

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Narasi 1

Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 13

Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 14

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 20

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya 277

Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara 1514

Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM.....1516

Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPD dengan Rancangan APBD.....1519

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD 1525

Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah 1643

Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.....1656

Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah 1657

Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya 1659

Lampiran XIII a : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah..... 1660

Lampiran XIII b : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain 1661

Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak *(Multi Years)*..... 1662

Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan 1663

Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah..... 1664

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 16 bulan Agustus tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6847;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan dan Pertangunggjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertangunggjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor…Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor …);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 23.911.942.794.000,00, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 23.549.642.794.000,00
b. Belanja Daerah	Rp. 23.911.942.794.000,00
Defisit	Rp. (362.300.000,00)
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan	Rp. 432.300.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp. 70.000.000.000,00

Pembiayaan Netto	Rp.	362.300.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA):	Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 23.549.642.794.000,00 *(Dua Puluh Tiga Triliun Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah),* yang terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.519.788.406.000,00 *(Lima Belas Triliun Lima Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah),* yang terdiri dari:
   a. Pajak daerah;
   b. Retribusi daerah;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
   d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.650.725.636.000,00 (*Dua Belas Triliun Enam Ratus Lima Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.805.361.743.000,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 707.349.144.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 356.351.883.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.006.377.888.000,00 *(Delapan Triliun Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

direncanakan sebesar Rp. 8.006.377.888.000,00 (*Delapan Triliun Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 6

(1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.476.500.000,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)* yaitu pendapatan hibah.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 23.476.500.000,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).*

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 23.911.942.794.000,00 (*Dua Puluh Tiga Triliun Sembilan Ratus Sebelas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

'

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.359.446.311.000,00 (*Lima Belas Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja bunga;
   d. Belanja subsidi;
   e. Belanja hibah; dan
   f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.556.641.594.000,00 (*Tujuh Triliun Lima Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.337.281.112.000,00 (*Lima Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah*).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.274.000.000,00 (*Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat*

Juta Rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.423.649.605.000,00 (*Dua Triliun Empat Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah*).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 32.600.000.000,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.254.657.327.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah.
b. Belanja modal peralatan dan mesin.
c. Belanja modal gedung dan bangunan.
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belanja modal aset lainnya;

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.700.000.000,00 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah*).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 747.529.982.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 342.870.007.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ribu Rupiah*).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.549.592.000,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 111.698.746.000,00 (*Seratus Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.309.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Rupiah).*

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah)*, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.272.839.156.000,00 (*Tujuh Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil;
b. Belanja Bantuan Keuangan;

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.196.561.232.000,00 (*Empat Triliun Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.076.277.924.000,00 (*Tiga Triliun Tujuh Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 362.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan;
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 432.300.000.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 432.300.000.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (*Tujuh Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah;

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana direncanakan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (*Tujuh Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 362.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 362.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII a Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran XIII b Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain:
15. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
16. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
17. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL:

PROVINSI JAWA TENGAH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**23.549.642.794.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**15.519.788.406.000**
4.1.1	Pajak Daerah	12.650.725.636.000
4.1.2	Retribusi Daerah	1.805.361.743.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	707.349.144.000
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	356.351.883.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**8.006.377.888.000**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.006.377.888.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**23.476.500.000**
4.3.1	Pendapatan Hibah	23.476.500.000
	Jumlah Pendapatan	**23.549.642.794.000**
5	**BELANJA DAERAH**	**23.911.942.794.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**15.359.446.311.000**
5.1.1	Belanja Pegawai	7.556.641.594.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.337.281.112.000
5.1.4	Belanja Subsidi	9.274.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	2.423.649.605.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.254.657.327.000**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	8.700.000.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	747.529.982.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	342.870.007.000
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.549.592.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	111.698.746.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.309.000.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**25.000.000.000**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**7.272.839.156.000**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.196.561.232.000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	3.076.277.924.000
	Jumlah Belanja	**23.911.942.794.000**
	Surplus/(Defisit)	**(362.300.000.000)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**362.300.000.000**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**432.300.000.000**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	432.300.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**432.300.000.000**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**70.000.000.000**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	70.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**70.000.000.000**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

LAMPIRAN II : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.778.854.996.000**	**11.620.703.455.000**	**1.175.227.683.000**	**-**	**-**	**12.795.931.138.000**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**6.366.900.000**	**8.015.746.823.000**	**793.045.020.000**	**-**	**-**	**8.808.791.843.000**
1.01.2.22.0.00.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.366.900.000	8.015.746.823.000	793.045.020.000	-	-	8.808.791.843.000
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.757.046.662.000**	**2.813.925.240.000**	**299.332.975.000**	**-**	**-**	**3.113.258.215.000**
1.02.0.00.0.00.01	Dinas Kesehatan	1.757.046.662.000	2.813.925.240.000	299.332.975.000	-	-	3.113.258.215.000
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**14.803.614.000**	**399.210.730.000**	**79.982.148.000**	**-**	**-**	**479.192.878.000**
1.03.0.00.0.00.14	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.450.000.000	227.132.504.000	68.370.334.000	-	-	295.502.838.000
1.03.0.00.0.00.15	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.353.614.000	172.078.226.000	11.611.814.000	-	-	183.690.040.000
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**	**52.349.033.000**	**185.000.000**	**-**	**-**	**52.534.033.000**
1.04.0.00.0.00.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	52.349.033.000	185.000.000	-	-	52.534.033.000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**406.000.000**	**36.918.431.000**	**2.032.500.000**	**-**	**-**	**38.950.931.000**
1.05.0.00.0.00.01	Satuan Polisi Pamong Praja	406.000.000	19.876.491.000	850.500.000	-	-	20.726.991.000
1.05.0.00.0.00.04	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	17.041.940.000	1.182.000.000	-	-	18.223.940.000
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**231.820.000**	**302.553.198.000**	**650.040.000**	**-**	**-**	**303.203.238.000**
1.06.0.00.0.00.01	Dinas Sosial	231.820.000	302.553.198.000	650.040.000	-	-	303.203.238.000
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**45.095.009.000**	**1.145.561.428.000**	**36.454.102.000**	**-**	**-**	**1.182.015.530.000**
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**3.642.250.000**	**95.886.957.000**	**2.043.588.000**	**-**	**-**	**97.930.545.000**
2.07.3.32.0.00.02	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.642.250.000	95.886.957.000	2.043.588.000	-	-	97.930.545.000
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**-**	**20.050.124.000**	**112.178.000**	**-**	**-**	**20.162.302.000**
2.08.2.14.0.00.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	20.050.124.000	112.178.000	-	-	20.162.302.000
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**26.880.000**	**41.287.217.000**	**821.700.000**	**-**	**-**	**42.108.917.000**
2.09.0.00.0.00.01	Dinas Ketahanan Pangan	26.880.000	41.287.217.000	821.700.000	-	-	42.108.917.000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**4.200.000.000**	**154.253.369.000**	**222.000.000**	**-**	**-**	**154.475.369.000**
2.11.3.29.0.00.02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.200.000.000	154.253.369.000	222.000.000	-	-	154.475.369.000
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**-**	**25.241.735.000**	**113.640.000**	**-**	**-**	**25.355.375.000**
2.13.2.12.0.00.03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	25.241.735.000	113.640.000	-	-	25.355.375.000
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**31.003.054.000**	**192.349.902.000**	**8.398.173.000**	**-**	**-**	**200.748.075.000**
2.15.0.00.0.00.01	Dinas Perhubungan	31.003.054.000	192.349.902.000	8.398.173.000	-	-	200.748.075.000
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**-**	**64.240.848.000**	**14.174.305.000**	**-**	**-**	**78.415.153.000**
2.16.0.00.0.00.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	64.240.848.000	14.174.305.000	-	-	78.415.153.000
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**611.225.000**	**35.628.752.000**	**192.700.000**	**-**	**-**	**35.821.452.000**
2.17.0.00.0.00.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	611.225.000	35.628.752.000	192.700.000	-	-	35.821.452.000
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**36.600.000**	**24.754.845.000**	**370.173.000**	**-**	**-**	**25.125.018.000**
2.18.0.00.0.00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36.600.000	24.754.845.000	370.173.000	-	-	25.125.018.000
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**5.505.000.000**	**457.272.367.000**	**8.800.000.000**	**-**	**-**	**466.072.367.000**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
2.19.3.26.0.00.02	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.505.000.000	457.272.367.000	8.800.000.000	-	-	466.072.367.000
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**70.000.000**	**34.595.312.000**	**1.205.645.000**	**-**	**-**	**35.800.957.000**
2.23.2.24.0.00.02	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	70.000.000	34.595.312.000	1.205.645.000	-	-	35.800.957.000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**45.526.709.000**	**542.128.755.000**	**15.376.891.000**	**-**	**-**	**557.505.646.000**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**15.182.605.000**	**79.360.587.000**	**7.389.861.000**	**-**	**-**	**86.750.448.000**
3.25.0.00.0.00.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.182.605.000	79.360.587.000	7.389.861.000	-	-	86.750.448.000
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**22.983.270.000**	**299.169.772.000**	**7.408.000.000**	**-**	**-**	**306.577.772.000**
3.27.0.00.0.00.08	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.983.270.000	149.497.041.000	1.405.000.000	-	-	150.902.041.000
3.27.0.00.0.00.10	Dinas Pertanian dan Perkebunan	13.000.000.000	149.672.731.000	6.003.000.000	-	-	155.675.731.000
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**3.311.829.000**	**63.655.074.000**	**183.030.000**	**-**	**-**	**63.838.104.000**
3.29.0.00.0.00.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.311.829.000	63.655.074.000	183.030.000	-	-	63.838.104.000
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**4.049.005.000**	**99.943.322.000**	**396.000.000**	**-**	**-**	**100.339.322.000**
3.31.3.30.0.00.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.049.005.000	99.943.322.000	396.000.000	-	-	100.339.322.000
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2.764.040.000**	**1.214.151.143.000**	**14.444.936.000**	**-**	**-**	**1.228.596.079.000**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**1.014.040.000**	**632.866.071.000**	**10.705.000.000**	**-**	**-**	**643.571.071.000**
4.01.0.00.0.00.01	Sekretariat Daerah	1.014.040.000	632.866.071.000	10.705.000.000	-	-	643.571.071.000
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**1.750.000.000**	**581.285.072.000**	**3.739.936.000**	**-**	**-**	**585.025.008.000**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
4.02.0.00.0.00.01	Sekretariat DPRD	1.750.000.000	581.285.072.000	3.739.936.000	-	-	585.025.008.000
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**21.677.402.040.000**	**545.776.331.000**	**12.683.703.000**	**25.000.000.000**	**7.272.839.156.000**	**7.856.299.190.000**
5.01	**PERENCANAAN**	**30.240.000**	**46.752.011.000**	**1.669.000.000**	**-**	**-**	**48.421.011.000**
5.01.0.00.0.00.02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30.240.000	46.752.011.000	1.669.000.000	-	-	48.421.011.000
5.02	**KEUANGAN**	**21.662.276.460.000**	**353.748.408.000**	**8.892.703.000**	**25.000.000.000**	**7.272.839.156.000**	**7.660.480.267.000**
5.02.0.00.0.00.02	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	12.815.986.348.000	285.068.576.000	7.482.128.000	-	-	292.550.704.000
5.02.0.00.0.00.03	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.846.290.112.000	68.679.832.000	1.410.575.000	25.000.000.000	7.272.839.156.000	7.367.929.563.000
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**718.000.000**	**42.795.136.000**	**175.000.000**	**-**	**-**	**42.970.136.000**
5.03.0.00.0.00.01	Badan Kepegawaian Daerah	718.000.000	42.795.136.000	175.000.000	-	-	42.970.136.000
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**13.702.340.000**	**59.413.905.000**	**297.000.000**	**-**	**-**	**59.710.905.000**
5.04.0.00.0.00.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.702.340.000	59.413.905.000	297.000.000	-	-	59.710.905.000
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**-**	**20.305.100.000**	**150.000.000**	**-**	**-**	**20.455.100.000**
5.05.0.00.0.00.01	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	20.305.100.000	150.000.000	-	-	20.455.100.000
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**675.000.000**	**22.761.771.000**	**1.500.000.000**	**-**	**-**	**24.261.771.000**
5.07.0.00.0.00.01	Badan Penghubung	675.000.000	22.761.771.000	1.500.000.000	-	-	24.261.771.000
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**-**	**39.567.619.000**	**70.012.000**	**-**	**-**	**39.637.631.000**
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**-**	**39.567.619.000**	**70.012.000**	**-**	**-**	**39.637.631.000**
6.01.0.00.0.00.01	INSPEKTORAT	-	39.567.619.000	70.012.000	-	-	39.637.631.000
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**251.557.580.000**	**400.000.000**	**-**	**-**	**251.957.580.000**
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**-**	**251.557.580.000**	**400.000.000**	**-**	**-**	**251.957.580.000**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
8.01.0.00.0.00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	251.557.580.000	400.000.000	-	-	251.957.580.000
Jumlah		**23.549.642.794.000**	**15.359.446.311.000**	**1.254.657.327.000**	**25.000.000.000**	**7.272.839.156.000**	**23.911.942.794.000**
Surplus / (Defisit)		**(362.300.000.000)**					

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

LAMPIRAN III: RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL:

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.2.22.0.00.02 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**6.366.900.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.366.900.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	6.366.900.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**8.808.791.843.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.286.053.813.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**154.941.855.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	153.841.855.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	153.841.855.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.574.855.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.5	Belanja Hibah	145.267.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.100.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.041.376.458.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.038.626.458.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.038.626.458.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	5.038.626.458.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.750.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.750.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	1.677.900.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.072.100.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**870.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	620.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	620.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	1.360.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	618.640.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	150.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**475.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	250.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	150.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**10.800.500.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	601.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	601.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	2.720.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	598.280.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.807.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.376.130.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	3.400.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.372.730.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	430.870.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	430.870.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	782.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	766.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.1	Belanja Pegawai	2.720.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	763.280.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0003.5.2	BELANJA MODAL	16.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	830.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	830.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	830.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	373.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	363.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	363.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0005.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	62.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	58.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0006.5.2	BELANJA MODAL	3.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0006.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.855.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.855.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.855.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.270.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	4.270.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**16.726.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.031.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	50.680.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0005.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	980.320.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	980.320.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.540.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	29.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0006.5.1.1	Belanja Pegawai	6.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	2.510.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.510.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.500.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0009.5.2	BELANJA MODAL	4.500.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.500.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.830.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	58.860.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0010.5.1.1	Belanja Pegawai	1.360.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	1.771.140.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.771.140.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.825.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0011.5.1	BELANJA OPERASI	3.122.660.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0011.5.1.1	Belanja Pegawai	2.660.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	3.702.340.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0011.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.402.340.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0011.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.382.200.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	112.800.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	112.800.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	112.800.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.237.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.237.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.237.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	474.600.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	474.600.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	474.600.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.557.800.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	42.557.800.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.1	Belanja Pegawai	17.520.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.540.280.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.481.800.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	788.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	788.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	788.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	293.300.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	293.300.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	293.300.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	800.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	800.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	800.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	120.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	60.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.595.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	6.595.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.1	Belanja Pegawai	10.700.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.584.300.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.445.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	1.445.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.445.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.380.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.380.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.1	Belanja Pegawai	1.950.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.378.050.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**3.483.596.030.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**1.176.601.098.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	20.000.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0001.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0001.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	909.610.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0010.5.2	BELANJA MODAL	909.610.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0010.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	909.610.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.708.910.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	996.050.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0014.5.1.1	Belanja Pegawai	600.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	995.450.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0014.5.2	BELANJA MODAL	9.712.860.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0014.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.712.860.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	42.137.680.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	40.737.680.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0019.5.1.1	Belanja Pegawai	1.200.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.736.480.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0019.5.2	BELANJA MODAL	1.400.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0019.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.400.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	6.128.642.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0020.5.1	BELANJA OPERASI	6.128.642.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0020.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.128.642.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	300.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0022.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0022.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	300.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0023.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0023.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	248.667.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0027.5.1	BELANJA OPERASI	248.667.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0027.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	248.667.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.642.788.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0028.5.1	BELANJA OPERASI	2.642.788.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0028.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.642.788.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	18.116.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0036.5.2	BELANJA MODAL	18.116.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0036.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.116.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4.947.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0039.5.1	BELANJA OPERASI	4.947.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0039.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.947.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	30.600.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0041.5.2	BELANJA MODAL	30.600.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0041.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.600.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	8.520.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0045.5.1	BELANJA OPERASI	8.520.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0045.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0045.5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.000.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	900.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0046.5.1	BELANJA OPERASI	680.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0046.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0046.5.2	BELANJA MODAL	899.320.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0046.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	899.320.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.755.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0049.5.1	BELANJA OPERASI	4.755.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0049.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.755.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.000.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0051.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0051.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	283.994.308.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0052.5.1	BELANJA OPERASI	283.844.308.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0052.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	242.928.158.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0052.5.1.5	Belanja Hibah	40.916.150.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0052.5.2	BELANJA MODAL	150.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0052.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	706.100.384.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0053.5.1	BELANJA OPERASI	589.824.873.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0053.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	409.643.399.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0053.5.1.5	Belanja Hibah	180.181.474.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0053.5.2	BELANJA MODAL	116.275.511.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0053.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.121.778.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0053.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.153.733.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	575.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0057.5.1	BELANJA OPERASI	575.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0057.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	400.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0058.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0058.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0060.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0060.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	625.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0065.5.1	BELANJA OPERASI	625.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0065.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	625.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.229.664.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0068.5.1	BELANJA OPERASI	3.229.664.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0068.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.229.664.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	3.325.740.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0070.5.2	BELANJA MODAL	3.325.740.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0070.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.325.740.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	14.807.844.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0071.5.1	BELANJA OPERASI	14.407.844.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0071.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.407.844.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0071.5.2	BELANJA MODAL	400.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0071.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	9.616.861.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0072.5.2	BELANJA MODAL	9.616.861.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0072.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.616.861.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.512.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0078.5.1	BELANJA OPERASI	1.512.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0078.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.512.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**2.147.994.655.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	14.572.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0001.5.2	BELANJA MODAL	14.572.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0001.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.572.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	18.895.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0004.5.2	BELANJA MODAL	18.895.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0004.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.895.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	7.873.300.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0005.5.2	BELANJA MODAL	7.873.300.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0005.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.873.300.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.203.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0006.5.2	BELANJA MODAL	2.203.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0006.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.203.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.177.200.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0007.5.2	BELANJA MODAL	1.177.200.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0007.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.177.200.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.719.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0010.5.2	BELANJA MODAL	6.519.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0010.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.519.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	150.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0016.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	1.163.400.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0018.5.1	BELANJA OPERASI	1.163.400.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0018.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.163.400.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	14.563.643.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0028.5.2	BELANJA MODAL	14.563.643.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0028.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.563.643.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	7.537.950.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0031.5.1	BELANJA OPERASI	7.537.950.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0031.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.537.950.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	255.650.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0033.5.2	BELANJA MODAL	255.650.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0033.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255.650.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	7.000.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0037.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0037.5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.000.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	400.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0038.5.2	BELANJA MODAL	400.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0038.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.145.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	4.145.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0041.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.145.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3.200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0043.5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0043.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	430.584.962.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0045.5.1	BELANJA OPERASI	430.344.912.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0045.5.1.1	Belanja Pegawai	9.400.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0045.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	263.390.512.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0045.5.1.5	Belanja Hibah	166.945.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0045.5.2	BELANJA MODAL	240.050.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0045.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240.050.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1.318.196.111.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	1.144.982.886.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0046.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	319.590.306.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0046.5.1.5	Belanja Hibah	825.392.580.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0046.5.2	BELANJA MODAL	173.213.225.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0046.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.775.733.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0046.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.437.492.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	575.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0050.5.1	BELANJA OPERASI	575.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0050.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	500.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0051.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0051.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0053.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0053.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	515.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0059.5.1	BELANJA OPERASI	515.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0059.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	515.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	5.100.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0060.5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0060.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.812.120.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0062.5.1	BELANJA OPERASI	5.812.120.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0062.5.1.1	Belanja Pegawai	600.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0062.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.811.520.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	800.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0063.5.1	BELANJA OPERASI	800.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0063.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	25.056.750.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0064.5.2	BELANJA MODAL	25.056.750.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0064.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.056.750.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	12.237.503.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0069.5.1	BELANJA OPERASI	10.610.003.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0069.5.1.1	Belanja Pegawai	600.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0069.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.609.403.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0069.5.2	BELANJA MODAL	1.627.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0069.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.627.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.967.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0072.5.1	BELANJA OPERASI	1.967.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0072.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.967.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	199.716.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0073.5.1	BELANJA OPERASI	199.716.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0073.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	199.716.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**159.000.277.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	4.500.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0001.5.2	BELANJA MODAL	4.500.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0001.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.500.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.150.346.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0003.5.2	BELANJA MODAL	1.150.346.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0003.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.150.346.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.199.915.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0004.5.2	BELANJA MODAL	1.199.915.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0004.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.199.915.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.134.665.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0008.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0008.5.2	BELANJA MODAL	9.126.665.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0008.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.126.665.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	405.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0038.5.1	BELANJA OPERASI	405.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0038.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	405.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.320.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0040.5.2	BELANJA MODAL	1.320.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0040.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.320.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2.000.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0044.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0044.5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0045.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0045.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.640.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0048.5.1	BELANJA OPERASI	2.640.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0048.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0050.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0050.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	28.984.931.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0051.5.1	BELANJA OPERASI	28.984.931.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0051.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.701.431.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0051.5.1.5	Belanja Hibah	5.283.500.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	83.429.585.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0052.5.1	BELANJA OPERASI	75.417.686.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0052.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.725.061.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0052.5.1.5	Belanja Hibah	46.692.625.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0052.5.2	BELANJA MODAL	8.011.899.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0052.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.661.928.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0052.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	349.971.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0056.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0056.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	300.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0057.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0057.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	776.880.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0059.5.1	BELANJA OPERASI	776.880.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0059.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	776.880.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	170.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0066.5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0066.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.320.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0069.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0069.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0069.5.2	BELANJA MODAL	1.160.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0069.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.160.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	13.090.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0070.5.2	BELANJA MODAL	13.090.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0070.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.090.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	645.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0071.5.1	BELANJA OPERASI	645.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0071.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	645.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	326.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0077.5.2	BELANJA MODAL	326.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0077.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	326.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	6.406.955.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0079.5.1	BELANJA OPERASI	1.420.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0079.5.1.1	Belanja Pegawai	600.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0079.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.419.400.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0079.5.2	BELANJA MODAL	4.986.955.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0079.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.986.955.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	651.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0080.5.2	BELANJA MODAL	651.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0080.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	651.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**896.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**711.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	711.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	711.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	711.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	**185.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	185.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	185.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**1.250.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**	**1.250.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1.250.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**1.120.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**925.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	400.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	525.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	525.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02	**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**195.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	70.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	125.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**7.580.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**3.200.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.700.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**4.380.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	4.380.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.380.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**22.266.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**22.266.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	22.266.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	22.266.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.0003.5.1.5	Belanja Hibah	22.266.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**955.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**955.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	605.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	605.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	605.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	350.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**1.325.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**300.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	300.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**1.025.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	160.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	165.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	165.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	700.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**3.750.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**	**3.750.000.000**	**-**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1.200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.000.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	550.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.0004.5.1.1	Belanja Pegawai	650.000	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	549.350.000	-
	Jumlah Belanja	**8.808.791.843.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(8.802.424.943.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01 - Dinas Kesehatan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**1.757.046.662.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.757.046.662.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	1.705.946.947.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	51.099.715.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**3.113.258.215.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.704.119.490.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**789.442.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	616.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	616.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	616.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.442.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	173.442.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	173.442.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**680.229.859.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	668.431.859.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	668.431.859.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	668.431.859.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.700.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	11.700.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	11.700.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**417.200.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	250.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	167.200.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	167.200.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	167.200.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.588.836.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	447.050.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	320.950.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	320.950.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	126.100.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.100.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	94.850.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	94.850.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94.850.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	451.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	451.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	451.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	286.443.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	286.443.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	286.443.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	198.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	198.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.711.093.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.711.093.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.711.093.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	260.400.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	260.400.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	260.400.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.138.400.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.400.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	128.400.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.400.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	375.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0008.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0008.5.2	BELANJA MODAL	350.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0008.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0008.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	270.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.615.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	2.615.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.615.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.275.392.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	136.400.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	136.400.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	136.400.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.786.778.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.786.778.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.786.778.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.700.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	91.700.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	91.700.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.260.514.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	13.260.514.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.260.514.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.330.361.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.013.975.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.013.975.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.013.975.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	761.500.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	761.500.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	761.500.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	275.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	275.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.552.886.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.552.886.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.552.886.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	727.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	727.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	727.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.990.250.000.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.990.250.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.718.250.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	284.777.822.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.433.472.178.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	272.000.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.500.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.698.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.250.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.197.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**404.607.180.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**42.546.681.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	917.800.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	917.800.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	417.800.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1.5	Belanja Hibah	500.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	24.043.475.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.2	BELANJA MODAL	24.043.475.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.043.475.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	624.150.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	624.150.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	624.150.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	439.400.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	439.400.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	439.400.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	50.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0025.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0025.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	16.471.856.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0027.5.1	BELANJA OPERASI	16.471.856.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0027.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.471.856.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**357.457.260.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	517.150.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	517.150.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	517.150.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	278.550.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	278.550.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	278.550.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	476.885.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	476.885.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	476.885.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	400.195.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	400.195.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.195.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	50.242.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	50.242.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.242.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.888.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.888.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.888.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	200.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	500.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	21.410.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	21.410.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.410.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.058.535.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	2.058.535.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.058.535.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	200.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	347.877.080.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0016.5.1	BELANJA OPERASI	347.877.080.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	347.877.080.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	666.450.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	666.450.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	666.450.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	200.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0020.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.629.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0022.5.1	BELANJA OPERASI	1.629.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0022.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.629.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	493.763.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0023.5.1	BELANJA OPERASI	493.763.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0023.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	493.763.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**400.000.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	400.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	330.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.2	BELANJA MODAL	70.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	70.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah**	**4.203.239.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4.003.239.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.003.239.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.003.239.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.151.000.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.151.000.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	651.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	651.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	651.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	500.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**300.394.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**300.394.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	300.394.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	300.394.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.394.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**3.080.151.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**2.812.151.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2.812.151.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.812.151.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.812.151.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**268.000.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	268.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	268.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	268.000.000	-
	Jumlah Belanja	**3.113.258.215.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(1.356.211.553.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.14 - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**9.450.000.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.450.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	9.450.000.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**295.502.838.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**105.248.046.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**840.000.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	520.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	520.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	520.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	320.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	320.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**75.351.549.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72.898.309.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	72.898.309.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	72.898.309.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.013.240.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.013.240.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	1.995.240.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	440.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	440.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	440.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**350.000.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	350.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**193.000.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	193.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	193.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	193.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.003.199.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	173.704.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	173.704.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	173.704.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	670.064.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	670.064.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	670.064.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	601.114.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	601.114.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	601.114.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	415.509.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	415.509.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	415.509.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	61.500.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	61.500.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	61.500.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.932.308.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	3.932.308.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.932.308.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	77.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	77.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	72.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.371.613.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	378.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.0002.5.2	BELANJA MODAL	378.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	378.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	240.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	240.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	753.613.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	753.613.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	753.613.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.150.143.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.482.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	79.482.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	79.482.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.394.800.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.394.800.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.394.800.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.675.861.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	10.675.861.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.675.861.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.988.542.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.808.423.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.808.423.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.808.423.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.950.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.050.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	900.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	900.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.230.119.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	1.230.119.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.230.119.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**16.919.053.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**16.919.053.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.453.657.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	1.453.657.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.453.657.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	642.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	642.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	642.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	14.823.396.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	6.823.396.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.823.396.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0017.5.2	BELANJA MODAL	8.000.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0017.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.000.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**674.105.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	**674.105.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	674.105.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	674.105.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	674.105.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**38.166.603.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01	**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**38.166.603.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	150.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	180.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0018.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0018.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	37.836.603.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	7.836.603.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.836.603.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0019.5.2	BELANJA MODAL	30.000.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0019.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**129.159.390.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**129.159.390.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	347.760.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0024.5.1	BELANJA OPERASI	254.033.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0024.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	254.033.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0024.5.2	BELANJA MODAL	93.727.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0024.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.727.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	15.884.013.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0026.5.1	BELANJA OPERASI	15.294.013.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0026.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.294.013.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0026.5.2	BELANJA MODAL	590.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0026.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	590.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.782.691.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0028.5.1	BELANJA OPERASI	1.782.691.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0028.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.782.691.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	3.490.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0030.5.2	BELANJA MODAL	3.490.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0030.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.490.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	80.884.600.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0033.5.1	BELANJA OPERASI	79.984.606.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0033.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	79.984.606.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0033.5.2	BELANJA MODAL	899.994.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0033.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	899.994.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	23.536.385.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0040.5.1	BELANJA OPERASI	2.536.385.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0040.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.536.385.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0040.5.2	BELANJA MODAL	21.000.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0040.5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.000.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0040.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.000.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.049.553.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0041.5.1	BELANJA OPERASI	49.553.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0041.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.553.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0041.5.2	BELANJA MODAL	2.000.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0041.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.000.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.074.553.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0043.5.1	BELANJA OPERASI	1.074.553.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0043.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.074.553.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	109.835.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0044.5.1	BELANJA OPERASI	109.835.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0044.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	109.835.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**5.335.641.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**4.042.143.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	2.065.143.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	2.065.143.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.065.143.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	200.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	1.777.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	1.777.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.777.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**807.500.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	682.500.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	657.500.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	657.500.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0008.5.2	BELANJA MODAL	25.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0008.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	125.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0009.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.03	**Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**485.998.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	485.998.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	485.998.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	485.998.000	-
	Jumlah Belanja	**295.502.838.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(286.052.838.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.15 - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**5.353.614.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.353.614.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	5.353.614.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**183.690.040.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**93.836.860.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**900.000.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**79.570.327.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78.103.255.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	78.103.255.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	78.103.255.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.467.072.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.467.072.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.0007.5.1.1	Belanja Pegawai	883.692.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	583.380.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**383.500.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	383.500.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	383.500.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	383.500.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**461.632.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	269.292.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	269.292.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	269.292.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	92.340.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	92.340.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	92.340.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.095.586.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	635.389.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	221.219.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	221.219.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	414.170.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	414.170.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.944.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	133.944.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	133.944.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	147.025.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	147.025.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	147.025.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.237.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	25.237.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.237.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	122.643.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	122.643.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	122.643.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.283.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	363.283.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	363.283.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	608.065.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	408.065.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	408.065.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0011.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0011.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.415.008.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.810.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	74.810.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	74.810.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.659.485.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.659.485.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.659.485.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.619.595.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.619.595.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.619.595.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.061.118.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.061.118.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.061.118.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.010.807.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.933.283.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.933.283.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.933.283.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.202.437.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.202.437.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.202.437.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	875.087.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	875.087.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	875.087.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**85.151.387.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**41.130.985.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	1.500.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0075.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0075.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.450.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0079.5.1	BELANJA OPERASI	1.450.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0079.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	638.574.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0087.5.1	BELANJA OPERASI	638.574.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0087.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	638.574.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	876.751.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0090.5.1	BELANJA OPERASI	876.751.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0090.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	876.751.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	10.303.659.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0103.5.1	BELANJA OPERASI	9.975.033.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0103.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.975.033.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0103.5.2	BELANJA MODAL	328.626.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0103.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	328.626.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0104	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	200.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0104.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0104.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0104.5.2	BELANJA MODAL	150.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0104.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	5.407.004.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0105.5.1	BELANJA OPERASI	5.407.004.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0105.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.407.004.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	16.546.997.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0107.5.1	BELANJA OPERASI	14.046.997.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0107.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.046.997.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0107.5.2	BELANJA MODAL	2.500.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0107.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	850.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0117.5.1	BELANJA OPERASI	850.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0117.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	850.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.550.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0118.5.1	BELANJA OPERASI	189.452.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0118.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	189.452.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0118.5.2	BELANJA MODAL	2.360.548.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0118.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.360.548.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	808.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0122.5.1	BELANJA OPERASI	258.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0122.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	258.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0122.5.2	BELANJA MODAL	550.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0122.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	550.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**44.020.402.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.066.639.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0014.5.1	BELANJA OPERASI	308.169.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	308.169.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0014.5.2	BELANJA MODAL	4.758.470.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0014.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.758.470.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	37.688.763.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0021.5.1	BELANJA OPERASI	37.688.763.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0021.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.688.763.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	565.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0032.5.1	BELANJA OPERASI	215.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0032.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0032.5.2	BELANJA MODAL	350.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0032.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	700.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0037.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0037.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**4.701.793.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**1.295.711.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi	1.133.211.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.133.211.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.133.211.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	162.500.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	162.500.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	162.500.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**667.853.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	467.853.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	467.853.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	467.853.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	200.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**888.000.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	709.696.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	709.696.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	709.696.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	178.304.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	178.304.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	178.304.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**1.850.229.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.344.355.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.344.355.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.344.355.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	231.848.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.0006.5.1	BELANJA OPERASI	231.848.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	231.848.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	274.026.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	274.026.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	274.026.000	-
	Jumlah Belanja	**183.690.040.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(178.336.426.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ORGANISASI : 1.04.0.00.0.00.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**52.534.033.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**21.324.033.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.150.456.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	400.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.456.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	750.456.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	750.456.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.229.577.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.724.577.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	14.724.577.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	14.724.577.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	420.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	420.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	318.840.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	101.160.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**175.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	155.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**110.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.020.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.120.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.120.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	370.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	370.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	370.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	90.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.829.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	479.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	479.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	479.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.150.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.150.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**720.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	340.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	340.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**25.290.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**220.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	150.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	70.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**140.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	70.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	70.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0009.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**19.430.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3.200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	16.230.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	16.230.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.630.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0004.5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	14.600.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program**	**5.500.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	5.500.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.0006.5.1	BELANJA OPERASI	5.425.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.425.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.0006.5.2	BELANJA MODAL	75.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.0006.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**3.765.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01	**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**1.035.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	310.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	310.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	650.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	75.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0018.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0018.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**2.730.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	690.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	690.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	690.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	140.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.900.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0014.5.1	BELANJA OPERASI	1.900.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**480.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	**480.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	400.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0002.5.1.5	Belanja Hibah	225.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	80.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**200.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01	**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah**	**200.000.000**	**-**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**380.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01	**Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi**	**380.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	380.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	20.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**570.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**570.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	330.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	330.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	240.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**525.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01	**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**525.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	395.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	395.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	395.000.000	-
	Jumlah Belanja	**52.534.033.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(52.534.033.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01 - Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**406.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	406.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	406.000.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**20.726.991.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.538.991.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**157.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	98.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	98.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	58.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.450.444.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.158.444.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.158.444.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	13.158.444.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	282.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	282.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**180.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**795.647.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.147.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	125.147.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.147.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430.500.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	430.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	430.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**654.500.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	639.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0002.5.2	BELANJA MODAL	639.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	639.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.520.400.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	305.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	305.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.212.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.212.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.212.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**681.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	370.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	370.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	196.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.090.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.520.100.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	260.163.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	260.163.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	260.163.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	100.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	125.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	600.947.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	600.947.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.947.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	325.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0018.5.1	BELANJA OPERASI	325.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0018.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	208.890.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	208.890.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	208.890.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**481.400.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	41.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	41.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	438.400.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	438.400.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	438.400.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**88.500.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	88.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	88.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**98.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**98.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	98.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01.0022.5.1	BELANJA OPERASI	98.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01.0022.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000	-
	Jumlah Belanja	**20.726.991.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(20.320.991.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.04 - Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**18.223.940.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**14.373.940.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**250.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.813.463.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.513.463.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	7.513.463.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	7.513.463.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	226.200.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	73.800.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**50.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**926.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	800.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.182.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0002.5.2	BELANJA MODAL	1.100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	82.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.362.477.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.910.977.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.910.977.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.910.977.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**785.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**3.850.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**1.100.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1.100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**1.475.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	300.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	275.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0014.5.1	BELANJA OPERASI	275.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	150.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0016.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0019.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	500.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0021.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0021.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**975.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	750.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**300.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0017.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0019.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0020.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0020.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
	Jumlah Belanja	**18.223.940.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(18.223.940.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.01 - Dinas Sosial

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**231.820.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	231.820.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	231.820.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**303.203.238.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**144.922.151.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.000.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**103.412.158.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	101.512.158.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	101.512.158.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	101.512.158.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.350.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	1.170.240.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	179.760.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	250.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**225.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**325.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	125.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7.026.123.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	460.786.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	460.786.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	460.786.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.900.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	101.900.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	101.900.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	259.525.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	259.525.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	259.525.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	942.270.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	942.270.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	942.270.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	235.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	235.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	95.375.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	93.225.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	93.225.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.2	BELANJA MODAL	2.150.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.150.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	501.592.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0007.5.1	BELANJA OPERASI	501.592.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	501.592.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	426.975.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	426.975.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	426.975.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.962.700.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	3.962.700.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.962.700.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**666.390.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	362.515.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	362.515.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	362.515.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	303.875.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	23.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	280.375.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.375.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.920.460.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135.600.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	135.600.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	135.600.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.553.660.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.553.660.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.553.660.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	444.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	444.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	444.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.787.200.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	16.787.200.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.787.200.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.347.020.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	189.600.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	189.600.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	189.600.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	919.830.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	919.830.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	919.830.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	357.450.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	357.450.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	357.450.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.379.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	9.379.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.379.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.640.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	500.640.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.640.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**10.721.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01	**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**250.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	250.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**10.471.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	250.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	7.112.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	7.112.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.112.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	1.300.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.809.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.809.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0004.5.1.5	Belanja Hibah	1.509.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**200.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	**200.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**72.868.427.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**23.255.628.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	17.478.480.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.478.480.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.478.480.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	2.518.120.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.518.120.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.518.120.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	446.245.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	446.245.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	446.245.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	214.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	214.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	214.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.042.382.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.042.382.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.042.382.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	525.801.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	525.801.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	525.801.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.250.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	21.250.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.250.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	380.520.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	380.520.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	380.520.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	628.830.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	628.830.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	628.830.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	**23.748.430.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	12.011.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	12.011.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.011.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	2.576.885.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.576.885.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.576.885.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	185.202.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	185.202.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	185.202.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	473.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	468.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	468.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0006.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.217.678.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0009.5.1	BELANJA OPERASI	4.217.678.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.217.678.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	535.295.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	535.295.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	535.295.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	3.748.870.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	3.748.870.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.748.870.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**17.710.369.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	12.889.537.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	12.889.537.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.889.537.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	2.504.350.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.504.350.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.504.350.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	307.920.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	307.920.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	307.920.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	6.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	762.800.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	762.800.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	762.800.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0009	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	429.852.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0009.5.1	BELANJA OPERASI	429.852.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	429.852.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	322.410.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0011.5.1	BELANJA OPERASI	322.410.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	322.410.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0012	Pemulasaraan	487.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0012.5.1	BELANJA OPERASI	487.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	487.500.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**3.284.130.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	2.223.550.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.223.550.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.223.550.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	321.800.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	321.800.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	321.800.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	36.880.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	36.880.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36.880.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	263.900.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	263.900.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	263.900.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	53.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0009.5.1	BELANJA OPERASI	53.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	60.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0010.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	325.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0011.5.1	BELANJA OPERASI	325.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**4.869.870.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	3.457.350.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.457.350.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.457.350.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	723.200.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	723.200.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	723.200.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	127.470.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	127.470.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	127.470.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	339.350.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	339.350.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	339.350.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	67.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	67.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	63.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	63.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	92.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	92.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	92.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**70.447.160.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01	**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**350.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	350.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**70.097.160.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	57.297.160.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	57.297.160.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57.297.160.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	11.000.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**3.584.500.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**3.584.500.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.567.280.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.567.280.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.567.280.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	387.500.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	387.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	387.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	979.720.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	979.720.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	979.720.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	450.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**460.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**460.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	360.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000	-
	Jumlah Belanja	**303.203.238.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(302.971.418.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ORGANISASI : 2.07.3.32.0.00.02 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**3.642.250.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.642.250.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	3.568.750.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	73.500.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**97.930.545.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**86.030.264.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**703.260.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	459.605.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	459.605.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	459.605.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	243.655.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	243.655.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	243.655.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**69.381.071.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	68.068.043.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	68.068.043.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	68.068.043.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.044.920.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.044.920.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	702.100.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	342.820.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.266.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	194.266.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	194.266.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	71.442.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	71.442.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	71.442.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.400.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**75.000.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	75.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**44.220.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	44.220.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	44.220.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.220.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**102.220.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	36.300.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	36.300.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	33.920.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	33.920.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	33.920.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.702.409.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	118.365.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	118.365.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	118.365.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.870.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	151.870.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	151.870.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	132.219.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	132.219.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	132.219.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	252.340.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	252.340.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	252.340.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	109.075.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	109.075.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	109.075.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.560.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	6.560.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.560.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	49.877.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0007.5.1	BELANJA OPERASI	49.877.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.877.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.087.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	68.087.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	68.087.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.214.016.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.214.016.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.214.016.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	600.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**693.588.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0002.5.2	BELANJA MODAL	350.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.713.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	206.713.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	206.713.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	30.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0008.5.2	BELANJA MODAL	30.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0008.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.875.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	86.875.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.875.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0011.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.945.231.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.127.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	42.127.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.127.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.353.506.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.353.506.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.353.506.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.800.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	177.800.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	177.800.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.371.798.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.371.798.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.371.798.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.383.265.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	716.137.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	716.137.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	716.137.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	42.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243.245.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	243.245.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	243.245.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	139.750.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	139.750.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	139.750.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	95.600.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	95.600.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.600.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	768.804.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	768.804.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	768.804.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.435.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	158.435.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	158.435.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	219.294.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	219.294.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	219.294.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**246.740.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**246.740.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	80.850.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	80.850.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.850.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	77.370.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	77.370.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	77.370.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	88.520.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	88.520.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	88.520.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**3.664.754.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	**3.262.450.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.666.648.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.666.648.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.666.648.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	215.802.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	215.802.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	215.802.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	1.380.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0003.5.2	BELANJA MODAL	1.350.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.350.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02	**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	**176.875.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	176.875.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	176.875.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	176.875.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah**	**219.429.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	219.429.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	219.429.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	219.429.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	**6.000.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**2.319.000.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01	**Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**1.490.153.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	159.581.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	159.581.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	159.581.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	601.830.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	601.830.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	601.830.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	19.310.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	19.310.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.310.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	59.470.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	59.470.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	59.470.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	649.962.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	649.962.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	649.962.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.02	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**10.000.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	10.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**516.500.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	116.500.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	116.500.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	116.500.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.0003	Job Fair /Bursa Kerja	400.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	**289.307.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	50.600.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.600.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.600.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	40.200.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	40.200.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	9.040.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	9.040.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.040.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	189.467.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	189.467.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	189.467.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05	**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**13.040.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13.040.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.040.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.040.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**1.908.787.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**349.824.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	125.380.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	125.380.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.380.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	28.881.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	28.881.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.881.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	195.563.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	195.563.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	195.563.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.102.723.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	455.362.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	455.362.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	455.362.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	95.422.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	95.422.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.422.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	26.963.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	26.963.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.963.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	252.793.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	252.793.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	252.793.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	272.183.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	272.183.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	272.183.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03	**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**456.240.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	278.055.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	278.055.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	278.055.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	54.291.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	54.291.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.291.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	123.894.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	123.894.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	123.894.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**3.500.000.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**3.500.000.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1.541.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.541.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.541.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	536.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	536.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	536.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	1.423.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.423.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.423.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**261.000.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**261.000.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	231.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	231.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	231.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	30.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
	Jumlah Belanja	**97.930.545.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(94.288.295.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 2.08.2.14.0.00.02 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**20.162.302.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.496.242.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**225.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.926.902.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.508.502.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	12.508.502.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	12.508.502.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	368.400.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	368.400.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	349.560.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.840.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**67.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	65.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**290.960.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	255.960.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	255.960.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	255.960.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**645.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.322.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.322.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	98.678.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.678.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	55.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	55.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	320.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**13.500.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	11.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	11.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	2.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.022.880.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.472.880.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.472.880.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.472.880.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**305.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	82.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**1.000.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**80.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	25.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	30.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	25.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**920.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	880.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	880.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	880.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	40.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**977.550.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**80.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	30.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	50.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**50.040.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	30.040.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	30.040.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.040.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**847.510.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	34.510.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	34.510.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.510.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	743.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	743.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	743.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**135.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**60.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**75.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**150.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**150.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	150.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**185.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**150.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	90.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**35.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	15.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**253.510.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	30.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**70.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	50.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**133.510.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	2.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	15.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	98.510.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0008.5.1	BELANJA OPERASI	98.510.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	98.510.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**195.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**190.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	35.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	50.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	90.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	**5.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0008	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	5.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**450.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**380.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	180.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	200.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB**	**70.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	70.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**320.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	40.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0020.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0020.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**220.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	40.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	40.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	140.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	-
	Jumlah Belanja	**20.162.302.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(20.162.302.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
ORGANISASI : 2.09.0.00.0.00.01 - Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**26.880.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.880.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	26.880.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**42.108.917.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**21.255.029.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**750.000.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	380.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	380.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	370.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	370.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	370.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.104.222.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.316.222.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	15.316.222.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	15.316.222.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	378.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	375.120.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	410.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	410.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	410.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**158.000.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	140.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**6.000.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	6.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**197.000.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	197.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	197.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	197.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.112.000.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	62.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	86.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	108.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	108.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	674.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	674.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	674.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	95.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**771.600.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	771.600.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	771.600.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	771.600.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.692.562.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.092.562.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.092.562.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.092.562.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**463.645.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	213.645.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	163.545.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	163.545.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	50.100.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.100.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**14.623.888.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**8.290.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	750.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1.500.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	5.940.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	5.940.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0009.5.1.4	Belanja Subsidi	5.750.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	100.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**5.333.888.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	5.333.888.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.333.888.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.833.888.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.0005.5.1.4	Belanja Subsidi	500.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**	**1.000.000.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	510.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	510.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	510.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	490.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	490.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	490.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**3.930.000.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**3.930.000.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	3.930.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.930.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	906.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0004.5.1.4	Belanja Subsidi	3.024.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**2.300.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**2.300.000.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	650.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	370.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	370.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	370.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	650.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	630.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	630.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	630.000.000	-
	Jumlah Belanja	**42.108.917.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(42.082.037.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 2.11.3.29.0.00.02 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**4.200.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.200.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	4.075.000.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	125.000.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**154.475.369.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**140.422.179.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**550.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**127.777.691.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	127.627.691.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	127.627.691.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	127.627.691.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.400.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	61.400.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	61.400.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	88.600.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	88.600.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	88.600.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**431.500.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	431.500.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	431.500.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	431.500.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**95.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.162.483.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.700.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	90.700.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.700.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	162.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	135.190.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	135.190.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	135.190.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	167.660.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	167.660.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	167.660.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	192.500.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	192.500.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	192.500.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	-	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	220.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	220.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.194.433.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.194.433.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.194.433.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**22.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	22.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.054.633.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.898.550.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.898.550.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.898.550.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.500.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	111.500.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	111.500.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.019.583.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	5.019.583.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.1	Belanja Pegawai	611.080.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.408.503.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.328.872.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.794.250.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.794.250.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.794.250.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	13.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	279.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	279.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	177.622.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	177.622.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	177.622.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**434.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**200.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	200.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	1.200.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198.800.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**234.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	234.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	234.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	234.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**2.353.388.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**2.353.388.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.244.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.244.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.244.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	759.388.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	759.388.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	1.800.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	483.588.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.0002.5.1.5	Belanja Hibah	274.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	350.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**745.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**745.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	535.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	535.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	535.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0004.5.1.1	Belanja Pegawai	600.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	99.400.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	80.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**50.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**50.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	50.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**564.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**564.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	334.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	334.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	600.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	333.400.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	230.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	230.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**1.305.113.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.305.113.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	655.113.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	655.113.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	2.400.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	652.713.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	600.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.0005.5.1.1	Belanja Pegawai	1.800.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	478.200.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.0005.5.1.5	Belanja Hibah	120.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**200.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**200.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	200.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.0007.5.1.1	Belanja Pegawai	3.600.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	196.400.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**389.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**389.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	389.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	189.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	189.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.0005.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.0005.5.2.1	Belanja Modal Tanah	200.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**5.854.089.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**192.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	50.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	142.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	142.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	142.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.271.221.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	30.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	2.341.869.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.341.869.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.341.869.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.824.352.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.824.352.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.824.352.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	75.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0008.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	-	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**142.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	142.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	142.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.0004.5.1.1	Belanja Pegawai	1.200.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.800.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**187.440.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	137.440.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	137.440.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	137.440.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	50.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**225.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	75.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.0001.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	75.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.0002.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	75.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.0003.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**836.428.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	6.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	6.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	10.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	15.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0004.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	49.750.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	49.750.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.750.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih	749.678.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	749.678.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	749.678.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**824.768.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	**475.968.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	158.736.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	158.736.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	158.736.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	72.600.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	72.600.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	72.600.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	92.232.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	92.232.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	92.232.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	30.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	22.400.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	22.400.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	100.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**188.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	188.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	188.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	188.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**160.800.000**	**-**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	160.800.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	160.800.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.800.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.005.832.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.005.832.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	119.832.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	119.832.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	119.832.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	780.600.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	780.600.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	780.600.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	105.400.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	105.400.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	105.400.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**328.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**328.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	114.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	114.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	184.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	184.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	184.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	30.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
	Jumlah Belanja	**154.475.369.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(150.275.369.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.13.2.12.0.00.03 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**25.355.375.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.863.205.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**455.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	325.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	325.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.625.428.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.250.428.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	15.250.428.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	15.250.428.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	375.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	375.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	370.920.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	99.320.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**769.722.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	680.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	64.320.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.320.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	82.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.722.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	12.722.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.722.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	320.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.0007.5.1	BELANJA OPERASI	680.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.0007.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	49.320.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.0007.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.320.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.283.055.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	565.055.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	565.055.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	565.055.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.688.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.688.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0004.5.1.1	Belanja Pegawai	1.360.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.686.640.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**580.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0008.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.320.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0009.5.1.1	Belanja Pegawai	1.360.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	248.640.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**220.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01	**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	**220.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	220.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	220.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**210.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**210.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	210.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	210.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**194.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**194.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	194.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	194.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	194.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**20.850.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01	**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**20.850.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	20.850.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	20.850.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.850.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**602.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**602.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	190.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	190.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	412.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	412.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0003.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	411.320.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.540.320.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**1.540.320.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	310.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	310.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	50.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	200.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	313.170.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	313.170.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	313.170.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	478.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	478.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	478.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.150.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	4.150.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	185.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0018.5.1	BELANJA OPERASI	185.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0018.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**2.705.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01	**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**2.705.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	500.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	125.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0006.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	124.320.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.750.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.750.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000.000	-
	Jumlah Belanja	**25.355.375.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(25.355.375.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01 - Dinas Perhubungan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**31.003.054.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.003.054.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	2.951.578.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	28.051.476.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**200.748.075.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**68.772.521.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**346.600.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	261.600.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	261.600.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	261.600.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**51.042.889.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.238.689.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.238.689.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	50.238.689.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	734.200.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	734.200.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	729.700.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.155.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.155.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.155.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.155.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**160.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	55.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.438.352.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	257.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	257.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	257.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	89.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	89.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	89.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	43.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	229.852.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	229.852.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	229.852.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.605.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.605.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.605.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**550.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0002.5.2	BELANJA MODAL	550.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	550.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.252.780.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.589.225.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.589.225.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.589.225.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.657.555.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	9.657.555.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.657.555.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.826.900.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	857.400.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	857.400.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	857.400.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	410.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	410.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	410.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	129.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	129.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**130.096.680.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**380.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	380.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	380.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**2.139.390.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.139.390.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	509.690.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	2.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	507.190.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	1.629.700.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.422.700.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**5.155.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	105.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.2	BELANJA MODAL	105.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1.100.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0007.5.2	BELANJA MODAL	1.100.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0007.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.100.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	3.500.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0010.5.2	BELANJA MODAL	3.500.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0010.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.500.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	450.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0011.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0011.5.1.1	Belanja Pegawai	3.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	446.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**2.902.463.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	46.320.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	46.320.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.320.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	898.080.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	898.080.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	898.080.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	70.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.888.063.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.592.763.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0007.5.1.1	Belanja Pegawai	5.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.587.763.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0007.5.2	BELANJA MODAL	295.300.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0007.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.300.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**75.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.0006	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	75.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**1.611.515.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1.200.665.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.665.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.665.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	200.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0004.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	210.850.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	210.850.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210.850.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**117.312.524.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	924.955.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	924.955.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	924.955.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	116.387.569.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	115.900.569.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0003.5.1.1	Belanja Pegawai	12.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115.888.569.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0003.5.2	BELANJA MODAL	487.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	487.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**360.788.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	290.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	290.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	1.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	289.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	70.288.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	70.288.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.288.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**35.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	35.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.0002.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**50.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**35.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.0004.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.15	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**40.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.15.0003.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.15.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**779.100.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.03	**Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan**	**60.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	**70.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam	70.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan**	**79.100.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	79.100.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	79.100.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	79.100.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**570.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	130.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	130.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0001.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0002.5.2	BELANJA MODAL	400.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0002.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0009.5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0009.5.2	BELANJA MODAL	31.600.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0009.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.600.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**1.099.774.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**1.099.774.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	1.099.774.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	930.201.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	930.201.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.2	BELANJA MODAL	169.573.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.438.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.135.000	-
	Jumlah Belanja	**200.748.075.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(169.745.021.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**78.415.153.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**29.637.129.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**610.000.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	411.510.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	411.510.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	411.510.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.490.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	198.490.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198.490.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.173.911.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.589.686.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.589.686.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	20.589.686.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	352.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	352.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	352.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.150.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	75.150.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.150.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	83.225.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	83.225.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	83.225.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	73.850.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	73.850.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	73.850.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**270.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	36.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	34.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**450.000.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	80.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	320.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	320.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.854.875.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	431.875.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	431.875.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	431.875.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	135.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	135.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	185.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	185.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**160.000.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	80.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	80.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	80.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.241.343.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.343.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.343.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.343.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.000.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**877.000.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	22.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**24.459.750.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**24.459.750.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.368.209.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.368.209.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.368.209.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.700.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	559.750.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	559.750.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0006.5.1.1	Belanja Pegawai	2.040.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	557.710.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media	505.841.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	505.841.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	505.841.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.904.750.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.904.750.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.904.750.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	-	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	400.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.1.1	Belanja Pegawai	2.040.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	397.960.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	5.353.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	5.353.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.103.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0012.5.1.5	Belanja Hibah	4.250.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	334.027.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	334.027.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	334.027.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	9.437.881.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	9.437.881.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.437.881.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.800.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0020.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0020.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	1.096.292.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0023.5.1	BELANJA OPERASI	1.096.292.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0023.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.096.292.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**20.107.445.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**-**	**-**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	-	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**20.107.445.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	-	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	-	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2.817.254.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	2.817.254.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0017.5.1.1	Belanja Pegawai	4.080.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.813.174.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	80.082.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0018.5.1	BELANJA OPERASI	80.082.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0018.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.082.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.880.800.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0026.5.1	BELANJA OPERASI	1.880.800.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0026.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.880.800.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	102.664.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0028.5.1	BELANJA OPERASI	102.664.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0028.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	102.664.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	15.226.645.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0029.5.1	BELANJA OPERASI	1.726.645.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0029.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.726.645.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0029.5.2	BELANJA MODAL	13.500.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0029.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.500.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**1.210.829.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**1.210.829.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	378.750.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	378.750.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	378.750.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	100.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	260.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	304.370.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	304.370.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	304.370.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	167.709.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	167.709.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	167.709.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**3.000.000.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**1.341.640.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	240.520.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	240.520.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	240.520.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	145.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	145.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	370.600.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	370.600.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	370.600.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	585.520.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	585.520.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	585.520.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**1.658.360.000**	**-**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1.658.360.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.144.055.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.144.055.000	-
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.2	BELANJA MODAL	514.305.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	514.305.000	-
	Jumlah Belanja	**78.415.153.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(78.415.153.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
ORGANISASI : 2.17.0.00.0.00.01 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**611.225.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	611.225.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	411.215.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	200.010.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**35.821.452.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**25.907.910.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**486.444.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	311.444.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	311.444.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	311.444.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.483.160.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.933.826.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	15.933.826.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	15.933.826.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	421.590.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	421.590.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	396.600.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.990.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	127.744.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	127.744.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	127.744.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**90.000.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**26.000.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.723.680.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	171.400.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	171.400.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	171.400.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	115.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.124.280.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.124.280.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.124.280.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**207.700.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	110.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	60.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.700.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	22.700.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0011.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.700.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.278.926.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.500.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.500.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.533.100.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.533.100.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.533.100.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.664.326.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.664.326.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.664.326.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**612.000.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	195.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	195.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	45.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	145.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	145.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	126.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**1.499.384.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**645.052.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	645.052.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	645.052.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	645.052.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**854.332.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	854.332.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	854.332.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	854.332.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**734.908.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**734.908.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	734.908.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	734.908.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	734.908.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**1.606.604.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.606.604.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	705.776.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	705.776.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	705.776.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	900.828.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	900.828.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	900.828.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO**	**3.494.064.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**3.494.064.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	300.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	865.220.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	865.220.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	865.220.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	547.940.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	547.940.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	547.940.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	650.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	1.130.904.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	1.130.904.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.130.904.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**2.578.582.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01	**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**2.578.582.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	554.320.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	554.320.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	554.320.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	2.024.262.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.024.262.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.024.262.000	-
	Jumlah Belanja	**35.821.452.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(35.210.227.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.01 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**36.600.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.600.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	33.000.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	3.600.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**25.125.018.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**20.185.806.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**304.347.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	158.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	158.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.347.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	146.347.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	146.347.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.263.466.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.933.466.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	15.933.466.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	15.933.466.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	330.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	330.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	289.800.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**80.000.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**54.000.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**680.674.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	87.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.854.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	68.854.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	68.854.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	8.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.820.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	279.820.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	279.820.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**370.173.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	370.173.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	370.173.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.173.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.099.646.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	600.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.467.146.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.467.146.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.467.146.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**333.500.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.500.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	109.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	109.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**560.640.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**310.640.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	310.640.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	310.640.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	310.640.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**250.000.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	250.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**1.612.500.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**1.612.500.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.582.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.582.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.582.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	30.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**1.654.602.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01	**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**850.000.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	850.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	850.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	850.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**804.602.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	720.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	720.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	84.602.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	84.602.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	84.602.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**561.470.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**561.470.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	200.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	161.470.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	161.470.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	161.470.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	200.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**550.000.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**550.000.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	550.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000	-
	Jumlah Belanja	**25.125.018.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(25.088.418.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ORGANISASI : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**5.505.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.505.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	5.505.000.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**466.072.367.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**49.976.367.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**550.030.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.030.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	300.030.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.030.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.526.337.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.066.337.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	27.066.337.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	27.066.337.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	460.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	460.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	450.120.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.880.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**550.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	550.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**250.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	250.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.114.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	130.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	-	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	285.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	285.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	285.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.100.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**600.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	600.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.07.0001.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.07.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.635.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.700.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.700.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	11.700.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.751.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	290.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	290.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	361.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	361.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	361.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.800.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**11.525.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**3.250.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	700.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	-	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	-	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	650.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	-	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	1.600.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	300.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	**8.275.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	225.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	8.050.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	8.050.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.0004.5.1.5	Belanja Hibah	8.050.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**388.786.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**9.000.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	-	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	9.000.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0004.5.2	BELANJA MODAL	8.800.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0004.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.800.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**17.920.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	4.400.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.400.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	150.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	13.370.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	13.370.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.370.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**361.866.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	300.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	70.055.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	70.055.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.055.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	13.736.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	13.736.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.736.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	150.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0008.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	277.625.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0009.5.1	BELANJA OPERASI	277.625.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0009.5.1.5	Belanja Hibah	277.525.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**-**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.0003	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	-	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	-	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**6.200.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**5.200.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	5.200.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**500.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	500.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.0009.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**500.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	118.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.0010.5.1	BELANJA OPERASI	118.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	382.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.0013.5.1	BELANJA OPERASI	382.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	382.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**5.660.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**5.660.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	350.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	650.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4.660.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	4.660.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.660.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**550.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**450.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	450.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**100.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.02.0008	Perlindungan Hasil Kreativitas	100.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**3.375.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**2.675.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	350.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1.275.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	1.275.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.0014.5.1.5	Belanja Hibah	825.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	1.050.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	1.050.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**700.000.000**	**-**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	500.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
	Jumlah Belanja	**466.072.367.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(460.567.367.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
ORGANISASI : 2.23.2.24.0.00.02 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**70.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	70.000.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**35.800.957.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**33.389.359.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**175.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	135.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	135.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.887.910.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.637.910.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	27.637.910.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	27.637.910.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	234.240.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.760.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**95.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**61.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	46.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.074.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	9.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	75.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0007.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	175.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**200.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.661.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.300.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	86.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.265.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.265.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.265.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**235.449.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.449.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	100.449.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.449.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**1.400.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**820.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	25.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	550.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0009.5.2	BELANJA MODAL	510.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0009.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	510.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	50.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	8.750.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0015.5.2	BELANJA MODAL	41.250.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0015.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.250.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**580.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	60.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	435.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	421.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189.460.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0002.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	231.540.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	30.400.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	30.400.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	24.600.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	24.600.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**240.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**80.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	20.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	60.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02	**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**50.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	35.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	15.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.03	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**40.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	37.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.03.0002.5.2	BELANJA MODAL	3.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.03.0002.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah**	**70.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0001.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0001.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**701.598.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**145.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	25.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	120.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**220.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	220.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	220.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**336.598.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	75.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	261.598.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	261.598.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	261.598.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**70.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01	**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**25.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	25.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	23.680.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.680.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0001.5.2	BELANJA MODAL	1.320.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0001.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.320.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**	**25.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	25.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04	**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan**	**20.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	20.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	10.925.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.925.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002.5.2	BELANJA MODAL	9.075.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.075.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	4.000.000	-
	Jumlah Belanja	**35.800.957.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(35.730.957.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.25.0.00.0.00.01 - Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**15.182.605.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.182.605.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	15.182.605.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**86.750.448.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**55.662.881.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**741.745.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	359.445.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	359.445.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	359.445.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	382.300.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	382.300.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	382.300.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**48.061.846.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.991.846.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	46.991.846.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	46.991.846.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	920.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	920.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	918.960.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	150.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**220.000.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	150.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.547.908.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	133.810.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	133.810.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	133.810.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	479.348.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	128.970.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	128.970.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	350.378.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.378.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	-	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	760.750.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	760.750.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	760.750.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**507.250.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	-	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	507.250.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	507.250.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	507.250.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.340.980.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.900.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	46.900.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.900.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.294.080.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.294.080.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.294.080.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.143.152.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.610.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	316.610.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	316.610.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.750.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	196.750.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	196.750.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	469.792.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	390.652.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	390.652.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	79.140.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.140.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**2.106.110.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**1.518.438.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	382.824.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	382.824.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	382.824.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.135.614.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.135.114.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.135.114.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.2	BELANJA MODAL	500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02	**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**67.610.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	67.610.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	67.610.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.610.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03	**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**520.062.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	520.062.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	520.062.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	335.062.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1.5	Belanja Hibah	185.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**10.701.928.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**796.726.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	57.285.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	57.285.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57.285.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	739.441.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	739.441.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	739.441.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.406.600.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	610.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	610.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.0003.5.1.5	Belanja Hibah	610.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	796.600.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	796.600.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	471.600.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.0004.5.1.5	Belanja Hibah	325.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**8.498.602.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	2.241.995.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.152.995.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.152.995.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	89.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	6.256.607.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.194.514.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.194.514.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003.5.2	BELANJA MODAL	1.062.093.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.525.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	806.715.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	183.853.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**14.581.048.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**203.500.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	110.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	93.500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	93.500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	93.500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**3.724.692.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	250.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.250.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	352.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0004.5.1.5	Belanja Hibah	1.898.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	452.707.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0006.5.1	BELANJA OPERASI	452.707.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	452.707.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	771.985.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0007.5.1	BELANJA OPERASI	771.985.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	771.985.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**10.652.856.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.652.856.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.391.356.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.391.356.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0003.5.2	BELANJA MODAL	5.261.500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	742.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0003.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.519.500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**1.756.361.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**1.282.844.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	50.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	174.159.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	174.159.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	174.159.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	894.922.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	894.922.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	894.922.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	163.763.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	163.763.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	163.763.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**473.517.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	171.104.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	171.104.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	171.104.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	152.409.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	152.409.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	152.409.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	150.004.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	150.004.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.004.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**1.942.120.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**99.500.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	95.500.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	95.500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	4.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**1.838.620.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	130.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0002.5.1.5	Belanja Hibah	130.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.708.620.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.668.620.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.668.620.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0004.5.2	BELANJA MODAL	40.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0004.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**4.000.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	-
	Jumlah Belanja	**86.750.448.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(71.567.843.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.08 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**9.983.270.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.983.270.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	9.983.270.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**150.902.041.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**55.452.687.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.576.528.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	349.768.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	349.768.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	600.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	349.168.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.226.760.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.226.760.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.0007.5.1.1	Belanja Pegawai	1.200.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.225.560.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**33.862.915.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.546.515.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	33.546.515.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	33.546.515.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	266.400.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	266.400.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	266.400.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**178.740.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	70.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	8.740.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	8.740.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.740.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**30.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	30.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**108.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	108.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.017.198.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.856.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	33.856.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	33.856.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.614.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	164.614.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	164.614.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.546.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	36.546.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36.546.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	605.378.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	605.378.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	605.378.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	131.862.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	131.862.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	131.862.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	227.648.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	227.648.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	227.648.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	790.569.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	790.569.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	790.569.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.725.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	16.725.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.725.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.248.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	15.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	230.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	230.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	110.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	110.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0007.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	293.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0011.5.1	BELANJA OPERASI	288.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	288.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0011.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.441.486.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.700.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.671.400.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.671.400.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.671.400.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	122.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	122.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.642.386.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	9.642.386.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.642.386.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.989.820.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	360.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	360.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	360.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.900.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	131.900.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	131.900.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	8.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	521.920.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	521.920.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	521.920.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.655.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.655.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.655.500.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	55.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.783.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	733.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	733.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	1.050.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	850.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0009.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	423.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	423.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	423.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**37.558.500.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**2.400.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	2.400.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.0003.5.1.1	Belanja Pegawai	1.800.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	298.200.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.0003.5.1.5	Belanja Hibah	2.100.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**25.578.500.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	21.984.200.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	21.984.200.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	2.040.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.789.160.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.0001.5.1.5	Belanja Hibah	12.193.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.594.300.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.594.300.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.0004.5.1.1	Belanja Pegawai	3.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.771.300.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.0004.5.1.5	Belanja Hibah	820.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06	**Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**	**9.580.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	9.580.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.580.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.0001.5.1.5	Belanja Hibah	9.200.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**5.700.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**5.700.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5.350.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	5.350.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	350.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.0019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.0019.5.1.5	Belanja Hibah	50.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**39.913.154.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**35.865.350.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35.865.350.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	35.865.350.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.0007.5.1.1	Belanja Pegawai	1.800.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	333.550.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.0007.5.1.5	Belanja Hibah	35.530.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**2.909.304.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	2.909.304.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.909.304.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.909.304.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**1.138.500.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	1.138.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.138.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	433.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.0001.5.1.5	Belanja Hibah	705.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**12.277.700.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**12.277.700.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	12.277.700.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	12.277.700.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.597.700.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.0006.5.1.5	Belanja Hibah	8.680.000.000	-
	Jumlah Belanja	**150.902.041.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(140.918.771.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.10 - Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**13.000.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.000.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	12.649.862.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	350.138.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**155.675.731.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**109.679.896.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**900.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90.820.644.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85.833.743.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	85.833.743.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	85.833.743.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.986.901.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.986.901.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	734.400.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.252.501.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**281.500.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	277.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	277.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	277.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**80.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.601.392.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	129.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	129.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	474.748.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	204.748.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	204.748.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	270.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.070.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	37.070.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.070.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0003.5.2	BELANJA MODAL	47.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	137.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	137.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	137.500.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	262.713.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	262.713.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	262.713.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.510.361.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.510.361.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.510.361.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.541.600.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	975.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0001.5.2	BELANJA MODAL	975.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0001.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	975.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	80.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	80.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.313.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	1.313.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.313.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	75.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0010.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.100.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	98.100.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0011.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.100.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.453.750.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.610.400.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.610.400.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.610.400.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.750.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	134.750.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	134.750.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.676.600.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.651.700.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.651.700.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0004.5.2	BELANJA MODAL	24.900.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0004.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.900.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.001.010.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.059.540.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.059.540.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.059.540.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	37.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	37.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	354.470.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	354.470.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	354.470.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.905.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.107.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.107.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	798.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	798.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.494.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	518.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	518.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0010.5.2	BELANJA MODAL	1.976.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0010.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0010.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.876.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**37.080.553.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**25.513.272.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	25.513.272.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	25.243.272.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.751.972.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0001.5.1.5	Belanja Hibah	5.491.300.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0001.5.2	BELANJA MODAL	270.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0001.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**11.567.281.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	67.423.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	67.423.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.423.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	11.499.858.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	11.424.858.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.424.858.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0005.5.2	BELANJA MODAL	75.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0005.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**5.960.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**5.960.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	5.960.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.960.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.0001.5.1.5	Belanja Hibah	3.800.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**745.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**745.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	645.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	645.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	645.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**2.210.282.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01	**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**256.970.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	256.970.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	256.970.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	256.970.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**1.330.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	400.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	930.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	930.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	930.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**623.312.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	623.312.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	623.312.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	623.312.000	-
	Jumlah Belanja	**155.675.731.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(142.675.731.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ORGANISASI : 3.29.0.00.0.00.01 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**3.311.829.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.311.829.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	1.656.400.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	1.655.429.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**63.838.104.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**53.633.683.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**931.036.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	632.512.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	632.512.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	632.512.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	298.524.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	298.524.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	298.524.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**40.993.406.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.704.620.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	39.704.620.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	39.704.620.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.106.880.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.106.880.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	1.106.880.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.566.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	87.566.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.566.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	52.500.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	52.500.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41.840.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	41.840.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41.840.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**157.000.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	144.500.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	144.500.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	144.500.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.500.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**140.000.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.129.411.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.950.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	174.950.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	174.950.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	107.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	104.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	104.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.2	BELANJA MODAL	3.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.311.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	250.311.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.311.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	78.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	24.600.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	24.600.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.050.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	125.050.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.050.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.158.100.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.158.100.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.158.100.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	115.400.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	115.400.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115.400.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**195.850.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	25.400.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	6.750.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	18.650.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.650.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	170.450.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	10.070.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.070.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	160.380.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.380.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.949.780.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.100.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	41.100.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41.100.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.660.900.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.660.900.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.660.900.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.250.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	13.250.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.234.530.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.234.530.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.234.530.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.137.200.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	388.560.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	388.560.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	388.560.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.640.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	81.640.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	81.640.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	315.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	315.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	315.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	327.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	327.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**2.178.750.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**605.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	605.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	605.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	605.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**1.573.750.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	563.700.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	563.700.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	563.700.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	1.010.050.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.010.050.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.010.050.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**2.503.054.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.01	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**186.250.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.01.0006	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut	186.250.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	186.250.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	186.250.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**2.166.804.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	278.500.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	278.500.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	278.500.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1.888.304.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.888.304.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.888.304.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**150.000.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.0003.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**2.381.039.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07	**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	**1.499.084.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1.499.084.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.499.084.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	230.084.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07.0007.5.1.5	Belanja Hibah	1.269.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.10	**Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi**	**881.955.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	881.955.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.10.0002.5.1	BELANJA OPERASI	881.955.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.10.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	881.955.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**3.141.578.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**336.600.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	336.600.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	336.600.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	336.600.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**1.185.518.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1.185.518.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.185.518.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.185.518.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**1.619.460.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	34.320.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	34.320.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.320.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.585.140.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.585.140.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.585.140.000	-
	Jumlah Belanja	**63.838.104.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(60.526.275.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
ORGANISASI : 3.31.3.30.0.00.02 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**4.049.005.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.049.005.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	1.939.780.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	2.109.225.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**100.339.322.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**49.524.618.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**548.742.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	248.742.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	248.742.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	248.742.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**34.382.824.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.808.304.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	32.808.304.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	32.808.304.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.509.520.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.509.520.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	1.451.580.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57.940.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**290.585.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	240.585.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	240.585.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	240.585.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**117.677.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	42.677.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	42.677.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.677.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.927.073.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	160.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258.233.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	258.233.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	258.233.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	220.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	178.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	178.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0003.5.2	BELANJA MODAL	42.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	646.540.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	646.540.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	646.540.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.600.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	107.600.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	107.600.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	22.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	249.900.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	249.900.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	249.900.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.227.800.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.227.800.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.227.800.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.803.391.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.700.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.109.700.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.109.700.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.109.700.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.689.991.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	5.689.991.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.689.991.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.454.326.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.400.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	342.400.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	342.400.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	705.426.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	705.426.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	705.426.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	20.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	776.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	422.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	422.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	354.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	354.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	91.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	91.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	401.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	401.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	401.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**633.633.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor**	**168.621.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	168.621.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	168.621.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	168.621.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.03	**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**	**26.300.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	26.300.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	26.300.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.300.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	**438.712.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	438.712.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	438.712.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	438.712.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**238.250.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	**238.250.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	238.250.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	238.250.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	238.250.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**32.895.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	**40.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	40.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02	**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	**32.800.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	20.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32.780.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	32.780.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.780.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	**55.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	20.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.0005	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	35.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**1.334.967.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**1.334.967.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	1.071.367.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.071.367.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.071.367.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal	72.650.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	72.650.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	72.650.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	50.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	140.950.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	140.950.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.950.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**2.786.815.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**518.012.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	329.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	329.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	329.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	188.512.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	188.512.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	188.512.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**2.091.482.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	310.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	310.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	691.226.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	691.226.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	691.226.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	1.090.256.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.090.256.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.090.256.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**177.321.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	177.321.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	177.321.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	177.321.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**2.450.180.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01	**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	**325.180.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	325.180.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	325.180.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	325.180.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.02	**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**2.110.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	2.110.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.110.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.02.0002.5.1.5	Belanja Hibah	2.060.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.03	**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**15.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	15.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**9.979.492.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**9.979.492.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5.815.029.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.815.029.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.815.029.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4.164.463.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.164.463.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.119.463.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0004.5.1.5	Belanja Hibah	2.045.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**245.681.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	**245.681.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	245.681.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	245.681.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	245.681.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**250.686.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**250.686.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	30.175.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	30.175.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.175.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	220.511.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	220.511.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	220.511.000	-
	Jumlah Belanja	**100.339.322.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(96.290.317.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01 - Sekretariat Daerah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**1.014.040.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.014.040.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	1.014.040.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**643.571.071.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**226.172.646.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**190.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**115.305.142.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	113.340.142.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	113.340.142.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	113.340.142.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.540.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.540.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	1.520.100.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	125.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**792.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	442.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	442.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	442.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	350.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**30.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	30.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**145.312.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	104.574.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	104.574.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	104.574.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.738.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	40.738.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.738.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**14.631.753.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	400.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.718.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	500.718.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.718.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	425.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	425.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	425.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	45.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.895.651.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	6.895.651.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.1	Belanja Pegawai	6.120.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.889.531.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	365.384.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	365.384.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.1	Belanja Pegawai	1.360.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	364.024.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.700.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	1.500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	9.200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.511.213.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	631.213.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	631.213.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	631.213.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.350.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	17.350.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.350.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.300.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.250.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	87.500.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	87.500.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.400.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.500.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	312.500.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	312.500.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**26.232.776.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.743.094.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.743.094.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	2.743.094.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	160.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0002.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	23.279.682.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0004.5.1	BELANJA OPERASI	23.279.682.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0004.5.1.1	Belanja Pegawai	23.279.682.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**6.120.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.950.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.950.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.770.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.770.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.770.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.400.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**15.334.203.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	350.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0001.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	11.484.203.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0002.5.1	BELANJA OPERASI	11.484.203.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.484.203.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	3.500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**	**2.880.247.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2.580.247.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.580.247.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.580.247.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0002.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	50.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**1.780.528.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**687.552.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	262.352.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	262.352.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	262.352.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	212.400.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	212.400.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	212.400.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	212.800.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	212.800.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	212.800.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02	**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**1.092.976.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	301.360.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	301.360.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	301.360.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	240.160.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	240.160.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	240.160.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	276.640.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	276.640.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	276.640.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	274.816.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	274.816.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	274.816.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**3.478.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**1.005.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	550.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	549.320.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	230.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	230.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	229.320.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	225.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**1.330.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	800.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	800.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	1.360.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	798.640.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	225.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	224.320.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	305.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	305.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	304.320.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**1.143.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	593.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	593.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	592.320.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	350.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0003.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	349.320.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**400.058.148.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**398.686.424.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	394.145.724.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	394.145.724.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	371.724.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.1.5	Belanja Hibah	393.774.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	4.540.700.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.540.700.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.540.700.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**643.908.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	243.908.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	243.908.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	243.908.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**727.816.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	527.816.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	527.816.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	527.816.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**2.918.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01	**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**1.682.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	65.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	465.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	460.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	460.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	652.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	652.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	652.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**1.236.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	236.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	236.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	236.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN**	**4.775.260.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**1.762.448.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	462.448.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	462.448.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	462.448.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1.300.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**1.612.812.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	577.043.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	577.043.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	577.043.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	521.683.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	521.683.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	521.683.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	514.086.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	514.086.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	514.086.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**1.400.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	810.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	810.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	810.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	390.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	390.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	390.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan	150.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	25.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan	25.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**2.348.489.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.270.335.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	262.535.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	262.535.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	500.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	262.035.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	799.800.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	799.800.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	799.800.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	208.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	208.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0003.5.1.1	Belanja Pegawai	1.500.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	206.500.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**603.720.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	190.230.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	190.230.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	190.230.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	295.350.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	295.350.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	295.350.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	118.140.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	118.140.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	118.140.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**474.434.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	147.204.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	147.204.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	1.360.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	145.844.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	162.210.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	162.210.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	1.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	161.210.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	165.020.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	165.020.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	165.020.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**2.040.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**1.470.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	465.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	465.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	465.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	285.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	285.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	285.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	720.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	720.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0003.5.1.1	Belanja Pegawai	1.200.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	718.800.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**570.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	120.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	347.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	347.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	600.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	346.400.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	103.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	103.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	103.000.000	-
	Jumlah Belanja	**643.571.071.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(642.557.031.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD
ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01 - Sekretariat DPRD

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**1.750.000.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.750.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	1.750.000.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**585.025.008.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**218.871.748.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.112.567.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	812.567.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	812.567.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	812.567.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**20.665.764.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.560.764.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	19.560.764.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	19.560.764.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.105.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.105.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	807.840.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	297.160.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.055.674.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.055.674.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.055.674.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.055.674.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**600.101.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	206.808.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	206.808.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	206.808.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	393.293.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	393.293.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	393.293.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.256.952.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	435.701.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	435.701.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	435.701.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182.189.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	182.189.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	182.189.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	480.500.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	480.500.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	480.500.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	980.400.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	980.400.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	980.400.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	178.162.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	178.162.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	178.162.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.762.981.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	639.680.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0001.5.2	BELANJA MODAL	639.680.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0001.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	639.680.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.163.948.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0002.5.2	BELANJA MODAL	2.163.948.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.163.948.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	276.640.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	276.640.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	276.640.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	381.288.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	381.288.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	381.288.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.301.425.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	2.023.045.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.023.045.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	278.380.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	278.380.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.393.158.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	196.957.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	196.957.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	196.957.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.439.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.439.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.439.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.031.086.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.031.086.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.031.086.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.726.115.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	14.726.115.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.726.115.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.718.675.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	502.800.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	502.800.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	502.800.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.027.582.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.027.582.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.027.582.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	57.475.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	57.475.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57.475.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.699.503.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.699.503.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.699.503.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.431.315.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	2.431.315.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.431.315.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**159.305.876.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	157.346.875.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0001.5.1	BELANJA OPERASI	157.346.875.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	157.346.875.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.392.880.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.392.880.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.392.880.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	566.121.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0003.5.1	BELANJA OPERASI	566.121.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	566.121.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**366.153.260.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**8.483.926.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8.483.926.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.483.926.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.483.926.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**2.102.662.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	2.102.662.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.102.662.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.102.662.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**13.819.030.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2.214.668.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.214.668.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.214.668.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2.214.668.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.214.668.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.214.668.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.214.668.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.214.668.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.214.668.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2.214.668.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.214.668.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.214.668.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2.214.668.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.214.668.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.214.668.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.149.830.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.149.830.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.149.830.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.595.860.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.595.860.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.595.860.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**83.361.307.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.380.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.380.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.173.208.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.173.208.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.173.208.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	454.190.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	454.190.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	454.190.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	10.849.896.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0006.5.1	BELANJA OPERASI	10.849.896.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.849.896.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	65.504.013.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	65.504.013.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.504.013.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**64.153.805.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	20.563.680.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.563.680.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.563.680.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	175.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	43.415.125.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	43.415.125.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.415.125.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**552.860.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	552.860.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	552.860.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	552.860.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**116.323.862.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	116.323.862.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.0002.5.1	BELANJA OPERASI	116.323.862.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	116.323.862.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**77.355.808.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	77.355.808.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	77.355.808.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	77.355.808.000	-
	Jumlah Belanja	**585.025.008.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(583.275.008.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01 - PERENCANAAN
ORGANISASI : 5.01.0.00.0.00.02 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01.5.01.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**30.240.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.240.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	30.240.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.01.5.01.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**48.421.011.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**35.441.011.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**660.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	360.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22.081.232.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.406.192.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	21.406.192.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	21.406.192.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	350.040.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	350.040.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	350.040.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**260.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**390.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	190.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	190.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.871.200.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	220.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	220.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	39.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006.5.2	BELANJA MODAL	19.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	180.200.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	180.200.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.200.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	90.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.250.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	950.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	950.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0007.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	950.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.275.418.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.045.418.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.045.418.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.045.418.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.653.161.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	650.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	340.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	340.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	24.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.809.161.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.409.161.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.409.161.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	400.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**5.900.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**4.216.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	4.216.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	4.216.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0006.5.1.1	Belanja Pegawai	6.120.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.209.880.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**741.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0001	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	601.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	601.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	601.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	140.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**943.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	678.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	678.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	678.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	265.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	265.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	265.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**7.080.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**2.700.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	140.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	984.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	984.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0004.5.1.1	Belanja Pegawai	7.480.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	976.520.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	350.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.226.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.226.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.226.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**2.230.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	680.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	680.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0003.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	679.320.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	860.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	860.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0004.5.1.1	Belanja Pegawai	2.040.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	857.960.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	340.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	340.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	350.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0008.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	349.320.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**2.150.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	150.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	500.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0004.5.1.1	Belanja Pegawai	680.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	499.320.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	400.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0008.5.1.1	Belanja Pegawai	2.720.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.097.280.000	-
	Jumlah Belanja	**48.421.011.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(48.390.771.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02 - Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**12.815.986.348.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.815.986.348.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.1	Pajak Daerah	12.650.725.636.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	5.260.712.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	160.000.000.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**292.550.704.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**254.399.644.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**605.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	345.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	345.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	345.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**156.923.731.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	154.448.801.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	154.448.801.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	129.810.801.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.638.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.247.370.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.247.370.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	2.159.190.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	88.180.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	227.560.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	227.560.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	227.560.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**613.700.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	258.700.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	258.700.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	258.700.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	355.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	355.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	355.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**207.550.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	157.550.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	157.550.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	157.550.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**18.356.538.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	425.744.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	425.744.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	425.744.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.040.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.040.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.374.224.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.374.224.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.374.224.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.393.104.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.393.104.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.393.104.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	239.729.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	239.729.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	239.729.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.957.357.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0007.5.1	BELANJA OPERASI	3.957.357.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.957.357.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.202.344.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.202.344.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.202.344.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.664.171.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	3.664.171.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.664.171.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	47.865.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	47.865.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.865.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7.392.128.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0001.5.2	BELANJA MODAL	5.200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0001.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.192.128.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	2.192.128.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.192.128.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**54.381.188.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.555.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	104.555.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	104.555.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.695.570.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	12.695.570.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.695.570.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.184.428.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.184.428.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.184.428.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.396.635.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	31.396.635.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31.396.635.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.919.809.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	871.890.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	871.890.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	871.890.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.359.980.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	5.359.980.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.359.980.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.926.690.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.926.690.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.926.690.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	288.525.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	288.525.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	288.525.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.928.858.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.928.858.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.928.858.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.150.510.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	1.150.510.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.150.510.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.393.356.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	2.393.356.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.393.356.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**38.151.060.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**38.151.060.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	2.710.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.710.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.710.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.897.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.897.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.897.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	352.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	352.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	352.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.506.435.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	7.506.435.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.506.435.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	225.209.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	225.209.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	225.209.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	15.303.951.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	15.303.951.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.303.951.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	150.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	290.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	290.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	290.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	659.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	659.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	659.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	9.057.465.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	8.967.465.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.967.465.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0014.5.2	BELANJA MODAL	90.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0014.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
	Jumlah Belanja	**292.550.704.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**12.523.435.644.000**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.03 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**8.846.290.112.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	816.435.724.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	8.521.080.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	707.349.144.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	100.565.500.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	8.006.377.888.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.006.377.888.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.476.500.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.3.1	Pendapatan Hibah	23.476.500.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**7.367.929.563.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**47.625.407.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**507.095.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	256.300.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	256.300.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	256.300.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.795.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	250.795.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.795.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**31.434.373.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.576.252.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	29.576.252.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	29.576.252.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.661.421.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.661.421.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	1.314.680.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	346.741.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	56.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	56.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	140.700.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	140.700.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.700.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.601.207.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	565.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	565.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	565.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	354.500.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	354.500.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	354.500.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	360.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	771.707.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	771.707.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	771.707.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	35.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	35.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	60.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.216.354.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.200.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.200.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.820.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.820.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.185.154.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.185.154.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.185.154.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.671.378.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.600.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	132.600.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	132.600.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	70.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.468.778.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	758.178.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	758.178.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0006.5.2	BELANJA MODAL	710.600.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	710.600.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.700.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**7.314.939.156.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**8.600.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	160.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	160.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4.597.137.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	4.597.137.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.597.137.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.724.546.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	2.724.546.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.724.546.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	958.317.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	958.317.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	958.317.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.200.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	218.900.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	218.900.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	218.900.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	218.900.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	218.900.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	218.900.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	218.900.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	218.900.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	218.900.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	498.400.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	498.400.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	498.400.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	44.900.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	44.900.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.900.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**2.200.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	400.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	600.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	600.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	600.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0009.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**4.150.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	408.927.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	408.927.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	408.927.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	220.530.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	220.530.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	220.530.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.664.237.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.664.237.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.664.237.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	746.868.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0008.5.1	BELANJA OPERASI	746.868.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	746.868.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	319.228.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0009.5.1	BELANJA OPERASI	319.228.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	319.228.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	790.210.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0011.5.1	BELANJA OPERASI	790.210.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	790.210.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**7.297.839.156.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3.076.277.924.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0008.5.4	BELANJA TRANSFER	3.076.277.924.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0008.5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	3.076.277.924.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	25.000.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0009.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0009.5.3.1	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	4.196.561.232.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0010.5.4	BELANJA TRANSFER	4.196.561.232.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0010.5.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.196.561.232.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan**	**950.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	950.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	950.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	950.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**5.365.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**5.365.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	698.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	698.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	698.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	189.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	189.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	189.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	352.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	162.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0005.5.2	BELANJA MODAL	190.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0005.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	190.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	400.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.705.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.290.025.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.290.025.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0007.5.2	BELANJA MODAL	414.975.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0007.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	414.975.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	193.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	193.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	193.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	132.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	132.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.268.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	1.268.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.268.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	428.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	428.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	428.000.000	-
	Jumlah Belanja	**7.367.929.563.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**1.478.360.549.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6	**PEMBIAYAAN**	**362.300.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	432.300.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	432.300.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	70.000.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	70.000.000.000	-
	Pembiayaan Netto	**362.300.000.000**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.03 - KEPEGAWAIAN
ORGANISASI : 5.03.0.00.0.00.01 - Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**718.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	718.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	12.000.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	706.000.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**42.970.136.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**32.813.136.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**500.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.720.170.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.602.950.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	26.602.950.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	26.602.950.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.022.220.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.022.220.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	726.120.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	296.100.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**150.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**20.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**170.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.255.966.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.966.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	25.966.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.966.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	560.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	560.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	110.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**175.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	75.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0008.5.2	BELANJA MODAL	75.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0008.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.112.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.350.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**710.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	190.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**10.157.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**4.335.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	110.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.960.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.960.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	280.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	280.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	275.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	275.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	385.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	385.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	385.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	325.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	325.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**1.055.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	140.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	315.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	315.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	315.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	600.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**3.647.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	1.021.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.021.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.021.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.256.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.256.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.256.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	50.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0013.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	320.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0014.5.1	BELANJA OPERASI	320.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**1.120.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	275.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	275.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	292.800.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	292.800.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	292.800.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	92.200.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	92.200.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	92.200.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	180.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	280.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0008.5.1	BELANJA OPERASI	280.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000	-
	Jumlah Belanja	**42.970.136.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(42.252.136.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**13.702.340.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.702.340.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	2.290.050.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	11.412.290.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**59.710.905.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**43.874.265.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**350.000.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**29.413.493.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.693.553.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	27.693.553.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	27.693.553.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.499.930.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.499.930.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	477.480.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.022.450.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	82.174.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	82.174.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	82.174.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78.868.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	78.868.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	78.868.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58.968.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	58.968.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.968.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**234.000.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	234.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	234.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	234.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**79.990.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	79.990.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	79.990.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	79.990.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**198.400.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48.400.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	48.400.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	48.400.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.088.982.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	178.093.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	178.093.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	178.093.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.916.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	188.916.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	188.916.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	343.025.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	343.025.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	343.025.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305.260.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	305.260.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	305.260.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.200.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	76.200.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	76.200.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	36.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	105.400.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	105.400.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	105.400.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.693.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	280.693.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	280.693.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.505.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	8.505.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.505.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	566.890.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	566.890.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	566.890.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**297.000.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	218.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	218.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	218.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0007.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	69.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.725.600.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.252.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.252.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.252.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.469.600.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	7.469.600.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.469.600.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.486.800.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.300.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	117.300.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	117.300.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	21.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	760.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	760.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	760.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	588.500.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	588.500.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	588.500.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**15.836.640.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**1.347.950.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	21.250.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	21.250.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.250.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	102.924.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	102.924.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	102.924.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.200.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	23.776.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	23.776.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.776.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**14.488.690.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	58.750.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	58.750.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.750.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	25.437.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	25.437.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.437.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	374.563.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	374.563.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	374.563.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	73.115.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	73.115.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	73.115.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	13.636.640.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	13.636.640.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.636.640.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	320.185.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

	Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	320.185.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	320.185.000	-
	Jumlah Belanja	**59.710.905.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(46.008.565.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI : 5.05.0.00.0.00.01 - Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.05.5.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**20.455.100.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.780.100.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**340.000.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	240.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.928.099.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.484.539.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.484.539.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	10.484.539.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	223.560.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	223.560.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	223.560.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	110.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**125.000.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	110.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**340.000.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	280.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	280.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.014.435.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.374.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	112.374.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	112.374.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	94.561.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	94.561.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94.561.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**150.000.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	150.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	150.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0007.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.676.766.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	570.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	570.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	570.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	305.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	305.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	796.766.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	796.766.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	796.766.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.205.800.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	375.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	375.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	58.800.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	58.800.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	90.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	305.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	305.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	235.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	235.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**4.675.000.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**1.917.872.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	250.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	552.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	552.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	552.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	348.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	348.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	348.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	25.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	425.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	425.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	425.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	317.872.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	317.872.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	317.872.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**218.000.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	218.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	218.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	218.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**218.000.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	218.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	218.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	218.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**2.321.128.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	525.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	525.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	914.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	914.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	914.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	690.846.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	690.846.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	690.846.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	191.282.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	191.282.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	191.282.000	-
	Jumlah Belanja	**20.455.100.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(20.455.100.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG
ORGANISASI : 5.07.0.00.0.00.01 - Badan Penghubung

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**675.000.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	675.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	675.000.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.07.5.07.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**24.261.771.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**20.268.891.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**128.067.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.067.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	68.067.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	68.067.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.898.194.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.840.414.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.840.414.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	9.840.414.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.780.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	37.780.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	36.600.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.180.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**251.580.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	251.580.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	251.580.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	251.580.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**90.000.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.757.213.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.941.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.941.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.941.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	204.372.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	204.372.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	204.372.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	630.900.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	630.900.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	630.900.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.500.000.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.0002.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	500.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.239.837.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	950.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	950.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	950.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.188.837.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.188.837.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.188.837.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.404.000.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	762.900.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	762.900.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	762.900.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	25.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	86.100.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	86.100.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	86.100.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	380.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	380.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**3.992.880.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**3.992.880.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	2.792.880.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.792.880.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.792.880.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1.200.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000	-
	Jumlah Belanja	**24.261.771.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(23.586.771.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01 - INSPEKTORAT

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**39.637.631.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**30.233.832.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**105.000.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**24.327.954.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.312.954.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.312.954.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	24.312.954.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**200.500.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.500.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.500.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.500.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**587.889.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	567.889.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	567.889.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	567.889.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**820.434.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.214.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.214.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.214.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	300.220.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	300.220.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.220.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	480.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	480.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**70.012.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	17.400.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	17.400.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.400.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.612.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	52.612.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.612.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.782.015.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	229.940.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	229.940.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	229.940.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	707.074.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	707.074.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	707.074.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.581.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	40.581.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.581.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.804.420.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.804.420.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.1	Belanja Pegawai	291.360.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.513.060.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.340.028.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.953.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	37.953.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.953.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	553.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	553.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	553.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	419.075.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	419.075.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	419.075.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**6.073.727.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**4.794.427.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.420.914.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.420.914.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.420.914.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.126.400.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.126.400.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.126.400.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	484.250.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	484.250.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	484.250.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	348.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	348.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	348.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	835.620.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	835.620.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	835.620.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil	579.243.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	579.243.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	579.243.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**1.279.300.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	200.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.079.300.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.079.300.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.079.300.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**3.330.072.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**198.940.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	198.940.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	198.940.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198.940.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**3.131.132.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	772.407.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	772.407.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	772.407.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.358.725.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.358.725.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.358.725.000	-
	Jumlah Belanja	**39.637.631.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(39.637.631.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**251.957.580.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.068.613.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.302.117.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.350.280.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.350.280.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.280.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	951.837.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	951.837.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	951.837.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.195.687.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.822.687.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.822.687.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	9.822.687.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	350.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.1	Belanja Pegawai	350.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**80.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**370.000.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	260.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.516.629.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	731.629.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	731.629.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	731.629.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**400.000.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	50.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	350.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.591.180.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.134.180.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.134.180.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.134.180.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**613.000.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	205.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**3.865.113.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**3.865.113.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	2.715.113.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.715.113.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.715.113.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	35.210.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	35.210.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.210.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	54.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	54.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	9.590.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	9.590.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.590.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	44.611.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	44.611.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.611.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	11.042.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	11.042.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.042.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	995.547.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	995.547.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	995.547.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**50.923.529.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**50.923.529.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	29.660.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	29.660.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.660.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.462.040.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.462.040.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.462.040.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	339.885.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	339.885.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	339.885.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	48.091.944.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	48.091.944.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	484.213.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0005.5.1.5	Belanja Hibah	47.607.731.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**128.136.927.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**128.136.927.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.550.543.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.550.543.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.550.543.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	180.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	125.406.384.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	125.406.384.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0005.5.1.5	Belanja Hibah	125.286.384.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**2.844.451.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**2.844.451.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.044.959.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.044.959.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.044.959.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	593.400.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	593.400.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	593.400.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	206.092.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	206.092.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	206.092.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**48.118.947.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**48.118.947.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.701.086.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.701.086.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.701.086.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	43.717.861.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	43.717.861.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0005.5.1.5	Belanja Hibah	43.667.861.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.500.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000	-
	Jumlah Belanja	**251.957.580.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(251.957.580.000)**	**-**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

LAMPIRAN IV: RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH

REKAPITULASI BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**11.620.703.455.000**	**1.175.227.683.000**	**-**	**-**	**12.795.931.138.000**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**8.015.746.823.000**	**793.045.020.000**	**-**	**-**	**8.808.791.843.000**
1.01.1.01.2.22.0.00.02	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**8.015.746.823.000**	**793.045.020.000**	**-**	**-**	**8.808.791.843.000**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.272.129.143.000**	**13.924.670.000**	**-**	**-**	**5.286.053.813.000**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.941.855.000	-	-	-	154.941.855.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	153.841.855.000	-	-	-	153.841.855.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.100.000.000	-	-	-	1.100.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.041.376.458.000	-	-	-	5.041.376.458.000
	Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.038.626.458.000	-	-	-	5.038.626.458.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.750.000.000	-	-	-	2.750.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	870.000.000	-	-	-	870.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	620.000.000	-	-	-	620.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (100.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (2.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	475.000.000	-	-	-	475.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000	-	-	-	50.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.340.130.000	460.370.000	-	-	10.800.500.000
	Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	601.000.000	-	-	-	601.000.000
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (1.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (2.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.376.130.000	430.870.000	-	-	1.807.000.000
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (1.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (2.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	766.000.000	16.000.000	-	-	782.000.000
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (1.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (2.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	830.500.000	-	-	-	830.500.000
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (1.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (2.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	363.000.000	10.000.000	-	-	373.000.000
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (1.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (2.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	58.500.000	3.500.000	-	-	62.000.000
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (1.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (2.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.855.000.000	-	-	-	1.855.000.000
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (1.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (2.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.270.000.000	-	-	-	4.270.000.000
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (1.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (2.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120.000.000	-	-	-	120.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.261.700.000	13.464.300.000	-	-	16.726.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	50.680.000	980.320.000	-	-	1.031.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (12.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (16.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (17.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (20.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (24.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (60.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (85.00 Unit)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.500.000	2.510.500.000	-	-	2.540.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (10.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (16.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (17.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (20.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (24.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (60.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (85.00 Unit)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	4.500.000.000	-	-	4.500.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (16.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (17.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (20.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (24.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (60.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (85.00 Unit)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.860.000	1.771.140.000	-	-	1.830.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (16.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (17.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (20.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (24.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (60.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (85.00 Unit)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.122.660.000	3.702.340.000	-	-	6.825.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (12.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (16.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (17.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (20.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (24.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (60.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (85.00 Unit)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.382.200.000	-	-	-	49.382.200.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	112.800.000	-	-	-	112.800.000
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (21.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.237.000.000	-	-	-	6.237.000.000
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (21.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	474.600.000	-	-	-	474.600.000
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (21.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.557.800.000	-	-	-	42.557.800.000
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (21.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.481.800.000	-	-	-	11.481.800.000
	Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	788.000.000	-	-	-	788.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (10.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (105.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (146.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (18.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (25.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (280.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (28.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (539.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	293.300.000	-	-	-	293.300.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (105.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (146.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (18.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (25.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (280.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (28.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (539.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	800.500.000	-	-	-	800.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (10.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (105.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (146.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (18.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (25.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (280.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (28.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (539.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	120.000.000	-	-	-	120.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (105.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (146.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (18.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (25.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (280.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (28.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (539.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (100.00 Unit)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.595.000.000	-	-	-	6.595.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (105.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (146.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (18.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (25.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (280.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (28.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (539.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.445.000.000	-	-	-	1.445.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (105.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (146.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (18.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (25.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (280.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (28.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (539.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.380.000.000	-	-	-	1.380.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (105.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (146.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (18.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (22.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (25.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (280.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (28.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (539.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**2.704.475.680.000**	**779.120.350.000**	**-**	**-**	**3.483.596.030.000**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	965.195.196.000	211.405.902.000	-	-	1.176.601.098.000
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I (90.90 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II (76.84 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III (76.06 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV (25.85 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX (54.60 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V (94.23 %)					
	APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI (80.17 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII (72.84 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII (77.25 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X (78.06 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI (88.14 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII (81.40 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII (88.26 %)					
	Persentase angka putus sekolah SMA (2.28 %)					
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA (75.00 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA (56.00 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I (1.70 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II (1.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III (2.89 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV (1.50 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX (3.24 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V (1.93 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI (93.00 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII (2.75 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII (2.30 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X (32.14 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI (4.84 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII (2.08 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII (2.53 %)					
	Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (20.00 %)					
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi (84.10 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I (0.95 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II (40.41 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III (69.90 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV (71.25 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX (79.20 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V (78.90 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI (93.00 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII (85.60 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII (76.13 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X (85.17 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI (48.73 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII (83.00 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII (79.50 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi (20.00 %)					
	Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum (67.80 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA (36.86 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	-	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	909.610.000	-	-	909.610.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	996.050.000	9.712.860.000	-	-	10.708.910.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I (9.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX (0.53 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII (22.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (12.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (22.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (24.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (3.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (6.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (62.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (65.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (68.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (80.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (36385.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (44120.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (344.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (35163.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (27337.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30217.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (27992.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (30638.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (39788.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (28183.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (34989.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (24800.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (14158.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (8932.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III (10945.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (8556.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (11531.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (11853.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (11520.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (40580.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (9099.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (11663.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (8050.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I (76.68 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II (30.57 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III (72.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV (73.70 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX (24.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V (69.37 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI (85.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII (50.28 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (78.40 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X (66.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI (82.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII (75.30 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (75.26 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	40.737.680.000	1.400.000.000	-	-	42.137.680.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX (0.53 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII (22.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (12.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (22.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (24.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (3.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (6.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (62.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (65.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (68.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (80.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (36385.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (44120.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (344.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (35163.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (27337.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30217.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (27992.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (30638.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (39788.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (28183.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (34989.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (24800.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (14158.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (8932.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III (10945.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (8556.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (11531.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (11853.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (11520.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (40580.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (9099.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (11663.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (8050.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I (76.68 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II (30.57 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III (72.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV (73.70 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX (24.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V (69.37 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI (85.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII (50.28 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (78.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X (66.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI (82.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII (75.30 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (75.26 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	6.128.642.000	-	-	-	6.128.642.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX (0.53 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII (22.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (12.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (22.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (24.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (3.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (6.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (62.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (65.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (68.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (80.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (36385.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (44120.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (344.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (35163.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (27337.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30217.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (27992.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (30638.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (39788.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (28183.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (34989.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (24800.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (14158.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (8932.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III (10945.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (8556.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (11531.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (11853.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (11520.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (40580.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (9099.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (11663.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (8050.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I (76.68 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II (30.57 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III (72.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV (73.70 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX (24.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V (69.37 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI (85.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII (50.28 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (78.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X (66.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI (82.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII (75.30 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (75.26 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II (3.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX (0.53 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII (22.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (12.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (22.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (24.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (6.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (62.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (65.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (68.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (80.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (36385.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (44120.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (344.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (35163.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30217.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (27992.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (30638.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (39788.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (28183.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (34989.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (24800.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (14158.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (8932.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III (10945.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (11531.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (11853.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (11520.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (40580.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (9099.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (11663.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (8050.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I (76.68 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II (30.57 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III (72.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX (24.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V (69.37 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI (85.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII (50.28 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (78.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X (66.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI (82.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII (75.30 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (75.26 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX (0.53 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII (22.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (12.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (22.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (24.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (6.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (62.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (65.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (68.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (80.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (36385.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (44120.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (344.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (35163.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30217.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (27992.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (30638.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (39788.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (28183.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (34989.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (24800.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (14158.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (8932.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III (10945.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (11531.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (11853.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (11520.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (40580.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (9099.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (11663.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (8050.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I (76.68 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II (30.57 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III (72.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX (24.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V (69.37 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI (85.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII (50.28 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (78.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X (66.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI (82.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII (75.30 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (75.26 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	248.667.000	-	-	-	248.667.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.642.788.000	-	-	-	2.642.788.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	-	18.116.000.000	-	-	18.116.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II (3.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX (0.53 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII (22.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (12.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (22.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (24.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (3.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (6.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (62.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (65.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (68.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (80.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (36385.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (44120.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (344.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (35163.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (27337.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30217.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (27992.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (30638.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (39788.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (28183.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (34989.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (24800.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (14158.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (8932.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III (10945.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (8556.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (11531.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (11853.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (11520.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (40580.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (9099.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (11663.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (8050.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I (76.68 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II (30.57 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III (72.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV (73.70 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX (24.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V (69.37 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI (85.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII (50.28 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (78.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X (66.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI (82.96 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII (75.30 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (75.26 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4.947.000.000	-	-	-	4.947.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	30.600.000.000	-	-	30.600.000.000
	Jumlah Guru SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (5000.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (171.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	8.520.000.000	-	-	-	8.520.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	680.000	899.320.000	-	-	900.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II (3.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX (0.53 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII (22.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (12.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (22.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (24.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (3.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (6.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (62.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (65.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (68.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (80.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (36385.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (44120.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (344.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (35163.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (27337.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30217.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (27992.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (30638.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (39788.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (28183.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (34989.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (24800.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (14158.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (8932.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III (10945.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (8556.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (11531.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (11853.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (11520.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (40580.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (9099.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (11663.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (8050.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I (76.68 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II (30.57 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III (72.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV (73.70 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX (24.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V (69.37 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI (85.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII (50.28 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (78.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X (66.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI (82.96 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII (75.30 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (75.26 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.755.000.000	-	-	-	4.755.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX (0.53 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII (22.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (12.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (22.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (24.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (3.00 Unit)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (6.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (62.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (65.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (68.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (80.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (36385.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (44120.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (344.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (35163.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (27337.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30217.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (27992.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (30638.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (39788.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (28183.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (34989.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (24800.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (14158.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (8932.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III (10945.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (8556.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (11531.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (11853.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (11520.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (40580.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (9099.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (11663.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (8050.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I (76.68 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II (30.57 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III (72.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV (73.70 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX (24.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V (69.37 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI (85.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII (50.28 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (78.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X (66.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI (82.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII (75.30 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (75.26 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
	Jumlah Guru SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (5000.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang bersertifikat kompetensi (13996.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (171.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	283.844.308.000	150.000.000	-	-	283.994.308.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX (0.53 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V (9.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII (22.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (12.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (22.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (24.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (3.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (6.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (62.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (65.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (68.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (80.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (36385.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (44120.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (344.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (35163.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (27337.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30217.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (27992.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (30638.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (39788.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (28183.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (34989.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (24800.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (14158.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (8932.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III (10945.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (8556.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (11531.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (11853.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (11520.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (40580.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (9099.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (11663.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (8050.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I (76.68 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II (30.57 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III (72.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV (73.70 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX (24.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V (69.37 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI (85.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII (50.28 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (78.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X (66.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI (82.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII (75.30 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (75.26 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	589.824.873.000	116.275.511.000	-	-	706.100.384.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	575.000.000	-	-	-	575.000.000
	Jumlah Guru SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (5000.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (171.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Jumlah Guru SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (5000.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (171.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	625.000.000	-	-	-	625.000.000
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II (3.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX (0.53 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII (22.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (12.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (22.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (24.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (3.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (6.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (62.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (65.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (68.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (80.00 Unit)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (36385.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (44120.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (344.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (35163.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (27337.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30217.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (27992.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (30638.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (39788.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (28183.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (34989.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (24800.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (14158.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (8932.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III (10945.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (8556.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (11531.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (11853.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (11520.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (40580.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (9099.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (11663.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (8050.00 Siswa)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I (76.68 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II (30.57 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III (72.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV (73.70 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX (24.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V (69.37 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI (85.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII (50.28 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (78.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X (66.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI (82.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII (75.30 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (75.26 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.229.664.000	-	-	-	3.229.664.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX (0.53 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII (22.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI (7.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (12.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (22.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (24.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (3.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (6.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (62.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (65.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (68.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (80.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (36385.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (44120.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (344.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (35163.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (27337.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30217.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (27992.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (30638.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (39788.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (28183.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (34989.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (24800.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (14158.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (8932.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III (10945.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (8556.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (11531.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (11853.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (11520.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (40580.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (9099.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (11663.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (8050.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I (76.68 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II (30.57 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III (72.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV (73.70 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX (24.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V (69.37 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI (85.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII (50.28 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (78.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X (66.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI (82.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII (75.30 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (75.26 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	-	3.325.740.000	-	-	3.325.740.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II (3.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX (0.53 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII (22.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (12.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (22.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (24.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (6.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (62.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (65.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (68.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (80.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (36385.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (44120.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (344.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (35163.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30217.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (27992.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (30638.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (39788.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (28183.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (34989.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (24800.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (14158.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (8932.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III (10945.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (11531.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (11853.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (11520.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (40580.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (9099.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (11663.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (8050.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I (76.68 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II (30.57 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III (72.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX (24.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V (69.37 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI (85.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII (50.28 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (78.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X (66.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI (82.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII (75.30 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (75.26 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	14.407.844.000	400.000.000	-	-	14.807.844.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX (0.53 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII (22.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII (6.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (12.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (22.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (24.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (3.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (6.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (62.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (65.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (68.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (80.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (36385.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (44120.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (344.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (35163.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (27337.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30217.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (27992.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (30638.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (39788.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (28183.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (34989.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (24800.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (14158.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (8932.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III (10945.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (8556.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (11531.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (11853.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (11520.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (40580.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (9099.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (11663.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (8050.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I (76.68 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II (30.57 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III (72.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV (73.70 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX (24.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V (69.37 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI (85.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII (50.28 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (78.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X (66.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI (82.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII (75.30 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (75.26 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	9.616.861.000	-	-	9.616.861.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.512.000.000	-	-	-	1.512.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru (27.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (6200.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional (93.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX (0.53 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V (9.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII (22.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (12.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (22.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (24.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (3.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (6.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (62.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (65.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (68.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (80.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin (38995.00 Siswa)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SMA (426470.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (36385.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (44120.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (344.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (35163.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (27337.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (13.23 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30217.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (27992.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (30638.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (39788.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (28183.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (34989.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (24800.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (14158.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (8932.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III (10945.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (8556.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (13.23 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (11531.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (11853.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (11520.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (40580.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (9099.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (11663.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (8050.00 Siswa)					
	Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi (2.00 Angka)					
	Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan (570.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan (5.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I (76.68 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II (30.57 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III (72.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV (73.70 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX (24.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V (69.37 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI (85.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII (50.28 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (78.40 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X (66.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI (82.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII (75.30 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (75.26 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.626.002.987.000	521.991.668.000	-	-	2.147.994.655.000
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I (90.90 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II (76.84 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III (76.06 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV (25.85 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX (54.60 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V (94.23 %)					
	APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI (80.17 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII (72.84 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII (77.25 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X (78.06 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI (88.14 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII (81.40 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII (88.26 %)					
	Persentase angka putus sekolah SMK (0.02 %)					
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK (65.00 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I (1.70 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II (1.00 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III (2.89 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV (1.50 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX (3.24 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V (1.93 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI (93.00 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII (2.75 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII (2.30 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X (32.14 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI (4.84 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII (2.08 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII (2.53 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMK (58.82 %)					
	Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (20.00 %)					
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi (84.10 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I (0.95 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II (40.41 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III (69.90 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV (71.25 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX (79.20 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V (78.90 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI (93.00 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII (85.60 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII (76.13 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X (85.17 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI (48.73 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII (83.00 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII (79.50 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi (20.00 %)					
	Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum (53.49 %)					
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK (0.60 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	-	14.572.000.000	-	-	14.572.000.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	-	18.895.500.000	-	-	18.895.500.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I (17.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III (15.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX (5.70 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (104.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (109.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (111.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (146.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (147.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (154.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (8.00 Unit)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (681200.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (456.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (54427.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30843.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (29182.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (41457.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (60855.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (90481.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (54637.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (93058.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (46700.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (9079.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (11634.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (10645.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (22630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (19630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (92137.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (16406.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (31020.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (14040.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I (91.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II (41.11 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III (90.15 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX (88.43 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V (88.09 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI (89.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII (64.18 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (89.60 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X (88.98 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI (84.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII (91.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (84.77 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	-	7.873.300.000	-	-	7.873.300.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I (17.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX (5.70 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (104.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (109.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (111.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (146.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (147.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (154.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (8.00 Unit)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (456.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (54427.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30843.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (29182.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (41457.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (60855.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (90481.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (54637.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (93058.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (46700.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (9079.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (11634.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (10645.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (22630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (19630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (92137.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (16406.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (31020.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (14040.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I (91.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II (41.11 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III (90.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX (88.43 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V (88.09 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI (89.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII (64.18 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (89.60 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X (88.98 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI (84.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII (91.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (84.77 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	2.203.000.000	-	-	2.203.000.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	1.177.200.000	-	-	1.177.200.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.200.000.000	6.519.500.000	-	-	7.719.500.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I (17.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX (5.70 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (104.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (109.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (111.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (146.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (147.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (154.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (8.00 Unit)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (456.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (54427.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30843.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (41457.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (60855.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (90481.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (54637.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (93058.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (46700.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (9079.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (11634.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (10645.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (19630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (92137.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (16406.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (31020.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (14040.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I (91.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II (41.11 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III (90.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX (88.43 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V (88.09 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII (64.18 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (89.60 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X (88.98 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI (84.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII (91.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (84.77 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I (17.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III (15.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX (5.70 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (104.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (109.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (111.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (146.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (147.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (154.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (8.00 Unit)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (456.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (54427.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30843.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (29182.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (41457.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (60855.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (90481.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (54637.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (93058.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (46700.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (9079.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (11634.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (10645.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (22630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (19630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (92137.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (16406.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (31020.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (14040.00 Siswa)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I (91.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II (41.11 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III (90.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX (88.43 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V (88.09 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI (89.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII (64.18 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (89.60 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X (88.98 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI (84.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII (91.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (84.77 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	1.163.400.000	-	-	-	1.163.400.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I (17.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX (5.70 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII (8.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (104.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (109.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (111.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (146.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (147.00 Unit)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (154.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (8.00 Unit)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (456.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (54427.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30843.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (29182.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (41457.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (60855.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (90481.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (54637.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (93058.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (46700.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (9079.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (11634.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (10645.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (22630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (19630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (92137.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (16406.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (31020.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (14040.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I (91.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II (41.11 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III (90.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX (88.43 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V (88.09 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI (89.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII (64.18 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (89.60 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X (88.98 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI (84.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII (91.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (84.77 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	-	14.563.643.000	-	-	14.563.643.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I (17.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX (5.70 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (104.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (109.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (111.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (146.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (147.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (154.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (8.00 Unit)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (456.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (54427.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30843.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (29182.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (41457.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (60855.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (90481.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (54637.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (93058.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (46700.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (9079.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (11634.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (10645.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (22630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (19630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (92137.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (16406.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (31020.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (14040.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I (91.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II (41.11 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III (90.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX (88.43 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V (88.09 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI (89.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII (64.18 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (89.60 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X (88.98 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI (84.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII (91.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (84.77 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	7.537.950.000	-	-	-	7.537.950.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	255.650.000.000	-	-	255.650.000.000
	Jumlah Guru SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (9000.00 Angka)					
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (319.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	7.000.000.000	-	-	-	7.000.000.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	-	400.000.000	-	-	400.000.000
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I (17.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX (5.70 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII (8.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (104.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (109.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (111.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (146.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (147.00 Unit)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (154.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (8.00 Unit)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (456.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (54427.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30843.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (29182.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (41457.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (60855.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (90481.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (54637.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (93058.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (46700.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (9079.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (11634.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (10645.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (22630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (19630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (92137.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (16406.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (31020.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (14040.00 Siswa)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I (91.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II (41.11 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III (90.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX (88.43 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V (88.09 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI (89.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII (64.18 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (89.60 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X (88.98 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI (84.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII (91.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (84.77 %)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.145.000.000	-	-	-	4.145.000.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I (17.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX (5.70 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (104.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (109.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (111.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (146.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (147.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (154.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (8.00 Unit)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (456.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (54427.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30843.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (29182.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (41457.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (60855.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (90481.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (54637.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (93058.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (46700.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (9079.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (11634.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (10645.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (22630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (19630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (92137.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (16406.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (31020.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (14040.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I (91.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II (41.11 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III (90.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX (88.43 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V (88.09 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI (89.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII (64.18 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (89.60 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X (88.98 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI (84.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII (91.50 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (84.77 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3.200.000.000	-	-	-	3.200.000.000
	Jumlah Guru SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (9000.00 Angka)					
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang bersertifikat kompetensi (955.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (319.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	430.344.912.000	240.050.000	-	-	430.584.962.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I (17.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III (15.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX (5.70 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (104.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (109.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (111.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (146.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (147.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (154.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (8.00 Unit)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (681200.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (456.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (54427.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30843.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (29182.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (41457.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (60855.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (90481.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (54637.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (93058.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (46700.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (9079.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (11634.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (10645.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (22630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (19630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (92137.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (16406.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (31020.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (14040.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I (91.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II (41.11 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III (90.15 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX (88.43 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V (88.09 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI (89.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII (64.18 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (89.60 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X (88.98 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI (84.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII (91.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (84.77 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1.144.982.886.000	173.213.225.000	-	-	1.318.196.111.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	575.000.000	-	-	-	575.000.000
	Jumlah Guru SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (9000.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (319.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Jumlah Guru SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (9000.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (319.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	515.000.000	-	-	-	515.000.000
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I (17.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX (5.70 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (8.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (104.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (109.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (111.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (146.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (147.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (154.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (8.00 Unit)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (456.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (54427.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30843.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (29182.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (41457.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (60855.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (90481.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (54637.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (93058.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (46700.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (9079.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (11634.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (10645.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (22630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (19630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (92137.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (16406.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (31020.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (14040.00 Siswa)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I (91.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II (41.11 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III (90.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX (88.43 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V (88.09 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI (89.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII (64.18 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (89.60 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X (88.98 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI (84.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII (91.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (84.77 %)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	5.100.000.000	-	-	-	5.100.000.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.812.120.000	-	-	-	5.812.120.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I (17.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX (5.70 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (104.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (109.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (111.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (146.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (147.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (154.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (8.00 Unit)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (456.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (54427.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30843.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (29182.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (41457.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (60855.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (90481.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (54637.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (93058.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (46700.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (9079.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (11634.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (10645.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (22630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (19630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (92137.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (16406.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (31020.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (14040.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I (91.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II (41.11 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III (90.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX (88.43 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V (88.09 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI (89.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII (64.18 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (89.60 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X (88.98 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI (84.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII (91.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (84.77 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	800.000.000	-	-	-	800.000.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I (17.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX (5.70 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (104.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (109.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (111.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (146.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (147.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (154.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (8.00 Unit)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (456.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (54427.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30843.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (29182.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (41457.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (60855.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (90481.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (54637.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (93058.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (46700.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (9079.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (11634.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (10645.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (22630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (19630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (92137.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (16406.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (31020.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (14040.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I (91.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II (41.11 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III (90.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX (88.43 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V (88.09 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI (89.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII (64.18 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (89.60 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X (88.98 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI (84.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII (91.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (84.77 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	25.056.750.000	-	-	25.056.750.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	10.610.003.000	1.627.500.000	-	-	12.237.503.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I (17.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX (5.70 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (104.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (109.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (111.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (146.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (147.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (154.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (8.00 Unit)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (456.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (54427.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30843.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (29182.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (41457.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (60855.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (90481.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (54637.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (93058.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (46700.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (9079.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (11634.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (10645.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (22630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (19630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (92137.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (16406.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (31020.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (14040.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I (91.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II (41.11 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III (90.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX (88.43 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V (88.09 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI (89.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII (64.18 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (89.60 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X (88.98 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI (84.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII (91.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (84.77 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.967.000.000	-	-	-	1.967.000.000
	Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK (71.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional (2256.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I (17.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX (5.70 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI (21.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (8.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (104.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (109.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (111.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (146.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (147.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (15.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (154.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (8.00 Unit)					
	Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin (57257.00 Angka)					
	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK (1276225.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (456.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III (54427.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (30843.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (29182.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (41457.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (60855.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (90481.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (54637.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (93058.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (46700.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (9079.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (681200.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (11634.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (91.09 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (10645.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (22630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (10507.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (19630.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (92137.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (16406.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (31020.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (14040.00 Siswa)					
	Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi (1547.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan (213.00 Angka)					
	Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK (3.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I (91.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II (41.11 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III (90.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX (88.43 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V (88.09 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI (89.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII (64.18 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (89.60 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X (88.98 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI (84.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII (91.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (84.77 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	199.716.000	-	-	-	199.716.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang bersertifikat kompetensi (955.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	113.277.497.000	45.722.780.000	-	-	159.000.277.000
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I (90.90 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II (76.84 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III (76.06 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV (25.85 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX (54.60 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V (94.23 %)					
	APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI (80.17 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII (72.84 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII (77.25 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X (78.06 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI (88.14 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII (81.40 %)					
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII (88.26 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase angka putus sekolah SLB (3.20 %)					
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB (13.16 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SLB (68.18 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I (1.70 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II (1.00 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III (2.89 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV (1.50 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX (3.24 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V (1.93 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI (93.00 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII (2.75 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII (2.30 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X (32.14 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI (4.84 %)					
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII (2.08 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII (2.53 %)					
	Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (20.00 %)					
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi (84.10 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I (0.95 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II (40.41 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III (69.90 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV (71.25 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX (79.20 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V (78.90 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI (93.00 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII (85.60 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII (76.13 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X (85.17 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI (48.73 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII (83.00 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII (79.50 %)					
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi (20.00 %)					
	Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum (10.00 %)					
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB (15.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-	4.500.000.000	-	-	4.500.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	1.150.346.000	-	-	1.150.346.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III (2.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX (2.82 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI (4.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (11.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (14.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (32.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (4.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (1749.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (1930.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (52.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (1013.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (2.01 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (314.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (886.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (518.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (1505.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (1622.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (644.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (1700.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (1410.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (375.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (4704.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (136.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (177.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (2.01 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (100.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (175.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (448.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (446.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (1721.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (165.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (566.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (325.00 Siswa)					
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I (90.08 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II (75.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III (86.69 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX (83.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V (92.52 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI (88.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII (188.45 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (81.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X (89.99 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI (83.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII (93.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (81.12 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	1.199.915.000	-	-	1.199.915.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.000.000	9.126.665.000	-	-	9.134.665.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III (2.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX (2.82 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI (4.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (11.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (14.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (32.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (4.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (1749.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (1930.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (52.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (1013.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (2.01 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (314.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (886.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (518.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (1505.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (1622.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (644.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (1700.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (1410.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (375.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (4704.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (136.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (177.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (2.01 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (100.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (175.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (448.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (446.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (1721.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (165.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (566.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (325.00 Siswa)					
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I (90.08 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II (75.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III (86.69 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX (83.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V (92.52 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI (88.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII (188.45 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (81.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X (89.99 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI (83.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII (93.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (81.12 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	405.000.000	-	-	-	405.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	1.320.000.000	-	-	1.320.000.000
	Jumlah Guru SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (550.00 Angka)					
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (38.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	-	200.000.000	-	-	200.000.000
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III (2.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX (2.82 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI (7.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI (4.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (11.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (14.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (32.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (4.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (1749.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (1930.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (52.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (1013.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (2.01 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (314.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (886.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (518.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (1505.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (1622.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (644.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (1700.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (1410.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (375.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (4704.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (136.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (177.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (2.01 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (100.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (175.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (448.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (446.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (1721.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (165.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (566.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (325.00 Siswa)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I (90.08 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II (75.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III (86.69 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX (83.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V (92.52 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI (88.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII (188.45 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (81.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X (89.99 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI (83.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII (93.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (81.12 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.640.000.000	-	-	-	2.640.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III (2.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX (2.82 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI (4.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (11.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (14.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (32.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (4.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (1749.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (1930.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (52.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (1013.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (2.01 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (314.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (886.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (518.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (1505.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (1622.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (644.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (1700.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (1410.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (375.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (4704.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (136.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (177.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (2.01 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (100.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (175.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (448.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (446.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (1721.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (165.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (566.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (325.00 Siswa)					
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I (90.08 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II (75.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III (86.69 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX (83.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V (92.52 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI (88.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII (188.45 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (81.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X (89.99 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI (83.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII (93.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (81.12 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	200.000.000	-	-	-	200.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Guru SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (550.00 Angka)					
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang bersertifikat kompetensi (725.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (38.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	28.984.931.000	-	-	-	28.984.931.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III (2.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX (2.82 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI (4.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (11.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (14.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (32.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (4.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (1749.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (1930.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (52.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (1013.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (2.01 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (314.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (886.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (518.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (1505.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (1622.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (644.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (1700.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (1410.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (375.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (4704.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (136.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (177.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (2.01 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (100.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (175.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (448.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (446.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (1721.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (165.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (566.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (325.00 Siswa)					
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I (90.08 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II (75.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III (86.69 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX (83.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V (92.52 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI (88.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII (188.45 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (81.07 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X (89.99 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI (83.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII (93.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (81.12 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	75.417.686.000	8.011.899.000	-	-	83.429.585.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150.000.000	-	-	-	150.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Guru SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (550.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (38.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Jumlah Guru SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (550.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (38.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	776.880.000	-	-	-	776.880.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	170.000.000	-	-	-	170.000.000
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III (2.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX (2.82 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI (4.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (11.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (14.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (32.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (4.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (1749.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (1930.00 Siswa)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (52.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (1013.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (2.01 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (314.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (886.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (518.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (1505.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (1622.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (644.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (1700.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (1410.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (375.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (4704.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (136.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (177.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (2.01 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (100.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (175.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (448.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (446.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (1721.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (165.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (566.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (325.00 Siswa)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I (90.08 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II (75.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III (86.69 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX (83.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V (92.52 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI (88.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII (188.45 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (81.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X (89.99 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI (83.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII (93.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (81.12 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	160.000.000	1.160.000.000	-	-	1.320.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III (2.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX (2.82 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI (4.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (11.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (14.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (32.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (4.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (1749.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (1930.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (52.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (1013.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (2.01 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (314.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (886.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (518.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (1505.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (1622.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (644.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (1700.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (1410.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (375.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (4704.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (136.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (177.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (2.01 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (100.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (175.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (448.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (446.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (1721.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (165.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (566.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (325.00 Siswa)					
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I (90.08 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II (75.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III (86.69 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX (83.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V (92.52 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI (88.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII (188.45 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (81.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X (89.99 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI (83.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII (93.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (81.12 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	13.090.000.000	-	-	13.090.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	645.000.000	-	-	-	645.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III (2.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX (2.82 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X (3.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI (4.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (11.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (14.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (32.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (4.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (1749.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (1930.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (52.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (1013.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (2.01 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (314.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (886.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (518.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (1505.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (1622.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (644.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (1700.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (1410.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (375.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (4704.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (136.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (177.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (2.01 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (100.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (175.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (448.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (446.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (1721.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (165.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (566.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (325.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I (90.08 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II (75.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III (86.69 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX (83.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V (92.52 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI (88.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII (188.45 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (81.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X (89.99 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI (83.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII (93.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (81.12 %)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	-	326.000.000	-	-	326.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	1.420.000.000	4.986.955.000	-	-	6.406.955.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III (2.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX (2.82 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI (4.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (11.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (14.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (32.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (4.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (1749.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (1930.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (52.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (1013.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (2.01 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (314.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (886.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (518.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (1505.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (1622.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (644.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (1700.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (1410.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (375.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (4704.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (136.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (177.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (2.01 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (100.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (175.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (448.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (446.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (1721.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (165.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (566.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (325.00 Siswa)					
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I (90.08 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II (75.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III (86.69 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX (83.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V (92.52 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI (88.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII (188.45 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (81.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X (89.99 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI (83.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII (93.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (81.12 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	651.000.000	-	-	651.000.000
	Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB (15.00 Angka)					
	Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB (6.00 Kegiatan)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II (1.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III (2.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV (3.00 Siswa)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX (2.82 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII (7.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII (6.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X (3.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI (4.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII (5.00 Angka)					
	Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII (3.00 Angka)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (11.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (14.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (2.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (32.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (4.00 Unit)					
	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi (5.00 Unit)					
	Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin (4481.00 Angka)					
	Jumlah siswa penerima dana BOS SLB (21733.00 Angka)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (1749.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I (1930.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II (52.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV (1013.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX (2.01 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V (314.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI (886.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII (518.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII (1505.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X (1622.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI (644.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII (1700.00 Siswa)					
	Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII (1410.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (375.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I (4704.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II (136.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV (177.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX (2.01 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V (100.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI (175.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII (448.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII (446.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X (1721.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI (165.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII (566.00 Siswa)					
	Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII (325.00 Siswa)					
	Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan (20.00 Angka)					
	Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB (2.00 Angka)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I (90.08 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II (75.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III (86.69 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX (83.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V (92.52 %)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI (88.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII (188.45 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII (81.07 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X (89.99 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI (83.96 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII (93.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII (81.12 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**896.000.000**	**-**	**-**	**-**	**896.000.000**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	711.000.000	-	-	-	711.000.000
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I (89.56 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II (81.72 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III (83.77 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV (82.27 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX (86.35 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V (88.84 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI (86.99 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII (89.33 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII (89.53 Angka)					
	Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X (82.71 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI (83.77 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII (85.80 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII (86.56 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	711.000.000	-	-	-	711.000.000
	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I (45.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II (55.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III (45.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV (100.00 %)					
	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX (66.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V (66.00 Unit)					
	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI (33.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII (45.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII (33.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X (61.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI (41.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII (50.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII (56.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I (126.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II (107.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III (70.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX (154.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V (116.00 Unit)					
	Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI (26.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII (70.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII (20.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X (146.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI (112.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII (110.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII (80.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	185.000.000	-	-	-	185.000.000
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I (89.56 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II (81.72 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III (83.77 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV (82.27 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX (86.35 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V (88.84 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI (86.99 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII (89.33 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII (89.53 Angka)					
	Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X (82.71 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI (83.77 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII (85.80 Angka)					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII (86.56 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	185.000.000	-	-	-	185.000.000
	Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I (8.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II (2.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III (7.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV (100.00 %)					
	Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX (14.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V (32.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI (4.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII (8.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII (14.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X (8.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI (4.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII (4.00 Angka)					
	Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII (8.00 Angka)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**1.250.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.250.000.000**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.250.000.000	-	-	-	1.250.000.000
	Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri) (78.20 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1.250.000.000	-	-	-	1.250.000.000
	Jumlah kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB (24132.00 Orang)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**1.120.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.120.000.000**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	925.000.000	-	-	-	925.000.000
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA (16.00 %)					
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK (94.29 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I (3.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III (100.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV (15.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX (50.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V (25.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI (100.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII (100.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII (100.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X (35.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI (4.76 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII (100.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas (15.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan (75.00 Dokumen)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	525.000.000	-	-	-	525.000.000
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (2.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN II (3.00 Angka)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN III (2.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN IX (66.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN V (1.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VI (1.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VII (2.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VIII (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN X (1.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XI (1.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XII (2.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XIII (2.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (2.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX (154.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN II (3.00 Angka)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN III (2.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN V (1.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VI (1.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VII (2.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VIII (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XI (1.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XII (2.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XIII (2.00 Dokumen)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	195.000.000	-	-	-	195.000.000
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus (100.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I (3.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II (100.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III (100.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV (15.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX (50.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V (25.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII (100.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII (100.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X (35.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI (4.76 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII (100.00 %)					
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII (100.00 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (5.00 Dokumen)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	125.000.000	-	-	-	125.000.000
	Jumlah kajian perijinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (1.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN I (2.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN II (1.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN III (1.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN IX (14.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VI (1.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VII (2.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VIII (2.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XI (1.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XII (1.00 Dokumen)					
	Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XIII (1.00 Dokumen)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**7.580.000.000**	**-**	**-**	**-**	**7.580.000.000**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.200.000.000	-	-	-	3.200.000.000
	Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan (52.38 %)					
	Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan (26.16 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.700.000.000	-	-	-	2.700.000.000
	Persentase OPK yang Berdaya (25.35 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase SDM Kebudayaan berkompeten (6.46 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Persentase OPK yang Berdaya (25.35 %)					
	Persentase SDM Kebudayaan berkompeten (6.46 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	4.380.000.000	-	-	-	4.380.000.000
	Persentase cakupan pelestarian seni (100.00 %)					
	Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional (20.78 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	4.380.000.000	-	-	-	4.380.000.000
	Jumlah kelompok seni yang difasilitasi (275.00 Kelompok)					
	Persentase partisipasi Pemanfaatan OPK Peringkat Nasional (69.05 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**22.266.000.000**	**-**	**-**	**-**	**22.266.000.000**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22.266.000.000	-	-	-	22.266.000.000
	Tingkat partisipasi seni tradisi (11.10 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	22.266.000.000	-	-	-	22.266.000.000
	Persentase Lembaga Seni aktif berkarya (26.74 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**955.000.000**	**-**	**-**	**-**	**955.000.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	955.000.000	-	-	-	955.000.000
	Persentase akses literasi sejarah (53.10 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	605.000.000	-	-	-	605.000.000
	Persentase Peningkatan Karya Literasi sejarah (tokoh sejarah, peristiwa bersejarah, toponimi, sejarah yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia) (53.10 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Persentase Peningkatan Karya Literasi sejarah (tokoh sejarah, peristiwa bersejarah, toponimi, sejarah yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia) (53.10 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**1.325.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.325.000.000**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase cagar budaya berperingkat nasional (13.15 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase Cagar Budaya Berperingkat Provinsi (8.77 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1.025.000.000	-	-	-	1.025.000.000
	Persentase cagar budaya berperingkat nasional (13.15 %)					
	Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya (26.73 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	160.000.000	-	-	-	160.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase cagar budaya layak uji peringkat (8.55 %)					
	Persentase partisipasi pemanfaatan cagar budaya (93.23 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	165.000.000	-	-	-	165.000.000
	Persentase cagar budaya layak uji peringkat (8.55 %)					
	Persentase partisipasi pemanfaatan cagar budaya (93.23 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	700.000.000	-	-	-	700.000.000
	Persentase cagar budaya layak uji peringkat (8.55 %)					
	Persentase partisipasi pemanfaatan cagar budaya (93.23 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**3.750.000.000**	**-**	**-**	**-**	**3.750.000.000**
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	3.750.000.000	-	-	-	3.750.000.000
	Nilai survey kepuasan pengunjung museum (89.90 %)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1.200.000.000	-	-	-	1.200.000.000
	Jumlah pengunjung museum (57500.00 Orang)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000
	Jumlah pengunjung museum (57500.00 Orang)					
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	550.000.000	-	-	-	550.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah pengunjung museum (57500.00 Orang)					
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.813.925.240.000**	**299.332.975.000**	**-**	**-**	**3.113.258.215.000**
1.02.1.02.0.00.0.00.01	**Dinas Kesehatan**	**2.813.925.240.000**	**299.332.975.000**	**-**	**-**	**3.113.258.215.000**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.428.899.990.000**	**275.219.500.000**	**-**	**-**	**2.704.119.490.000**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	789.442.000	-	-	-	789.442.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (75.00 %)					
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (81.00 %)					
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (90.00 %)					
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (91.11 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	616.000.000	-	-	-	616.000.000
	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (1.00 %)					
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.442.000	-	-	-	173.442.000
	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (1.00 %)					
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (95.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	680.229.859.000	-	-	-	680.229.859.000
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (50.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	668.431.859.000	-	-	-	668.431.859.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (14.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (24.00 Dokumen)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.700.000.000	-	-	-	11.700.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.000.000	-	-	-	48.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	417.200.000	-	-	-	417.200.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	167.200.000	-	-	-	167.200.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.462.736.000	126.100.000	-	-	3.588.836.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140.000.000	-	-	-	140.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	320.950.000	126.100.000	-	-	447.050.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	94.850.000	-	-	-	94.850.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	451.000.000	-	-	-	451.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	286.443.000	-	-	-	286.443.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	198.000.000	-	-	-	198.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.711.093.000	-	-	-	1.711.093.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	260.400.000	-	-	-	260.400.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000	3.093.400.000	-	-	3.138.400.000
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	128.400.000	-	-	148.400.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (15.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang disediakan (4.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	25.000.000	350.000.000	-	-	375.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang disediakan (4.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	2.615.000.000	-	-	2.615.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang disediakan (4.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.275.392.000	-	-	-	20.275.392.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	136.400.000	-	-	-	136.400.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.786.778.000	-	-	-	6.786.778.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.700.000	-	-	-	91.700.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.260.514.000	-	-	-	13.260.514.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.330.361.000	-	-	-	5.330.361.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.013.975.000	-	-	-	1.013.975.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	761.500.000	-	-	-	761.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	275.000.000	-	-	-	275.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.552.886.000	-	-	-	2.552.886.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	727.000.000	-	-	-	727.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.718.250.000.000	272.000.000.000	-	-	1.990.250.000.000
	Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo (43.00 %)					
	Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (45.60 %)					
	Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta (33.00 %)					
	Cost Recovery Rate Total RS Khusus Mata (30.00 %)					
	Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi (82.00 %)					
	Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo (40.00 %)					
	Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (83.00 %)					
	Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo (49.91 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.718.250.000.000	272.000.000.000	-	-	1.990.250.000.000
	Cost Recovery Rate (CRR) Parsial (97.00 %)					
	Cost Recovery Rate Parsial (100.00 %)					
	Cost Recovery Rate Parsial (71.60 %)					
	Cost Recovery Rate Parsial (89.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Cost Recovery Rate Parsial (95.00 %)					
	Cost Recovery Rate Parsial (97.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**380.493.705.000**	**24.113.475.000**	**-**	**-**	**404.607.180.000**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	18.503.206.000	24.043.475.000	-	-	42.546.681.000
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan (68.50 %)					
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin (85.00 %)					
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa (100.00 %)					
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten (100.00 %)					
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang (100.00 %)					
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati (100.00 %)					
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang (100.00 %)					
	Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM (85.00 %)					
	Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta (95.00 %)					
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta (95.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RS Khusus Mata (50.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	917.800.000	-	-	-	917.800.000
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
	Persentase faskes lainnya yang dipenuhi Fasilitas Sapras, alkes , SDM sesuai dengan ketentuan (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di BKIM (85.00 %)					
	Persentase RS yang dipenuhi Fasilitas Sapras, alkes , SDM sesuai dengan ketentuan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	24.043.475.000	-	-	24.043.475.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan alat kedokteran/kesehatan pelayanan (85.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (95.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (97.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (97.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (50.00 %)					
	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan alat kedokteran (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di BKIM (85.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarpras dan alkes untuk UKP rujukan dan UKM, UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penyediaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
	Persentase penyediaan penunjang layanan keperawatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
	Persentase penyediaan telemedicine RS (80.00 %)					
	Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	624.150.000	-	-	-	624.150.000
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (95.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (97.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (97.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
	Persentase penyediaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penyediaan penunjang layanan keperawatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	439.400.000	-	-	-	439.400.000
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di BKIM (85.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Vaksin (85.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	16.471.856.000	-	-	-	16.471.856.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (95.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (97.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (97.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (50.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di BKIM (85.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarpras dan alkes untuk UKP rujukan dan UKM, UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penyediaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
	Persentase penyediaan penunjang layanan keperawatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Vaksin (85.00 %)					
	Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	357.457.260.000	-	-	-	357.457.260.000
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan (68.50 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular (74.30 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa (74.30 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita (40.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting (57.14 %)					
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja (42.85 %)					
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja (42.86 %)					
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja (57.14 %)					
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja (42.86 %)					
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja (57.14 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia (74.28 %)					
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa (85.71 %)					
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten (42.86 %)					
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang (71.42 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (42.86 %)					
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang (71.42 %)					
	Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM (85.00 %)					
	Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RS Khusus Mata (50.00 %)					
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo (100.00 %)					
	Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	517.150.000	-	-	-	517.150.000
	Jumlah kab/kota yang difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS) (3.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (3.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS) (3.00 Kabupaten/Kota)					
	Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap (99.00 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM dan Keswa (74.30 %)					
	Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penangulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM (100.00 %)					
	Persentase kab/kota yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan PM dengan standar capaian HIV dan TB (40.00 %)					
	Persentase kejadian bencana yang difasilitasi penanganan krisis kesehatan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	278.550.000	-	-	-	278.550.000
	Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap (99.00 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM dan Keswa (74.30 %)					
	Persentase kab/kota yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan PM dengan standar capaian HIV dan TB (40.00 %)					
	Persentase kejadian bencana yang difasilitasi penanganan krisis kesehatan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	476.885.000	-	-	-	476.885.000
	Prosentase Kab Kota dengan Balita Yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya minimal 70% (80.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Prosentase Kab/Kota dengan Kesehatan Kerja dan olahraga yang baik (57.14 %)					
	Prosentase kab kota dengan kesling yang baik (62.86 %)					
	Prosentase Kab Kota Denganpelayanan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 70% (74.27 %)					
	Prosentase Kab/Kota dengan pengukuran Balita Usia 0-59 bulan berdasarkan surveilans gizi minimal 30% (85.71 %)					
	Prosentase kab kota dengan Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 70% (60.00 %)					
	Prosentase Kabupaten Kota dengan pelayanan kehamilan sesuai standar (K6) minimal 70% (71.42 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	400.195.000	-	-	-	400.195.000
	Jumlah kab/kota yang difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS) (3.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (3.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS) (3.00 Kabupaten/Kota)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM (100.00 %)					
	Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penangulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM (100.00 %)					
	Prosentase Kab Kota dengan Balita Yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya minimal 70% (80.00 %)					
	Prosentase Kab/Kota dengan Kesehatan Kerja dan olahraga yang baik (57.14 %)					
	Prosentase kab kota dengan kesling yang baik (62.86 %)					
	Prosentase Kab Kota Denganpelayanan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 70% (74.27 %)					
	Prosentase Kab/Kota dengan pengukuran Balita Usia 0-59 bulan berdasarkan surveilans gizi minimal 30% (85.71 %)					
	Prosentase kab kota dengan Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 70% (60.00 %)					
	Prosentase Kabupaten Kota dengan pelayanan kehamilan sesuai standar (K6) minimal 70% (71.42 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	50.242.000	-	-	-	50.242.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Prosentase Kab Kota dengan Balita Yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya minimal 70% (80.00 %)					
	Prosentase Kab/Kota dengan Kesehatan Kerja dan olahraga yang baik (57.14 %)					
	Prosentase kab kota dengan kesling yang baik (62.86 %)					
	Prosentase Kab Kota Denganpelayanan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 70% (74.27 %)					
	Prosentase Kab/Kota dengan pengukuran Balita Usia 0-59 bulan berdasarkan surveilans gizi minimal 30% (85.71 %)					
	Prosentase kab kota dengan Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 70% (60.00 %)					
	Prosentase Kabupaten Kota dengan pelayanan kehamilan sesuai standar (K6) minimal 70% (71.42 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.888.000.000	-	-	-	1.888.000.000
	Prosentase Kab Kota dengan Balita Yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya minimal 70% (80.00 %)					
	Prosentase Kab/Kota dengan Kesehatan Kerja dan olahraga yang baik (57.14 %)					
	Prosentase kab kota dengan kesling yang baik (62.86 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Prosentase Kab Kota Denganpelayanan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 70% (74.27 %)					
	Prosentase Kab/Kota dengan pengukuran Balita Usia 0-59 bulan berdasarkan surveilans gizi minimal 30% (85.71 %)					
	Prosentase kab kota dengan Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 70% (60.00 %)					
	Prosentase Kabupaten Kota dengan pelayanan kehamilan sesuai standar (K6) minimal 70% (71.42 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Prosentase Kab Kota dengan Balita Yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya minimal 70% (80.00 %)					
	Prosentase Kab/Kota dengan Kesehatan Kerja dan olahraga yang baik (57.14 %)					
	Prosentase kab kota dengan kesling yang baik (62.86 %)					
	Prosentase Kab Kota Denganpelayanan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 70% (74.27 %)					
	Prosentase Kab/Kota dengan pengukuran Balita Usia 0-59 bulan berdasarkan surveilans gizi minimal 30% (85.71 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Prosentase kab kota dengan Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 70% (60.00 %)					
	Prosentase Kabupaten Kota dengan pelayanan kehamilan sesuai standar (K6) minimal 70% (71.42 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Prosentase Kab Kota dengan Balita Yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya minimal 70% (80.00 %)					
	Prosentase Kab/Kota dengan Kesehatan Kerja dan olahraga yang baik (57.14 %)					
	Prosentase kab kota dengan kesling yang baik (62.86 %)					
	Prosentase Kab Kota Denganpelayanan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 70% (74.27 %)					
	Prosentase Kab/Kota dengan pengukuran Balita Usia 0-59 bulan berdasarkan surveilans gizi minimal 30% (85.71 %)					
	Prosentase kab kota dengan Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 70% (60.00 %)					
	Prosentase Kabupaten Kota dengan pelayanan kehamilan sesuai standar (K6) minimal 70% (71.42 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	21.410.000	-	-	-	21.410.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Lainnya sesuai Standar (99.49 %)					
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Ketentuan (67.61 %)					
	Presentase Faskes rujukan Sesuai Ketentuan (68.50 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.058.535.000	-	-	-	2.058.535.000
	Jumlah kab/kota yang difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS) (3.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (3.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS) (3.00 Kabupaten/Kota)					
	Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap (99.00 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM dan Keswa (74.30 %)					
	Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penangulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM (100.00 %)					
	Persentase kab/kota yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan PM dengan standar capaian HIV dan TB (40.00 %)					
	Persentase kejadian bencana yang difasilitasi penanganan krisis kesehatan (100.00 %)					
	Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan (100.00 %)					
	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pelayanan Kesehatan di BKIM Provinsi Jawa Tengah sesuai standar (96.00 %)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penyediaan layanan dan alkes untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (40.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap (99.00 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM dan Keswa (74.30 %)					
	Persentase kab/kota yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan PM dengan standar capaian HIV dan TB (40.00 %)					
	Persentase kejadian bencana yang difasilitasi penanganan krisis kesehatan (100.00 %)					
	Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan (100.00 %)					
	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pengelolaan Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) (100.00 %)					
	Persentase Pengelolaan Layanan Kesehatan Orang dengan Penyalahguna NAPZA (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	347.877.080.000	-	-	-	347.877.080.000
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Lainnya sesuai Standar (99.49 %)					
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Ketentuan (67.61 %)					
	Presentase Faskes rujukan Sesuai Ketentuan (68.50 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	666.450.000	-	-	-	666.450.000
	Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap (99.00 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM dan Keswa (74.30 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kab/kota yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan PM dengan standar capaian HIV dan TB (40.00 %)					
	Persentase kejadian bencana yang difasilitasi penanganan krisis kesehatan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Lainnya sesuai Standar (99.49 %)					
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Ketentuan (67.61 %)					
	Presentase Faskes rujukan Sesuai Ketentuan (68.50 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.629.000.000	-	-	-	1.629.000.000
	Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan (100.00 %)					
	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Pengelolaan Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) (100.00 %)					
	Persentase Pengelolaan Layanan Kesehatan Orang dengan Penyalahguna NAPZA (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan dan alkes untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (40.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	493.763.000	-	-	-	493.763.000
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Lainnya sesuai Standar (99.49 %)					
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Ketentuan (67.61 %)					
	Presentase Faskes rujukan Sesuai Ketentuan (68.50 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	330.000.000	70.000.000	-	-	400.000.000
	Persentase pemanfaatan informasi kesehatan (85.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	330.000.000	70.000.000	-	-	400.000.000
	Persentase Ketersediaan Informasi Kesehatan Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	4.203.239.000	-	-	-	4.203.239.000
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan (68.50 %)					
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa (85.71 %)					
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten (100.00 %)					
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang (100.00 %)					
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati (100.00 %)					
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang (100.00 %)					
	Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM (85.00 %)					
	Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RS Khusus Mata (50.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Prosentase RS kelas B dan faslitas Pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4.003.239.000	-	-	-	4.003.239.000
	Angka Kepuasan Pasien (86.75 Angka)					
	Angka Kepuasan Pasien (88.00 Angka)					
	Angka Kepuasan Pasien di balkesmas (84.50 Angka)					
	Angka Kepuasan Pasien di Balkesmas (87.00 Angka)					
	angka kepuasan pelanggan (91.00 Angka)					
	Angka kepuasan pelanggan di BKIM (86.00 %)					
	Persentase pelaksanaan pelaporan indikator mutu RS sebagai pendukung dokumen perijinan & akreditasi RS (90.00 %)					
	Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit (40.00 %)					
	Prosentase RS kelas B dan faslitas Pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.151.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.151.000.000**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.151.000.000	-	-	-	1.151.000.000
	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan advokasi, bimbingan teknis dan evaluasi menjadi labkesmas (7.00 Kabupaten/Kota)					
	Persentase capaian SDM kesehatan yang terlatih RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (20.00 %)					
	Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya (85.00 %)					
	Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih RSUD Dr. Moewardi (30.00 %)					
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih (20.00 %)					
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. Amino Gondohutomo (20.00 %)					
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (70.00 %)					
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Surakarta (35.00 %)					
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo (35.00 %)					
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Tugurejo (33.00 %)					
	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi (98.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	651.000.000	-	-	-	651.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah diklat yang dilaksanakan (2.00 Kegiatan)					
	Jumlah diklat yang dilaksanakan (5.00 Kegiatan)					
	Jumlah jenis kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi Latsar, Diklatpim, Peningkatan Kompetensi (3.00 Kegiatan)					
	Jumlah jenis kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek, workshop, simposium (5.00 Kegiatan)					
	Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi Latsar, Diklatpim, Administrasi Dasar (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek, workshop, simposium (10.00 Kegiatan)					
	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan (5.00 Kegiatan)					
	Junlah diklat yang dilaksanakan (1.00 Kegiatan)					
	Persentase pelatihan yang sesuai standart (98.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Jumlah Labkesda Kab/Kota yang dikembangkan mutu dan ditingkatkan kompetensi SDM Kesehatannya (20.00 Kabupaten/Kota)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase SDMK yang kompeten dan bermutu (90.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**300.394.000**	**-**	**-**	**-**	**300.394.000**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	300.394.000	-	-	-	300.394.000
	Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku (80.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	300.394.000	-	-	-	300.394.000
	Presentase penerbitan pengakuan PBF Cabang & Cabang PAK (85.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**3.080.151.000**	**-**	**-**	**-**	**3.080.151.000**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2.812.151.000	-	-	-	2.812.151.000
	Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (100.00 %)					
	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo (100.00 %)					
	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Surakarta (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (100.00 %)					
	Persentase capaian kegiatan promosi di tingkat provinsi RSJD Surakarta (95.00 %)					
	Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi (85.71 %)					
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RS Khusus Mata (60.00 %)					
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Dr. Moewardi (92.00 %)					
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo (100.00 %)					
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat (42.85 %)					
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat (42.86 %)					
	Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat (57.14 %)					
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat (42.86 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat (57.14 %)					
	Persentase ketercapaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Tugurejo (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2.812.151.000	-	-	-	2.812.151.000
	Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi (12.00 Kegiatan)					
	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (8.00 Kegiatan)					
	jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan (8.00 Kegiatan)					
	Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan home care, home visit, dropping (3.00 Kegiatan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan RSTD (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah kegiatan Advokasi, Kemitraan, dan Kerjasama Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (2.00 Kegiatan)					
	Jumlah Kegiatan Advokasi, Kemitraan dan Kerjasama Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (2.00 Kegiatan)					
	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi (3.00 Kegiatan)					
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi (7.00 Kegiatan)					
	Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan (3.00 Kegiatan)					
	Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja (3.00 Kabupaten/Kota)					
	Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja (42.86 %)					
	Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja (42.86 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja (6.00 %)					
	Persentase kab/kota yang melaksanakan penggerakan Germas (85.71 %)					
	Persentase pelaksanaan advokasi pemberdayaan, kemitraan peningkatan peran serta masyarakat & lintas sektor (3.00 Kegiatan)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	268.000.000	-	-	-	268.000.000
	Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi (85.71 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	268.000.000	-	-	-	268.000.000
	Persentase Kab/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan PHBS di Jawa Tengah (25.71 %)					
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**399.210.730.000**	**79.982.148.000**	**-**	**-**	**479.192.878.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**	**227.132.504.000**	**68.370.334.000**	**-**	**-**	**295.502.838.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**102.976.433.000**	**2.271.613.000**	**-**	**-**	**105.248.046.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	840.000.000	-	-	-	840.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	520.000.000	-	-	-	520.000.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	320.000.000	-	-	-	320.000.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	75.351.549.000	-	-	-	75.351.549.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (45.00 Dokumen)*	72.898.309.000	-	-	-	72.898.309.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (45.00 Dokumen)*	2.013.240.000	-	-	-	2.013.240.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (45.00 Dokumen)*	440.000.000	-	-	-	440.000.000
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	350.000.000	-	-	-	350.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (13.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	193.000.000	-	-	-	193.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	193.000.000	-	-	-	193.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.003.199.000	-	-	-	6.003.199.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	173.704.000	-	-	-	173.704.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	670.064.000	-	-	-	670.064.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	601.114.000	-	-	-	601.114.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	415.509.000	-	-	-	415.509.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	61.500.000	-	-	-	61.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.932.308.000	-	-	-	3.932.308.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	77.000.000	-	-	-	77.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	72.000.000	-	-	-	72.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.371.613.000	-	-	1.371.613.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	378.000.000	-	-	378.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (298.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	240.000.000	-	-	240.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (298.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	753.613.000	-	-	753.613.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (298.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.150.143.000	-	-	-	14.150.143.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.482.000	-	-	-	79.482.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (26.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (50.00 Laporan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.394.800.000	-	-	-	3.394.800.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (26.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (50.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.675.861.000	-	-	-	10.675.861.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (26.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (50.00 Laporan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.088.542.000	900.000.000	-	-	6.988.542.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.808.423.000	-	-	-	2.808.423.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (132.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (155.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (35.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (41.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (58.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (65.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (70.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (74.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (98.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.050.000.000	900.000.000	-	-	2.950.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (132.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (155.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (35.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (41.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (58.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (65.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (70.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (74.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (98.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.230.119.000	-	-	-	1.230.119.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (132.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (155.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (35.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (41.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (58.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (65.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (70.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (74.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (98.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**8.919.053.000**	**8.000.000.000**	**-**	**-**	**16.919.053.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	8.919.053.000	8.000.000.000	-	-	16.919.053.000
	Persentase akses air minum jaringan perpipaan (57.82 %)					
	Persentase akses air minum layak (93.94 %)					
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.453.657.000	-	-	-	1.453.657.000
	Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota (3.50 Liter)					
	Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jiwa) (21236165.00 Orang)					
	Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (Jiwa) (34502341.00 Orang)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	642.000.000	-	-	-	642.000.000
	Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota (3.50 Liter)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jiwa) (21236165.00 Orang)					
	Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (Jiwa) (34502341.00 Orang)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	6.823.396.000	8.000.000.000	-	-	14.823.396.000
	Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota (3.50 Liter)					
	Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jiwa) (21236165.00 Orang)					
	Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (Jiwa) (34502341.00 Orang)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**674.105.000**	**-**	**-**	**-**	**674.105.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	674.105.000	-	-	-	674.105.000
	Persentase akses air limbah domestik layak (95.18 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	674.105.000	-	-	-	674.105.000
	Jumlah Penduduk yang Sudah Mempunyai Akses Air Limbah Domestik Layak Th-N (35500068.00 Orang)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**8.166.603.000**	**30.000.000.000**	**-**	**-**	**38.166.603.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	8.166.603.000	30.000.000.000	-	-	38.166.603.000
	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah (5.83 %)					
	Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis (12.23 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n (126.00 Lokasi)					
	Jumlah Lokasi Komplek BGMD yang Diberi Bantuan Teknis Pada Tahun N (60.00 Lokasi)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	180.000.000	-	-	-	180.000.000
	Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n (126.00 Lokasi)					
	Jumlah Lokasi Komplek BGMD yang Diberi Bantuan Teknis Pada Tahun N (60.00 Lokasi)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7.836.603.000	30.000.000.000	-	-	37.836.603.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n (126.00 Lokasi)					
	Jumlah Lokasi Komplek BGMD yang Diberi Bantuan Teknis Pada Tahun N (60.00 Lokasi)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**101.085.669.000**	**28.073.721.000**	**-**	**-**	**129.159.390.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	101.085.669.000	28.073.721.000	-	-	129.159.390.000
	Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan (100.00 %)					
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap (90.10 %)					
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang (90.20 %)					
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati (86.43 %)					
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan (89.44 %)					
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi (87.39 %)					
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang (91.47 %)					
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta (89.45 %)					
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal (91.57 %)					
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo (90.92 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat (45.07 %)					
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur (47.91 %)					
	Persentase panjang jalan yang dileger (77.26 %)					
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap (87.57 %)					
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang (71.44 %)					
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati (87.66 %)					
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan (86.19 %)					
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi (67.34 %)					
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang (85.47 %)					
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta (91.47 %)					
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal (77.37 %)					
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo (92.66 %)					
	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan (18.07 %)					
	Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi (73.04 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	254.033.000	93.727.000	-	-	347.760.000
	Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan (13.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan (5.00 Dokumen)					
	Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N (1402.67 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	15.294.013.000	590.000.000	-	-	15.884.013.000
	Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan (13.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan (5.00 Dokumen)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap (205.75 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang (259.58 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati (247.82 Km)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pekalongan (255.46 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi (384.14 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang (224.91 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta (415.98 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal (197.56 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo (246.92 Km)					
	Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N (1402.67 Km)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Tegal (2165.35 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap (2562.67 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang (2455.20 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati (2723.00 m)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pekalongan (3343.71 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi (3607.00 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang (2471.61 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta (4791.92 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo (2147.11 m)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.782.691.000	-	-	-	1.782.691.000
	Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Tersedia (45.00 Unit)					
	Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi (1420.00 Sertifikat)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	-	3.490.000.000	-	-	3.490.000.000
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap (205.75 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang (259.58 Km)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati (247.82 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pekalongan (255.46 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi (384.14 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang (224.91 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta (415.98 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal (197.56 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo (246.92 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat (0.50 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur (1.50 Km)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Tegal (2165.35 m)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap (2562.67 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang (2455.20 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati (2723.00 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pekalongan (3343.71 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi (3607.00 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang (2471.61 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta (4791.92 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo (2147.11 m)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	79.984.606.000	899.994.000	-	-	80.884.600.000
	Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan (13.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan (5.00 Dokumen)					
	Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Tersedia (45.00 Unit)					
	Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi (1420.00 Sertifikat)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap (205.75 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang (259.58 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati (247.82 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pekalongan (255.46 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi (384.14 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang (224.91 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta (415.98 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal (197.56 Km)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo (246.92 Km)					
	Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N (1402.67 Km)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Tegal (2165.35 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap (2562.67 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang (2455.20 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati (2723.00 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pekalongan (3343.71 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi (3607.00 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang (2471.61 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta (4791.92 m)					
	Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo (2147.11 m)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	2.536.385.000	21.000.000.000	-	-	23.536.385.000
	Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan (13.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan (5.00 Dokumen)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat (0.50 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur (1.50 Km)					
	Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N (1402.67 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	49.553.000	2.000.000.000	-	-	2.049.553.000
	Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan (13.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan (5.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N (1402.67 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.074.553.000	-	-	-	1.074.553.000
	Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan (13.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan (5.00 Dokumen)					
	Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N (1402.67 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	109.835.000	-	-	-	109.835.000
	Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan (13.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan (5.00 Dokumen)					
	Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N (1402.67 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**5.310.641.000**	**25.000.000**	**-**	**-**	**5.335.641.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	4.042.143.000	-	-	-	4.042.143.000
	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi (66.67 %)					
	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (48.42 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	2.065.143.000	-	-	-	2.065.143.000
	Jumlah Tenaga Bidang Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi (11779.00 Orang)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (1.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	1.777.000.000	-	-	-	1.777.000.000
	Jumlah Tenaga Bidang Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi (11779.00 Orang)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	782.500.000	25.000.000	-	-	807.500.000
	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (48.42 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	657.500.000	25.000.000	-	-	682.500.000
	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi (5.00 Kegiatan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	125.000.000	-	-	-	125.000.000
	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi (5.00 Kegiatan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.03	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	485.998.000	-	-	-	485.998.000
	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (48.42 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	485.998.000	-	-	-	485.998.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi (1.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15	**Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang**	**172.078.226.000**	**11.611.814.000**	**-**	**-**	**183.690.040.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**93.222.690.000**	**614.170.000**	**-**	**-**	**93.836.860.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000.000	-	-	-	900.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.570.327.000	-	-	-	79.570.327.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78.103.255.000	-	-	-	78.103.255.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.467.072.000	-	-	-	1.467.072.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	383.500.000	-	-	-	383.500.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	383.500.000	-	-	-	383.500.000
	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	461.632.000	-	-	-	461.632.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	269.292.000	-	-	-	269.292.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	92.340.000	-	-	-	92.340.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.481.416.000	614.170.000	-	-	2.095.586.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.219.000	414.170.000	-	-	635.389.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (77.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (77.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.944.000	-	-	-	133.944.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (77.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	147.025.000	-	-	-	147.025.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (77.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.237.000	-	-	-	25.237.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (77.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	122.643.000	-	-	-	122.643.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (77.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.283.000	-	-	-	363.283.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (77.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	408.065.000	200.000.000	-	-	608.065.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (77.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.415.008.000	-	-	-	5.415.008.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.810.000	-	-	-	74.810.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (15.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (25.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (26.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (27.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.659.485.000	-	-	-	1.659.485.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (15.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (25.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (26.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (27.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.619.595.000	-	-	-	2.619.595.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.061.118.000	-	-	-	1.061.118.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (15.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (25.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (26.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (27.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.010.807.000	-	-	-	5.010.807.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.933.283.000	-	-	-	1.933.283.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (32.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (37.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (422.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (49.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (60.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (83.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (90.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.202.437.000	-	-	-	2.202.437.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (32.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (37.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (422.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (49.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (60.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (83.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (90.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	875.087.000	-	-	-	875.087.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (32.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (37.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (422.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (49.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (60.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (83.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (90.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**74.153.743.000**	**10.997.644.000**	**-**	**-**	**85.151.387.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35.241.811.000	5.889.174.000	-	-	41.130.985.000
	Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik (64.31 %)					
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %)					
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %)					
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %)					
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %)					
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %)					
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (67.35 %)					
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (63.64 %)					
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (34.78 %)					
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (92.23 %)					
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (50.00 %)					
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (76.50 %)					
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi (52.41 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto (50.08 %)					
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal (53.26 %)					
	Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air (62.50 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000
	Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kondisi fisik tampungan air yang terbangun (2.00 Dokumen)					
	jumlah laporan peningkataan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama dan pengelolaan aset (4.00 Dokumen)					
	Total Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun (93.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.450.000.000	-	-	-	1.450.000.000
	akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun (1.80 Km)					
	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA (1.00 Kegiatan)					
	Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir (2.00 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	638.574.000	-	-	-	638.574.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA (3.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi (19.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA (9.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	876.751.000	-	-	-	876.751.000
	akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun (1.80 Km)					
	Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kondisi fisik tampungan air yang terbangun (2.00 Dokumen)					
	jumlah laporan peningkataan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama dan pengelolaan aset (4.00 Dokumen)					
	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA (1.00 Kegiatan)					
	Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir (2.00 Km)					
	Total Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun (93.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	9.975.033.000	328.626.000	-	-	10.303.659.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA (3.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA (5.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi (19.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA (9.00 Dokumen)					
	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %)					
	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (27.78 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (9.09 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (15.00 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (10.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0104	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	50.000.000	150.000.000	-	-	200.000.000
	Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA (3.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi (19.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA (9.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	5.407.004.000	-	-	-	5.407.004.000
	Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA (5.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %)					
	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (27.78 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (9.09 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (15.00 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (10.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	14.046.997.000	2.500.000.000	-	-	16.546.997.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun (1.80 Km)					
	Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA (5.00 Dokumen)					
	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA (1.00 Kegiatan)					
	Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir (2.00 Km)					
	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %)					
	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (27.78 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (9.09 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (15.00 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (10.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	850.000.000	-	-	-	850.000.000
	Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA (3.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi (19.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA (9.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	189.452.000	2.360.548.000	-	-	2.550.000.000
	akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun (1.80 Km)					
	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA (1.00 Kegiatan)					
	Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir (2.00 Km)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	258.000.000	550.000.000	-	-	808.000.000
	Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA (3.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi (19.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA (9.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	38.911.932.000	5.108.470.000	-	-	44.020.402.000
	Indeks kinerja sistem irigasi (69.11 Angka)					
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (67.36 Angka)					
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (71.54 Angka)					
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (62.68 Angka)					
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (60.00 Angka)					
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (62.85 Angka)					
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (72.65 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air (62.50 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	308.169.000	4.758.470.000	-	-	5.066.639.000
	Jumlah DI yang direhab (17.00 Unit)					
	Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi (3.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	37.688.763.000	-	-	-	37.688.763.000
	Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (70.26 %)					
	Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (60.33 %)					
	Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Bengawan Solo (73.01 %)					
	Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (60.00 %)					
	Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serang Lusi Juana (59.54 %)					
	Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serayu Citanduy (72.65 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	215.000.000	350.000.000	-	-	565.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi (5.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	700.000.000	-	-	-	700.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah DI yang direhab (17.00 Unit)					
	Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi (3.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**4.701.793.000**	**-**	**-**	**-**	**4.701.793.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.295.711.000	-	-	-	1.295.711.000
	Persentase ketersediaan rencana tata ruang (68.21 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi	1.133.211.000	-	-	-	1.133.211.000
	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang (3.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	162.500.000	-	-	-	162.500.000
	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang (3.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	667.853.000	-	-	-	667.853.000
	Persentase ketersediaan rencana tata ruang (68.21 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	467.853.000	-	-	-	467.853.000
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (16.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	200.000.000	-	-	-	200.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (16.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	888.000.000	-	-	-	888.000.000
	Persentase implementasi pemanfaatan ruang (76.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	709.696.000	-	-	-	709.696.000
	Jumlah dokumen implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang (6.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	178.304.000	-	-	-	178.304.000
	Jumlah dokumen implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang (6.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	1.850.229.000	-	-	-	1.850.229.000
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %)					
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %)					
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %)					
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %)					
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %)					
	Persentase tertib ruang (48.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.344.355.000	-	-	-	1.344.355.000
	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (1.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (1.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (1.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (1.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (1.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (1.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang (5.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	231.848.000	-	-	-	231.848.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang (5.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	274.026.000	-	-	-	274.026.000
	Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang (5.00 Dokumen)					
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**52.349.033.000**	**185.000.000**	**-**	**-**	**52.534.033.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**52.349.033.000**	**185.000.000**	**-**	**-**	**52.534.033.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**21.234.033.000**	**90.000.000**	**-**	**-**	**21.324.033.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.150.456.000	-	-	-	1.150.456.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.456.000	-	-	-	750.456.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.229.577.000	-	-	-	15.229.577.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.724.577.000	-	-	-	14.724.577.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	420.000.000	-	-	-	420.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	175.000.000	-	-	-	175.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)*	10.000.000	-	-	-	10.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)*	155.000.000	-	-	-	155.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)*	5.000.000	-	-	-	5.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)*	5.000.000	-	-	-	5.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	110.000.000	-	-	-	110.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	20.000.000	-	-	-	20.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	20.000.000	-	-	-	20.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	50.000.000	-	-	-	50.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	10.000.000	-	-	-	10.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	10.000.000	-	-	-	10.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	2.020.000.000	-	-	-	2.020.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	50.000.000	-	-	-	50.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	-	-	-	50.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.120.000.000	-	-	-	1.120.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	50.000.000	-	-	-	50.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	370.000.000	-	-	-	370.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	-	90.000.000	-	-	90.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (84.00 Unit)*	-	90.000.000	-	-	90.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	1.829.000.000	-	-	-	1.829.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)*	200.000.000	-	-	-	200.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)*	479.000.000	-	-	-	479.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)*	1.150.000.000	-	-	-	1.150.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	720.000.000	-	-	-	720.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (267.00 Unit)*	50.000.000	-	-	-	50.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (267.00 Unit)*	240.000.000	-	-	-	240.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (267.00 Unit)*	20.000.000	-	-	-	20.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (267.00 Unit)*	70.000.000	-	-	-	70.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	340.000.000	-	-	-	340.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (267.00 Unit)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**25.215.000.000**	**75.000.000**	**-**	**-**	**25.290.000.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	220.000.000	-	-	-	220.000.000
	Persentase rumah layak huni yang disediakan (0.73 %)					
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (6.64 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Pendataan Penyedian Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi (2.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Pendataan Penyedian Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi (2.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	140.000.000	-	-	-	140.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase rumah layak huni yang disediakan (0.73 %)					
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (6.64 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi (1.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi (1.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	19.430.000.000	-	-	-	19.430.000.000
	Persentase rumah layak huni yang disediakan (0.73 %)					
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (6.64 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3.200.000.000	-	-	-	3.200.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (170.00 Unit)					
	Jumlah Unit Pembangunan Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi (340.00 Unit)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	16.230.000.000	-	-	-	16.230.000.000
	Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (170.00 Unit)					
	Jumlah Unit Pembangunan Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi (340.00 Unit)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	5.425.000.000	75.000.000	-	-	5.500.000.000
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (6.64 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	5.425.000.000	75.000.000	-	-	5.500.000.000
	Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (17000.00 Unit)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**3.765.000.000**	**-**	**-**	**-**	**3.765.000.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.035.000.000	-	-	-	1.035.000.000
	Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (100.00 %)					
	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh (13.90 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	310.000.000	-	-	-	310.000.000
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia (1.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia (2.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	650.000.000	-	-	-	650.000.000
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia (1.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia (2.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun (3.00 Laporan)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.730.000.000	-	-	-	2.730.000.000
	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh (13.90 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	690.000.000	-	-	-	690.000.000
	Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun (3.00 Laporan)					
	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas (50.00 Ha)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	140.000.000	-	-	-	140.000.000
	Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun (3.00 Laporan)					
	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas (50.00 Ha)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.900.000.000	-	-	-	1.900.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun (3.00 Laporan)					
	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas (50.00 Ha)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**480.000.000**	**-**	**-**	**-**	**480.000.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	480.000.000	-	-	-	480.000.000
	Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman (60.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (2.00 Laporan)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (2.00 Laporan)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**200.000.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi (1.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**360.000.000**	**20.000.000**	**-**	**-**	**380.000.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	360.000.000	20.000.000	-	-	380.000.000
	Persentase fasilitasi penetapan lokasi (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	360.000.000	20.000.000	-	-	380.000.000
	Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum (1.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**570.000.000**	**-**	**-**	**-**	**570.000.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	570.000.000	-	-	-	570.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	330.000.000	-	-	-	330.000.000
	Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi (3.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	240.000.000	-	-	-	240.000.000
	Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi (3.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**525.000.000**	**-**	**-**	**-**	**525.000.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	525.000.000	-	-	-	525.000.000
	Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	-	-	-	130.000.000
	Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria (10.00 Lokasi)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	395.000.000	-	-	-	395.000.000
	Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria (10.00 Lokasi)					
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**36.918.431.000**	**2.032.500.000**	**-**	**-**	**38.950.931.000**
1.05.1.05.0.00.0.00.01	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**19.876.491.000**	**850.500.000**	**-**	**-**	**20.726.991.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.688.491.000**	**850.500.000**	**-**	**-**	**18.538.991.000**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.000.000	-	-	-	157.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.500.000	-	-	-	98.500.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.500.000	-	-	-	58.500.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.450.444.000	-	-	-	13.450.444.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.158.444.000	-	-	-	13.158.444.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (13.00 Dokumen)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.000.000	-	-	-	282.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (13.00 Dokumen)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	-	-	-	10.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (13.00 Dokumen)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.000.000	-	-	-	180.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000	-	-	-	45.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	795.647.000	-	-	-	795.647.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.147.000	-	-	-	125.147.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000	-	-	-	45.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430.500.000	-	-	-	430.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	654.500.000	-	-	654.500.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	639.500.000	-	-	639.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	15.000.000	-	-	15.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.520.400.000	-	-	-	2.520.400.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	-	-	-	3.400.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.000.000	-	-	-	305.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.212.000.000	-	-	-	2.212.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	485.000.000	196.000.000	-	-	681.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.000.000	-	-	-	370.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	196.000.000	-	-	196.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	-	-	-	15.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.090.000.000**	**-**	**-**	**-**	**2.090.000.000**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.520.100.000	-	-	-	1.520.100.000
	Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum (56.07 %)					
	Persentase penegakan produk hukum daerah (86.67 %)					
	Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah (65.69 %)					
	Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina (64.54 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	260.163.000	-	-	-	260.163.000
	Jumlah kelompok masyarakat yang dilakukan penyuluhan (130.00 Kelompok)					
	Jumlah wilayah yang dilakukan pemetaan potensi rawan trantibum (35.00 Kabupaten/Kota)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.000	-	-	-	100.000
	Persentase Penerapan SPM Trantibumlinmas (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	125.000.000	-	-	-	125.000.000
	Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang diberdayakan (150.00 Kelompok)					
	Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang dilakukan penguatan kelembagaannya (185.00 Kelompok)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	600.947.000	-	-	-	600.947.000
	Jumlah kelompok masyarakat yang dilakukan penyuluhan (130.00 Kelompok)					
	Jumlah penanganan gangguan tramtibum (74.00 Kegiatan)					
	Jumlah upaya pencegahan gangguan tramtibum di Jawa Tengah (16.00 Kegiatan)					
	Jumlah wilayah yang dilakukan pemetaan potensi rawan trantibum (35.00 Kabupaten/Kota)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	325.000.000	-	-	-	325.000.000
	Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang diberdayakan (150.00 Kelompok)					
	Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang dilakukan penguatan kelembagaannya (185.00 Kelompok)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	208.890.000	-	-	-	208.890.000
	Jumlah penanganan gangguan tramtibum (74.00 Kegiatan)					
	Jumlah upaya pencegahan gangguan tramtibum di Jawa Tengah (16.00 Kegiatan)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	481.400.000	-	-	-	481.400.000
	Persentase penegakan produk hukum daerah (86.67 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2.000.000	-	-	-	2.000.000
	Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi (200.00 Orang)					
	Persentase pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	41.000.000	-	-	-	41.000.000
	Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi (200.00 Orang)					
	Persentase pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	438.400.000	-	-	-	438.400.000
	Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi (200.00 Orang)					
	Persentase pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	88.500.000	-	-	-	88.500.000
	Persentase penegakan produk hukum daerah (86.67 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	88.500.000	-	-	-	88.500.000
	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan PPNS (2.00 Dokumen)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**98.000.000**	**-**	**-**	**-**	**98.000.000**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	98.000.000	-	-	-	98.000.000
	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	98.000.000	-	-	-	98.000.000
	Jumlah Kab/kota yang telah dilakukan pemetaan daerah rawan kebakaran (35.00 Kabupaten/Kota)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04	**Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**17.041.940.000**	**1.182.000.000**	**-**	**-**	**18.223.940.000**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.191.940.000**	**1.182.000.000**	**-**	**-**	**14.373.940.000**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	-	-	-	100.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.813.463.000	-	-	-	7.813.463.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.513.463.000	-	-	-	7.513.463.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.000.000	-	-	-	2.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	-	-	-	3.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	926.000.000	-	-	-	926.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.000.000	-	-	-	1.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000	-	-	-	800.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.182.000.000	-	-	1.182.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	82.000.000	-	-	82.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.362.477.000	-	-	-	3.362.477.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	-	-	-	1.500.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.910.977.000	-	-	-	2.910.977.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	785.000.000	-	-	-	785.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (139.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	-	-	-	50.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (139.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (139.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (139.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**3.850.000.000**	**-**	**-**	**-**	**3.850.000.000**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.100.000.000	-	-	-	1.100.000.000
	Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya (0.12 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1.100.000.000	-	-	-	1.100.000.000
	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana (0.01 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.475.000.000	-	-	-	1.475.000.000
	Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik (2.86 %)					
	Persentase penanganan darurat bencana (100.00 %)					
	Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya (0.12 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (0.23 %)					
	Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana (5.00 Kegiatan)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	275.000.000	-	-	-	275.000.000
	Persentase sarpras PB yang terpenuhi (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Persentase kejadian bencana yang terpenuhi kajiannya (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (0.23 %)					
	Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana (5.00 Kegiatan)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Persentase upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (0.23 %)					
	Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana (5.00 Kegiatan)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (0.23 %)					
	Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana (5.00 Kegiatan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Persentase upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (0.23 %)					
	Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana (5.00 Kegiatan)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	975.000.000	-	-	-	975.000.000
	Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik (2.86 %)					
	Persentase penanganan darurat bencana (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase jumlah bencana yang dilakukan kaji cepat (100.00 %)					
	Persentase kejadian bencana yang tertangani (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase jumlah bencana yang dilakukan kaji cepat (100.00 %)					
	Persentase kejadian bencana yang tertangani (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	750.000.000	-	-	-	750.000.000
	Persentase logistik penyelamatan dan evakuasi yang terpenuhi (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	75.000.000	-	-	-	75.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase jumlah bencana yang dilakukan kaji cepat (100.00 %)					
	Persentase kejadian bencana yang tertangani (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana (2.00 %)					
	Persentase penanganan darurat bencana (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB yang terlaksana (100.00 %)					
	persentase pelaksanaan pemulihan pasca bencana (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase sinkronisasi data bencana pusat dan daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB yang terlaksana (100.00 %)					
	persentase pelaksanaan pemulihan pasca bencana (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	-	-	-	50.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB yang terlaksana (100.00 %)					
	persentase pelaksanaan pemulihan pasca bencana (100.00 %)					
	Persentase sinkronisasi data bencana pusat dan daerah (100.00 %)					
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**302.553.198.000**	**650.040.000**	**-**	**-**	**303.203.238.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01	**Dinas Sosial**	**302.553.198.000**	**650.040.000**	**-**	**-**	**303.203.238.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**144.277.111.000**	**645.040.000**	**-**	**-**	**144.922.151.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	103.412.158.000	-	-	-	103.412.158.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	101.512.158.000	-	-	-	101.512.158.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (5.00 Dokumen)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.350.000.000	-	-	-	1.350.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (5.00 Dokumen)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (5.00 Dokumen)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (5.00 Dokumen)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	225.000.000	-	-	-	225.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	325.000.000	-	-	-	325.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	125.000.000	-	-	-	125.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.023.973.000	2.150.000	-	-	7.026.123.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	460.786.000	-	-	-	460.786.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.900.000	-	-	-	101.900.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	259.525.000	-	-	-	259.525.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	942.270.000	-	-	-	942.270.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	235.000.000	-	-	-	235.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	93.225.000	2.150.000	-	-	95.375.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	501.592.000	-	-	-	501.592.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	426.975.000	-	-	-	426.975.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.962.700.000	-	-	-	3.962.700.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.500.000	642.890.000	-	-	666.390.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	362.515.000	-	-	362.515.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.500.000	280.375.000	-	-	303.875.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (1.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.920.460.000	-	-	-	20.920.460.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135.600.000	-	-	-	135.600.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (4.00 Laporan)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.553.660.000	-	-	-	3.553.660.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (4.00 Laporan)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	444.000.000	-	-	-	444.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.787.200.000	-	-	-	16.787.200.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.347.020.000	-	-	-	11.347.020.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	189.600.000	-	-	-	189.600.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	919.830.000	-	-	-	919.830.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (2.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	357.450.000	-	-	-	357.450.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (8.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (2.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.379.500.000	-	-	-	9.379.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (2.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (2.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (2.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.640.000	-	-	-	500.640.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (2.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (2.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**10.721.000.000**	**-**	**-**	**-**	**10.721.000.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (15.41 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan sumbangan lintas daerah kab./kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan (200.00 Dokumen)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	10.471.000.000	-	-	-	10.471.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (15.41 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas (1552.00 Orang)					
	Jumlah PSKS yang mendapatkan penyuluhan sosial (2000.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	7.112.000.000	-	-	-	7.112.000.000
	Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas (1552.00 Orang)					
	Jumlah PSKS yang mendapatkan penyuluhan sosial (2000.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	1.300.000.000	-	-	-	1.300.000.000
	Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas (1552.00 Orang)					
	Jumlah PSKS yang mendapatkan penyuluhan sosial (2000.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.809.000.000	-	-	-	1.809.000.000
	Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas (1552.00 Orang)					
	Jumlah PSKS yang mendapatkan penyuluhan sosial (2000.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**200.000.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal (200.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**72.863.427.000**	**5.000.000**	**-**	**-**	**72.868.427.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	23.255.628.000	-	-	-	23.255.628.000
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti (3.84 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (0.21 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata (0.24 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.16 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (0.14 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (0.22 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (0.21 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (0.17 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo (0.11 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi (0.12 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (0.15 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo (0.25 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (0.22 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (0.22 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (0.17 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	17.478.480.000	-	-	-	17.478.480.000
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti (4200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (360.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (480.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (420.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (350.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (360.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (480.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (150.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (42030.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha (350.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	2.518.120.000	-	-	-	2.518.120.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (360.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (480.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (420.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (350.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (360.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (480.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (42030.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha (350.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	446.245.000	-	-	-	446.245.000
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (360.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (480.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (150.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (420.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (350.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (360.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (480.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (150.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (42030.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha (350.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	214.000.000	-	-	-	214.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti (4200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (360.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo (170.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (480.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (280.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (420.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (350.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (360.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (480.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (280.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (42030.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha (350.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.042.382.000	-	-	-	1.042.382.000
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (360.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (480.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (250.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (420.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (350.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (360.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (480.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (400.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (42030.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha (350.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	525.801.000	-	-	-	525.801.000
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (360.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo (170.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (480.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (280.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (420.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (350.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (360.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (480.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (280.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (42030.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha (350.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.250.000	-	-	-	21.250.000
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	380.520.000	-	-	-	380.520.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (360.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (480.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (400.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (420.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (350.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (360.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (480.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (400.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (42030.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha (350.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	628.830.000	-	-	-	628.830.000
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti (4200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (360.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (480.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (420.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (350.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (360.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (480.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (150.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (42030.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha (350.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	23.743.430.000	5.000.000	-	-	23.748.430.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti (3.84 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.16 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (0.07 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (0.10 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri (0.15 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (0.07 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi (0.12 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo (0.25 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (0.22 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (0.08 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (0.22 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (0.06 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (0.16 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso (0.11 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	12.011.500.000	-	-	-	12.011.500.000
	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti (3400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (240.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (260.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (160.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (260.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (150.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (200.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	2.576.885.000	-	-	-	2.576.885.000
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (260.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (260.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (140.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (200.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	185.202.000	-	-	-	185.202.000
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (180.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (260.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (240.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (260.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (160.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (200.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	468.000.000	5.000.000	-	-	473.000.000
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (260.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (150.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (200.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (260.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (200.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.217.678.000	-	-	-	4.217.678.000
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (260.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (200.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (180.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (260.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (200.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	535.295.000	-	-	-	535.295.000
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (260.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (150.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (260.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (150.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (200.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	3.748.870.000	-	-	-	3.748.870.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti (3400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (260.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi (140.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (160.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial (260.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (200.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu (150.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (200.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	17.710.369.000	-	-	-	17.710.369.000
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti (3.84 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (0.13 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (0.13 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (0.21 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring (0.12 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata (0.24 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.16 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri (0.15 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (0.15 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo (0.25 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (0.08 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede (0.12 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (0.16 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	12.889.537.000	-	-	-	12.889.537.000
	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti (800.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (390.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (240.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (290.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (220.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (390.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede (290.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (180.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	2.504.350.000	-	-	-	2.504.350.000
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (390.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (280.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (290.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (390.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (120.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede (290.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (180.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	307.920.000	-	-	-	307.920.000
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (200.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (390.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (290.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (390.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran (180.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede (290.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (180.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	6.000.000	-	-	-	6.000.000
	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti (800.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (390.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (280.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (290.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (390.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (120.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede (290.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (180.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	762.800.000	-	-	-	762.800.000
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (200.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (390.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (290.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (390.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran (180.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede (290.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (180.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0009	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	429.852.000	-	-	-	429.852.000
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (390.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (200.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (290.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya (180.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (390.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri (240.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede (290.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (180.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	322.410.000	-	-	-	322.410.000
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (220.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (390.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (290.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (390.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring (280.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede (290.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (180.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0012	Pemulasaraan	487.500.000	-	-	-	487.500.000
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (390.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (120.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (290.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (200.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (390.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring (280.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri (240.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (170.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran (180.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede (290.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (180.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	3.284.130.000	-	-	-	3.284.130.000
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti (3.84 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (0.13 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (0.13 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (0.14 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	2.223.550.000	-	-	-	2.223.550.000
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti (500.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (220.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	321.800.000	-	-	-	321.800.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (220.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	36.880.000	-	-	-	36.880.000
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (220.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	263.900.000	-	-	-	263.900.000
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (220.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	53.000.000	-	-	-	53.000.000
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (220.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (220.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	325.000.000	-	-	-	325.000.000
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti (500.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (220.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (220.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	4.869.870.000	-	-	-	4.869.870.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata (0.24 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (0.22 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi (0.12 %)					
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (0.17 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	3.457.350.000	-	-	-	3.457.350.000
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (340.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pengathi (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (300.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo WIdodo (340.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (300.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	723.200.000	-	-	-	723.200.000
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (340.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pengathi (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (300.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo WIdodo (340.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (300.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	127.470.000	-	-	-	127.470.000
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (340.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pengathi (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (300.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo WIdodo (340.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (300.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	339.350.000	-	-	-	339.350.000
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (340.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pengathi (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (300.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo WIdodo (340.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (300.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	67.000.000	-	-	-	67.000.000
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (340.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pengathi (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (300.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo WIdodo (340.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (300.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	63.000.000	-	-	-	63.000.000
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (340.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pengathi (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (300.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo WIdodo (340.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (300.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	92.500.000	-	-	-	92.500.000
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (340.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pengathi (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (300.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo WIdodo (340.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (300.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**70.447.160.000**	**-**	**-**	**-**	**70.447.160.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan (400.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	70.097.160.000	-	-	-	70.097.160.000
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial (2.26 %)					
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan (0.04 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	57.297.160.000	-	-	-	57.297.160.000
	Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial (103528.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000.000	-	-	-	1.800.000.000
	Jumlah PPKS Keluarga yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 1) (800.00 Orang)					
	Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 2) (800.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	11.000.000.000	-	-	-	11.000.000.000
	Jumlah PPKS Keluarga yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 1) (800.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 2) (800.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**3.584.500.000**	**-**	**-**	**-**	**3.584.500.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	3.584.500.000	-	-	-	3.584.500.000
	Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.567.280.000	-	-	-	1.567.280.000
	Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (2000.00 Orang)					
	Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (2900.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	387.500.000	-	-	-	387.500.000
	Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (2000.00 Orang)					
	Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (2900.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (2000.00 Orang)					
	Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (2900.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	979.720.000	-	-	-	979.720.000
	Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (2000.00 Orang)					
	Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (2900.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (2000.00 Orang)					
	Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (2900.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**460.000.000**	**-**	**-**	**-**	**460.000.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	460.000.000	-	-	-	460.000.000
	Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah stakeholder yang berperan dalam pananaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial (400.00 Orang)					
	Jumlah TMPN Provinsi yang dikelola (1.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	360.000.000	-	-	-	360.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah stakeholder yang berperan dalam pananaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial (400.00 Orang)					
	Jumlah TMPN Provinsi yang dikelola (1.00 Unit)					
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.145.561.428.000**	**36.454.102.000**	**-**	**-**	**1.182.015.530.000**
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**95.886.957.000**	**2.043.588.000**	**-**	**-**	**97.930.545.000**
2.07.2.07.3.32.0.00.02	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**95.886.957.000**	**2.043.588.000**	**-**	**-**	**97.930.545.000**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**85.336.676.000**	**693.588.000**	**-**	**-**	**86.030.264.000**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	703.260.000	-	-	-	703.260.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	459.605.000	-	-	-	459.605.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (5.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	243.655.000	-	-	-	243.655.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (5.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.381.071.000	-	-	-	69.381.071.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	68.068.043.000	-	-	-	68.068.043.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.044.920.000	-	-	-	1.044.920.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (24.00 Dokumen)					
	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.266.000	-	-	-	194.266.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	71.442.000	-	-	-	71.442.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.400.000	-	-	-	2.400.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (24.00 Dokumen)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	44.220.000	-	-	-	44.220.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	44.220.000	-	-	-	44.220.000
	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (12.00 Laporan)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.220.000	-	-	-	102.220.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	36.300.000	-	-	-	36.300.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22.000.000	-	-	-	22.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	33.920.000	-	-	-	33.920.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.702.409.000	-	-	-	3.702.409.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	118.365.000	-	-	-	118.365.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.870.000	-	-	-	151.870.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	132.219.000	-	-	-	132.219.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	252.340.000	-	-	-	252.340.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	109.075.000	-	-	-	109.075.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	6.560.000	-	-	-	6.560.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	49.877.000	-	-	-	49.877.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	68.087.000	-	-	-	68.087.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.214.016.000	-	-	-	2.214.016.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	693.588.000	-	-	693.588.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	350.000.000	-	-	350.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	206.713.000	-	-	206.713.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	30.000.000	-	-	30.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	86.875.000	-	-	86.875.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	20.000.000	-	-	20.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.945.231.000	-	-	-	8.945.231.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.127.000	-	-	-	42.127.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (27.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.353.506.000	-	-	-	2.353.506.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (27.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.800.000	-	-	-	177.800.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (27.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.371.798.000	-	-	-	6.371.798.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (27.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.383.265.000	-	-	-	2.383.265.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	716.137.000	-	-	-	716.137.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (11.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (8.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	42.000.000	-	-	-	42.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (11.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (8.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243.245.000	-	-	-	243.245.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (11.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (8.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	139.750.000	-	-	-	139.750.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (11.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (8.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	95.600.000	-	-	-	95.600.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (11.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (8.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	768.804.000	-	-	-	768.804.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (11.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (8.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.435.000	-	-	-	158.435.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (11.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (8.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	219.294.000	-	-	-	219.294.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (11.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (8.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**246.740.000**	**-**	**-**	**-**	**246.740.000**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	246.740.000	-	-	-	246.740.000
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (68.57 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro *Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan (31.43 %)*	80.850.000	-	-	-	80.850.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro *Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan (31.43 %)*	77.370.000	-	-	-	77.370.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro *Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan (31.43 %)*	88.520.000	-	-	-	88.520.000
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**2.314.754.000**	**1.350.000.000**	**-**	**-**	**3.664.754.000**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi *Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi (30.59 %)* *Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri (3.20 %)* *Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran (46.98 %)* *Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian (9.50 %)* *Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi (2.35 %)*	1.912.450.000	1.350.000.000	-	-	3.262.450.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan (13.22 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.666.648.000	-	-	-	1.666.648.000
	Jumlah lembaga (penyedia dan pengguna tenaga kerja) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga (penyedia dan pengguna tenaga) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA dikalikan 100 persen (19.00 Unit)					
	Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi (100.00 %)					
	Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi (33.33 %)					
	Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi (66.67 %)					
	Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan (0.67 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK (30.00 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1 (20.00 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BPK Trans (40.00 %)					
	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (3.42 %)					
	Persentase penganggur atau pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri (27.69 %)					
	Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian (64.00 %)					
	Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri (10.20 %)					
	Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya (50.00 %)					
	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	215.802.000	-	-	-	215.802.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah lembaga (penyedia dan pengguna tenaga kerja) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga (penyedia dan pengguna tenaga) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA dikalikan 100 persen (19.00 Unit)					
	Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi (100.00 %)					
	Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi (33.33 %)					
	Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi (66.67 %)					
	Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan (0.67 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK (30.00 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1 (20.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BPK Trans (40.00 %)					
	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (3.42 %)					
	Persentase penganggur atau pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri (27.69 %)					
	Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian (64.00 %)					
	Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri (10.20 %)					
	Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya (50.00 %)					
	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	30.000.000	1.350.000.000	-	-	1.380.000.000
	Jumlah lembaga (penyedia dan pengguna tenaga kerja) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga (penyedia dan pengguna tenaga) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA dikalikan 100 persen (19.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi (100.00 %)					
	Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi (33.33 %)					
	Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi (66.67 %)					
	Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan (0.67 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK (30.00 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1 (20.00 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BPK Trans (40.00 %)					
	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (3.42 %)					
	Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian (64.00 %)					
	Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri (10.20 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	176.875.000	-	-	-	176.875.000
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi (30.59 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	176.875.000	-	-	-	176.875.000
	Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga (26.67 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	219.429.000	-	-	-	219.429.000
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas (4.60 %)					
	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan (13.22 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	219.429.000	-	-	-	219.429.000
	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas (20.67 %)					
	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (8.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	6.000.000	-	-	-	6.000.000
	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan (13.22 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.000.000	-	-	-	6.000.000
	Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan (4.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**2.319.000.000**	**-**	**-**	**-**	**2.319.000.000**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.490.153.000	-	-	-	1.490.153.000
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal (68.30 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	159.581.000	-	-	-	159.581.000
	Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (57.14 %)					
	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (47.50 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	601.830.000	-	-	-	601.830.000
	Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (57.14 %)					
	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (47.50 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	19.310.000	-	-	-	19.310.000
	Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (57.14 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (47.50 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	59.470.000	-	-	-	59.470.000
	Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (57.14 %)					
	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (47.50 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	649.962.000	-	-	-	649.962.000
	Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota (57.14 %)					
	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (47.50 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal (71.05 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase kenaikan izin LPTKS yang diterbitkan (20.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	516.500.000	-	-	-	516.500.000
	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal (71.05 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	116.500.000	-	-	-	116.500.000
	Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL)					
	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN) (19.41 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.0003	Job Fair /Bursa Kerja	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL)					
	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN) (19.41 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	289.307.000	-	-	-	289.307.000
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal (68.30 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	50.600.000	-	-	-	50.600.000
	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (50.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (1.51 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	40.200.000	-	-	-	40.200.000
	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (50.00 %)					
	Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (1.51 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	9.040.000	-	-	-	9.040.000
	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (50.00 %)					
	Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (1.51 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	189.467.000	-	-	-	189.467.000
	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (50.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (1.51 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13.040.000	-	-	-	13.040.000
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal (68.30 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13.040.000	-	-	-	13.040.000
	Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing) (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**1.908.787.000**	**-**	**-**	**-**	**1.908.787.000**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	349.824.000	-	-	-	349.824.000
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (98.20 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	125.380.000	-	-	-	125.380.000
	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB (26.97 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	28.881.000	-	-	-	28.881.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB (26.97 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	195.563.000	-	-	-	195.563.000
	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB (26.97 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	1.102.723.000	-	-	-	1.102.723.000
	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (49.77 %)					
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial (96.69 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	455.362.000	-	-	-	455.362.000
	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (49.79 %)					
	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan (96.69 %)					
	Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (80.00 %)					
	Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan (36.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	95.422.000	-	-	-	95.422.000
	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan (96.69 %)					
	Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan (36.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	26.963.000	-	-	-	26.963.000
	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (49.79 %)					
	Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (80.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	252.793.000	-	-	-	252.793.000
	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (49.79 %)					
	Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (80.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	272.183.000	-	-	-	272.183.000
	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (49.79 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (80.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	456.240.000	-	-	-	456.240.000
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah (45.54 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	278.055.000	-	-	-	278.055.000
	Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota (2.16 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	54.291.000	-	-	-	54.291.000
	Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota (2.16 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	123.894.000	-	-	-	123.894.000
	Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota (2.16 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**3.500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**3.500.000.000**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	3.500.000.000	-	-	-	3.500.000.000
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 (26.67 %)					
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan (89.59 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1.541.000.000	-	-	-	1.541.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan (56.43 %)					
	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (30.00 %)					
	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan (62.21 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	536.000.000	-	-	-	536.000.000
	Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan (56.43 %)					
	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (30.00 %)					
	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan (62.21 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	1.423.000.000	-	-	-	1.423.000.000
	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan (60.00 Laporan)					
	Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan (56.43 %)					
	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (30.00 %)					
	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan (62.21 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**261.000.000**	**-**	**-**	**-**	**261.000.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	261.000.000	-	-	-	261.000.000
	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian (3.71 %)					
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi (3.71 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	231.000.000	-	-	-	231.000.000
	Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi (8.57 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan (80.00 %)					
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**20.050.124.000**	**112.178.000**	**-**	**-**	**20.162.302.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	**20.050.124.000**	**112.178.000**	**-**	**-**	**20.162.302.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.384.064.000**	**112.178.000**	**-**	**-**	**16.496.242.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.000.000	-	-	-	225.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (50.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.000.000	-	-	-	110.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (50.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000	-	-	-	115.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (50.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.926.902.000	-	-	-	12.926.902.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.508.502.000	-	-	-	12.508.502.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	368.400.000	-	-	-	368.400.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	67.000.000	-	-	-	67.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	65.000.000	-	-	-	65.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	-	-	-	2.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	290.960.000	-	-	-	290.960.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	255.960.000	-	-	-	255.960.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	546.322.000	98.678.000	-	-	645.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	-	-	-	4.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)*	6.322.000	98.678.000	-	-	105.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)*	10.000.000	-	-	-	10.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)*	80.000.000	-	-	-	80.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)*	6.500.000	-	-	-	6.500.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)*	55.500.000	-	-	-	55.500.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)*	320.000.000	-	-	-	320.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000	-	-	-	4.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	13.500.000	-	-	13.500.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	11.500.000	-	-	11.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	2.000.000	-	-	2.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.022.880.000	-	-	-	2.022.880.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.000.000	-	-	-	550.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.472.880.000	-	-	-	1.472.880.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.000.000	-	-	-	305.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.000.000	-	-	-	160.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	-	-	-	10.000.000
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	-	-	-	1.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.000.000	-	-	-	82.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.000.000	-	-	-	52.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**1.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan (65.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi (10.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi (10.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi (10.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	920.000.000	-	-	-	920.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan (65.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	880.000.000	-	-	-	880.000.000
	Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya (75.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya (75.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**977.550.000**	**-**	**-**	**-**	**977.550.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar (22.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan (52.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan (52.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.040.000	-	-	-	50.040.000
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar (22.00 %)					
	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	30.040.000	-	-	-	30.040.000
	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	847.510.000	-	-	-	847.510.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar (22.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring (22.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (12.00 Kelompok)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	34.510.000	-	-	-	34.510.000
	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (12.00 Kelompok)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (12.00 Kelompok)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	743.000.000	-	-	-	743.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi (12.00 Kelompok)					
	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (12.00 Kelompok)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**135.000.000**	**-**	**-**	**-**	**135.000.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar (20.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar (20.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**150.000.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase keterisian indikator oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) provinsi (30.00 %)					
	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak (30.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA (12.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA (12.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**185.000.000**	**-**	**-**	**-**	**185.000.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya (82.86 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA (4.00 Kabupaten/Kota)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA (4.00 Kabupaten/Kota)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya (82.86 %)					
	Persentase keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE (20.00 Kelompok)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE (20.00 Kelompok)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**253.510.000**	**-**	**-**	**-**	**253.510.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Rasio korban kekerasan terhadap anak (11.80 per 100.000 penduduk)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak (34.20 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak (34.20 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Persentase korban kekerasan anak terlayani (100.00 %)					
	Rasio korban kekerasan terhadap anak (11.80 per 100.000 penduduk)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	20.000.000	-	-	-	20.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	133.510.000	-	-	-	133.510.000
	Rasio korban kekerasan terhadap anak (11.80 per 100.000 penduduk)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2.500.000	-	-	-	2.500.000
	Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi (15.00 Kelompok)					
	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya (15.00 Kelompok)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	2.500.000	-	-	-	2.500.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya (15.00 Kelompok)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya (15.00 Kelompok)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya (15.00 Kelompok)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	98.510.000	-	-	-	98.510.000
	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya (15.00 Kelompok)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**195.000.000**	**-**	**-**	**-**	**195.000.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	190.000.000	-	-	-	190.000.000
	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan (57.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan (20.00 Kabupaten/Kota)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan (20.00 Kabupaten/Kota)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan (20.00 Kabupaten/Kota)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	90.000.000	-	-	-	90.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan (20.00 Kabupaten/Kota)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR) (57.00 %)					
	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan (57.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0008	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (1.00 Dokumen)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**450.000.000**	**-**	**-**	**-**	**450.000.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	380.000.000	-	-	-	380.000.000
	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) (65.99 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	180.000.000	-	-	-	180.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP (31.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP (31.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Unmetneed (9.90 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas (15.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**320.000.000**	**-**	**-**	**-**	**320.000.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan (32.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	ASFR (Age Specific Fertility Rate) (18.70 Angka)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	60.000.000	-	-	-	60.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	ASFR (Age Specific Fertility Rate) (18.70 Angka)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	220.000.000	-	-	-	220.000.000
	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan (32.00 %)					
	Persentase keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota (34.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha (30.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha (30.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	140.000.000	-	-	-	140.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha (30.00 %)					
	Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga (30.00 %)					
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**41.287.217.000**	**821.700.000**	**-**	**-**	**42.108.917.000**
2.09.2.09.0.00.0.00.01	**Dinas Ketahanan Pangan**	**41.287.217.000**	**821.700.000**	**-**	**-**	**42.108.917.000**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**20.433.329.000**	**821.700.000**	**-**	**-**	**21.255.029.000**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000.000	-	-	-	750.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	380.000.000	-	-	-	380.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	370.000.000	-	-	-	370.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.104.222.000	-	-	-	16.104.222.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.316.222.000	-	-	-	15.316.222.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (3.00 Dokumen)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.000.000	-	-	-	378.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (3.00 Dokumen)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	410.000.000	-	-	-	410.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (3.00 Dokumen)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	158.000.000	-	-	-	158.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	140.000.000	-	-	-	140.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (2.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP (1.00 Dokumen)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000	-	-	-	18.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	6.000.000	-	-	-	6.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	6.000.000	-	-	-	6.000.000
	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (1.00 Laporan)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	197.000.000	-	-	-	197.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	197.000.000	-	-	-	197.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.112.000.000	-	-	-	1.112.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.000.000	-	-	-	62.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.000.000	-	-	-	86.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.000.000	-	-	-	72.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	108.000.000	-	-	-	108.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	674.000.000	-	-	-	674.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	95.000.000	-	-	-	95.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	771.600.000	-	-	771.600.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	771.600.000	-	-	771.600.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP (15.00 Unit)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.692.562.000	-	-	-	1.692.562.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP (26.00 Laporan)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.092.562.000	-	-	-	1.092.562.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP (26.00 Laporan)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.545.000	50.100.000	-	-	463.645.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000	-	-	-	180.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (100.00 Unit)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.545.000	50.100.000	-	-	213.645.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP (17.00 Unit)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP (17.00 Unit)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**14.623.888.000**	**-**	**-**	**-**	**14.623.888.000**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	8.290.000.000	-	-	-	8.290.000.000
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (87.70 kg/kapita/tahun)					
	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku (55.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Rata-rata ketercukupan pangan (1.25 Angka)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	750.000.000	-	-	-	750.000.000
	REKOMENDASI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA PANGAN LOKAL YANG DISUSUN (1.00 Dokumen)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000
	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN (1.00 Dokumen)					
	PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA (4.00 %)					
	PROSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	5.940.000.000	-	-	-	5.940.000.000
	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN (1.00 Dokumen)					
	PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA (4.00 %)					
	PROSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA (4.00 %)					
	PROSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	5.333.888.000	-	-	-	5.333.888.000
	Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi (0.38 Angka)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	5.333.888.000	-	-	-	5.333.888.000
	PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI (10.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (87.70 kg/kapita/tahun)					
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP) (87.70 kg/kapita/tahun)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	510.000.000	-	-	-	510.000.000
	PPH Kab / Kota > 87 (34.00 Angka)					
	PPH KAB/KOTA > 87 (DRP) (34.00 Angka)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	490.000.000	-	-	-	490.000.000
	PPH Kab / Kota > 87 (34.00 Angka)					
	PPH KAB/KOTA > 87 (DRP) (34.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**3.930.000.000**	**-**	**-**	**-**	**3.930.000.000**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	3.930.000.000	-	-	-	3.930.000.000
	Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi (0.01 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	3.930.000.000	-	-	-	3.930.000.000
	PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI (5.50 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**2.300.000.000**	**-**	**-**	**-**	**2.300.000.000**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.300.000.000	-	-	-	2.300.000.000
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (92.00 %)					
	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan (80.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	650.000.000	-	-	-	650.000.000
	Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai (2.00 Dokumen)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	370.000.000	-	-	-	370.000.000
	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN (1.00 Dokumen)*					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	*JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN** (1.00 Dokumen)*					
	Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran (67.00 %)					
	PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA (20.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	650.000.000	-	-	-	650.000.000
	Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai (2.00 Dokumen)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	630.000.000	-	-	-	630.000.000
	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN (1.00 Dokumen)*					
	*JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN** (1.00 Dokumen)*					
	Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran (67.00 %)					
	PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA (20.00 %)					
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**154.253.369.000**	**222.000.000**	**-**	**-**	**154.475.369.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**154.253.369.000**	**222.000.000**	**-**	**-**	**154.475.369.000**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**140.400.179.000**	**22.000.000**	**-**	**-**	**140.422.179.000**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.000.000	-	-	-	550.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	127.777.691.000	-	-	-	127.777.691.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	127.627.691.000	-	-	-	127.627.691.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.400.000	-	-	-	61.400.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	88.600.000	-	-	-	88.600.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	431.500.000	-	-	-	431.500.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Tahura (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPL2H (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BSPTH (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 10 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 3 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 6 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 7 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 9 (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	431.500.000	-	-	-	431.500.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 10 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 11 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 2 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 3 (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 4 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 5 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 6 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 7 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 8 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 9 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada KR Baturraden (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada TAHURA (1.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.000.000	-	-	-	95.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000	-	-	-	25.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.162.483.000	-	-	-	2.162.483.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Tahura (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPL2H (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BSPTH (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 10 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 2 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 6 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 7 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 9 (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.700.000	-	-	-	90.700.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BSPTH (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 10 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 6 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 7 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 9 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada KR Baturraden (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada TAHURA (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.000.000	-	-	-	162.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BSPTH (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 10 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 5 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 6 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 7 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 9 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada KR Baturraden (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada TAHURA (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	135.190.000	-	-	-	135.190.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BSPTH (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 10 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 6 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 7 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 9 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada KR Baturraden (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada TAHURA (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	167.660.000	-	-	-	167.660.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BSPTH (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 10 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 5 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 6 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 7 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 9 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada KR Baturraden (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada TAHURA (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	192.500.000	-	-	-	192.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BSPTH (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 10 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 6 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 7 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 9 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada KR Baturraden (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada TAHURA (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	220.000.000	-	-	-	220.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BSPTH (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 10 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 5 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 6 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 7 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 9 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada KR Baturraden (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada TAHURA (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.194.433.000	-	-	-	1.194.433.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BSPTH (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 10 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 6 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 7 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 9 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada KR Baturraden (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada TAHURA (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	22.000.000	-	-	22.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Tahura (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPL2H (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BSPTH (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 10 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 3 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 6 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 7 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 9 (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	22.000.000	-	-	22.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.054.633.000	-	-	-	7.054.633.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Tahura (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPL2H (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BSPTH (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 10 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 6 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 7 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 9 (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1 (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BSPTH (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 10 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 11 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 2 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 3 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 4 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 5 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 6 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 7 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 8 (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 9 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada KR Baturraden (1.00 Laporan)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.898.550.000	-	-	-	1.898.550.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BSPTH (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 10 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 11 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 2 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 3 (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 4 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 5 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 6 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 7 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 8 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 9 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada KR Baturraden (1.00 Laporan)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.500.000	-	-	-	111.500.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BSPTH (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 10 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 11 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 2 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 3 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 4 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 5 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 6 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 7 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 8 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 9 (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada KR Baturraden (1.00 Laporan)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.019.583.000	-	-	-	5.019.583.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BSPTH (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 10 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 11 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 2 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 3 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 4 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 5 (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 6 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 7 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 8 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 9 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada KR Baturraden (1.00 Laporan)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.328.872.000	-	-	-	2.328.872.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Tahura (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPL2H (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BSPTH (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 10 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 6 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 7 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 9 (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.794.250.000	-	-	-	1.794.250.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BSPTH (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 10 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 2 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 3 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 4 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 5 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 6 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 7 (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 8 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 9 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada KR Baturraden (1.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	13.000.000	-	-	-	13.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BSPTH (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 10 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 1 (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 2 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 3 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 4 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 5 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 6 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 7 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 8 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 9 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada KR Baturraden (1.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279.000.000	-	-	-	279.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BSPTH (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 10 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 2 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 3 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 4 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 5 (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 6 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 7 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 8 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 9 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada KR Baturraden (1.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	177.622.000	-	-	-	177.622.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BSPTH (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 10 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 2 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 3 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 4 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 5 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 6 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 7 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 8 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 9 (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada KR Baturraden (1.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	-	-	-	55.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BSPTH (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 10 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 2 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 3 (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 4 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 5 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 6 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 7 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 8 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 9 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada KR Baturraden (1.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BSPTH (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 10 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 2 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 3 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 4 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 5 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 6 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 7 (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 8 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 9 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada KR Baturraden (1.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**434.000.000**	**-**	**-**	**-**	**434.000.000**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup (3.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	234.000.000	-	-	-	234.000.000
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	234.000.000	-	-	-	234.000.000
	Jumlah Dokumen KLHS yang tervalidasi (10.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**2.353.388.000**	**-**	**-**	**-**	**2.353.388.000**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	2.353.388.000	-	-	-	2.353.388.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya (2.85 %)					
	Persentase pemantauan kualitas udara (100.00 %)					
	Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan (100.00 %)					
	Persentase pengujian kualitas air (100.00 %)					
	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya (4.76 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.244.000.000	-	-	-	1.244.000.000
	Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan Penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan (1.00 Dokumen)					
	Jumlah penurunan emisi grk di tingkat tapak (20000.00 tCO2e)					
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah (105.00 Unit)					
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu udara emisi (105.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	759.388.000	-	-	-	759.388.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah penurunan emisi grk di tingkat tapak (20000.00 tCO2e)					
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah (105.00 Unit)					
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu udara emisi (105.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan Penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan (1.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**745.000.000**	**-**	**-**	**-**	**745.000.000**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	745.000.000	-	-	-	745.000.000
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani (0.40 %)					
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden (2.60 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani (10.00 Ha)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	535.000.000	-	-	-	535.000.000
	Jumlah unit pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden (2.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani (10.00 Ha)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani (10.00 Ha)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**50.000.000**	**-**	**-**	**-**	**50.000.000**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase limbah B3 yang terkelola (80.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola (1476440.00 Ton)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**564.000.000**	**-**	**-**	**-**	**564.000.000**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	564.000.000	-	-	-	564.000.000
	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan (50.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase rekomendasi lingkungan hidup (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	334.000.000	-	-	-	334.000.000
	Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan / diterbitkan (10.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	230.000.000	-	-	-	230.000.000
	Jumlah pelaku usaha berijin yang taat (15.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**1.305.113.000**	**-**	**-**	**-**	**1.305.113.000**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	1.305.113.000	-	-	-	1.305.113.000
	Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah (33.00 %)					
	Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya (25.00 %)					
	Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya (10.50 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	655.113.000	-	-	-	655.113.000
	Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya (128.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (2.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Jumlah Kab/Kota yang ditingkatnkan kapasitas pengurangan sampah (2.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya (128.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**200.000.000**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase pengaduan yang ditangani (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah laporan aduan yang ditangani (12.00 Laporan)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**189.000.000**	**200.000.000**	**-**	**-**	**389.000.000**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	189.000.000	200.000.000	-	-	389.000.000
	Persentase sampah yang tertangani (43.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	189.000.000	200.000.000	-	-	389.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sampah tertangani (2650000.00 Ton)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**5.854.089.000**	**-**	**-**	**-**	**5.854.089.000**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	192.000.000	-	-	-	192.000.000
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (45.99 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan (82.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	142.000.000	-	-	-	142.000.000
	Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan (82.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.271.221.000	-	-	-	4.271.221.000
	Persentase lahan kritis tertangani (0.22 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10 (0.01 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1 (0.01 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11 (0.02 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2 (0.01 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3 (0.01 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4 (0.02 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5 (0.02 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6 (0.03 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7 (0.03 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8 (0.03 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9 (0.02 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) (811.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 10 (29.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 11 (65.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK1 (43.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK2 (56.00 Ha)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK3 (52.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK4 (83.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 5 (60.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 6 (124.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 7 (121.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 8 (94.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 9 (84.00 Ha)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	2.341.869.000	-	-	-	2.341.869.000
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 10 (29.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 11 (65.00 Ha)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK1 (43.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK2 (56.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK3 (52.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK4 (83.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 5 (60.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 6 (124.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 7 (121.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 8 (94.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 9 (84.00 Ha)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.824.352.000	-	-	-	1.824.352.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 10 (29.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 11 (65.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK1 (43.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK2 (56.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK3 (52.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK4 (83.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 5 (60.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 6 (124.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 7 (121.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 8 (94.00 Ha)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 9 (84.00 Ha)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) (811.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 10 (29.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 11 (65.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK1 (43.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK2 (56.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK3 (52.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK4 (83.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 5 (60.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 6 (124.00 Ha)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 7 (121.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 8 (94.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 9 (84.00 Ha)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	142.000.000	-	-	-	142.000.000
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	142.000.000	-	-	-	142.000.000
	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan (1.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	187.440.000	-	-	-	187.440.000
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (45.99 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	137.440.000	-	-	-	137.440.000
	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang (8.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang (8.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	225.000.000	-	-	-	225.000.000
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (45.99 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan (183.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan (183.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan (183.00 Unit)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	836.428.000	-	-	-	836.428.000
	Persentase peningkatan produksi bibit (-90.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	6.000.000	-	-	-	6.000.000
	Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi (1300000.00 Bibit)					
	Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH (75.00 Sertifikat)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	6.000.000	-	-	-	6.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi (1300000.00 Bibit)					
	Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH (75.00 Sertifikat)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi (1300000.00 Bibit)					
	Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH (75.00 Sertifikat)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi (1300000.00 Bibit)					
	Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH (75.00 Sertifikat)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	49.750.000	-	-	-	49.750.000
	Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi (1300000.00 Bibit)					
	Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH (75.00 Sertifikat)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih	749.678.000	-	-	-	749.678.000
	Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi (1300000.00 Bibit)					
	Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH (75.00 Sertifikat)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**824.768.000**	**-**	**-**	**-**	**824.768.000**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	475.968.000	-	-	-	475.968.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura (71.00 Angka)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	158.736.000	-	-	-	158.736.000
	Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (2.00 Dokumen)					
	Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	72.600.000	-	-	-	72.600.000
	Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (2.00 Dokumen)					
	Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	92.232.000	-	-	-	92.232.000
	Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (2.00 Dokumen)					
	Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (2.00 Dokumen)					
	Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	22.400.000	-	-	-	22.400.000
	Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (2.00 Dokumen)					
	Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (2.00 Dokumen)					
	Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	188.000.000	-	-	-	188.000.000
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani (10.00 %)					
	Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden (100.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	188.000.000	-	-	-	188.000.000
	Jumlah Jenis Tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden (705.00 Jenis)					
	Jumlah pengendalian Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (2.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	160.800.000	-	-	-	160.800.000
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif (60.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	160.800.000	-	-	-	160.800.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Pengendalian pengelolaan Konservasi ekosistem (3.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.005.832.000**	**-**	**-**	**-**	**1.005.832.000**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.005.832.000	-	-	-	1.005.832.000
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (2.50 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10 (0.20 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1 (0.30 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11 (0.20 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2 (0.20 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3 (0.20 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4 (0.20 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5 (0.30 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6 (0.20 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7 (0.30 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8 (0.20 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9 (0.20 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	119.832.000	-	-	-	119.832.000
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 10 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 11 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK1 (3.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK2 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK3 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 4 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 5 (3.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 6 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 7 (3.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 8 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 9 (2.00 Kelompok)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	780.600.000	-	-	-	780.600.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 10 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 11 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK1 (3.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK2 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK3 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 4 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 5 (3.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 6 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 7 (3.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 8 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 9 (2.00 Kelompok)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	105.400.000	-	-	-	105.400.000
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 10 (2.00 Kelompok)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 11 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK1 (3.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK2 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK3 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 4 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 5 (3.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 6 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 7 (3.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 8 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 9 (2.00 Kelompok)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**328.000.000**	**-**	**-**	**-**	**328.000.000**
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	328.000.000	-	-	-	328.000.000
	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani (10.00 %)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	114.000.000	-	-	-	114.000.000
	Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (2.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	184.000.000	-	-	-	184.000.000
	Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (2.00 Unit)					
	Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (2.00 Unit)					
	Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS (2.00 Dokumen)					
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**25.241.735.000**	**113.640.000**	**-**	**-**	**25.355.375.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**25.241.735.000**	**113.640.000**	**-**	**-**	**25.355.375.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**220.000.000**	**-**	**-**	**-**	**220.000.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	220.000.000	-	-	-	220.000.000
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el (98.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	220.000.000	-	-	-	220.000.000
	Persentase penduduk yang terfasilitasi perekaman KTP-el (99.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**210.000.000**	**-**	**-**	**-**	**210.000.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	210.000.000	-	-	-	210.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98% (99.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	210.000.000	-	-	-	210.000.000
	Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi Akta Kelahiran (98.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**194.000.000**	**-**	**-**	**-**	**194.000.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	194.000.000	-	-	-	194.000.000
	Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan (66.67 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	194.000.000	-	-	-	194.000.000
	Persentase Institusi/Lembaga/Badan Hukum yang difasilitasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.749.565.000**	**113.640.000**	**-**	**-**	**19.863.205.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	455.000.000	-	-	-	455.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (95.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	325.000.000	-	-	-	325.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen perencanaan, dan evaluasi yang disusun sesuai peraturan perundangan/jumlah jenis dokumen perencanaan, evaluasi yang disusun (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000	-	-	-	130.000.000
	Jumlah jenis dokumen perencanaan, dan evaluasi yang disusun sesuai peraturan perundangan/jumlah jenis dokumen perencanaan, evaluasi yang disusun (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.625.428.000	-	-	-	15.625.428.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.250.428.000	-	-	-	15.250.428.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	375.000.000	-	-	-	375.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	-	-	-	100.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	705.402.000	64.320.000	-	-	769.722.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000	64.320.000	-	-	65.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.000.000	-	-	-	82.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.722.000	-	-	-	12.722.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.000.000	-	-	-	110.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000	-	-	-	320.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000	49.320.000	-	-	50.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	680.000	49.320.000	-	-	50.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Unit)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.283.055.000	-	-	-	2.283.055.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	565.055.000	-	-	-	565.055.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)*	30.000.000	-	-	-	30.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)*	1.688.000.000	-	-	-	1.688.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	580.000.000	-	-	-	580.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)*	200.000.000	-	-	-	200.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)*	5.000.000	-	-	-	5.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)*	40.000.000	-	-	-	40.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000	-	-	-	20.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**20.850.000**	**-**	**-**	**-**	**20.850.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	20.850.000	-	-	-	20.850.000
	Presentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	20.850.000	-	-	-	20.850.000
	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam rangka Penataan Desa (70.00 Desa)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**602.000.000**	**-**	**-**	**-**	**602.000.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	602.000.000	-	-	-	602.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP) (59.32 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	190.000.000	-	-	-	190.000.000
	Jumlah kerjasama yang di fasilitasi dalam pelaksanaan Kerjasama Desa (3.00 Buah)					
	Jumlah pengembangan kerjasama antar kawasan perdesaan di Jawa Tengah yang terfasilitasi (1.00 Kws)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	412.000.000	-	-	-	412.000.000
	Jumlah kerjasama yang di fasilitasi dalam pelaksanaan Kerjasama Desa (3.00 Buah)					
	Jumlah pengembangan kerjasama antar kawasan perdesaan di Jawa Tengah yang terfasilitasi (1.00 Kws)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.540.320.000**	**-**	**-**	**-**	**1.540.320.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.540.320.000	-	-	-	1.540.320.000
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa (100.00 %)					
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	310.000.000	-	-	-	310.000.000
	Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi (35.00 Kabupaten/Kota)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Desa di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas Desa (50.00 Desa)					
	Jumlah Desa yang termonitor dalam penyusunan produk hukum desa (29.00 Desa)					
	Jumlah dokumen regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa yang difasilitasi dan direkomendasikan (55.00 Dokumen)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah ajuan dokumen tukar menukar tanah kas Desa yang difasilitasi dan direkomendasi (60.00 Dokumen)					
	Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan aset Desa (58.00 Orang)					
	Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan keuangan Desa (58.00 Orang)					
	Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana pada Pemerintahan Desa (29.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Desa di Jawa Tengah yang menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik (58.00 Desa)					
	Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam update Profil Desa dan Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	200.000.000	-	-	-	200.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah ajuan dokumen tukar menukar tanah kas Desa yang difasilitasi dan direkomendasi (60.00 Dokumen)					
	Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan aset Desa (58.00 Orang)					
	Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan keuangan Desa (58.00 Orang)					
	Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana pada Pemerintahan Desa (29.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Desa di Jawa Tengah yang menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik (58.00 Desa)					
	Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam update Profil Desa dan Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	313.170.000	-	-	-	313.170.000
	Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Desa di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas Desa (50.00 Desa)					
	Jumlah Desa yang termonitor dalam penyusunan produk hukum desa (29.00 Desa)					
	Jumlah dokumen regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa yang difasilitasi dan direkomendasikan (55.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	478.000.000	-	-	-	478.000.000
	Jumlah ajuan dokumen tukar menukar tanah kas Desa yang difasilitasi dan direkomendasi (60.00 Dokumen)					
	Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan aset Desa (58.00 Orang)					
	Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan keuangan Desa (58.00 Orang)					
	Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana pada Pemerintahan Desa (29.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Desa di Jawa Tengah yang menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik (58.00 Desa)					
	Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam update Profil Desa dan Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.150.000	-	-	-	4.150.000
	Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Desa di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas Desa (50.00 Desa)					
	Jumlah Desa yang termonitor dalam penyusunan produk hukum desa (29.00 Desa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah dokumen regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa yang difasilitasi dan direkomendasikan (55.00 Dokumen)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	185.000.000	-	-	-	185.000.000
	Jumlah ajuan dokumen tukar menukar tanah kas Desa yang difasilitasi dan direkomendasi (60.00 Dokumen)					
	Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan aset Desa (58.00 Orang)					
	Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan keuangan Desa (58.00 Orang)					
	Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana pada Pemerintahan Desa (29.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Desa di Jawa Tengah yang menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik (58.00 Desa)					
	Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam update Profil Desa dan Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**2.705.000.000**	**-**	**-**	**-**	**2.705.000.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.705.000.000	-	-	-	2.705.000.000
	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah (13.24 %)					
	Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya (100.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) (100.00 %)					
	Persentase pasar desa yang terverifikasi baik tata kelola kelembagaannya (17.24 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah anggota LPMD/K di Jawa Tengah yang dilatih peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat (150.00 Orang)					
	Jumlah anggota Pokjanal Posyandu yang difasilitasi peningkatan kapasitas (70.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah BUMDes dengan klasifikasi tumbuh/pemula dan berkembang yang di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya (350.00 Unit)					
	Jumlah keikutsertaan Jateng di Gelar TTG Nasional (1.00 Kali)					
	Jumlah Pasar Desa yang difasilitasi penguatan kelembagaannya (145.00 Unit)					
	Jumlah Pasar Desa yang difasilitasi peningkatan kapasitas pengelola (150.00 Unit)					
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Jawa Tengah (1.00 Kali)					
	Jumlah Posyantek yang di fasilitasi revitalisasi peran dan fungsinya dalam pemanfaatan TTG di Jawa Tengah (35.00 Unit)					
	Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (35.00 Kabupaten/Kota)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah anggota LPMD/K di Jawa Tengah yang dilatih peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat (150.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah anggota Pokjanal Posyandu yang difasilitasi peningkatan kapasitas (70.00 Orang)					
	Jumlah BUMDes dengan klasifikasi tumbuh/pemula dan berkembang yang di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya (350.00 Unit)					
	Jumlah keikutsertaan Jateng di Gelar TTG Nasional (1.00 Kali)					
	Jumlah Pasar Desa yang difasilitasi penguatan kelembagaannya (145.00 Unit)					
	Jumlah Pasar Desa yang difasilitasi peningkatan kapasitas pengelola (150.00 Unit)					
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Jawa Tengah (1.00 Kali)					
	Jumlah Posyantek yang di fasilitasi revitalisasi peran dan fungsinya dalam pemanfaatan TTG di Jawa Tengah (35.00 Unit)					
	Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (35.00 Kabupaten/Kota)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Jumlah anggota LPMD/K di Jawa Tengah yang dilatih peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat (150.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah anggota Pokjanal Posyandu yang difasilitasi peningkatan kapasitas (70.00 Orang)					
	Jumlah BUMDes dengan klasifikasi tumbuh/pemula dan berkembang yang di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya (350.00 Unit)					
	Jumlah keikutsertaan Jateng di Gelar TTG Nasional (1.00 Kali)					
	Jumlah Pasar Desa yang difasilitasi penguatan kelembagaannya (145.00 Unit)					
	Jumlah Pasar Desa yang difasilitasi peningkatan kapasitas pengelola (150.00 Unit)					
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Jawa Tengah (1.00 Kali)					
	Jumlah Posyantek yang di fasilitasi revitalisasi peran dan fungsinya dalam pemanfaatan TTG di Jawa Tengah (35.00 Unit)					
	Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (35.00 Kabupaten/Kota)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	125.000.000	-	-	-	125.000.000
	Jumlah anggota LPMD/K di Jawa Tengah yang dilatih peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat (150.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah anggota Pokjanal Posyandu yang difasilitasi peningkatan kapasitas (70.00 Orang)					
	Jumlah BUMDes dengan klasifikasi tumbuh/pemula dan berkembang yang di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya (350.00 Unit)					
	Jumlah keikutsertaan Jateng di Gelar TTG Nasional (1.00 Kali)					
	Jumlah Pasar Desa yang difasilitasi penguatan kelembagaannya (145.00 Unit)					
	Jumlah Pasar Desa yang difasilitasi peningkatan kapasitas pengelola (150.00 Unit)					
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Jawa Tengah (1.00 Kali)					
	Jumlah Posyantek yang di fasilitasi revitalisasi peran dan fungsinya dalam pemanfaatan TTG di Jawa Tengah (35.00 Unit)					
	Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (35.00 Kabupaten/Kota)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah anggota LPMD/K di Jawa Tengah yang dilatih peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat (150.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah anggota Pokjanal Posyandu yang difasilitasi peningkatan kapasitas (70.00 Orang)					
	Jumlah BUMDes dengan klasifikasi tumbuh/pemula dan berkembang yang di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya (350.00 Unit)					
	Jumlah keikutsertaan Jateng di Gelar TTG Nasional (1.00 Kali)					
	Jumlah Pasar Desa yang difasilitasi penguatan kelembagaannya (145.00 Unit)					
	Jumlah Pasar Desa yang difasilitasi peningkatan kapasitas pengelola (150.00 Unit)					
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Jawa Tengah (1.00 Kali)					
	Jumlah Posyantek yang di fasilitasi revitalisasi peran dan fungsinya dalam pemanfaatan TTG di Jawa Tengah (35.00 Unit)					
	Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (35.00 Kabupaten/Kota)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.750.000.000	-	-	-	1.750.000.000
	Jumlah anggota LPMD/K di Jawa Tengah yang dilatih peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat (150.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah anggota Pokjanal Posyandu yang difasilitasi peningkatan kapasitas (70.00 Orang)					
	Jumlah BUMDes dengan klasifikasi tumbuh/pemula dan berkembang yang di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya (350.00 Unit)					
	Jumlah keikutsertaan Jateng di Gelar TTG Nasional (1.00 Kali)					
	Jumlah Pasar Desa yang difasilitasi penguatan kelembagaannya (145.00 Unit)					
	Jumlah Pasar Desa yang difasilitasi peningkatan kapasitas pengelola (150.00 Unit)					
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Jawa Tengah (1.00 Kali)					
	Jumlah Posyantek yang di fasilitasi revitalisasi peran dan fungsinya dalam pemanfaatan TTG di Jawa Tengah (35.00 Unit)					
	Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (35.00 Kabupaten/Kota)					
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**192.349.902.000**	**8.398.173.000**	**-**	**-**	**200.748.075.000**
2.15.2.15.0.00.0.00.01	**Dinas Perhubungan**	**192.349.902.000**	**8.398.173.000**	**-**	**-**	**200.748.075.000**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**68.222.521.000**	**550.000.000**	**-**	**-**	**68.772.521.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	346.600.000	-	-	-	346.600.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	261.600.000	-	-	-	261.600.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.000	-	-	-	85.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.042.889.000	-	-	-	51.042.889.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (100.00 %)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.238.689.000	-	-	-	50.238.689.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (2.00 Dokumen)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	734.200.000	-	-	-	734.200.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (2.00 Dokumen)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.155.000.000	-	-	-	1.155.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.155.000.000	-	-	-	1.155.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.000.000	-	-	-	160.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	55.000.000	-	-	-	55.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.000.000	-	-	-	105.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.438.352.000	-	-	-	2.438.352.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	257.000.000	-	-	-	257.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.000.000	-	-	-	89.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	89.500.000	-	-	-	89.500.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	43.000.000	-	-	-	43.000.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	229.852.000	-	-	-	229.852.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	5.000.000	-	-	-	5.000.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	60.000.000	-	-	-	60.000.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	1.605.000.000	-	-	-	1.605.000.000
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.000.000	-	-	-	60.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	550.000.000	-	-	550.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	550.000.000	-	-	550.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (35.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.252.780.000	-	-	-	11.252.780.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	-	-	-	6.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (24.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.589.225.000	-	-	-	1.589.225.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.657.555.000	-	-	-	9.657.555.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (24.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.826.900.000	-	-	-	1.826.900.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	857.400.000	-	-	-	857.400.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (49.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (49.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (7.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	410.000.000	-	-	-	410.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (11.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (13.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (21.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (49.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (7.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (9.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.500.000	-	-	-	129.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (11.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (13.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (21.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (49.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (7.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (9.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (49.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**122.979.680.000**	**7.117.000.000**	**-**	**-**	**130.096.680.000**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	380.000.000	-	-	-	380.000.000
	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis (0.52 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	380.000.000	-	-	-	380.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Rasio implementasi dokumen RIJLLAJ (0.50 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	509.690.000	1.629.700.000	-	-	2.139.390.000
	Rasio konektivitas perkotaan (0.48 Angka)					
	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan (0.39 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	509.690.000	1.629.700.000	-	-	2.139.390.000
	Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi (0.62 Angka)					
	Rasio perlengkapan jalan terpasang (0.63 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	450.000.000	4.705.000.000	-	-	5.155.000.000
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (0.21 Angka)					
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (0.02 Angka)					
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (0.25 Angka)					
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (0.24 Angka)					
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (0.22 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (0.18 Angka)					
	Rasio pemanfatan terminal (0.23 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	-	105.000.000	-	-	105.000.000
	Rasio terminal tipe B dalam kondisi baik (0.41 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	-	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000
	Rasio terminal tipe B dalam kondisi baik (0.41 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	-	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000
	Rasio terminal tipe B dalam kondisi baik (0.41 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (0.50 Angka)					
	Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (0.50 Angka)					
	Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (0.50 Angka)					
	Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (0.50 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (0.50 Angka)					
	Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (0.50 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.607.163.000	295.300.000	-	-	2.902.463.000
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (0.95 Angka)					
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (0.94 Angka)					
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (0.95 Angka)					
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (0.94 Angka)					
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (0.95 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (0.95 Angka)					
	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan (0.39 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	46.320.000	-	-	-	46.320.000
	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng (17.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (12.00 Dokumen)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	898.080.000	-	-	-	898.080.000
	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (0.33 Angka)					
	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (0.19 Angka)					
	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (0.11 Angka)					
	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (0.14 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (0.24 Angka)					
	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (0.50 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng (17.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (12.00 Dokumen)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.592.763.000	295.300.000	-	-	1.888.063.000
	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (0.33 Angka)					
	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (0.19 Angka)					
	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (0.11 Angka)					
	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (0.14 Angka)					
	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (0.24 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (0.50 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan (0.39 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.0006	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Jumlah rekomendasi / persetujuan andalalin di Jalan provinsi (390.00 Dokumen)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.611.515.000	-	-	-	1.611.515.000
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (0.84 Angka)					
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (0.84 Angka)					
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (0.84 Angka)					
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (0.84 Angka)					
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (0.84 Angka)					
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (0.84 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah (0.99 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1.200.665.000	-	-	-	1.200.665.000
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (22676.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (2340.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (7071.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (3659.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (4198.00 Unit)					
	Jumlah total kendaraan yang di ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (1038.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah (439863.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	210.850.000	-	-	-	210.850.000
	Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah (439863.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (22676.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (2340.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (7071.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (3659.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (4198.00 Unit)					
	Jumlah total kendaraan yang di ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (1038.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	116.825.524.000	487.000.000	-	-	117.312.524.000
	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum (67.34 %)					
	Persentase perpindahan moda angkutan umum (53.00 %)					
	Rasio trayek angkutan jalan (0.56 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	924.955.000	-	-	-	924.955.000
	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani (27824836.00 Orang)					
	Rasio angkutan barang yang berijin (0.32 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	115.900.569.000	487.000.000	-	-	116.387.569.000
	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani (27824836.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan (6944462.00 Orang)					
	Rasio angkutan barang yang berijin (0.32 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	360.788.000	-	-	-	360.788.000
	Rasio trayek angkutan jalan (0.56 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	290.500.000	-	-	-	290.500.000
	Rasio kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (0.86 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	70.288.000	-	-	-	70.288.000
	Rasio kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (0.86 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Rasio trayek angkutan jalan (0.56 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan (0.09 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Rasio trayek angkutan jalan (0.56 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin (0.62 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Rasio trayek angkutan jalan (0.56 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Rasio angkutan taksi terpenuhi (0.44 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Rasio trayek angkutan jalan (0.56 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Rasio trayek yang ditetapkan pemukhtahiran tarif (1.00 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**217.500.000**	**561.600.000**	**-**	**-**	**779.100.000**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP (0.38 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Rasio dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasrkan tingkatannya (0.40 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP (0.38 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin (0.13 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	79.100.000	-	-	-	79.100.000
	Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP (0.38 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	79.100.000	-	-	-	79.100.000
	Berth occupancy ratio (0.45 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.400.000	561.600.000	-	-	570.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP (0.38 Angka)					
	Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai (0.40 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	130.000.000	-	-	130.000.000
	Rasio fasilitas keselamatan penyeberangan sungai terpenuhi (0.18 Angka)					
	Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi (0.53 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	400.000.000	-	-	400.000.000
	Rasio fasilitas keselamatan penyeberangan sungai terpenuhi (0.18 Angka)					
	Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi (0.53 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.400.000	31.600.000	-	-	40.000.000
	Rasio fasilitas keselamatan penyeberangan sungai terpenuhi (0.18 Angka)					
	Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi (0.53 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**930.201.000**	**169.573.000**	**-**	**-**	**1.099.774.000**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	930.201.000	169.573.000	-	-	1.099.774.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan (0.08 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	930.201.000	169.573.000	-	-	1.099.774.000
	Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian (0.36 Angka)					
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**64.240.848.000**	**14.174.305.000**	**-**	**-**	**78.415.153.000**
2.16.2.16.0.00.0.00.01	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**64.240.848.000**	**14.174.305.000**	**-**	**-**	**78.415.153.000**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**29.477.129.000**	**160.000.000**	**-**	**-**	**29.637.129.000**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	610.000.000	-	-	-	610.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (3.01 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	411.510.000	-	-	-	411.510.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.490.000	-	-	-	198.490.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.173.911.000	-	-	-	21.173.911.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (79.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.589.686.000	-	-	-	20.589.686.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	352.000.000	-	-	-	352.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.150.000	-	-	-	75.150.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	83.225.000	-	-	-	83.225.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	73.850.000	-	-	-	73.850.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	270.000.000	-	-	-	270.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (79.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	36.000.000	-	-	-	36.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran (3.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran (3.00 Dokumen)*	200.000.000	-	-	-	200.000.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran (3.00 Dokumen)*	34.000.000	-	-	-	34.000.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (79.00 %)*	450.000.000	-	-	-	450.000.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)*	50.000.000	-	-	-	50.000.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)*	80.000.000	-	-	-	80.000.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)*	320.000.000	-	-	-	320.000.000
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.854.875.000	-	-	-	1.854.875.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (79.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.000.000	-	-	-	85.000.000
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	431.875.000	-	-	-	431.875.000
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85.000.000	-	-	-	85.000.000
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	135.000.000	-	-	-	135.000.000
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.000.000	-	-	-	3.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	185.000.000	-	-	-	185.000.000
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.000.000	-	-	-	750.000.000
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	160.000.000	-	-	160.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (79.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	80.000.000	-	-	80.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, selama satu tahun anggaran (3.00 Unit)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	80.000.000	-	-	80.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, selama satu tahun anggaran (3.00 Unit)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.241.343.000	-	-	-	4.241.343.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (79.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.343.000	-	-	-	5.343.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran (4.00 Laporan)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000	-	-	-	1.200.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran (4.00 Laporan)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000	-	-	-	36.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran (4.00 Laporan)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran (4.00 Laporan)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	877.000.000	-	-	-	877.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (79.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran (239.00 Unit)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran (239.00 Unit)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	22.000.000	-	-	-	22.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran (239.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran (239.00 Unit)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran (239.00 Unit)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran (239.00 Unit)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**24.459.750.000**	**-**	**-**	**-**	**24.459.750.000**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	24.459.750.000	-	-	-	24.459.750.000
	Nilai keterbukaan informasi publik (33.00 Angka)					
	Nilai survey kepuasan komunikasi publik (81.00 Angka)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.368.209.000	-	-	-	1.368.209.000
	Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (91.00 Kelompok)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (260.00 Konten)					
	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (260.00 Dokumen)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.700.000.000	-	-	-	1.700.000.000
	Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (91.00 Kelompok)					
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (260.00 Konten)					
	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (260.00 Dokumen)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	559.750.000	-	-	-	559.750.000
	Persentase Badan Publik yang Terbuka (Informatif) (80.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media	505.841.000	-	-	-	505.841.000
	Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (91.00 Kelompok)					
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (260.00 Konten)					
	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (260.00 Dokumen)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.904.750.000	-	-	-	1.904.750.000
	Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (91.00 Kelompok)					
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (260.00 Konten)					
	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (260.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (91.00 Kelompok)					
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (260.00 Konten)					
	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (260.00 Dokumen)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	5.353.000.000	-	-	-	5.353.000.000
	Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (91.00 Kelompok)					
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (260.00 Konten)					
	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (260.00 Dokumen)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	334.027.000	-	-	-	334.027.000
	Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (91.00 Kelompok)					
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (260.00 Konten)					
	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (260.00 Dokumen)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	9.437.881.000	-	-	-	9.437.881.000
	Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (91.00 Kelompok)					
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (260.00 Konten)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (260.00 Dokumen)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.800.000.000	-	-	-	1.800.000.000
	Persentase Badan Publik yang Terbuka (Informatif) (80.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	1.096.292.000	-	-	-	1.096.292.000
	Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan (91.00 Kelompok)					
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (260.00 Konten)					
	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum (260.00 Dokumen)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**6.607.445.000**	**13.500.000.000**	**-**	**-**	**20.107.445.000**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	6.607.445.000	13.500.000.000	-	-	20.107.445.000
	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (74.00 %)					
	Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi (47.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2.817.254.000	-	-	-	2.817.254.000
	Persentase Aplikasi Umum yang Terkelola (100.00 %)					
	Persentase Dokumen Tata Kelola e-Government yang diterbitkan (65.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem e-Government yang terintegrasi (50.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	80.082.000	-	-	-	80.082.000
	Persentase Aplikasi Umum yang Terkelola (100.00 %)					
	Persentase Dokumen Tata Kelola e-Government yang diterbitkan (65.00 %)					
	Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem e-Government yang terintegrasi (50.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.880.800.000	-	-	-	1.880.800.000
	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi layanan Pusat Data (41.00 OPD)					
	Jumlah regulasi/SOP layanan Infrastruktur TIK (2.00 Dokumen)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	102.664.000	-	-	-	102.664.000
	Persentase Aplikasi Umum yang Terkelola (100.00 %)					
	Persentase Dokumen Tata Kelola e-Government yang diterbitkan (65.00 %)					
	Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem e-Government yang terintegrasi (50.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	1.726.645.000	13.500.000.000	-	-	15.226.645.000
	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi layanan Pusat Data (41.00 OPD)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah regulasi/SOP layanan Infrastruktur TIK (2.00 Dokumen)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**1.210.829.000**	**-**	**-**	**-**	**1.210.829.000**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1.210.829.000	-	-	-	1.210.829.000
	Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah (48.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	378.750.000	-	-	-	378.750.000
	Persentase Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi (60.00 %)					
	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data (48.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi (60.00 %)					
	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data (48.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	260.000.000	-	-	-	260.000.000
	Persentase Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi (60.00 %)					
	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data (48.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	304.370.000	-	-	-	304.370.000
	Persentase Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi (60.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data (48.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	167.709.000	-	-	-	167.709.000
	Persentase Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi (60.00 %)					
	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data (48.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**2.485.695.000**	**514.305.000**	**-**	**-**	**3.000.000.000**
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1.341.640.000	-	-	-	1.341.640.000
	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80% (50.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	240.520.000	-	-	-	240.520.000
	Jumlah SDM yang mampu menerapkan SMKI (240.00 Orang)					
	Meningkatnya Ketersediaan Layanan yang Menerapkan Prinsip SMKI dan sumber daya pendukung yang memadai (50.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	145.000.000	-	-	-	145.000.000
	Jumlah SDM yang mampu menerapkan SMKI (240.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Meningkatnya Ketersediaan Layanan yang Menerapkan Prinsip SMKI dan sumber daya pendukung yang memadai (50.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	370.600.000	-	-	-	370.600.000
	Jumlah SDM yang mampu menerapkan SMKI (240.00 Orang)					
	Meningkatnya Ketersediaan Layanan yang Menerapkan Prinsip SMKI dan sumber daya pendukung yang memadai (50.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	585.520.000	-	-	-	585.520.000
	Jumlah SDM yang mampu menerapkan SMKI (240.00 Orang)					
	Meningkatnya Ketersediaan Layanan yang Menerapkan Prinsip SMKI dan sumber daya pendukung yang memadai (50.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	1.144.055.000	514.305.000	-	-	1.658.360.000
	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80% (50.00 %)					
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1.144.055.000	514.305.000	-	-	1.658.360.000
	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Jaring Komunkasi Sandi (50.00 %)					
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**35.628.752.000**	**192.700.000**	**-**	**-**	**35.821.452.000**
2.17.2.17.0.00.0.00.01	**Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**	**35.628.752.000**	**192.700.000**	**-**	**-**	**35.821.452.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**25.715.210.000**	**192.700.000**	**-**	**-**	**25.907.910.000**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	486.444.000	-	-	-	486.444.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	311.444.000	-	-	-	311.444.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.000.000	-	-	-	175.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.483.160.000	-	-	-	16.483.160.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.933.826.000	-	-	-	15.933.826.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (38.00 Dokumen)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	421.590.000	-	-	-	421.590.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (38.00 Dokumen)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	127.744.000	-	-	-	127.744.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (38.00 Dokumen)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (12.00 Dokumen)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.000.000	-	-	-	26.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.000.000	-	-	-	6.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.723.680.000	-	-	-	1.723.680.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	171.400.000	-	-	-	171.400.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12.000.000	-	-	-	12.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	115.000.000	-	-	-	115.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.124.280.000	-	-	-	1.124.280.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.000.000	-	-	-	6.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	192.700.000	-	-	207.700.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	110.000.000	-	-	110.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (44.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (52.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	60.000.000	-	-	75.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (44.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (52.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	22.700.000	-	-	22.700.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (44.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (52.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.278.926.000	-	-	-	6.278.926.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.500.000	-	-	-	11.500.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (38.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.533.100.000	-	-	-	1.533.100.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (38.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (38.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.664.326.000	-	-	-	4.664.326.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (38.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	612.000.000	-	-	-	612.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000	-	-	-	16.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (133.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	195.000.000	-	-	-	195.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (133.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (161.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (133.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (161.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (133.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (161.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	45.000.000	-	-	-	45.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (133.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (161.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	145.000.000	-	-	-	145.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (133.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (161.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.000.000	-	-	-	126.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (133.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (161.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**1.499.384.000**	**-**	**-**	**-**	**1.499.384.000**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	645.052.000	-	-	-	645.052.000
	Persentase koperasi berkualitas (26.74 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	645.052.000	-	-	-	645.052.000
	Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diperiksa (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	854.332.000	-	-	-	854.332.000
	Persentase koperasi berkualitas (26.74 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	854.332.000	-	-	-	854.332.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Provinsi yang sudah diperiksa (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**734.908.000**	**-**	**-**	**-**	**734.908.000**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	734.908.000	-	-	-	734.908.000
	Persentase SDM koperasi yang berkualitas (11.50 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	734.908.000	-	-	-	734.908.000
	Persentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya (90.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**1.606.604.000**	**-**	**-**	**-**	**1.606.604.000**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.606.604.000	-	-	-	1.606.604.000
	Persentase koperasi provinsi produktif (48.53 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	705.776.000	-	-	-	705.776.000
	Persentase Jumlah Koperasi Provinsi yang mengalami peningkatan usahanya (42.93 %)					
	Presentase Koperasi Provinsi yang mengalami penguatan manajemen dan kelembagaannya (33.56 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	900.828.000	-	-	-	900.828.000
	Persentase Jumlah Koperasi Provinsi yang mengalami peningkatan usahanya (42.93 %)					
	Presentase Koperasi Provinsi yang mengalami penguatan manajemen dan kelembagaannya (33.56 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**3.494.064.000**	**-**	**-**	**-**	**3.494.064.000**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	3.494.064.000	-	-	-	3.494.064.000
	Persentase pertumbuhan wirausaha baru (25.00 %)					
	Persentase usaha mikro mandiri (82.30 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase Usaha Mikro yang meningkat kapasitas usahanya (94.14 %)					
	Persentase Usaha Mikro yang meningkat pembiayaannya (94.44 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	865.220.000	-	-	-	865.220.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase SDM UMKM dan Wirausaha yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan usahanya (95.86 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	547.940.000	-	-	-	547.940.000
	Persentase Usaha Mikro yang meningkat kapasitas usahanya (94.14 %)					
	Persentase Usaha Mikro yang meningkat pembiayaannya (94.44 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	650.000.000	-	-	-	650.000.000
	Persentase Usaha Mikro yang meningkat kapasitas usahanya (94.14 %)					
	Persentase Usaha Mikro yang meningkat pembiayaannya (94.44 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	1.130.904.000	-	-	-	1.130.904.000
	Persentase Usaha Mikro yang meningkat kapasitas usahanya (94.14 %)					
	Persentase Usaha Mikro yang meningkat pembiayaannya (94.44 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**2.578.582.000**	**-**	**-**	**-**	**2.578.582.000**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2.578.582.000	-	-	-	2.578.582.000
	Persentase UMKM siap bermitra (23.08 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	554.320.000	-	-	-	554.320.000
	Persentase UMKM yang difasilitasi kemitraannya (15.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Usaha Kecil yang meningkat Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Jaringan Usaha, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologinya (30.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	2.024.262.000	-	-	-	2.024.262.000
	Persentase UMKM yang difasilitasi kemitraannya (15.00 %)					
	Persentase Usaha Kecil yang meningkat Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Jaringan Usaha, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologinya (30.00 %)					
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**24.754.845.000**	**370.173.000**	**-**	**-**	**25.125.018.000**
2.18.2.18.0.00.0.00.01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**24.754.845.000**	**370.173.000**	**-**	**-**	**25.125.018.000**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.815.633.000**	**370.173.000**	**-**	**-**	**20.185.806.000**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	304.347.000	-	-	-	304.347.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158.000.000	-	-	-	158.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.347.000	-	-	-	146.347.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	16.263.466.000	-	-	-	16.263.466.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)*	15.933.466.000	-	-	-	15.933.466.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)*	330.000.000	-	-	-	330.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	80.000.000	-	-	-	80.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)*	80.000.000	-	-	-	80.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	54.000.000	-	-	-	54.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	24.000.000	-	-	-	24.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	-	-	-	30.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	680.674.000	-	-	-	680.674.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.000.000	-	-	-	87.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.854.000	-	-	-	68.854.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	8.000.000	-	-	-	8.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.820.000	-	-	-	279.820.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.000.000	-	-	-	12.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	370.173.000	-	-	370.173.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	370.173.000	-	-	370.173.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (27.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.099.646.000	-	-	-	2.099.646.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	-	-	-	8.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.500.000	-	-	-	600.500.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000	-	-	-	24.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.467.146.000	-	-	-	1.467.146.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.500.000	-	-	-	333.500.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000	-	-	-	95.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (187.00 Unit)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.500.000	-	-	-	4.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (187.00 Unit)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000	-	-	-	110.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (187.00 Unit)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.000.000	-	-	-	109.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (187.00 Unit)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (187.00 Unit)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**560.640.000**	**-**	**-**	**-**	**560.640.000**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	310.640.000	-	-	-	310.640.000
	Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan (50.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	310.640.000	-	-	-	310.640.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan (50.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah Kajian IPRO Pengembangan Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang dipromosikan (1.00 Dokumen)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**1.612.500.000**	**-**	**-**	**-**	**1.612.500.000**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.612.500.000	-	-	-	1.612.500.000
	Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan (50.00 %)					
	Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN (67.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.582.500.000	-	-	-	1.582.500.000
	Jumlah kemitraan usaha yang dihasilkan (8.00 Dokumen)					
	Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan (35.00 Dokumen)					
	Jumlah kepeminatan PMA/PMDN yang dilakukan pengawalan (35.00 Dokumen)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah kemitraan usaha yang dihasilkan (8.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan (35.00 Dokumen)					
	Jumlah kepeminatan PMA/PMDN yang dilakukan pengawalan (35.00 Dokumen)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**1.654.602.000**	**-**	**-**	**-**	**1.654.602.000**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	850.000.000	-	-	-	850.000.000
	Persentase pemenuhan standar pelayanan (100.00 %)					
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	850.000.000	-	-	-	850.000.000
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (100.00 %)					
	Persentase standar pelayanan sesuai ISO (90.00 %)					
	Presentase analisis pengembangan sarana prasarana layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	804.602.000	-	-	-	804.602.000
	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan (91.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	720.000.000	-	-	-	720.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan (800.00 Dokumen)					
	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan (700.00 Dokumen)					
	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian (500.00 Dokumen)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	84.602.000	-	-	-	84.602.000
	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan (800.00 Dokumen)					
	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan (700.00 Dokumen)					
	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian (500.00 Dokumen)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**561.470.000**	**-**	**-**	**-**	**561.470.000**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	561.470.000	-	-	-	561.470.000
	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui (22.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	200.000.000	-	-	-	200.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disetujui (20500.00 Unit)					
	Jumlah pelaku usaha dan/atau aparatur yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (100.00 Orang)					
	Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (200.00 Unit)					
	Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi (80.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	161.470.000	-	-	-	161.470.000
	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disetujui (20500.00 Unit)					
	Jumlah pelaku usaha dan/atau aparatur yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (100.00 Orang)					
	Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (200.00 Unit)					
	Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi (80.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disetujui (20500.00 Unit)					
	Jumlah pelaku usaha dan/atau aparatur yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (200.00 Unit)					
	Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi (80.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**550.000.000**	**-**	**-**	**-**	**550.000.000**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	550.000.000	-	-	-	550.000.000
	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan (10.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	550.000.000	-	-	-	550.000.000
	Jumlah aplikasi yang dikembangkan (1.00 Unit)					
	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dipublikasikan (100.00 %)					
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**457.272.367.000**	**8.800.000.000**	**-**	**-**	**466.072.367.000**
2.19.2.19.3.26.0.00.02	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	**457.272.367.000**	**8.800.000.000**	**-**	**-**	**466.072.367.000**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**49.976.367.000**	**-**	**-**	**-**	**49.976.367.000**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.030.000	-	-	-	550.030.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.030.000	-	-	-	300.030.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.526.337.000	-	-	-	27.526.337.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.066.337.000	-	-	-	27.066.337.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	460.000.000	-	-	-	460.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	550.000.000	-	-	-	550.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	550.000.000	-	-	-	550.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (100.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.114.000.000	-	-	-	2.114.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	130.000.000	-	-	-	130.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000	-	-	-	160.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	-	-	-	4.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105.000.000	-	-	-	105.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	285.000.000	-	-	-	285.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.100.000.000	-	-	-	1.100.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.635.000.000	-	-	-	15.635.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	-	-	-	35.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.700.000.000	-	-	-	3.700.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.700.000.000	-	-	-	11.700.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.751.000.000	-	-	-	2.751.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.000.000	-	-	-	290.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	361.000.000	-	-	-	361.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.800.000.000	-	-	-	1.800.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**11.525.000.000**	**-**	**-**	**-**	**11.525.000.000**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	3.250.000.000	-	-	-	3.250.000.000
	Jumlah wirausaha muda mandiri (10.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	700.000.000	-	-	-	700.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah wirausaha muda (100.00 Orang)					
	Peningkatan jumlah lokus unggulan hasil pendampingan kepeloporan pemuda (100.00 Lokasi)					
	Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan					
	Kesehatan dan kesejahteraan					
	gender dan diskriminasi (4.00 Dokumen)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	650.000.000	-	-	-	650.000.000
	Jumlah wirausaha muda (100.00 Orang)					
	Peningkatan jumlah lokus unggulan hasil pendampingan kepeloporan pemuda (100.00 Lokasi)					
	Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan					
	Kesehatan dan kesejahteraan					
	gender dan diskriminasi (4.00 Dokumen)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	1.600.000.000	-	-	-	1.600.000.000
	Jumlah wirausaha muda (100.00 Orang)					
	Peningkatan jumlah lokus unggulan hasil pendampingan kepeloporan pemuda (100.00 Lokasi)					
	Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan					
	Kesehatan dan kesejahteraan					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	gender dan diskriminasi (4.00 Dokumen)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Jumlah wirausaha muda (100.00 Orang)					
	Peningkatan jumlah lokus unggulan hasil pendampingan kepeloporan pemuda (100.00 Lokasi)					
	Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan					
	Kesehatan dan kesejahteraan					
	gender dan diskriminasi (4.00 Dokumen)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	8.275.000.000	-	-	-	8.275.000.000
	Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi (75.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	225.000.000	-	-	-	225.000.000
	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan provinsi (250.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	8.050.000.000	-	-	-	8.050.000.000
	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan provinsi (250.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**379.986.000.000**	**8.800.000.000**	**-**	**-**	**388.786.000.000**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	200.000.000	8.800.000.000	-	-	9.000.000.000
	Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi (105.00 Orang)					
	Persentase peningkatan perolehan medali (31.25 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	200.000.000	8.800.000.000	-	-	9.000.000.000
	Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan (105.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	17.920.000.000	-	-	-	17.920.000.000
	Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi (105.00 Orang)					
	Persentase peningkatan perolehan medali (31.25 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	4.400.000.000	-	-	-	4.400.000.000
	Kebugaran/pemassalan Olahraga (26500.00 Orang)					
	Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi (190.00 Orang)					
	Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi (250.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Kebugaran/pemassalan Olahraga (26500.00 Orang)					
	Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi (250.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	13.370.000.000	-	-	-	13.370.000.000
	Kebugaran/pemassalan Olahraga (26500.00 Orang)					
	Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi (190.00 Orang)					
	Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi (250.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	361.866.000.000	-	-	-	361.866.000.000
	Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi (105.00 Orang)					
	Persentase peningkatan perolehan medali (31.25 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional (125.00 Orang)					
	Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional (284.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	70.055.000.000	-	-	-	70.055.000.000
	Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional (125.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	13.736.000.000	-	-	-	13.736.000.000
	Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional (125.00 Orang)					
	Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional (284.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional (125.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	277.625.000.000	-	-	-	277.625.000.000
	Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional (125.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**6.200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**6.200.000.000**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	5.200.000.000	-	-	-	5.200.000.000
	Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan (26.67 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	5.200.000.000	-	-	-	5.200.000.000
	Daya Tarik Wisata yang dikembangkan (2.00 Lokasi)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan (26.67 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	500.000.000	-	-	-	500.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang terkelola (2.00 Lokasi)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan (26.67 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	118.000.000	-	-	-	118.000.000
	Usaha Pariwiata yang memiliki TDUP/NIB (110.00 Dokumen)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	382.000.000	-	-	-	382.000.000
	Usaha Pariwiata yang memiliki TDUP/NIB (110.00 Dokumen)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**5.660.000.000**	**-**	**-**	**-**	**5.660.000.000**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5.660.000.000	-	-	-	5.660.000.000
	Jumlah kunjungan wisatawan (54069703.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Pengguna Media Sarpras Pemasaran Pariwisata (450000.00 Orang)					
	Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri (85.00 Kegiatan)					
	Tujuan Pasar Wisata Potensial (3.00 Lokasi)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	650.000.000	-	-	-	650.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Pengguna Media Sarpras Pemasaran Pariwisata (450000.00 Orang)					
	Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri (85.00 Kegiatan)					
	Tujuan Pasar Wisata Potensial (3.00 Lokasi)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4.660.000.000	-	-	-	4.660.000.000
	Pengguna Media Sarpras Pemasaran Pariwisata (450000.00 Orang)					
	Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri (85.00 Kegiatan)					
	Tujuan Pasar Wisata Potensial (3.00 Lokasi)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**550.000.000**	**-**	**-**	**-**	**550.000.000**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan) (8.00 Kabupaten/Kota)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang PMK3I (2.00 Kabupaten/Kota)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan) (8.00 Kabupaten/Kota)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.02.0008	Perlindungan Hasil Kreativitas	100.000.000	-	-	-	100.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi HKI (80.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**3.375.000.000**	**-**	**-**	**-**	**3.375.000.000**
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	2.675.000.000	-	-	-	2.675.000.000
	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi (33.87 %)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan (831.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1.275.000.000	-	-	-	1.275.000.000
	Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan (831.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	1.050.000.000	-	-	-	1.050.000.000
	Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan (831.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	700.000.000	-	-	-	700.000.000
	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi (33.87 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif yang di latih dan disertifikasi (240.00 Orang)					
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif yang di latih dan disertifikasi (240.00 Orang)					
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**34.595.312.000**	**1.205.645.000**	**-**	**-**	**35.800.957.000**
2.23.2.23.2.24.0.00.02	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**34.595.312.000**	**1.205.645.000**	**-**	**-**	**35.800.957.000**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**33.189.359.000**	**200.000.000**	**-**	**-**	**33.389.359.000**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.000.000	-	-	-	175.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	135.000.000	-	-	-	135.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.887.910.000	-	-	-	27.887.910.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)*	27.637.910.000	-	-	-	27.637.910.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)*	250.000.000	-	-	-	250.000.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	95.000.000	-	-	-	95.000.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)*	90.000.000	-	-	-	90.000.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)*	5.000.000	-	-	-	5.000.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	61.000.000	-	-	-	61.000.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	5.000.000	-	-	-	5.000.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	-	-	-	10.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.000.000	-	-	-	46.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.074.000.000	-	-	-	1.074.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	-	-	-	25.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	9.000.000	-	-	-	9.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	175.000.000	-	-	-	175.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	200.000.000	-	-	200.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	200.000.000	-	-	200.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (38.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.661.000.000	-	-	-	3.661.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (8.00 Laporan)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.300.000.000	-	-	-	1.300.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (8.00 Laporan)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.000.000	-	-	-	86.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (8.00 Laporan)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.265.000.000	-	-	-	2.265.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (8.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.449.000	-	-	-	235.449.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.449.000	-	-	-	100.449.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**427.750.000**	**972.250.000**	**-**	**-**	**1.400.000.000**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	268.750.000	551.250.000	-	-	820.000.000
	Nilai survey kepuasan masyarakat (80.00 Nilai)					
	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi (88.89 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi (8.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi (20.00 Orang)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi (8.00 Unit)					
	Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi (20.00 Orang)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi (8.00 Unit)					
	Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi (20.00 Orang)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah (10.00 Jenis)					
	Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah (5.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	40.000.000	510.000.000	-	-	550.000.000
	Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah (10.00 Jenis)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah (5.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	8.750.000	41.250.000	-	-	50.000.000
	Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah (10.00 Jenis)					
	Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah (5.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi (8.00 Unit)					
	Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi (20.00 Orang)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	159.000.000	421.000.000	-	-	580.000.000
	Nilai survey kepuasan masyarakat (80.00 Nilai)					
	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca (61.54 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat (3.00 Kegiatan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	14.000.000	421.000.000	-	-	435.000.000
	Jumlah masyarakat yang menjadi agen literasi (20.00 Orang)					
	Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah (2657000.00 Orang)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	30.400.000	-	-	-	30.400.000
	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat (3.00 Kegiatan)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah masyarakat yang menjadi agen literasi (20.00 Orang)					
	Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah (2657000.00 Orang)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	24.600.000	-	-	-	24.600.000
	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat (3.00 Kegiatan)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**217.000.000**	**23.000.000**	**-**	**-**	**240.000.000**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	80.000.000	-	-	-	80.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah (92.25 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Umum Prov Jateng (194.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Umum Prov Jateng (194.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah (92.25 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Jumlah naskah Katalog Induk Derah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan (2.00 Dokumen)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Jumlah naskah Katalog Induk Derah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan (2.00 Dokumen)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	37.000.000	3.000.000	-	-	40.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah (92.25 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	37.000.000	3.000.000	-	-	40.000.000
	Jumlah koleksi naskah kuno yang dialihmediakan (32.00 Eks)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	50.000.000	20.000.000	-	-	70.000.000
	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah (92.25 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	20.000.000	20.000.000	-	-	40.000.000
	Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah (593.00 Eks)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah (593.00 Eks)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**701.598.000**	**-**	**-**	**-**	**701.598.000**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	145.000.000	-	-	-	145.000.000
	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya (30.26 %)					
	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	25.000.000	-	-	-	25.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah arsip dinamis inaktif Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian (1500.00 Arsip)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	120.000.000	-	-	-	120.000.000
	Jumlah unit LKD Prov/Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya (23.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	220.000.000	-	-	-	220.000.000
	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	220.000.000	-	-	-	220.000.000
	Jumlah arsip statis yang tersusun daftar inventarisnya (12000.00 Dokumen)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	336.598.000	-	-	-	336.598.000
	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya (30.26 %)					
	Persentase peningkatan pengunjung arsip (79.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Jumlah arsip yang terlayankan (1000.00 Arsip)					
	Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip (41.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	261.598.000	-	-	-	261.598.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah arsip yang terlayankan (1000.00 Arsip)					
	Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip (41.00 Unit)					
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui SIKD (85.36 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**59.605.000**	**10.395.000**	**-**	**-**	**70.000.000**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	23.680.000	1.320.000	-	-	25.000.000
	Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip (20.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	23.680.000	1.320.000	-	-	25.000.000
	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk pemusnahan arsip (retensi					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase arsip yang diselamatkan (65.92 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah Arsip yang terselamatkan akibat bencana berskala Provinsi (500.00 Arsip)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	10.925.000	9.075.000	-	-	20.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase arsip yang diselamatkan (65.92 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10.925.000	9.075.000	-	-	20.000.000
	Jumlah khazanah arsip statis LKD Provinsi yang dialihmediakan (272000.00 Arsip)					
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**542.128.755.000**	**15.376.891.000**	**-**	**-**	**557.505.646.000**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**79.360.587.000**	**7.389.861.000**	**-**	**-**	**86.750.448.000**
3.25.3.25.0.00.0.00.01	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**79.360.587.000**	**7.389.861.000**	**-**	**-**	**86.750.448.000**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**54.726.113.000**	**936.768.000**	**-**	**-**	**55.662.881.000**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	741.745.000	-	-	-	741.745.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	359.445.000	-	-	-	359.445.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	382.300.000	-	-	-	382.300.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.061.846.000	-	-	-	48.061.846.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.991.846.000	-	-	-	46.991.846.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	920.000.000	-	-	-	920.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	220.000.000	-	-	-	220.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	150.000.000	-	-	-	150.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.197.530.000	350.378.000	-	-	1.547.908.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	133.810.000	-	-	-	133.810.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.970.000	350.378.000	-	-	479.348.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	-	-	-	50.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	760.750.000	-	-	-	760.750.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	-	-	-	2.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.000.000	-	-	-	12.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	507.250.000	-	-	507.250.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	507.250.000	-	-	507.250.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.340.980.000	-	-	-	3.340.980.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.900.000	-	-	-	46.900.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.294.080.000	-	-	-	2.294.080.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.064.012.000	79.140.000	-	-	1.143.152.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.610.000	-	-	-	316.610.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal (1.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.750.000	-	-	-	196.750.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal (1.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	390.652.000	79.140.000	-	-	469.792.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal (1.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**2.105.610.000**	**500.000**	**-**	**-**	**2.106.110.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.517.938.000	500.000	-	-	1.518.438.000
	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (5.00 %)					
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat (4.00 %)					
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan (2.93 %)					
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur (7.80 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	382.824.000	-	-	-	382.824.000
	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan (1.00 Lokasi)					
	Jumlah pelaku usaha yang diverifikasi persyaratan KKPRL (4.00 Orang)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.135.114.000	500.000	-	-	1.135.614.000
	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola (2.00 Lokasi)					
	Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi (2.20 Ha)					
	Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi (2.20 Ha)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	67.610.000	-	-	-	67.610.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat (4.00 %)					
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan (2.93 %)					
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur (7.80 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	67.610.000	-	-	-	67.610.000
	Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	520.062.000	-	-	-	520.062.000
	Persentase produksi garam (2.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	520.062.000	-	-	-	520.062.000
	Jumah KUGAR yang meningkat kompetensinya (25.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan (4.00 Kelompok)					
	Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya (5.00 Kelompok)					
	Jumlah sentra garam rakyat yang didata potensinya (5.00 Lokasi)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**9.550.835.000**	**1.151.093.000**	**-**	**-**	**10.701.928.000**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	796.726.000	-	-	-	796.726.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Indeks harga yang diterima oleh nelayan (108.54 Angka)					
	Persentase produksi perikanan tangkap (5.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	57.285.000	-	-	-	57.285.000
	Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan (5050.00 Orang)					
	Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah produksi perikanan yang didaratkan (343717.50 Ton)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	739.441.000	-	-	-	739.441.000
	Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan (5050.00 Orang)					
	Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah produksi perikanan yang didaratkan (343717.50 Ton)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.406.600.000	-	-	-	1.406.600.000
	Indeks harga yang diterima oleh nelayan (108.54 Angka)					
	Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya (50.00 %)					
	Persentase produksi perikanan tangkap (5.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	610.000.000	-	-	-	610.000.000
	Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan (280.00 Unit)					
	Jumlah lokasi yang dilindungi SDI nya (1.00 Lokasi)					
	Jumlah nelayan yang meningkat ketrampilan dan kompetensi (60.00 Orang)					
	Persentase Kapal Perikanan yang menerapkan teknologi Penangkapan Ikan (0.25 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	796.600.000	-	-	-	796.600.000
	Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan (280.00 Unit)					
	Jumlah lokasi yang dilindungi SDI nya (1.00 Lokasi)					
	Jumlah nelayan yang meningkat ketrampilan dan kompetensi (60.00 Orang)					
	Persentase Kapal Perikanan yang menerapkan teknologi Penangkapan Ikan (0.25 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	7.347.509.000	1.151.093.000	-	-	8.498.602.000
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong (72.72 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa (72.27 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor (70.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan (72.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending (63.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak (81.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang (71.72 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari (72.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto (81.82 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	2.152.995.000	89.000.000	-	-	2.241.995.000
	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan (5.00 Jenis)					
	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan (6.00 Jenis)					
	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan (7.00 Jenis)					
	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan (9.00 Jenis)					
	Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan (3.00 Jenis)					
	Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan (4.00 Jenis)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan (5.00 Jenis)					
	Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan (6.00 Jenis)					
	Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan (7.00 Jenis)					
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan (10.00 %)					
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan (20.00 %)					
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan (28.00 %)					
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan (33.00 %)					
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan (43.00 %)					
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan (50.00 %)					
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan (57.00 %)					
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan (57.14 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (100.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (42.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (45.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (50.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (54.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (60.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (66.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (68.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (70.00 %)					
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (10.00 %)					
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (16.22 %)					
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (20.00 %)					
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (3.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (35.00 %)					
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (60.00 %)					
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (7.00 %)					
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (9.00 %)					
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (90.00 %)					
	Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya (10.00 %)					
	Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya (12.00 %)					
	Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya (14.00 %)					
	Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya (25.00 %)					
	Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya (30.00 %)					
	Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya (32.00 %)					
	Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya (70.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya (7.40 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	5.194.514.000	1.062.093.000	-	-	6.256.607.000
	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan (5.00 Jenis)					
	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan (6.00 Jenis)					
	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan (7.00 Jenis)					
	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan (9.00 Jenis)					
	Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan (3.00 Jenis)					
	Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan (4.00 Jenis)					
	Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan (5.00 Jenis)					
	Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan (6.00 Jenis)					
	Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan (7.00 Jenis)					
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan (10.00 %)					
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan (20.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan (28.00 %)					
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan (33.00 %)					
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan (43.00 %)					
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan (50.00 %)					
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan (57.00 %)					
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan (57.14 %)					
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (100.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (42.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (45.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (50.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (54.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (60.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (66.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (68.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik (70.00 %)					
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (10.00 %)					
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (16.22 %)					
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (20.00 %)					
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (3.00 %)					
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (35.00 %)					
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (60.00 %)					
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (7.00 %)					
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (9.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi (90.00 %)					
	Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya (10.00 %)					
	Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya (12.00 %)					
	Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya (14.00 %)					
	Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya (25.00 %)					
	Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya (30.00 %)					
	Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya (32.00 %)					
	Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya (70.00 %)					
	Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya (7.40 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**9.319.548.000**	**5.261.500.000**	**-**	**-**	**14.581.048.000**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	203.500.000	-	-	-	203.500.000
	Produksi perikanan budidaya (609000.00 Ton)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	110.000.000	-	-	-	110.000.000
	Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha (127.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	93.500.000	-	-	-	93.500.000
	Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha (127.00 Orang)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.724.692.000	-	-	-	3.724.692.000
	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya (111.55 Angka)					
	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan (100.00 %)					
	Persentase produksi ikan konsumsi air laut (5.00 %)					
	Produksi perikanan budidaya (609000.00 Ton)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut (1.00 Jenis)					
	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya (1.00 Lokasi)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.250.000.000	-	-	-	2.250.000.000
	Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut (1.00 Jenis)					
	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya (1.00 Lokasi)					
	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Meningkat Keterampilannya (60.00 Orang)					
	Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya (3.00 Jenis)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	452.707.000	-	-	-	452.707.000
	Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani (350.00 Kasus)					
	Persentase Pengguna Layanan Pengujian (20.00 %)					
	Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkat Kompetensinya (29.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	771.985.000	-	-	-	771.985.000
	Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut (1.00 Jenis)					
	Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani (350.00 Kasus)					
	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya (1.00 Lokasi)					
	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Meningkat Keterampilannya (60.00 Orang)					
	Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya (3.00 Jenis)					
	Persentase Pengguna Layanan Pengujian (20.00 %)					
	Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkat Kompetensinya (29.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	5.391.356.000	5.261.500.000	-	-	10.652.856.000
	Persentase produksi ikan konsumsi air laut (5.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.391.356.000	5.261.500.000	-	-	10.652.856.000
	Jenis Ikan Endemik Lokal yang dikembangkan (1.00 Jenis)					
	Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya (9.00 Lokasi)					
	Persentase Peningkatan Produksi Benih, Ikan Konsumsi dan Calon Induk Unggul (5.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**1.756.361.000**	**-**	**-**	**-**	**1.756.361.000**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1.282.844.000	-	-	-	1.282.844.000
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat (61.00 %)					
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan (61.00 %)					
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur (61.00 %)					
	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan (70.00 %)					
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat (2.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan (2.00 %)					
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur (2.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (35.00 Kelompok)					
	Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP (18.00 Orang)					
	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	174.159.000	-	-	-	174.159.000
	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (35.00 Kelompok)					
	Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan (10.00 Kali)					
	Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan (7.00 Kali)					
	Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan (8.00 Kali)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP (18.00 Orang)					
	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil (100.00 %)					
	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	894.922.000	-	-	-	894.922.000
	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (35.00 Kelompok)					
	Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan (10.00 Kali)					
	Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan (7.00 Kali)					
	Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan (8.00 Kali)					
	Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP (18.00 Orang)					
	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	163.763.000	-	-	-	163.763.000
	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (35.00 Kelompok)					
	Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan (10.00 Kali)					
	Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan (7.00 Kali)					
	Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan (8.00 Kali)					
	Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP (18.00 Orang)					
	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil (100.00 %)					
	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	473.517.000	-	-	-	473.517.000
	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan (70.00 %)					
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat (2.00 %)					
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan (2.00 %)					
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur (2.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	171.104.000	-	-	-	171.104.000
	Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP (180.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya (100.00 %)					
	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	152.409.000	-	-	-	152.409.000
	Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP (180.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya (100.00 %)					
	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	150.004.000	-	-	-	150.004.000
	Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP (180.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya (100.00 %)					
	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**1.902.120.000**	**40.000.000**	**-**	**-**	**1.942.120.000**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	99.500.000	-	-	-	99.500.000
	Jumlah produksi olahan ikan (160800.00 Ton)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	95.500.000	-	-	-	95.500.000
	Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata (20.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	4.000.000	-	-	-	4.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata (20.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.798.620.000	40.000.000	-	-	1.838.620.000
	Jumlah produksi olahan ikan (160800.00 Ton)					
	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan (4.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	130.000.000	-	-	-	130.000.000
	Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan (425.00 Sertifikat)					
	Jumlah jenis pelatihan peningkatan keterampilan dan kompetensi (2.00 Jenis)					
	Jumlah Poklahsar yang Meningkat Usahanya (5.00 Unit)					
	Jumlah Rekomendasi sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) yang diterbitkan (100.00 Sertifikat)					
	Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Usaha Kelautan dan Perikanan yang dipromosikan (35.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.668.620.000	40.000.000	-	-	1.708.620.000
	Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan (425.00 Sertifikat)					
	Jumlah jenis pelatihan peningkatan keterampilan dan kompetensi (2.00 Jenis)					
	Jumlah Poklahsar yang Meningkat Usahanya (5.00 Unit)					
	Jumlah Rekomendasi sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) yang diterbitkan (100.00 Sertifikat)					
	Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Usaha Kelautan dan Perikanan yang dipromosikan (35.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.000.000	-	-	-	4.000.000
	Jumlah produksi olahan ikan (160800.00 Ton)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.000.000	-	-	-	4.000.000
	Jumlah Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan (1.00 Dokumen)					
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**299.169.772.000**	**7.408.000.000**	**-**	**-**	**306.577.772.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	**149.497.041.000**	**1.405.000.000**	**-**	**-**	**150.902.041.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**54.047.687.000**	**1.405.000.000**	**-**	**-**	**55.452.687.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.576.528.000	-	-	-	1.576.528.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	349.768.000	-	-	-	349.768.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.226.760.000	-	-	-	1.226.760.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.862.915.000	-	-	-	33.862.915.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.546.515.000	-	-	-	33.546.515.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	266.400.000	-	-	-	266.400.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	-	-	-	25.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	178.740.000	-	-	-	178.740.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	8.740.000	-	-	-	8.740.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	30.000.000	-	-	-	30.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (1.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.000.000	-	-	-	108.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108.000.000	-	-	-	108.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.007.198.000	10.000.000	-	-	2.017.198.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.856.000	-	-	-	33.856.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.614.000	10.000.000	-	-	174.614.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.546.000	-	-	-	36.546.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	605.378.000	-	-	-	605.378.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	131.862.000	-	-	-	131.862.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	227.648.000	-	-	-	227.648.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	790.569.000	-	-	-	790.569.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	16.725.000	-	-	-	16.725.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	903.000.000	345.000.000	-	-	1.248.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	15.000.000	-	-	-	15.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	230.000.000	-	-	230.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)*	-	110.000.000	-	-	110.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000	-	-	-	600.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	288.000.000	5.000.000	-	-	293.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.441.486.000	-	-	-	11.441.486.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000	-	-	-	5.700.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.671.400.000	-	-	-	1.671.400.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.000.000	-	-	-	122.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.642.386.000	-	-	-	9.642.386.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.939.820.000	1.050.000.000	-	-	4.989.820.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	360.500.000	-	-	-	360.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.900.000	-	-	-	131.900.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	8.000.000	-	-	-	8.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	521.920.000	-	-	-	521.920.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.655.500.000	-	-	-	1.655.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	55.000.000	-	-	-	55.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	733.500.000	1.050.000.000	-	-	1.783.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	423.500.000	-	-	-	423.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**37.558.500.000**	**-**	**-**	**-**	**37.558.500.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	2.400.000.000	-	-	-	2.400.000.000
	Jumlah populasi ternak perah (113440.00 (ST)/(AU))					
	Jumlah populasi ternak petelur (247848.00 (ST)/(AU))					
	Jumlah populasi ternak potong (3745066.00 (ST)/(AU))					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	2.400.000.000	-	-	-	2.400.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak perah (1.00 Buah)					
	Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak potong (1.00 Buah)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	25.578.500.000	-	-	-	25.578.500.000
	Jumlah populasi ternak perah (113440.00 (ST)/(AU))					
	Jumlah populasi ternak petelur (247848.00 (ST)/(AU))					
	Jumlah populasi ternak potong (3745066.00 (ST)/(AU))					
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging (1.00 %)					
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu (1.00 %)					
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur (1.00 %)					
	Persentase produksi dan distribusi semen beku (1.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	21.984.200.000	-	-	-	21.984.200.000
	Jumlah pelaku usaha pakan ternak perah yang produknya sesuai standar kualitas pakan (1.00 Unit)					
	Jumlah pelaku usaha pakan ternak potong yang produknya sesuai standar kualitas pakan (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Produksi semen segar (27000.00 Angka)					
	Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak perah (1.00 Buah)					
	Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak potong (1.00 Buah)					
	Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi daging (1.00 %)					
	Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi petelur (1.00 %)					
	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi daging (1.00 %)					
	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi susu (1.00 %)					
	Persentase semen beku yang dihasilkan dari semen segar yang layak diproduksi (80.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.594.300.000	-	-	-	3.594.300.000
	Jumlah pelaku usaha pakan ternak perah yang produknya sesuai standar kualitas pakan (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah pelaku usaha pakan ternak potong yang produknya sesuai standar kualitas pakan (1.00 Unit)					
	Jumlah Produksi semen segar (27000.00 Angka)					
	Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak perah (1.00 Buah)					
	Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak potong (1.00 Buah)					
	Persentase semen beku yang dihasilkan dari semen segar yang layak diproduksi (80.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	9.580.000.000	-	-	-	9.580.000.000
	Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan (4.00 Dokumen)					
	Persentase fasilitasi obat hewan (1.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	9.580.000.000	-	-	-	9.580.000.000
	Jumlah hewan/ternak yang difasilitasi obat hewan (10000.00 Ekor)					
	Jumlah laporan pengawasan pelaku usaha obat hewan dan produk hewan (4.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**5.700.000.000**	**-**	**-**	**-**	**5.700.000.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	5.700.000.000	-	-	-	5.700.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha (12.00 %)					
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah (12.00 %)					
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur (12.00 %)					
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong (12.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5.350.000.000	-	-	-	5.350.000.000
	Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak perah (1.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak potong (3.00 Kelompok)					
	Jumlah Pelaku Usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha (2.00 Unit)					
	Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak perah (1.00 Unit)					
	Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak petelur (2.00 Unit)					
	Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak potong (2.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak perah (2.00 Kelompok)					
	Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak petelur (2.00 Kelompok)					
	Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak potong (2.00 Kelompok)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak perah (1.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak potong (3.00 Kelompok)					
	Jumlah Pelaku Usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha (2.00 Unit)					
	Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak perah (1.00 Unit)					
	Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak petelur (2.00 Unit)					
	Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak potong (2.00 Unit)					
	Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak perah (2.00 Kelompok)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak petelur (2.00 Kelompok)					
	Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak potong (2.00 Kelompok)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**39.913.154.000**	**-**	**-**	**-**	**39.913.154.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35.865.350.000	-	-	-	35.865.350.000
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis (4.00 Dokumen)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35.865.350.000	-	-	-	35.865.350.000
	Jumlah Laporan situasi penyakit menular strategis (PHMS) (4.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	2.909.304.000	-	-	-	2.909.304.000
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara (4.00 Dokumen)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	2.909.304.000	-	-	-	2.909.304.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan hasil pengujian sampel (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan lalu lintas ternak (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan (4.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	1.138.500.000	-	-	-	1.138.500.000
	Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) (3.50 %)					
	Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali (7.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	1.138.500.000	-	-	-	1.138.500.000
	Jumlah RPH yang tidak melakukan pemotongan betina produktif (6.00 Unit)					
	Jumlah unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV (15.00 Buah)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**12.277.700.000**	**-**	**-**	**-**	**12.277.700.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	12.277.700.000	-	-	-	12.277.700.000
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah (3.62 %)					
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur (2.29 %)					
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong (1.08 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	12.277.700.000	-	-	-	12.277.700.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak perah yang terbentuk (1.00 Unit)					
	Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak petelur yang terbentuk (1.00 Kelompok)					
	Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak potong yang terbentuk (3.00 Kelompok)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	**149.672.731.000**	**6.003.000.000**	**-**	**-**	**155.675.731.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**104.021.896.000**	**5.658.000.000**	**-**	**-**	**109.679.896.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000.000	-	-	-	900.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90.820.644.000	-	-	-	90.820.644.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85.833.743.000	-	-	-	85.833.743.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)*	4.986.901.000	-	-	-	4.986.901.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	281.500.000	-	-	-	281.500.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)*	277.000.000	-	-	-	277.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)*	4.500.000	-	-	-	4.500.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	80.000.000	-	-	-	80.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	65.000.000	-	-	-	65.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	15.000.000	-	-	-	15.000.000
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.284.392.000	317.000.000	-	-	2.601.392.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	129.000.000	-	-	-	129.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.748.000	270.000.000	-	-	474.748.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.070.000	47.000.000	-	-	84.070.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	137.500.000	-	-	-	137.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.000.000	-	-	-	3.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	262.713.000	-	-	-	262.713.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.510.361.000	-	-	-	1.510.361.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	2.541.600.000	-	-	2.541.600.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	975.000.000	-	-	975.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	80.000.000	-	-	80.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	1.313.500.000	-	-	1.313.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	75.000.000	-	-	75.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	98.100.000	-	-	98.100.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.428.850.000	24.900.000	-	-	5.453.750.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.000.000	-	-	-	32.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.610.400.000	-	-	-	2.610.400.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.750.000	-	-	-	134.750.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.651.700.000	24.900.000	-	-	2.676.600.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.226.510.000	2.774.500.000	-	-	7.001.010.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.059.540.000	-	-	-	1.059.540.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (25.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	37.500.000	-	-	-	37.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (25.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	354.470.000	-	-	-	354.470.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (25.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.107.000.000	798.500.000	-	-	2.905.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (25.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	518.000.000	1.976.000.000	-	-	2.494.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (25.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (25.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**36.735.553.000**	**345.000.000**	**-**	**-**	**37.080.553.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	25.243.272.000	270.000.000	-	-	25.513.272.000
	Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan (3.00 %)					
	Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya (2.00 %)					
	Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan (100.00 %)					
	Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani (2.50 %)					
	Persentase luas lahan yang dioptimasi (2.50 %)					
	Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura (1.50 %)					
	Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan (1.50 %)					
	Persentase peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan (1.50 %)					
	Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi (93.00 %)					
	Produksi bawang merah (527875.00 Ton)					
	Produksi cabai (346115.00 Ton)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Produksi durian (153410.00 Ton)					
	Produksi jagung (3583730.00 Ton)					
	Produksi jahe (35908.00 Ton)					
	Produksi kedelai (52762.00 Ton)					
	Produksi kelapa (167187.00 Ton)					
	Produksi kopi (26005.00 Ton)					
	Produksi melati (25120.00 Ton)					
	Produksi padi (9613469.00 Ton)					
	Produksi tebu (2562216.00 Ton)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	25.243.272.000	270.000.000	-	-	25.513.272.000
	Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (jagung) (584552.00 Ha)					
	Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (kedelai) (31303.00 Ha)					
	Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (padi) (1689538.00 Ha)					
	Jumlah informasi harga pasar yang disebarluaskan (6.00 Komoditi)					
	jumlah kab/kota yang menyalurkan pupuk sesuai alokasi (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah kelembagaan pengelola alsintan (1133.00 Unit)					
	Jumlah kelompok pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya (105.00 Kelompok)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kelompok pengolah hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya (35.00 Kelompok)					
	jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen (5.00 Kelompok)					
	jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen (3.00 Kelompok)					
	jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen (2.00 Kelompok)					
	jumlah LKMA yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan (20.00 Unit)					
	jumlah luasan lahan yang dioptimasi (200.00 Ha)					
	Jumlah Luas Panen Alpukat (15.00 Ha)					
	Jumlah Luas Panen Bawang Merah (52776.00 Ha)					
	Jumlah Luas Panen Cabai (44364.00 Ha)					
	Jumlah Luas Panen Durian (28.00 Ha)					
	Jumlah Luas Panen Jahe (1647.00 Ha)					
	Jumlah Luas Panen Kencur (849.00 Ha)					
	Jumlah Luas Panen Melati (2.00 Ha)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani (16550.00 Ha)					
	Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kelapa (50.00 Ha)					
	Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kopi (50.00 Ha)					
	Peningkatan luas tanaman produktif (TM) tanaman rempah dan penyegar lainnya (30.00 Ha)					
	Peningkatan luas tanaman produktif (TM) tanaman semusim lainnya (2010.00 Ha)					
	Peningkatan luas tanaman produktif (TM) tanaman tahunan lainnya (30.00 Ha)					
	Peningkatan luas tanaman produktif (TM) tebu (300.00 Ha)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	11.492.281.000	75.000.000	-	-	11.567.281.000
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta (85.00 %)					
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas (85.00 %)					
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang (85.00 %)					
	Persentase layanan sertifikasi benih (100.00 %)					
	Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan (3.00 %)					
	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan (1.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	67.423.000	-	-	-	67.423.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Pengawasan peredaran benih hortikultura (12.00 Bulan)					
	Pengawasan peredaran benih perkebunan (12.00 Bulan)					
	Pengawasan peredaran benih Tanaman Pangan (12.00 Bulan)					
	Pengujian laboratorium hortikultura (122.00 Lembar)					
	Pengujian laboratorium tanaman pangan (1.08 Lembar)					
	Sertifikasi benih hortikultura buah (518175.00 Batang)					
	Sertifikasi benih hortikultura sayuran (110.00 Ha)					
	Sertifikasi benih padi (5454.00 Ha)					
	Sertifikasi benih palawija (1111.00 Ha)					
	Sertifikasi benih tanaman perkebunan (848720.00 Batang)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	11.424.858.000	75.000.000	-	-	11.499.858.000
	Jumlah pengembangan tanaman hias (525.00 Batang)					
	Jumlah perbanyakan benih tanaman buah (2000.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih bawang merah (4.25 Ton)					
	Jumlah produksi benih Buah (15000.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih Kedelai (1.60 Ton)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah produksi benih Kentang (8.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih padi (35.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih Padi (49.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih padi (77.35 Ton)					
	Jumlah produksi benih palawija (3.20 Ton)					
	Jumlah produksi benih palawija (5.44 Ton)					
	Jumlah produksi benih Planlet (17000.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih sayuran (0.10 Ton)					
	Jumlah Produksi benih tanaman buah (1000.00 Batang)					
	Jumlah produksi sayuran (1.00 Ton)					
	Jumlah produksi tanaman hias (2250.00 Batang)					
	Pengawasan peredaran benih hortikultura (12.00 Bulan)					
	Pengawasan peredaran benih perkebunan (12.00 Bulan)					
	Pengawasan peredaran benih Tanaman Pangan (12.00 Bulan)					
	Pengujian laboratorium hortikultura (122.00 Lembar)					
	Pengujian laboratorium tanaman pangan (1.08 Lembar)					
	Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar siap salur (1.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman semusim siap salur (3.00 %)					
	Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman tahunan siap salur (1.00 %)					
	Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman rempah dan penyegar (1.00 %)					
	Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman semusim (1.00 %)					
	Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman tahunan (1.00 %)					
	Sertifikasi benih hortikultura buah (518175.00 Batang)					
	Sertifikasi benih hortikultura sayuran (110.00 Ha)					
	Sertifikasi benih padi (5454.00 Ha)					
	Sertifikasi benih palawija (1111.00 Ha)					
	Sertifikasi benih tanaman perkebunan (848720.00 Batang)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**5.960.000.000**	**-**	**-**	**-**	**5.960.000.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	5.960.000.000	-	-	-	5.960.000.000
	Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik (7420274.00 m)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	5.960.000.000	-	-	-	5.960.000.000
	Persentase Jaringan irigasi alternatif (5.00 %)					
	Persentase jaringan irigasi tersier yang baik (1.88 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**745.000.000**	**-**	**-**	**-**	**745.000.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	745.000.000	-	-	-	745.000.000
	Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam (10.00 %)					
	Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) (15.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	645.000.000	-	-	-	645.000.000
	Luasan lahan yang terdampak Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang bisa ditangani (10.00 %)					
	Luasan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terhadap luas pengembangan tanaman (15.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Luasan lahan yang terdampak Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang bisa ditangani (10.00 %)					
	Luasan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terhadap luas pengembangan tanaman (15.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**2.210.282.000**	**-**	**-**	**-**	**2.210.282.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	256.970.000	-	-	-	256.970.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya (2.50 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	256.970.000	-	-	-	256.970.000
	Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (2.50 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.330.000.000	-	-	-	1.330.000.000
	Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya (2.50 %)					
	Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian (5250.00 Orang)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	930.000.000	-	-	-	930.000.000
	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian (5250.00 Orang)					
	Persentase jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan (0.20 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	623.312.000	-	-	-	623.312.000
	Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya (2.50 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	623.312.000	-	-	-	623.312.000
	Persentase peningkatan jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi (60.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**63.655.074.000**	**183.030.000**	**-**	**-**	**63.838.104.000**
3.29.3.29.0.00.0.00.01	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	**63.655.074.000**	**183.030.000**	**-**	**-**	**63.838.104.000**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**53.450.653.000**	**183.030.000**	**-**	**-**	**53.633.683.000**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)*	931.036.000	-	-	-	931.036.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	632.512.000	-	-	-	632.512.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	298.524.000	-	-	-	298.524.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	40.993.406.000	-	-	-	40.993.406.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	39.704.620.000	-	-	-	39.704.620.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	1.106.880.000	-	-	-	1.106.880.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	87.566.000	-	-	-	87.566.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	52.500.000	-	-	-	52.500.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	41.840.000	-	-	-	41.840.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	157.000.000	-	-	-	157.000.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (12.00 Dokumen)*	144.500.000	-	-	-	144.500.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (12.00 Dokumen)*	12.500.000	-	-	-	12.500.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	140.000.000	-	-	-	140.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.125.411.000	4.000.000	-	-	2.129.411.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95.000.000	-	-	-	95.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.950.000	1.000.000	-	-	175.950.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	104.000.000	3.000.000	-	-	107.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.311.000	-	-	-	250.311.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.000.000	-	-	-	78.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	24.600.000	-	-	-	24.600.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.050.000	-	-	-	125.050.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.158.100.000	-	-	-	1.158.100.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	115.400.000	-	-	-	115.400.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.820.000	179.030.000	-	-	195.850.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	6.750.000	18.650.000	-	-	25.400.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (7.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (73.00 Unit)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.070.000	160.380.000	-	-	170.450.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (38.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (7.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (73.00 Unit)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.949.780.000	-	-	-	7.949.780.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.100.000	-	-	-	41.100.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.660.900.000	-	-	-	1.660.900.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.250.000	-	-	-	13.250.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.234.530.000	-	-	-	6.234.530.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.137.200.000	-	-	-	1.137.200.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (72.00 Unit)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	388.560.000	-	-	-	388.560.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (19.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (20.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (205.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (21.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (38.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (39.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (43.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (72.00 Unit)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.640.000	-	-	-	81.640.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (72.00 Unit)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	315.000.000	-	-	-	315.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (19.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (20.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (21.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (38.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (39.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (43.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (72.00 Unit)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327.000.000	-	-	-	327.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (19.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (20.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (205.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (21.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (38.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (39.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (43.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (72.00 Unit)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**2.178.750.000**	**-**	**-**	**-**	**2.178.750.000**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	605.000.000	-	-	-	605.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah (27.60 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	605.000.000	-	-	-	605.000.000
	Jumlah cakupan wilayah penyediaan data geologi di Jawa Tengah (35.00 Kabupaten/Kota)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1.573.750.000	-	-	-	1.573.750.000
	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah (100.00 %)					
	Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah (27.60 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (3.50 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (2.50 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (2.90 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (3.00 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (2.30 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (1.70 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (1.90 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (1.70 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (2.80 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (4.20 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (1.70 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (1.90 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	563.700.000	-	-	-	563.700.000
	Persentase realisasi pengujian air tanah di Jawa Tengah (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	1.010.050.000	-	-	-	1.010.050.000
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Jawa Tengah (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Muria (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Merapi (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Semarang Demak (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Selatan (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Tengah (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Utara (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Sewu Lawu (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Selatan (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Utara (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Solo (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %)					
	Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak (100.00 %)					
	Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara (100.00 %)					
	Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**2.503.054.000**	**-**	**-**	**-**	**2.503.054.000**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	186.250.000	-	-	-	186.250.000
	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.01.0006	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut	186.250.000	-	-	-	186.250.000
	Persentase realisasi pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	2.166.804.000	-	-	-	2.166.804.000
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah (45.00 %)					
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria (45.00 %)					
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan (45.00 %)					
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi (45.00 %)					
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak (45.00 %)					
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan (45.00 %)					
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah (45.00 %)					
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara (45.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu (45.00 %)					
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan (45.00 %)					
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara (45.00 %)					
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo (45.00 %)					
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo (45.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	278.500.000	-	-	-	278.500.000
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan (60.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo (60.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1.888.304.000	-	-	-	1.888.304.000
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah (60.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara (60.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo (60.00 %)					
	Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo (60.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah (45.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase deviasi harga pasar dengan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (10.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**2.381.039.000**	**-**	**-**	**-**	**2.381.039.000**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1.499.084.000	-	-	-	1.499.084.000
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria (18.35 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan (61.17 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi (61.17 SBM)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak (30.58 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan (61.17 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah (30.58 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara (39241.43 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu (61.17 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan (39259.78 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara (61.17 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo (30.58 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo (45.88 SBM)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1.499.084.000	-	-	-	1.499.084.000
	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria (6.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan (30.00 Orang)					
	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Merapi (30.00 Orang)					
	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Semarang Demak (18.00 Orang)					
	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan (30.00 Orang)					
	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah (18.00 Orang)					
	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara (150.00 Orang)					
	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Sewu Lawu (45.00 Orang)					
	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan (156.00 Orang)					
	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara (30.00 Orang)					
	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Solo (18.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo (15.00 Orang)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	881.955.000	-	-	-	881.955.000
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah (91370.61 SBM)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	881.955.000	-	-	-	881.955.000
	Persentase desa yang melaksanakan Konservasi Energi di Jawa Tengah (28.80 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**3.141.578.000**	**-**	**-**	**-**	**3.141.578.000**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	336.600.000	-	-	-	336.600.000
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria (51.27 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan (49.74 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi (49.72 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak (52.13 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan (49.42 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah (49.12 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara (50.08 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu (49.64 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan (49.66 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara (50.05 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo (49.77 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo (50.05 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	336.600.000	-	-	-	336.600.000
	Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Merapi (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Semarang Demak (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Selatan (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Tengah (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Utara (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Sewu Lawu (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Selatan (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Utara (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Solo (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1.185.518.000	-	-	-	1.185.518.000
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah (65.04 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria (51.27 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan (49.74 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi (49.72 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak (52.13 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan (49.42 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah (49.12 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara (50.08 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu (49.64 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan (49.66 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara (50.05 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo (49.77 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo (50.05 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1.185.518.000	-	-	-	1.185.518.000
	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah (32.60 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria (5.16 %)					
	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan (2.08 %)					
	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi (2.04 %)					
	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak (6.86 %)					
	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan (1.45 %)					
	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah (0.85 %)					
	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara (2.78 %)					
	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu (1.89 %)					
	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan (1.93 %)					
	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara (2.71 %)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo (2.15 %)					
	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo (2.71 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.619.460.000	-	-	-	1.619.460.000
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria (51.27 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan (49.74 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi (49.72 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak (52.13 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan (49.42 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah (49.12 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara (50.08 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu (49.64 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan (49.66 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara (50.05 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo (49.77 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo (50.05 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	34.320.000	-	-	-	34.320.000
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria (97.39 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Selatan (97.39 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi (97.39 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang Demak (97.39 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan (97.39 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah (97.40 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara (97.39 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Sewu Lawu (97.39 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan (97.39 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara (97.39 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo (97.39 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Ungaran Telomoyo (97.39 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.585.140.000	-	-	-	1.585.140.000
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria (97.39 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Selatan (97.39 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi (97.39 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang Demak (97.39 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan (97.39 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah (97.40 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara (97.39 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Sewu Lawu (97.39 %)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan (97.39 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara (97.39 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo (97.39 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Ungaran Telomoyo (97.39 %)					
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**99.943.322.000**	**396.000.000**	**-**	**-**	**100.339.322.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**99.943.322.000**	**396.000.000**	**-**	**-**	**100.339.322.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**633.633.000**	**-**	**-**	**-**	**633.633.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	168.621.000	-	-	-	168.621.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2) (10.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	168.621.000	-	-	-	168.621.000
	Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB (2.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	26.300.000	-	-	-	26.300.000
	Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2) (10.00 %)					
	Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi (10.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	26.300.000	-	-	-	26.300.000
	Jumlah Pelaku Usaha Bahan Berbahaya Yang diawasi (5.00 Orang)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	438.712.000	-	-	-	438.712.000
	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah (8.60 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	438.712.000	-	-	-	438.712.000
	Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal (4.60 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**238.250.000**	**-**	**-**	**-**	**238.250.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	238.250.000	-	-	-	238.250.000
	Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi (15.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	238.250.000	-	-	-	238.250.000
	Jumlah Pelaku Pasar Rakyat yang Dilatih (25.00 Orang)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**32.895.000.000**	**-**	**-**	**-**	**32.895.000.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota (9.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau ketersediaannya (3.00 Komoditi)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	32.800.000.000	-	-	-	32.800.000.000
	Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota (9.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang di pantau Harganya (12.00 Unit)					
	Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas (12.00 Lokasi)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32.780.000.000	-	-	-	32.780.000.000
	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang di pantau Harganya (12.00 Unit)					
	Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas (12.00 Lokasi)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	55.000.000	-	-	-	55.000.000
	Persentase kinerja realisasi pupuk (91.00 %)					
	Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi (10.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah pelaku usaha pupuk yang pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan (4.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi antar pelaku pupuk bersubsidi (6.00 Kegiatan)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.0005	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Jumlah Pelaku Usaha Pupuk Bersubsidi Yang diawasi (30.00 Orang)					
	Jumlah pelaku usaha pupuk yang pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan (4.00 Orang)					
	Jumlah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi antar pelaku pupuk bersubsidi (6.00 Kegiatan)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**1.334.967.000**	**-**	**-**	**-**	**1.334.967.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1.334.967.000	-	-	-	1.334.967.000
	Persentase kenaikan nilai ekspor non migas (4.05 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	1.071.367.000	-	-	-	1.071.367.000
	Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan Ekspor (1430.00 Orang)					
	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal	72.650.000	-	-	-	72.650.000
	Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan Ekspor (1430.00 Orang)					
	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan Ekspor (1430.00 Orang)					
	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	140.950.000	-	-	-	140.950.000
	Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan Ekspor (1430.00 Orang)					
	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (2.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**2.786.815.000**	**-**	**-**	**-**	**2.786.815.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	518.012.000	-	-	-	518.012.000
	Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen (1.05 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	329.500.000	-	-	-	329.500.000
	Jumlah Laporan Aduan Masyarakat (3.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi (150.00 Orang)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	188.512.000	-	-	-	188.512.000
	Jumlah Laporan Aduan Masyarakat (3.00 Laporan)					
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi (150.00 Orang)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	2.091.482.000	-	-	-	2.091.482.000
	Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen (1.05 %)					
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang (10.00 %)					
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta (0.10 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	310.000.000	-	-	-	310.000.000
	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu (1711.00 Kegiatan)					
	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu (2400.00 Kegiatan)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	691.226.000	-	-	-	691.226.000
	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu (1711.00 Kegiatan)					
	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu (2400.00 Kegiatan)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	1.090.256.000	-	-	-	1.090.256.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu (1711.00 Kegiatan)					
	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu (2400.00 Kegiatan)					
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Standarisasi Industri (31.00 Orang)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	177.321.000	-	-	-	177.321.000
	Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen (1.05 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	177.321.000	-	-	-	177.321.000
	Jumlah Barang Beredar Yang diawasi (Unit Barang) (30.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**2.450.180.000**	**-**	**-**	**-**	**2.450.180.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	325.180.000	-	-	-	325.180.000
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri (15.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	325.180.000	-	-	-	325.180.000
	Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi (2.00 Orang)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	2.110.000.000	-	-	-	2.110.000.000
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri (15.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	2.110.000.000	-	-	-	2.110.000.000
	Jumlah Fasilitasi kemitraan (1.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri (15.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Jumlah orang yang mendapatkan edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (50.00 Orang)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**49.128.618.000**	**396.000.000**	**-**	**-**	**49.524.618.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	548.742.000	-	-	-	548.742.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (80.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (5.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	248.742.000	-	-	-	248.742.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (5.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.382.824.000	-	-	-	34.382.824.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (80.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.808.304.000	-	-	-	32.808.304.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (3.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.509.520.000	-	-	-	1.509.520.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (3.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.000.000	-	-	-	65.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (3.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	290.585.000	-	-	-	290.585.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (80.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	240.585.000	-	-	-	240.585.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (12.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (2.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (2.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	117.677.000	-	-	-	117.677.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (80.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	42.677.000	-	-	-	42.677.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (2.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	-	-	-	75.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (2.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.885.073.000	42.000.000	-	-	2.927.073.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (80.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	160.000.000	-	-	-	160.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258.233.000	-	-	-	258.233.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	178.000.000	42.000.000	-	-	220.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	646.540.000	-	-	-	646.540.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.600.000	-	-	-	107.600.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	22.000.000	-	-	-	22.000.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	249.900.000	-	-	-	249.900.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	1.227.800.000	-	-	-	1.227.800.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	5.000.000	-	-	-	5.000.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	30.000.000	-	-	-	30.000.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (80.00 %)*	8.803.391.000	-	-	-	8.803.391.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.700.000	-	-	-	3.700.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (2.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.109.700.000	-	-	-	3.109.700.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (2.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.689.991.000	-	-	-	5.689.991.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (2.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.100.326.000	354.000.000	-	-	2.454.326.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (80.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.000.000	-	-	-	105.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (30.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (41.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.400.000	-	-	-	342.400.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (102.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (19.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (30.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (41.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.500.000	-	-	-	12.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (102.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (19.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (30.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (41.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	705.426.000	-	-	-	705.426.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (102.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (19.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (30.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (41.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (102.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (19.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (41.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	422.500.000	354.000.000	-	-	776.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (102.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (19.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (30.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (41.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.500.000	-	-	-	91.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (102.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (19.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (30.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (41.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	401.000.000	-	-	-	401.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (102.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (19.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (30.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (41.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**9.979.492.000**	**-**	**-**	**-**	**9.979.492.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	9.979.492.000	-	-	-	9.979.492.000
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif (4.39 %)					
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa (6.67 %)					
	Persentase pertumbuhan produksi industri agro (2.50 %)					
	Persentase pertumbuhan produksi industri non agro (2.50 %)					
	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki (85.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5.815.029.000	-	-	-	5.815.029.000
	Jumlah Pelaku Industri Agro yang mendapatkan fasilitasi (22.00 Orang)					
	Jumlah Pelaku Industri Non Agro yang mendapatkan fasilitasi (112.00 Orang)					
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan dan Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan (30.00 Orang)					
	Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan dan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna (160.00 Orang)					
	Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil dan alas kaki (500.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SDM Industri Agro Yang dilatih (40.00 Orang)					
	Jumlah SDM Industri Non Agro Yang dilatih (40.00 Orang)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4.164.463.000	-	-	-	4.164.463.000
	Jumlah Pelaku Industri Agro yang mendapatkan fasilitasi (22.00 Orang)					
	Jumlah Pelaku Industri Non Agro yang mendapatkan fasilitasi (112.00 Orang)					
	Jumlah SDM Industri Agro Yang dilatih (40.00 Orang)					
	Jumlah SDM Industri Non Agro Yang dilatih (40.00 Orang)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**245.681.000**	**-**	**-**	**-**	**245.681.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	245.681.000	-	-	-	245.681.000
	Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan (9.00 %)					
	Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan (5.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	245.681.000	-	-	-	245.681.000
	Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan (1.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan (47.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**250.686.000**	**-**	**-**	**-**	**250.686.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	250.686.000	-	-	-	250.686.000
	Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (10.00 %)					
	Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (6.95 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	30.175.000	-	-	-	30.175.000
	Jumlah penambahan Industri Agro dalam SIINAS (25.00 Unit)					
	Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Non Agro dalam SIINAS (200.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	220.511.000	-	-	-	220.511.000
	Jumlah penambahan Industri Agro dalam SIINAS (25.00 Unit)					
	Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Non Agro dalam SIINAS (200.00 Unit)					
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.214.151.143.000**	**14.444.936.000**	**-**	**-**	**1.228.596.079.000**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**632.866.071.000**	**10.705.000.000**	**-**	**-**	**643.571.071.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO HUKUM**	**3.067.092.000**	**5.000.000**	**-**	**-**	**3.072.092.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO PEREKONOMIAN**	**3.470.400.000**	**-**	**-**	**-**	**3.470.400.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM**	**2.312.812.000**	**-**	**-**	**-**	**2.312.812.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO UMUM**	**211.355.535.000**	**10.700.000.000**	**-**	**-**	**222.055.535.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**400.401.884.000**	**-**	**-**	**-**	**400.401.884.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA**	**4.387.526.000**	**-**	**-**	**-**	**4.387.526.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**2.594.229.000**	**-**	**-**	**-**	**2.594.229.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO ORGANISASI**	**2.601.069.000**	**-**	**-**	**-**	**2.601.069.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**2.675.524.000**	**-**	**-**	**-**	**2.675.524.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**635.524.000**	**-**	**-**	**-**	**635.524.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**909.526.000**	**-**	**-**	**-**	**909.526.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**343.736.000**	**-**	**-**	**-**	**343.736.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**154.092.000**	**-**	**-**	**-**	**154.092.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**211.355.535.000**	**10.700.000.000**	**-**	**-**	**222.055.535.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**820.541.000**	**-**	**-**	**-**	**820.541.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**700.000.000**	**-**	**-**	**-**	**700.000.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**245.740.000**	**-**	**-**	**-**	**245.740.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**307.952.000**	**-**	**-**	**-**	**307.952.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.000.000	-	-	-	190.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (90.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.000.000	-	-	-	110.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115.305.142.000	-	-	-	115.305.142.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Laporan)*	113.340.142.000	-	-	-	113.340.142.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Laporan)*	1.540.000.000	-	-	-	1.540.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Laporan)*	300.000.000	-	-	-	300.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Laporan)*	125.000.000	-	-	-	125.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)*	792.000.000	-	-	-	792.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (12.00 Laporan)*	442.000.000	-	-	-	442.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	350.000.000	-	-	-	350.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	145.312.000	-	-	-	145.312.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	104.574.000	-	-	-	104.574.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.738.000	-	-	-	40.738.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.524.000	-	-	-	445.524.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.736.000	-	-	-	343.736.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.952.000	-	-	-	307.952.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	909.526.000	-	-	-	909.526.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	675.229.000	-	-	-	675.229.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.849.954.000	-	-	-	10.849.954.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.740.000	-	-	-	245.740.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.092.000	-	-	-	154.092.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	700.000.000	-	-	-	700.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.718.000	-	-	-	500.718.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	425.000.000	-	-	-	425.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	45.000.000	-	-	-	45.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.500.000.000	-	-	-	5.500.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.195.000	-	-	-	370.195.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	872.000.000	-	-	-	872.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.000.000	-	-	-	144.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.000.000	-	-	-	275.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.429.236.000	-	-	-	3.429.236.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	660.000.000	-	-	-	660.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (100.00 %)*	634.968.000	-	-	-	634.968.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian (100.00 %)*	287.952.000	-	-	-	287.952.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (100.00 %)*	222.300.000	-	-	-	222.300.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah (100.00 %)*	75.329.000	-	-	-	75.329.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang (100.00 %)*	40.000.000	-	-	-	40.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	-	-	-	20.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.092.000	-	-	-	10.092.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37.526.000	-	-	-	37.526.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.261.000	-	-	-	40.261.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.440.000	-	-	-	23.440.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	68.736.000	-	-	-	68.736.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	10.700.000.000	-	-	10.700.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
	Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Paket)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	9.200.000.000	-	-	9.200.000.000
	Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Paket)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.511.213.000	-	-	-	25.511.213.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000.000	-	-	-	7.500.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	631.213.000	-	-	-	631.213.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.350.000.000	-	-	-	17.350.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.300.000.000	-	-	-	8.300.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (833.00 Unit)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.250.000.000	-	-	-	2.250.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (833.00 Unit)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	87.500.000	-	-	-	87.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (833.00 Unit)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (833.00 Unit)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000.000	-	-	-	4.000.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (833.00 Unit)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.500.000	-	-	-	312.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (833.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26.232.776.000	-	-	-	26.232.776.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.743.094.000	-	-	-	2.743.094.000
	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	160.000.000	-	-	-	160.000.000
	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	23.279.682.000	-	-	-	23.279.682.000
	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	6.120.000.000	-	-	-	6.120.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.950.000.000	-	-	-	2.950.000.000
	Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.770.000.000	-	-	-	1.770.000.000
	Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000
	Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	15.334.203.000	-	-	-	15.334.203.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	11.484.203.000	-	-	-	11.484.203.000
	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan (12.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	3.500.000.000	-	-	-	3.500.000.000
	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	2.880.247.000	-	-	-	2.880.247.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2.580.247.000	-	-	-	2.580.247.000
	Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**1.780.528.000**	**-**	**-**	**-**	**1.780.528.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	687.552.000	-	-	-	687.552.000
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya (88.57 %)					
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif (90.00 %)					
	Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi (70.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	262.352.000	-	-	-	262.352.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (1.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	212.400.000	-	-	-	212.400.000
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (1.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	212.800.000	-	-	-	212.800.000
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.092.976.000	-	-	-	1.092.976.000
	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB (48.57 %)					
	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A (69.05 %)					
	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan (92.00 %)					
	Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A (36.59 %)					
	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan (91.01 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	301.360.000	-	-	-	301.360.000
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	240.160.000	-	-	-	240.160.000
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	276.640.000	-	-	-	276.640.000
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	274.816.000	-	-	-	274.816.000
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**3.478.000.000**	**-**	**-**	**-**	**3.478.000.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	1.005.000.000	-	-	-	1.005.000.000
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (95.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	550.000.000	-	-	-	550.000.000
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (8.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	230.000.000	-	-	-	230.000.000
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (8.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	225.000.000	-	-	-	225.000.000
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (8.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.330.000.000	-	-	-	1.330.000.000
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah (95.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	800.000.000	-	-	-	800.000.000
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen)					
	Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (95.00 %)					
	Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	225.000.000	-	-	-	225.000.000
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen)					
	Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (95.00 %)					
	Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	305.000.000	-	-	-	305.000.000
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen)					
	Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (95.00 %)					
	Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.143.000.000	-	-	-	1.143.000.000
	Tingkat efektivitas kerjasama daerah (95.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	593.000.000	-	-	-	593.000.000
	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (95.00 %)					
	Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (95.00 %)					
	Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah (95.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	200.000.000	-	-	-	200.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (95.00 %)					
	Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (95.00 %)					
	Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah (95.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (95.00 %)					
	Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (95.00 %)					
	Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah (95.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**400.058.148.000**	**-**	**-**	**-**	**400.058.148.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	398.686.424.000	-	-	-	398.686.424.000
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik (60.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	394.145.724.000	-	-	-	394.145.724.000
	Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	4.540.700.000	-	-	-	4.540.700.000
	Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	643.908.000	-	-	-	643.908.000
	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar (83.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	243.908.000	-	-	-	243.908.000
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	727.816.000	-	-	-	727.816.000
	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar (84.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (4.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	527.816.000	-	-	-	527.816.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (4.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**2.913.000.000**	**5.000.000**	**-**	**-**	**2.918.000.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.677.000.000	5.000.000	-	-	1.682.000.000
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan (97.00 %)					
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji (97.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota (12.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	65.000.000	-	-	-	65.000.000
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota (12.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	460.000.000	5.000.000	-	-	465.000.000
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota (12.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	652.000.000	-	-	-	652.000.000
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota (12.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (12.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.236.000.000	-	-	-	1.236.000.000
	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani (96.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM (96.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara (12.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (12.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	236.000.000	-	-	-	236.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara (12.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (12.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN**	**3.162.448.000**	**-**	**-**	**-**	**3.162.448.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN**	**1.612.812.000**	**-**	**-**	**-**	**1.612.812.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1.762.448.000	-	-	-	1.762.448.000
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan (84.00 %)					
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan (79.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	462.448.000	-	-	-	462.448.000
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro (4.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro (4.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1.300.000.000	-	-	-	1.300.000.000
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro (4.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1.612.812.000	-	-	-	1.612.812.000
	Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur (85.00 %)					
	Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan (85.00 %)					
	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian (87.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	577.043.000	-	-	-	577.043.000
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	521.683.000	-	-	-	521.683.000
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	514.086.000	-	-	-	514.086.000
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000
	Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha (82.00 %)					
	Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan (86.00 %)					
	Persentase nilai kemandirian BLUD (56.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	810.000.000	-	-	-	810.000.000
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	390.000.000	-	-	-	390.000.000
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**2.348.489.000**	**-**	**-**	**-**	**2.348.489.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.270.335.000	-	-	-	1.270.335.000
	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa (91.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	262.535.000	-	-	-	262.535.000
	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	799.800.000	-	-	-	799.800.000
	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	208.000.000	-	-	-	208.000.000
	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	603.720.000	-	-	-	603.720.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik (82.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	190.230.000	-	-	-	190.230.000
	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	295.350.000	-	-	-	295.350.000
	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	118.140.000	-	-	-	118.140.000
	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	474.434.000	-	-	-	474.434.000
	Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa (82.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	147.204.000	-	-	-	147.204.000
	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	162.210.000	-	-	-	162.210.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	165.020.000	-	-	-	165.020.000
	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**2.040.000.000**	**-**	**-**	**-**	**2.040.000.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.470.000.000	-	-	-	1.470.000.000
	Persentase capaian pelaksanaan APBD (98.80 %)					
	Persentase capaian pelaksanaan APBN (95.50 %)					
	Persentase realisasi bantuan keuangan (85.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	465.000.000	-	-	-	465.000.000
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	285.000.000	-	-	-	285.000.000
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	720.000.000	-	-	-	720.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	570.000.000	-	-	-	570.000.000
	Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah (86.00 %)					
	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	120.000.000	-	-	-	120.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (2.00 Dokumen)					
	Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap (92.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	347.000.000	-	-	-	347.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (2.00 Dokumen)					
	Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap (92.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	103.000.000	-	-	-	103.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (2.00 Dokumen)					
	Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap (92.00 %)					
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**581.285.072.000**	**3.739.936.000**	**-**	**-**	**585.025.008.000**
4.02.4.02.0.00.0.00.01	**Sekretariat DPRD**	**581.285.072.000**	**3.739.936.000**	**-**	**-**	**585.025.008.000**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**215.131.812.000**	**3.739.936.000**	**-**	**-**	**218.871.748.000**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.112.567.000	-	-	-	1.112.567.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	812.567.000	-	-	-	812.567.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.665.764.000	-	-	-	20.665.764.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.560.764.000	-	-	-	19.560.764.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (24.00 Dokumen)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.105.000.000	-	-	-	1.105.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (24.00 Dokumen)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.055.674.000	-	-	-	1.055.674.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.055.674.000	-	-	-	1.055.674.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (12.00 Dokumen)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	600.101.000	-	-	-	600.101.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	206.808.000	-	-	-	206.808.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	393.293.000	-	-	-	393.293.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.256.952.000	-	-	-	3.256.952.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	435.701.000	-	-	-	435.701.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182.189.000	-	-	-	182.189.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	480.500.000	-	-	-	480.500.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	980.400.000	-	-	-	980.400.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	178.162.000	-	-	-	178.162.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.023.045.000	3.739.936.000	-	-	5.762.981.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	639.680.000	-	-	639.680.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (141.00 Unit)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	2.163.948.000	-	-	2.163.948.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (141.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (141.00 Unit)*	-	276.640.000	-	-	276.640.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (141.00 Unit)*	-	381.288.000	-	-	381.288.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (141.00 Unit)*	2.023.045.000	278.380.000	-	-	2.301.425.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	19.393.158.000	-	-	-	19.393.158.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)*	196.957.000	-	-	-	196.957.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)*	3.439.000.000	-	-	-	3.439.000.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.031.086.000	-	-	-	1.031.086.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.726.115.000	-	-	-	14.726.115.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.718.675.000	-	-	-	7.718.675.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	502.800.000	-	-	-	502.800.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (160.00 Unit)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.027.582.000	-	-	-	3.027.582.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (160.00 Unit)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	57.475.000	-	-	-	57.475.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (160.00 Unit)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.699.503.000	-	-	-	1.699.503.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (160.00 Unit)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.431.315.000	-	-	-	2.431.315.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (160.00 Unit)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	159.305.876.000	-	-	-	159.305.876.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	157.346.875.000	-	-	-	157.346.875.000
	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.392.880.000	-	-	-	1.392.880.000
	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	566.121.000	-	-	-	566.121.000
	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**366.153.260.000**	**-**	**-**	**-**	**366.153.260.000**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	8.483.926.000	-	-	-	8.483.926.000
	Persentase fasilitasi penyusunan raperda (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8.483.926.000	-	-	-	8.483.926.000
	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan RAPERDA (23.00 Dokumen)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.102.662.000	-	-	-	2.102.662.000
	Persentase fasilitasi penyusunan raperda (95.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	2.102.662.000	-	-	-	2.102.662.000
	Jumlah dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran (2.00 Dokumen)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	13.819.030.000	-	-	-	13.819.030.000
	Persentase fasilitasi penyusunan raperda (95.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2.214.668.000	-	-	-	2.214.668.000
	Persentase tercapainya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2.214.668.000	-	-	-	2.214.668.000
	Persentase tercapainya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.214.668.000	-	-	-	2.214.668.000
	Persentase tercapainya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2.214.668.000	-	-	-	2.214.668.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tercapainya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2.214.668.000	-	-	-	2.214.668.000
	Persentase tercapainya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.149.830.000	-	-	-	1.149.830.000
	Persentase tercapainya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.595.860.000	-	-	-	1.595.860.000
	Persentase tercapainya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	83.361.307.000	-	-	-	83.361.307.000
	Persentase fasilitasi penyusunan raperda (95.00 %)					
	Persentase layanan bagian humas (95.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.380.000.000	-	-	-	4.380.000.000
	Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD (6.00 Dokumen)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.173.208.000	-	-	-	2.173.208.000
	Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	454.190.000	-	-	-	454.190.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	10.849.896.000	-	-	-	10.849.896.000
	Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	65.504.013.000	-	-	-	65.504.013.000
	Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	64.153.805.000	-	-	-	64.153.805.000
	Persentase fasilitasi penyusunan raperda (95.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	20.563.680.000	-	-	-	20.563.680.000
	Persentase tercapainya kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	175.000.000	-	-	-	175.000.000
	Persentase tercapainya kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	43.415.125.000	-	-	-	43.415.125.000
	Persentase tercapainya kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	552.860.000	-	-	-	552.860.000
	Persentase fasilitasi penyusunan raperda (95.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	552.860.000	-	-	-	552.860.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD (21.00 Dokumen)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	116.323.862.000	-	-	-	116.323.862.000
	Persentase layanan bagian humas (95.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	116.323.862.000	-	-	-	116.323.862.000
	Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama (12.00 Dokumen)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	77.355.808.000	-	-	-	77.355.808.000
	Persentase fasilitasi penyusunan raperda (95.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	77.355.808.000	-	-	-	77.355.808.000
	Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD (33.00 Dokumen)					
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**545.776.331.000**	**12.683.703.000**	**25.000.000.000**	**7.272.839.156.000**	**7.856.299.190.000**
5.01	**PERENCANAAN**	**46.752.011.000**	**1.669.000.000**	**-**	**-**	**48.421.011.000**
5.01.5.01.0.00.0.00.02	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**46.752.011.000**	**1.669.000.000**	**-**	**-**	**48.421.011.000**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**33.772.011.000**	**1.669.000.000**	**-**	**-**	**35.441.011.000**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	660.000.000	-	-	-	660.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	360.000.000	-	-	-	360.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	300.000.000	-	-	-	300.000.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	22.081.232.000	-	-	-	22.081.232.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	21.406.192.000	-	-	-	21.406.192.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	350.040.000	-	-	-	350.040.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	200.000.000	-	-	-	200.000.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	75.000.000	-	-	-	75.000.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	-	-	-	50.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	260.000.000	-	-	-	260.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (2.00 Dokumen)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (2.00 Dokumen)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	390.000.000	-	-	-	390.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	190.000.000	-	-	-	190.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	-	-	-	100.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.852.200.000	19.000.000	-	-	2.871.200.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000	-	-	-	120.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.000.000	-	-	-	52.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	220.000.000	-	-	-	220.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	20.000.000	19.000.000	-	-	39.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	180.200.000	-	-	-	180.200.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.250.000.000	-	-	1.250.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	100.000.000	-	-	100.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (40.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (40.00 Unit)*	-	200.000.000	-	-	200.000.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (40.00 Unit)*	-	950.000.000	-	-	950.000.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	4.275.418.000	-	-	-	4.275.418.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)*	30.000.000	-	-	-	30.000.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)*	1.200.000.000	-	-	-	1.200.000.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)*	3.045.418.000	-	-	-	3.045.418.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	3.253.161.000	400.000.000	-	-	3.653.161.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	650.000.000	-	-	-	650.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1475.00 Unit)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1475.00 Unit)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1475.00 Unit)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	340.000.000	-	-	-	340.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1475.00 Unit)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	24.000.000	-	-	-	24.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1475.00 Unit)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.409.161.000	400.000.000	-	-	1.809.161.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1475.00 Unit)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000	-	-	-	250.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1475.00 Unit)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1475.00 Unit)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**5.900.000.000**	**-**	**-**	**-**	**5.900.000.000**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.216.000.000	-	-	-	4.216.000.000
	Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	4.216.000.000	-	-	-	4.216.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang diamanahkan regulasi (3.00 Dokumen)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	741.000.000	-	-	-	741.000.000
	Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0001	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	601.000.000	-	-	-	601.000.000
	Jumlah dokumen analisis data dan informasi Perencanaan Pembangunan (1.00 Dokumen)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	140.000.000	-	-	-	140.000.000
	Jumlah dokumen analisis data dan informasi Perencanaan Pembangunan (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	943.000.000	-	-	-	943.000.000
	Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	678.000.000	-	-	-	678.000.000
	Jumlah Dokumen Evaluasi yang sesuai amanah regulasi (4.00 Dokumen)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	265.000.000	-	-	-	265.000.000
	Jumlah Dokumen Evaluasi yang sesuai amanah regulasi (4.00 Dokumen)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**7.080.000.000**	**-**	**-**	**-**	**7.080.000.000**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.700.000.000	-	-	-	2.700.000.000
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya (100.00 %)					
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	140.000.000	-	-	-	140.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Kesos (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pemberdes (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup PMS (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang Pemberdes (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kesos (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup PMS (1.00 Laporan)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	984.000.000	-	-	-	984.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Kesos (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pemberdes (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup PMS (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang Pemberdes (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kesos (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup PMS (1.00 Laporan)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Kesos (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pemberdes (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup PMS (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang Pemberdes (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kesos (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup PMS (1.00 Laporan)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.226.000.000	-	-	-	1.226.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Kesos (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pemberdes (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup PMS (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang Pemberdes (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kesos (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup PMS (1.00 Laporan)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2.230.000.000	-	-	-	2.230.000.000
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian (100.00 %)					
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	680.000.000	-	-	-	680.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Eknaker (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup KKI (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Tanlut (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Eknaker (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup KKI (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Tanlut (1.00 Laporan)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	860.000.000	-	-	-	860.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Eknaker (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup KKI (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Tanlut (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Eknaker (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup KKI (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Tanlut (1.00 Laporan)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	340.000.000	-	-	-	340.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Eknaker (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup KKI (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Tanlut (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Eknaker (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup KKI (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Tanlut (1.00 Laporan)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	350.000.000	-	-	-	350.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Eknaker (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup KKI (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Tanlut (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Eknaker (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup KKI (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Tanlut (1.00 Laporan)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.150.000.000	-	-	-	2.150.000.000
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah (100.00 %)					
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	150.000.000	-	-	-	150.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Infrastruktur dan Perhubungan (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup SDH LH (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Infrastruktur dan Perhubungan (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup SDH LH (1.00 Laporan)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Infrastruktur dan Perhubungan (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup SDH LH (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Infrastruktur dan Perhubungan (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup SDH LH (1.00 Laporan)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Infrastruktur dan Perhubungan (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup SDH LH (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Infrastruktur dan Perhubungan (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup SDH LH (1.00 Laporan)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.100.000.000	-	-	-	1.100.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Infrastruktur dan Perhubungan (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup SDH LH (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Infrastruktur dan Perhubungan (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman (1.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup SDH LH (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02	**KEUANGAN**	**353.748.408.000**	**8.892.703.000**	**25.000.000.000**	**7.272.839.156.000**	**7.660.480.267.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.02	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	**285.068.576.000**	**7.482.128.000**	**-**	**-**	**292.550.704.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**247.007.516.000**	**7.392.128.000**	**-**	**-**	**254.399.644.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	605.000.000	-	-	-	605.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (90.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	345.000.000	-	-	-	345.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.000.000	-	-	-	260.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	156.923.731.000	-	-	-	156.923.731.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Salatiga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang I (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang II (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang III (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal (95.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	154.448.801.000	-	-	-	154.448.801.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.247.370.000	-	-	-	2.247.370.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Magelang (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1 (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Tegal (4.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	227.560.000	-	-	-	227.560.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	613.700.000	-	-	-	613.700.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Salatiga (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang I (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang II (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang III (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal (95.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	258.700.000	-	-	-	258.700.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (100.00 %)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD kabupaten Blora (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Magelang (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang 1 (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang II (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal (4.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	355.000.000	-	-	-	355.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	207.550.000	-	-	-	207.550.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (95.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	157.550.000	-	-	-	157.550.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.356.538.000	-	-	-	18.356.538.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Salatiga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang I (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang II (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang III (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal (95.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	425.744.000	-	-	-	425.744.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.040.000.000	-	-	-	3.040.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.374.224.000	-	-	-	1.374.224.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.393.104.000	-	-	-	4.393.104.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	239.729.000	-	-	-	239.729.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.957.357.000	-	-	-	3.957.357.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.202.344.000	-	-	-	1.202.344.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.664.171.000	-	-	-	3.664.171.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	47.865.000	-	-	-	47.865.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.000.000	-	-	-	12.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.392.128.000	-	-	7.392.128.000
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang (-26.14 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Salatiga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang I (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang II (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang III (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal (95.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	5.200.000.000	-	-	5.200.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	2.192.128.000	-	-	2.192.128.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Batang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Boyolali (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Demak (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pati (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Pekalongan (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Semarang III (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Tegal (1.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.381.188.000	-	-	-	54.381.188.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Salatiga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang I (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang II (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang III (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal (95.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.555.000	-	-	-	104.555.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Magelang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1 (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Tegal (4.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.695.570.000	-	-	-	12.695.570.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Magelang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1 (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Tegal (4.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.184.428.000	-	-	-	10.184.428.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Magelang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1 (4.00 Laporan)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Tegal (4.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.396.635.000	-	-	-	31.396.635.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus (4.00 Laporan)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Magelang (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1 (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Tegal (4.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.919.809.000	-	-	-	15.919.809.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Salatiga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang I (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang II (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang III (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	871.890.000	-	-	-	871.890.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Batang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD kabupaten Blora (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Boyolali (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Demak (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pati (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pekalongan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pemalang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Tegal (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Magelang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Pekalongan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Salatiga (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang II (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang III (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Surakarta (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Tegal (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.359.980.000	-	-	-	5.359.980.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Batang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD kabupaten Blora (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Boyolali (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Demak (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pati (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pekalongan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pemalang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Tegal (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Magelang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Pekalongan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Salatiga (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang II (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang III (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Surakarta (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Tegal (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.926.690.000	-	-	-	2.926.690.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Batang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD kabupaten Blora (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Boyolali (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Demak (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pati (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pekalongan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pemalang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Tegal (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Magelang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Pekalongan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Salatiga (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang II (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang III (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Surakarta (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Tegal (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	288.525.000	-	-	-	288.525.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Batang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD kabupaten Blora (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Boyolali (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Demak (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pati (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pekalongan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pemalang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Tegal (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Magelang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Pekalongan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Salatiga (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang II (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang III (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Surakarta (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Tegal (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.928.858.000	-	-	-	2.928.858.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Batang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD kabupaten Blora (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Boyolali (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Demak (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pati (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pekalongan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pemalang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Tegal (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Magelang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Pekalongan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Salatiga (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang II (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang III (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Surakarta (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Tegal (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.150.510.000	-	-	-	1.150.510.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Batang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD kabupaten Blora (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Boyolali (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Demak (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pati (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pekalongan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pemalang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Tegal (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Magelang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Pekalongan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Salatiga (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang II (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang III (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Surakarta (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Tegal (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.393.356.000	-	-	-	2.393.356.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banjarnegara (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banyumas (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Batang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD kabupaten Blora (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Boyolali (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Brebes (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Cilacap (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Demak (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Grobogan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Jepara (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Karanganyar (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kendal (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Klaten (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kudus (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Magelang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pati (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pekalongan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pemalang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Purbalingga (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Rembang (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Semarang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sragen (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Tegal (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Temanggung (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Magelang (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Pekalongan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Salatiga (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang II (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang III (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Surakarta (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Tegal (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**38.061.060.000**	**90.000.000**	**-**	**-**	**38.151.060.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	38.061.060.000	90.000.000	-	-	38.151.060.000
	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan (100.00 %)					
	Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah (100.00 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (13.21 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas (13.46 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang (15.87 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora (13.64 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali (13.53 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes (13.72 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap (13.57 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak (13.67 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan (13.66 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara (13.32 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (13.52 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen (13.59 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal (13.45 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten (13.67 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus (13.63 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang (13.58 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati (13.46 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan (12.72 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang (13.37 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (13.41 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo (13.71 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang (14.95 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang (13.33 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen (13.54 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (13.62 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal (13.63 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung (13.36 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (13.46 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (13.46 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang (13.43 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan (13.51 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga (12.67 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 (14.69 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II (13.55 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III (13.55 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta (13.57 %)					
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal (19.19 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara (-14.93 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas (-11.67 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang (-19.20 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora (-13.35 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali (-13.53 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes (9.72 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap (-10.50 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak (-12.89 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan (-9.14 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara (-18.29 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar (-22.60 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen (-7.41 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal (-6.82 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten (-16.34 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus (-17.98 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang (-11.38 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati (-15.98 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan (-14.89 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang (-8.82 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga (-17.71 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo (-7.40 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang (-9.37 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang (-13.70 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen (-22.66 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo (-14.90 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal (2.02 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung (-13.52 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri (-7.55 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo (-24.10 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang (-24.50 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan (-21.25 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga (-6.82 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1 (4.34 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II (-12.96 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III (-21.14 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta (-10.64 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal (3.51 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara (4.31 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas (-10.17 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang (4.69 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora (14.70 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali (14.18 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes (13.30 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap (2.39 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak (5.28 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan (-11.08 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara (-4.88 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar (-0.41 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen (-6.00 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal (32.23 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten (-1.14 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus (-11.69 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang (19.12 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati (-6.74 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan (-14.86 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang (7.36 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga (4.55 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo (-2.81 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang (7.95 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang (-11.35 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen (-4.52 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo (-16.09 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal (11.08 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung (11.47 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KAbupaten Wonogiri (-21.29 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo (-3.04 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang (-4.53 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga (2.58 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II (-0.21 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III (19.63 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta (0.55 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara (-0.46 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas (-15.84 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang (-3.73 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora (-22.72 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali (-16.92 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes (2.01 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap (-17.17 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak (-15.64 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan (-15.78 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara (-15.04 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar (-10.91 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen (-13.87 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal (-8.84 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten (-15.94 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus (-22.30 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang (-5.76 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati (-19.95 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang (-10.34 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga (-21.96 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo (-27.79 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang (-23.29 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang (-26.14 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen (-19.81 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo (-17.60 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal (13.68 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung (-9.56 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri (-22.78 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo (-15.00 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang (-67.77 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan (-50.20 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga (-31.07 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1 (-17.00 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II (-29.99 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III (-19.28 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta (-32.48 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal (-50.20 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan (-4.14 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain (3.19 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (6.97 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas (9.36 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang (9.37 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora (21.32 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali (6.13 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes (12.68 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap (31.53 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak (14.09 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan (15.03 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara (-35.43 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (23.37 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen (20.73 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal (11.16 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten (7.60 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus (12.52 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang (11.24 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati (20.59 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan (17.76 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang (9.48 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga (22.05 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo (32.02 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang (27.65 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang (21.18 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen (6.99 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (10.38 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal (12.30 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung (19.39 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (15.75 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (5.55 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang (21.75 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan (18.98 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga (12.37 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 (13.17 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II (18.67 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III (17.95 %)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta (13.93 %)					
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal (78.96 %)					
	Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (73.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	2.710.000.000	-	-	-	2.710.000.000
	Jumlah Dokumen Informasi data pendapatan yang tersusun (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah yang terapkan (1.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen regulasi pelayanan PKB (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah (4.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PKB dan BBNKB yang terlaksana (2.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan regulasi penanganan piutang PKB (1.00 Laporan)					
	Persentase penanganan pengajuan keberatan PKB yang terselesaikan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.897.000.000	-	-	-	1.897.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Daerah (4.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen regulasi pelayanan PKB (1.00 Dokumen)					
	Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB (37.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain (37.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok yang terlaksana (4.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PKB dan BBNKB yang terlaksana (2.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Pendapatan Pajak Lain (4.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan regulasi penanganan piutang PKB (1.00 Laporan)					
	Persentase penanganan pengajuan keberatan PKB yang terselesaikan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	352.000.000	-	-	-	352.000.000
	Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Daerah (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok yang terlaksana (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Laporan Pendapatan Pajak Lain (4.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.506.435.000	-	-	-	7.506.435.000
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara (14730.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas (28340.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang (17280.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora (11720.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali (17540.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes (28500.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap (29420.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak (22400.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan (21950.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara (23230.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar (17050.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen (17530.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal (19400.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten (26000.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus (15730.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang (17000.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati (21220.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan (14700.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang (23000.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga (16210.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo (9900.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang (10670.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang (19740.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen (17890.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo (17880.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal (25820.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung (9140.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (14250.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo (9740.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Magelang (3240.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan (6900.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga (4430.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang 1 (23740.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II (18120.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III (16400.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta (16810.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Tegal (9890.00 Unit)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (39565884.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (95377608.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (46287644.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD kabupaten Blora (38499895.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (62048864.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (112261562.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (100784103.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (96532791.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (80075218.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (79897306.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (64035615.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (54408329.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (77308709.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (89407036.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (74564278.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (67984364.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (93008431.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (52058877.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (70805035.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (42262590.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (38951486.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (40742878.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (83062163.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (62139620.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (82192398.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (93656565.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (33421502.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (44130893.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (32265389.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Magelang (13412432.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (27752323.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Salatiga (25246360.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang 1 (174716311.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang II (125774625.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang III (105715002.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Surakarta (97613482.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Tegal (31465237.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara (3895000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banyumas (740000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Batang (395000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Blora (100000.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Boyolali (200000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Brebes (266000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Cilacap (3925000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Demak (230000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Grobogan (900000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Jepara (12000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar (408000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kebumen (736000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kendal (96000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Klaten (550000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kudus (7000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Magelang (905000.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pati (78000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan (291000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pemalang (247000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga (454000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purworejo (110000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Rembang (96000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Semarang (1260000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sragen (7500.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo (235000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Tegal (406000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Temanggung (316000.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri (255500.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo (567000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Magelang (105000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Salatiga (50000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang II (572000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang III (435000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Surakarta (50000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (79430909.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (182892682.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Batang (79989403.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Blora (71306856.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (122893737.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Brebes (131289711.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (176500170.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Demak (134528768.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (126126565.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Jepara (142051610.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (136635766.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (102864247.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kendal (115552981.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Klaten (170559812.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kusus (134194641.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Magelang (127389286.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pati (169139692.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (84738032.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (115832343.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (81271448.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (68238499.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Rembang (63811883.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Semarang (141520544.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sragen (132649504.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (145801529.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Tegal (133010753.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (70016434.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (94785629.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (71037885.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Magelang (33142524.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Pekalongan (46977430.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Salatiga (45368560.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang 1 (234884528.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang II (194972389.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang III (176507301.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Surakarta (170779171.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Tegal (44665201.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (87928.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (234072.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Batang (73960.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Blora (124083.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Boyolali (103130.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Brebes (138458.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (162735.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Demak (96369.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (164364.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Jepara (158559.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95327.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (134169.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kendal (86779.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Klaten (177532.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kudus (124200.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Magelang (220382.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pati (132609.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pekalongan (80275.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pemalang (121007.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (89068.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (88320.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Semarang (169815.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (118348.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Tegal (90995.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (93957.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (160359.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (109617.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Magelang (74732.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Pekalongan (73637.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Salatiga (78150.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang 1 (365453.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang II (243079.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang III (308090.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Surakarta (198818.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Tegal (311023.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaat Aset Daerah UPPD Kabupaten Rembang (99233.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sragen (72080.00 Ribu Rupiah)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	225.209.000	-	-	-	225.209.000
	Jumlah Dokumen Informasi data pendapatan yang tersusun (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah yang terapkan (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	15.303.951.000	-	-	-	15.303.951.000
	Jumlah dokumen regulasi pelayanan PKB (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PKB dan BBNKB yang terlaksana (2.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan regulasi penanganan piutang PKB (1.00 Laporan)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara (14730.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas (28340.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang (17280.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora (11720.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali (17540.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes (28500.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap (29420.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak (22400.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan (21950.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara (23230.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar (17050.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen (17530.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal (19400.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten (26000.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus (15730.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang (17000.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati (21220.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan (14700.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang (23000.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga (16210.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo (9900.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang (10670.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang (19740.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen (17890.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo (17880.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal (25820.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung (9140.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri (14250.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo (9740.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Magelang (3240.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan (6900.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga (4430.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang 1 (23740.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II (18120.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III (16400.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta (16810.00 Unit)					
	Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Tegal (9890.00 Unit)					
	Persentase penanganan pengajuan keberatan PKB yang terselesaikan (100.00 %)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (39565884.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (95377608.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (46287644.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD kabupaten Blora (38499895.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (62048864.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (112261562.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (100784103.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (96532791.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (80075218.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (79897306.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (64035615.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (54408329.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (77308709.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (89407036.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (74564278.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (67984364.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (93008431.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (52058877.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (70805035.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (42262590.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (38951486.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (40742878.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (83062163.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (62139620.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (82192398.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (93656565.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (33421502.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (44130893.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (32265389.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Magelang (13412432.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (27752323.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Salatiga (25246360.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang 1 (174716311.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang II (125774625.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang III (105715002.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Surakarta (97613482.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Tegal (31465237.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara (3895000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banyumas (740000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Batang (395000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Blora (100000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Boyolali (200000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Brebes (266000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Cilacap (3925000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Demak (230000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Grobogan (900000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Jepara (12000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar (408000.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kebumen (736000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kendal (96000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Klaten (550000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kudus (7000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Magelang (905000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pati (78000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan (291000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pemalang (247000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga (454000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purworejo (110000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Rembang (96000.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Semarang (1260000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sragen (7500.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo (235000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Tegal (406000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Temanggung (316000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri (255500.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo (567000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Magelang (105000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Salatiga (50000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang II (572000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang III (435000.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Surakarta (50000.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (79430909.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (182892682.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Batang (79989403.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Blora (71306856.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (122893737.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Brebes (131289711.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (176500170.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Demak (134528768.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (126126565.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Jepara (142051610.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (136635766.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (102864247.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kendal (115552981.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Klaten (170559812.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kusus (134194641.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Magelang (127389286.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pati (169139692.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (84738032.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (115832343.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (81271448.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (68238499.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Rembang (63811883.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Semarang (141520544.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sragen (132649504.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (145801529.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Tegal (133010753.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (70016434.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (94785629.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (71037885.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Magelang (33142524.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Pekalongan (46977430.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Salatiga (45368560.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang 1 (234884528.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang II (194972389.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang III (176507301.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Surakarta (170779171.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Tegal (44665201.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara (87928.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (234072.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Batang (73960.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Blora (124083.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Boyolali (103130.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Brebes (138458.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (162735.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Demak (96369.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (164364.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Jepara (158559.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar (95327.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (134169.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kendal (86779.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Klaten (177532.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kudus (124200.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Magelang (220382.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pati (132609.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pekalongan (80275.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pemalang (121007.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga (89068.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (88320.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Semarang (169815.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (118348.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Tegal (90995.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Temanggung (93957.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (160359.00 Ribu Rupiah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (109617.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Magelang (74732.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Pekalongan (73637.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Salatiga (78150.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang 1 (365453.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang II (243079.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang III (308090.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Surakarta (198818.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Tegal (311023.00 Ribu Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaat Aset Daerah UPPD Kabupaten Rembang (99233.00 Ribu Rupiah)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sragen (72080.00 Ribu Rupiah)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah dokumen regulasi pelayanan PKB (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PKB dan BBNKB yang terlaksana (2.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan regulasi penanganan piutang PKB (1.00 Laporan)					
	Persentase penanganan pengajuan keberatan PKB yang terselesaikan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	290.000.000	-	-	-	290.000.000
	Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB (37.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain (37.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	659.000.000	-	-	-	659.000.000
	Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Daerah (4.00 Dokumen)					
	Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB (37.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain (37.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok yang terlaksana (4.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Pendapatan Pajak Lain (4.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	8.967.465.000	90.000.000	-	-	9.057.465.000
	Jumlah Dokumen Informasi data pendapatan yang tersusun (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah yang terapkan (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah (4.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**68.679.832.000**	**1.410.575.000**	**25.000.000.000**	**7.272.839.156.000**	**7.367.929.563.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**46.819.807.000**	**805.600.000**	**-**	**-**	**47.625.407.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	507.095.000	-	-	-	507.095.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	256.300.000	-	-	-	256.300.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	250.795.000	-	-	-	250.795.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	31.434.373.000	-	-	-	31.434.373.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)*	29.576.252.000	-	-	-	29.576.252.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)*	1.661.421.000	-	-	-	1.661.421.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)*	56.000.000	-	-	-	56.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)*	140.700.000	-	-	-	140.700.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	100.000.000	-	-	-	100.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.601.207.000	-	-	-	2.601.207.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	565.000.000	-	-	-	565.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	354.500.000	-	-	-	354.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	360.000.000	-	-	-	360.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	771.707.000	-	-	-	771.707.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	200.000.000	-	-	-	200.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	-	95.000.000	-	-	95.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (521.00 Unit)*	-	35.000.000	-	-	35.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (521.00 Unit)*	-	60.000.000	-	-	60.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	8.216.354.000	-	-	-	8.216.354.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)*	11.200.000	-	-	-	11.200.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.820.000.000	-	-	-	1.820.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.185.154.000	-	-	-	6.185.154.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.960.778.000	710.600.000	-	-	4.671.378.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (326.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.600.000	-	-	-	132.600.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (730.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (326.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (730.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	758.178.000	710.600.000	-	-	1.468.778.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (326.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (730.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (326.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.700.000.000	-	-	-	1.700.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (730.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**17.100.000.000**	**-**	**25.000.000.000**	**7.272.839.156.000**	**7.314.939.156.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	8.600.000.000	-	-	-	8.600.000.000
	Persentase penetapan APBD tepat waktu (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	160.000.000	-	-	-	160.000.000
	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (8.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (8.00 Dokumen)					
	Tersusunya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan. (35.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	160.000.000	-	-	-	160.000.000
	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (8.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (8.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tersusunya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan. (35.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4.597.137.000	-	-	-	4.597.137.000
	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (8.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (8.00 Dokumen)					
	Tersusunya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan. (35.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.724.546.000	-	-	-	2.724.546.000
	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (8.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (8.00 Dokumen)					
	Tersusunya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan. (35.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	958.317.000	-	-	-	958.317.000
	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (8.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (8.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan. (35.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	-	-	-	1.200.000.000
	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	218.900.000	-	-	-	218.900.000
	Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	218.900.000	-	-	-	218.900.000
	Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	218.900.000	-	-	-	218.900.000
	Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	498.400.000	-	-	-	498.400.000
	Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	44.900.000	-	-	-	44.900.000
	Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (105.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.200.000.000	-	-	-	2.200.000.000
	Persentase penyusunan dokumen manajemen kas (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan (2.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan (2.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan (2.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan (2.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4.150.000.000	-	-	-	4.150.000.000
	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	408.927.000	-	-	-	408.927.000
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	220.530.000	-	-	-	220.530.000
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.664.237.000	-	-	-	1.664.237.000
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	746.868.000	-	-	-	746.868.000
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	319.228.000	-	-	-	319.228.000
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	790.210.000	-	-	-	790.210.000
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	25.000.000.000	7.272.839.156.000	7.297.839.156.000
	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	-	3.076.277.924.000	3.076.277.924.000
	Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	25.000.000.000	-	25.000.000.000
	Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	-	-	-	4.196.561.232.000	4.196.561.232.000
	Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	950.000.000	-	-	-	950.000.000
	Persentase penyusunan dokumen manajemen kas (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	950.000.000	-	-	-	950.000.000
	Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan (2.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**4.760.025.000**	**604.975.000**	**-**	**-**	**5.365.000.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.760.025.000	604.975.000	-	-	5.365.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi (100.00 %)					
	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik (89.86 %)					
	Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	698.000.000	-	-	-	698.000.000
	Meningkatnya jumlah aset yang teramankan (72.46 Angka)					
	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (100.00 %)					
	Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah (100.00 %)					
	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	189.000.000	-	-	-	189.000.000
	Meningkatnya jumlah aset yang teramankan (72.46 Angka)					
	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (100.00 %)					
	Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	162.000.000	190.000.000	-	-	352.000.000
	Meningkatnya jumlah aset yang teramankan (72.46 Angka)					
	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (100.00 %)					
	Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah (100.00 %)					
	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Meningkatnya jumlah aset yang teramankan (72.46 Angka)					
	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (100.00 %)					
	Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah (100.00 %)					
	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.290.025.000	414.975.000	-	-	1.705.000.000
	Meningkatnya jumlah aset yang teramankan (72.46 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (100.00 %)					
	Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah (100.00 %)					
	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	193.000.000	-	-	-	193.000.000
	Meningkatnya jumlah aset yang teramankan (72.46 Angka)					
	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (100.00 %)					
	Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah (100.00 %)					
	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	132.000.000	-	-	-	132.000.000
	Meningkatnya jumlah aset yang teramankan (72.46 Angka)					
	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (100.00 %)					
	Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.268.000.000	-	-	-	1.268.000.000
	Meningkatnya jumlah aset yang teramankan (72.46 Angka)					
	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (100.00 %)					
	Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah (100.00 %)					
	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	428.000.000	-	-	-	428.000.000
	Meningkatnya jumlah aset yang teramankan (72.46 Angka)					
	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (100.00 %)					
	Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah (100.00 %)					
	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu (1.00 Dokumen)					
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**42.795.136.000**	**175.000.000**	**-**	**-**	**42.970.136.000**
5.03.5.03.0.00.0.00.01	**Badan Kepegawaian Daerah**	**42.795.136.000**	**175.000.000**	**-**	**-**	**42.970.136.000**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**32.638.136.000**	**175.000.000**	**-**	**-**	**32.813.136.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (3.22 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.720.170.000	-	-	-	27.720.170.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (92.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.602.950.000	-	-	-	26.602.950.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.022.220.000	-	-	-	1.022.220.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	20.000.000	-	-	-	20.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	25.000.000	-	-	-	25.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (92.00 %)*	150.000.000	-	-	-	150.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)*	150.000.000	-	-	-	150.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (92.00 %)*	20.000.000	-	-	-	20.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah *Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (2.00 Laporan)*	20.000.000	-	-	-	20.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (92.00 %)*	170.000.000	-	-	-	170.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140.000.000	-	-	-	140.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.255.966.000	-	-	-	1.255.966.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (92.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.000.000	-	-	-	140.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.966.000	-	-	-	25.966.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	100.000.000	-	-	-	100.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	150.000.000	-	-	-	150.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	560.000.000	-	-	-	560.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	110.000.000	-	-	-	110.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (92.00 %)*	-	175.000.000	-	-	175.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)*	-	75.000.000	-	-	75.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	100.000.000	-	-	100.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.112.000.000	-	-	-	2.112.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (92.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	-	-	-	12.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000.000	-	-	-	700.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.350.000.000	-	-	-	1.350.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	710.000.000	-	-	-	710.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (92.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000	-	-	-	190.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**10.157.000.000**	**-**	**-**	**-**	**10.157.000.000**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	4.335.000.000	-	-	-	4.335.000.000
	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN (100.00 %)					
	Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN *persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN (100.00 %)*	110.000.000	-	-	-	110.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK *persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN (100.00 %)*	2.960.000.000	-	-	-	2.960.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian *persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN (100.00 %)*	280.000.000	-	-	-	280.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN *Persentase Peningkatan Pemahaman atas Nilai Dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN (100.00 %)*	275.000.000	-	-	-	275.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian *Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan (60.00 %)*	385.000.000	-	-	-	385.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian *Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan (60.00 %)*	325.000.000	-	-	-	325.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN *Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan (100.00 %)* *Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu (100.00 %)*	1.055.000.000	-	-	-	1.055.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	140.000.000	-	-	-	140.000.000
	Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu (100.00 %)					
	persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	315.000.000	-	-	-	315.000.000
	Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu (100.00 %)					
	persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	3.647.000.000	-	-	-	3.647.000.000
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan (100.00 %)					
	Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	1.021.000.000	-	-	-	1.021.000.000
	Persentase Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.256.000.000	-	-	-	2.256.000.000
	Persentase Peningkatan Kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	50.000.000	-	-	-	50.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Peningkatan Kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	320.000.000	-	-	-	320.000.000
	Persentase Peningkatan Kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.120.000.000	-	-	-	1.120.000.000
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan (100.00 %)					
	Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	275.000.000	-	-	-	275.000.000
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	292.800.000	-	-	-	292.800.000
	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN (100.00 %)					
	Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	92.200.000	-	-	-	92.200.000
	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN (100.00 %)					
	Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	180.000.000	-	-	-	180.000.000
	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	280.000.000	-	-	-	280.000.000
	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN (100.00 %)					
	Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN (100.00 %)					
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**59.413.905.000**	**297.000.000**	**-**	**-**	**59.710.905.000**
5.04.5.04.0.00.0.00.01	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**59.413.905.000**	**297.000.000**	**-**	**-**	**59.710.905.000**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**43.577.265.000**	**297.000.000**	**-**	**-**	**43.874.265.000**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.413.493.000	-	-	-	29.413.493.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.693.553.000	-	-	-	27.693.553.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.499.930.000	-	-	-	1.499.930.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	82.174.000	-	-	-	82.174.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78.868.000	-	-	-	78.868.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58.968.000	-	-	-	58.968.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	234.000.000	-	-	-	234.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	234.000.000	-	-	-	234.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	79.990.000	-	-	-	79.990.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	79.990.000	-	-	-	79.990.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	198.400.000	-	-	-	198.400.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48.400.000	-	-	-	48.400.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.088.982.000	-	-	-	2.088.982.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	178.093.000	-	-	-	178.093.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	188.916.000	-	-	-	188.916.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	343.025.000	-	-	-	343.025.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	305.260.000	-	-	-	305.260.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	76.200.000	-	-	-	76.200.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	36.000.000	-	-	-	36.000.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	105.400.000	-	-	-	105.400.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.693.000	-	-	-	280.693.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.505.000	-	-	-	8.505.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	566.890.000	-	-	-	566.890.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	297.000.000	-	-	297.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	218.000.000	-	-	218.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	10.000.000	-	-	10.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	69.000.000	-	-	69.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.725.600.000	-	-	-	9.725.600.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	-	-	-	4.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.252.000.000	-	-	-	2.252.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.469.600.000	-	-	-	7.469.600.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.486.800.000	-	-	-	1.486.800.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.300.000	-	-	-	117.300.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	21.000.000	-	-	-	21.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	760.000.000	-	-	-	760.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	588.500.000	-	-	-	588.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**15.836.640.000**	**-**	**-**	**-**	**15.836.640.000**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.347.950.000	-	-	-	1.347.950.000
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan) (3.50 Angka)					
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis (100.00 %)					
	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	21.250.000	-	-	-	21.250.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis (3.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	102.924.000	-	-	-	102.924.000
	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis (3.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.200.000.000	-	-	-	1.200.000.000
	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis (17320.00 Orang)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	23.776.000	-	-	-	23.776.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis (3.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	14.488.690.000	-	-	-	14.488.690.000
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan) (3.50 Angka)					
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional (100.00 %)					
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial (100.00 %)					
	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan (100.00 %)					
	Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	58.750.000	-	-	-	58.750.000
	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	25.437.000	-	-	-	25.437.000
	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi (2.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	374.563.000	-	-	-	374.563.000
	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi (2.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	73.115.000	-	-	-	73.115.000
	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi (2.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	13.636.640.000	-	-	-	13.636.640.000
	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (1150.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial (1320.00 Orang)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	320.185.000	-	-	-	320.185.000
	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi (2.00 Dokumen)					
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**20.305.100.000**	**150.000.000**	**-**	**-**	**20.455.100.000**
5.05.5.05.0.00.0.00.01	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**	**20.305.100.000**	**150.000.000**	**-**	**-**	**20.455.100.000**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.630.100.000**	**150.000.000**	**-**	**-**	**15.780.100.000**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	340.000.000	-	-	-	340.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	240.000.000	-	-	-	240.000.000
	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	-	-	-	100.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.928.099.000	-	-	-	10.928.099.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.484.539.000	-	-	-	10.484.539.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (19.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	223.560.000	-	-	-	223.560.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (19.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.000.000	-	-	-	110.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (19.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	110.000.000	-	-	-	110.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (19.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	125.000.000	-	-	-	125.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	110.000.000	-	-	-	110.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (2.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (2.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	340.000.000	-	-	-	340.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	280.000.000	-	-	-	280.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000	-	-	-	45.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.014.435.000	-	-	-	1.014.435.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	-	-	-	20.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	-	-	-	2.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.374.000	-	-	-	112.374.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.000.000	-	-	-	65.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	94.561.000	-	-	-	94.561.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	150.000.000	-	-	150.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	150.000.000	-	-	150.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (40.00 Unit)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.676.766.000	-	-	-	1.676.766.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)*	570.000.000	-	-	-	570.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)*	305.000.000	-	-	-	305.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)*	796.766.000	-	-	-	796.766.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	1.205.800.000	-	-	-	1.205.800.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (700.00 Unit)*	375.000.000	-	-	-	375.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (700.00 Unit)*	12.000.000	-	-	-	12.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	58.800.000	-	-	-	58.800.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (700.00 Unit)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (700.00 Unit)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.000.000	-	-	-	305.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (700.00 Unit)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	235.000.000	-	-	-	235.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (700.00 Unit)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000	-	-	-	130.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (700.00 Unit)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**4.675.000.000**	**-**	**-**	**-**	**4.675.000.000**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.917.872.000	-	-	-	1.917.872.000
	Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi (100.00 %)					
	Persentase pelaksanaan riset dan inovasi (100.00 %)					
	Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah Dokumen Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan (1.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	552.000.000	-	-	-	552.000.000
	Jumlah Dokumen Pengembangan Infrastruktur (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Penguatan SDM (1.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	348.000.000	-	-	-	348.000.000
	Jumlah Dokumen Pengembangan Infrastruktur (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Penguatan SDM (1.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah dokumen fasilitasi penelitian dan pengembangan riset inovasi (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	425.000.000	-	-	-	425.000.000
	Jumlah Dokumen Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan (1.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	317.872.000	-	-	-	317.872.000
	Jumlah dokumen fasilitasi penelitian dan pengembangan riset inovasi (1.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	218.000.000	-	-	-	218.000.000
	Persentase pelaksanaan riset dan inovasi (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	218.000.000	-	-	-	218.000.000
	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan (1.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	218.000.000	-	-	-	218.000.000
	Persentase pelaksanaan riset dan inovasi (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	218.000.000	-	-	-	218.000.000
	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan (1.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2.321.128.000	-	-	-	2.321.128.000
	Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pelaksanaan riset dan inovasi (100.00 %)					
	Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	525.000.000	-	-	-	525.000.000
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi (1.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	914.000.000	-	-	-	914.000.000
	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi (1.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	690.846.000	-	-	-	690.846.000
	Jumlah dokumen pemanfaatan riset inovasi (1.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	191.282.000	-	-	-	191.282.000
	Jumlah dokumen pemanfaatan riset inovasi (1.00 Dokumen)					
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**22.761.771.000**	**1.500.000.000**	**-**	**-**	**24.261.771.000**
5.07.5.07.0.00.0.00.01	**Badan Penghubung**	**22.761.771.000**	**1.500.000.000**	**-**	**-**	**24.261.771.000**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.768.891.000**	**1.500.000.000**	**-**	**-**	**20.268.891.000**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.067.000	-	-	-	128.067.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	68.067.000	-	-	-	68.067.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	60.000.000	-	-	-	60.000.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	9.898.194.000	-	-	-	9.898.194.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	9.840.414.000	-	-	-	9.840.414.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	37.780.000	-	-	-	37.780.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	20.000.000	-	-	-	20.000.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	251.580.000	-	-	-	251.580.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)*	251.580.000	-	-	-	251.580.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	90.000.000	-	-	-	90.000.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	90.000.000	-	-	-	90.000.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	1.757.213.000	-	-	-	1.757.213.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	50.941.000	-	-	-	50.941.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	75.000.000	-	-	-	75.000.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	204.372.000	-	-	-	204.372.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.000.000	-	-	-	21.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	630.900.000	-	-	-	630.900.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.000.000	-	-	-	750.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (198.00 Unit)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	500.000.000	-	-	500.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (198.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.239.837.000	-	-	-	5.239.837.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.000.000	-	-	-	21.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	950.000.000	-	-	-	950.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.188.837.000	-	-	-	4.188.837.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.404.000.000	-	-	-	1.404.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	762.900.000	-	-	-	762.900.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	86.100.000	-	-	-	86.100.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	380.000.000	-	-	-	380.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**3.992.880.000**	**-**	**-**	**-**	**3.992.880.000**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3.992.880.000	-	-	-	3.992.880.000
	Persentase ketercapaian pelayanan penghubung (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	2.792.880.000	-	-	-	2.792.880.000
	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat (100.00 %)					
	Persentase Terpenuhinya fasilitasi Pengunjung Anjungan Daerah Jawa Tengah (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1.200.000.000	-	-	-	1.200.000.000
	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (100.00 %)					
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat (100.00 %)					
	Persentase Terpenuhinya fasilitasi Pengunjung Anjungan Daerah Jawa Tengah (100.00 %)					
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**39.567.619.000**	**70.012.000**	**-**	**-**	**39.637.631.000**
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**39.567.619.000**	**70.012.000**	**-**	**-**	**39.637.631.000**
6.01.6.01.0.00.0.00.01	**INSPEKTORAT**	**39.567.619.000**	**70.012.000**	**-**	**-**	**39.637.631.000**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**30.163.820.000**	**70.012.000**	**-**	**-**	**30.233.832.000**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.000.000	-	-	-	105.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	45.000.000	-	-	-	45.000.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	24.327.954.000	-	-	-	24.327.954.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)*	24.312.954.000	-	-	-	24.312.954.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)*	15.000.000	-	-	-	15.000.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	200.500.000	-	-	-	200.500.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)*	200.500.000	-	-	-	200.500.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	587.889.000	-	-	-	587.889.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000	-	-	-	20.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	567.889.000	-	-	-	567.889.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	820.434.000	-	-	-	820.434.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.214.000	-	-	-	10.214.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	300.220.000	-	-	-	300.220.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480.000.000	-	-	-	480.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	25.000.000	-	-	-	25.000.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	-	70.012.000	-	-	70.012.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Unit)*	-	17.400.000	-	-	17.400.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Unit)*	-	52.612.000	-	-	52.612.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	2.782.015.000	-	-	-	2.782.015.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)*	229.940.000	-	-	-	229.940.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)*	707.074.000	-	-	-	707.074.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)*	40.581.000	-	-	-	40.581.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)*	1.804.420.000	-	-	-	1.804.420.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	1.340.028.000	-	-	-	1.340.028.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (152.00 Unit)*	37.953.000	-	-	-	37.953.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (152.00 Unit)*	553.000.000	-	-	-	553.000.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (152.00 Unit)*	20.000.000	-	-	-	20.000.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.000.000	-	-	-	160.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (152.00 Unit)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	419.075.000	-	-	-	419.075.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (152.00 Unit)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (152.00 Unit)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**6.073.727.000**	**-**	**-**	**-**	**6.073.727.000**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.794.427.000	-	-	-	4.794.427.000
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri (84.00 %)					
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah (86.00 %)					
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah (86.00 %)					
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (86.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.420.914.000	-	-	-	1.420.914.000
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.126.400.000	-	-	-	1.126.400.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	484.250.000	-	-	-	484.250.000
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	348.000.000	-	-	-	348.000.000
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	835.620.000	-	-	-	835.620.000
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil	579.243.000	-	-	-	579.243.000
	Jumlah Dokumen Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semesteran (2.00 Dokumen)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.279.300.000	-	-	-	1.279.300.000
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu (86.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.079.300.000	-	-	-	1.079.300.000
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**3.330.072.000**	**-**	**-**	**-**	**3.330.072.000**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	198.940.000	-	-	-	198.940.000
	Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3 (12.24 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	198.940.000	-	-	-	198.940.000
	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (1.00 Kegiatan)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	3.131.132.000	-	-	-	3.131.132.000
	Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3 (12.24 %)					
	Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3 (12.24 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	772.407.000	-	-	-	772.407.000
	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi (5.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (5.00 Laporan)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.358.725.000	-	-	-	2.358.725.000
	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi (5.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (5.00 Laporan)					
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**251.557.580.000**	**400.000.000**	**-**	**-**	**251.957.580.000**
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**251.557.580.000**	**400.000.000**	**-**	**-**	**251.957.580.000**
8.01.8.01.0.00.0.00.01	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**251.557.580.000**	**400.000.000**	**-**	**-**	**251.957.580.000**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.668.613.000**	**400.000.000**	**-**	**-**	**18.068.613.000**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.302.117.000	-	-	-	2.302.117.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.350.280.000	-	-	-	1.350.280.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	951.837.000	-	-	-	951.837.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.195.687.000	-	-	-	10.195.687.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.822.687.000	-	-	-	9.822.687.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	350.000.000	-	-	-	350.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	1.500.000	-	-	-	1.500.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	1.500.000	-	-	-	1.500.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	20.000.000	-	-	-	20.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	80.000.000	-	-	-	80.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (12.00 Dokumen)*	80.000.000	-	-	-	80.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	370.000.000	-	-	-	370.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	15.000.000	-	-	-	15.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	15.000.000	-	-	-	15.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	80.000.000	-	-	-	80.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	260.000.000	-	-	-	260.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	1.516.629.000	-	-	-	1.516.629.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	25.000.000	-	-	-	25.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	-	-	-	200.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.000.000	-	-	-	180.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.000	-	-	-	85.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	731.629.000	-	-	-	731.629.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	20.000.000	-	-	-	20.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	60.000.000	-	-	-	60.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	-	400.000.000	-	-	400.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (41.00 Unit)*	-	50.000.000	-	-	50.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (41.00 Unit)*	-	350.000.000	-	-	350.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	2.591.180.000	-	-	-	2.591.180.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (84.00 Laporan)*	7.000.000	-	-	-	7.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (84.00 Laporan)*	450.000.000	-	-	-	450.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (84.00 Laporan)*	2.134.180.000	-	-	-	2.134.180.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)*	613.000.000	-	-	-	613.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (352.00 Unit)*	225.000.000	-	-	-	225.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (352.00 Unit)*	3.000.000	-	-	-	3.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (352.00 Unit)*	110.000.000	-	-	-	110.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.000.000	-	-	-	205.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (352.00 Unit)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (352.00 Unit)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**3.865.113.000**	**-**	**-**	**-**	**3.865.113.000**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.865.113.000	-	-	-	3.865.113.000
	Indeks Ideologi Pancasila (3.10 Nilai)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	2.715.113.000	-	-	-	2.715.113.000
	Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (85.00 %)					
	Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme (85.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	35.210.000	-	-	-	35.210.000
	Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (85.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme (85.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	54.000.000	-	-	-	54.000.000
	Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (85.00 %)					
	Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme (85.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	9.590.000	-	-	-	9.590.000
	Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (85.00 %)					
	Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme (85.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	44.611.000	-	-	-	44.611.000
	Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (85.00 %)					
	Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme (85.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	11.042.000	-	-	-	11.042.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (85.00 %)					
	Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme (85.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	995.547.000	-	-	-	995.547.000
	Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (85.00 %)					
	Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme (85.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**50.923.529.000**	**-**	**-**	**-**	**50.923.529.000**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	50.923.529.000	-	-	-	50.923.529.000
	IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi (76.00 Nilai)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	29.660.000	-	-	-	29.660.000
	Persentase masyarakat yang paham pendidikan politik (89.50 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (89.50 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (89.50 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.462.040.000	-	-	-	2.462.040.000
	Persentase masyarakat yang paham pendidikan politik (89.50 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (89.50 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (89.50 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	339.885.000	-	-	-	339.885.000
	Persentase masyarakat yang paham pendidikan politik (89.50 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (89.50 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (89.50 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	48.091.944.000	-	-	-	48.091.944.000
	Persentase masyarakat yang paham pendidikan politik (89.50 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (89.50 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (89.50 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**128.136.927.000**	**-**	**-**	**-**	**128.136.927.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	128.136.927.000	-	-	-	128.136.927.000
	Indeks kinerja ormas (77.87 Nilai)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.550.543.000	-	-	-	2.550.543.000
	Skor variabel program dan kegiatan ormas (37.31 Skor)					
	Skor variabel sumber daya ormas (40.56 Skor)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	180.000.000	-	-	-	180.000.000
	Skor variabel program dan kegiatan ormas (37.31 Skor)					
	Skor variabel sumber daya ormas (40.56 Skor)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	125.406.384.000	-	-	-	125.406.384.000
	Skor variabel program dan kegiatan ormas (37.31 Skor)					
	Skor variabel sumber daya ormas (40.56 Skor)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**2.844.451.000**	**-**	**-**	**-**	**2.844.451.000**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.844.451.000	-	-	-	2.844.451.000
	Indeks penguatan dampak ekonomi (3.10 %)					
	Indeks toleransi (74.30 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.044.959.000	-	-	-	2.044.959.000
	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (87.00 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (87.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	593.400.000	-	-	-	593.400.000
	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (87.00 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (87.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	206.092.000	-	-	-	206.092.000
	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (87.00 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (87.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**48.118.947.000**	**-**	**-**	**-**	**48.118.947.000**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	48.118.947.000	-	-	-	48.118.947.000
	Indeks kewaspadaan Nasional (73.50 Angka)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.701.086.000	-	-	-	2.701.086.000
	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (77.00 %)					
	Persentase penanganan konflik sosial (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (77.00 %)					
	Persentase penanganan konflik sosial (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	43.717.861.000	-	-	-	43.717.861.000
	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (77.00 %)					
	Persentase penanganan konflik sosial (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000
	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (77.00 %)					
	Persentase penanganan konflik sosial (100.00 %)					
Total		**15.359.446.311.000**	**1.254.657.327.000**	**25.000.000.000**	**7.272.839.156.000**	**23.911.942.794.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah

PJ. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

LAMPIRAN V : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	**Pelayanan Umum**	**2.055.989.308.000**	**27.562.291.000**	**25.000.000.000**	**7.272.839.156.000**	**9.381.390.755.000**
01.01.2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.241.735.000	113.640.000	-	-	25.355.375.000
01.02.4.01	Sekretariat Daerah	632.866.071.000	10.705.000.000	-	-	643.571.071.000
01.03.4.02	Sekretariat DPRD	581.285.072.000	3.739.936.000	-	-	585.025.008.000
01.04.5.01	Perencanaan	46.752.011.000	1.669.000.000	-	-	48.421.011.000
01.05.5.02	Keuangan	353.748.408.000	8.892.703.000	25.000.000.000	7.272.839.156.000	7.660.480.267.000
01.06.5.03	Kepegawaian	42.795.136.000	175.000.000	-	-	42.970.136.000
01.07.5.04	Pendidikan dan Pelatihan	59.413.905.000	297.000.000	-	-	59.710.905.000
01.08.5.07	Penghubung	22.761.771.000	1.500.000.000	-	-	24.261.771.000
01.09.6.01	Inspektorat	39.567.619.000	70.012.000	-	-	39.637.631.000
01.10.8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	251.557.580.000	400.000.000	-	-	251.957.580.000
03	**Ketertiban dan keamanan**	**36.918.431.000**	**2.032.500.000**	**-**	**-**	**38.950.931.000**
03.01.1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	36.918.431.000	2.032.500.000	-	-	38.950.931.000
04	**Ekonomi**	**996.277.276.000**	**41.377.530.000**	**-**	**-**	**1.037.654.806.000**
04.01.2.07	Tenaga Kerja	95.886.957.000	2.043.588.000	-	-	97.930.545.000
04.02.2.09	Pangan	41.287.217.000	821.700.000	-	-	42.108.917.000
04.03.2.15	Perhubungan	192.349.902.000	8.398.173.000	-	-	200.748.075.000
04.04.2.16	Komunikasi dan Informatika	64.240.848.000	14.174.305.000	-	-	78.415.153.000
04.05.2.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	35.628.752.000	192.700.000	-	-	35.821.452.000
04.06.2.18	Penanaman Modal	24.754.845.000	370.173.000	-	-	25.125.018.000
04.07.3.25	Kelautan dan Perikanan	79.360.587.000	7.389.861.000	-	-	86.750.448.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
04.08.3.27	Pertanian	299.169.772.000	7.408.000.000	-	-	306.577.772.000
04.09.3.29	Energi dan Sumber Daya Mineral	63.655.074.000	183.030.000	-	-	63.838.104.000
04.10.3.31	Perindustrian	99.943.322.000	396.000.000	-	-	100.339.322.000
05	**Perlindungan Lingkungan Hidup**	**154.253.369.000**	**222.000.000**	**-**	**-**	**154.475.369.000**
05.01.2.11	Lingkungan Hidup	154.253.369.000	222.000.000	-	-	154.475.369.000
06	**Perumahan dan Fasilitas Umum**	**451.559.763.000**	**80.167.148.000**	**-**	**-**	**531.726.911.000**
06.01.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	399.210.730.000	79.982.148.000	-	-	479.192.878.000
06.02.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	52.349.033.000	185.000.000	-	-	52.534.033.000
07	**Kesehatan**	**2.813.925.240.000**	**299.332.975.000**	**-**	**-**	**3.113.258.215.000**
07.01.1.02	Kesehatan	2.813.925.240.000	299.332.975.000	-	-	3.113.258.215.000
10	**Pendidikan**	**8.507.614.502.000**	**803.050.665.000**	**-**	**-**	**9.310.665.167.000**
10.01.1.01	Pendidikan	8.015.746.823.000	793.045.020.000	-	-	8.808.791.843.000
10.02.2.19	Kepemudaan dan Olahraga	457.272.367.000	8.800.000.000	-	-	466.072.367.000
10.03.2.23	Perpustakaan	34.595.312.000	1.205.645.000	-	-	35.800.957.000
11	**Perlindungan Sosial**	**322.603.322.000**	**762.218.000**	**-**	**-**	**323.365.540.000**
11.01.1.06	Sosial	302.553.198.000	650.040.000	-	-	303.203.238.000
11.02.2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.050.124.000	112.178.000	-	-	20.162.302.000
	Jumlah	**15.339.141.211.000**	**1.254.507.327.000**	**25.000.000.000**	**7.272.839.156.000**	**23.891.487.694.000**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

PRINTED BY GRMS JATENG

LAMPIRAN VI : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

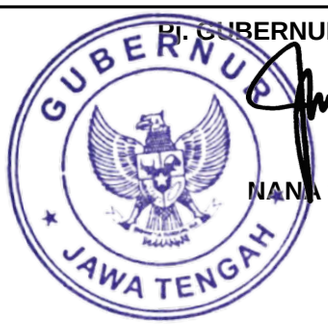
PROVINSI JAWA TENGAH
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	**2**	**3**	**4**
A	**SPM Bidang Pendidikan**		
1	Pendidikan Menengah Atas		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.176.601.098.000
2	Pendidikan Menengah Kejuruan		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2.147.994.655.000
3	Pendidikan Khusus		
		Pengelolaan Pendidikan Khusus	159.000.277.000
		Total	**3.483.596.030.000**
B	**SPM BIDANG KESEHATAN**		
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	517.150.000
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	278.550.000
		Total	**795.700.000**
C	**SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM**		
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	16.919.053.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota		
		Pengelolaan dan Pengembangan	674.105.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4
		Sistem Air Limbah Domestik Regional	
		Total	**17.593.158.000**
D	**SPM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**		
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi		
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	220.000.000
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	19.430.000.000
		Total	**19.650.000.000**
E	**SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS**		
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu		
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.520.100.000
		Total	**1.520.100.000**
F	**SPM BIDANG SOSIAL**		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Sosial		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	23.255.628.000
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Sosial		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	23.748.430.000
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	17.710.369.000
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	3.284.130.000
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	4.869.870.000
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4
	pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi		
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	3.584.500.000
		Total	**76.452.927.000**

PJ. GUBERNUR JAWA TENGAH



NANA SUDJANA

LAMPIRAN VII : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPD DENGAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	RPD (Rp)	APBD (Rp)
1	2	3	4
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**12.354.606.675.000**	**12.795.931.138.000**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**8.024.436.678.000**	**8.808.791.843.000**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.096.202.443.000	5.286.053.813.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.902.599.235.000	3.483.596.030.000
1.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.950.000.000	7.580.000.000
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	10.000.000.000	22.266.000.000
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	845.000.000	896.000.000
1.01.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	525.000.000	955.000.000
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.500.000.000	1.250.000.000
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	900.000.000	1.120.000.000
1.01.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.065.000.000	1.325.000.000
1.01.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.850.000.000	3.750.000.000
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**3.102.121.334.000**	**3.113.258.215.000**
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.499.480.170.000	2.704.119.490.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	594.181.164.000	404.607.180.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.845.000.000	1.151.000.000
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	700.000.000	300.394.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.915.000.000	3.080.151.000
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**766.371.166.000**	**479.192.878.000**
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	203.016.218.000	199.084.906.000
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	142.338.598.000	85.151.387.000
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	65.290.668.000	16.919.053.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.074.159.000	674.105.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	644.159.000	38.166.603.000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	337.991.815.000	129.159.390.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	4.265.549.000	5.335.641.000
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.750.000.000	4.701.793.000
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**70.779.223.000**	**52.534.033.000**
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.761.223.000	21.324.033.000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	39.490.000.000	25.290.000.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.323.000.000	3.765.000.000
1.04.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000	380.000.000
1.04.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	915.000.000	570.000.000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	900.000.000	480.000.000
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN	275.000.000	200.000.000
1.04.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	715.000.000	525.000.000

PRINTED BY GRMS JATENG

KODE	URAIAN	RPD (Rp)	APBD (Rp)
1	2	3	4
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**44.769.740.000**	**38.950.931.000**
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.198.340.000	32.912.931.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.916.400.000	2.090.000.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	7.555.000.000	3.850.000.000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100.000.000	98.000.000
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**346.128.534.000**	**303.203.238.000**
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	181.676.979.000	144.922.151.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	12.362.000.000	10.721.000.000
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	200.000.000	200.000.000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	82.379.395.000	72.868.427.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	64.522.160.000	70.447.160.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.138.000.000	3.584.500.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	850.000.000	460.000.000
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.147.917.849.000**	**1.182.015.530.000**
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**107.223.976.000**	**97.930.545.000**
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	93.052.397.000	86.030.264.000
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	300.000.000	246.740.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	5.126.410.000	3.664.754.000
2.07.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	296.000.000	261.000.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.945.479.000	2.319.000.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.348.152.000	1.908.787.000
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	3.155.538.000	3.500.000.000
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**23.057.785.000**	**20.162.302.000**
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.150.085.000	16.496.242.000
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.370.100.000	1.000.000.000
2.08.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	430.000.000	195.000.000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.485.000.000	977.550.000
2.08.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.180.000.000	450.000.000
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	375.000.000	135.000.000
2.08.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	500.000.000	320.000.000
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	300.000.000	150.000.000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	600.000.000	185.000.000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	667.600.000	253.510.000
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**40.717.296.000**	**42.108.917.000**
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.112.296.000	21.255.029.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	10.580.000.000	14.623.888.000
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.050.000.000	3.930.000.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.975.000.000	2.300.000.000
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**222.042.832.000**	**154.475.369.000**
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	151.492.000.000	140.422.179.000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.300.000.000	434.000.000
2.11.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	27.738.000.000	5.854.089.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	10.799.000.000	2.353.388.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.550.000.000	745.000.000

KODE	URAIAN	RPD (Rp)	APBD (Rp)
1	2	3	4
2.11.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	2.860.000.000	824.768.000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	300.000.000	50.000.000
2.11.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	11.200.000.000	1.005.832.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.450.000.000	564.000.000
2.11.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1.130.000.000	328.000.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	5.450.000.000	1.305.113.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	400.000.000	200.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.373.832.000	389.000.000
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**26.966.216.000**	**25.355.375.000**
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.496.216.000	19.863.205.000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	50.000.000	20.850.000
2.13.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	390.000.000	220.000.000
2.13.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	360.000.000	210.000.000
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1.100.000.000	602.000.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.025.000.000	1.540.320.000
2.13.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	410.000.000	194.000.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.135.000.000	2.705.000.000
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**246.086.656.000**	**200.748.075.000**
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	73.945.197.000	68.772.521.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	166.383.964.000	130.096.680.000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.174.100.000	779.100.000
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.583.395.000	1.099.774.000
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**99.535.576.000**	**78.415.153.000**
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.548.392.000	29.637.129.000
2.16.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.428.000.000	1.210.829.000
2.16.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3.000.000.000	3.000.000.000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	32.572.000.000	24.459.750.000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	30.987.184.000	20.107.445.000
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**68.258.148.000**	**35.821.452.000**
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.758.148.000	25.907.910.000
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3.550.000.000	1.499.384.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.000.000.000	734.908.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	5.650.000.000	1.606.604.000
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	13.125.000.000	3.494.064.000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	9.175.000.000	2.578.582.000
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**27.770.647.000**	**25.125.018.000**
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.622.475.000	20.185.806.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	830.000.000	560.640.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.730.000.000	1.612.500.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.253.172.000	1.654.602.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.280.000.000	561.470.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1.055.000.000	550.000.000
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**247.252.917.000**	**466.072.367.000**
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.232.917.000	49.976.367.000

KODE	URAIAN	RPD (Rp)	APBD (Rp)
1	2	3	4
2.19.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.625.000.000	6.200.000.000
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	43.670.000.000	11.525.000.000
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	137.450.000.000	388.786.000.000
2.19.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.750.000.000	5.660.000.000
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	800.000.000	550.000.000
2.19.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.725.000.000	3.375.000.000
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**39.005.800.000**	**35.800.957.000**
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.357.035.000	33.389.359.000
2.23.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.766.845.000	701.598.000
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.246.500.000	1.400.000.000
2.23.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	244.616.000	70.000.000
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	390.804.000	240.000.000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**567.377.440.000**	**557.505.646.000**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**95.906.483.000**	**86.750.448.000**
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	64.076.808.000	55.662.881.000
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	4.217.267.000	2.106.110.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12.791.939.000	10.701.928.000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	9.194.200.000	14.581.048.000
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.569.829.000	1.756.361.000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.056.440.000	1.942.120.000
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**269.502.702.000**	**306.577.772.000**
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	166.868.011.000	165.132.583.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	71.207.788.000	74.639.053.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9.737.112.000	11.660.000.000
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.000.000.000	39.913.154.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.349.991.000	745.000.000
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	12.339.800.000	14.487.982.000
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**92.290.107.000**	**63.838.104.000**
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.653.338.000	53.633.683.000
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	5.574.474.000	2.178.750.000
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	6.683.030.000	2.503.054.000
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	12.768.835.000	2.381.039.000
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	11.610.430.000	3.141.578.000
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**109.678.148.000**	**100.339.322.000**
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	57.683.333.000	49.524.618.000
3.31.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	465.000.000	633.633.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	17.955.048.000	9.979.492.000
3.31.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.465.000.000	238.250.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	360.000.000	245.681.000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.136.152.000	250.686.000
3.31.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	20.366.899.000	32.895.000.000
3.31.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.753.554.000	1.334.967.000
3.31.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	4.805.162.000	2.786.815.000
3.31.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.688.000.000	2.450.180.000
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**907.180.766.000**	**1.228.596.079.000**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**541.328.469.000**	**643.571.071.000**

KODE	URAIAN	RPD (Rp)	APBD (Rp)
1	2	3	4
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	189.430.850.000	226.172.646.000
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.766.025.000	1.780.528.000
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.150.000.000	3.478.000.000
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	329.871.784.000	400.058.148.000
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.118.250.000	2.918.000.000
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	5.623.000.000	4.775.260.000
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.617.060.000	2.348.489.000
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.751.500.000	2.040.000.000
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**365.852.297.000**	**585.025.008.000**
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	192.064.354.000	218.871.748.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	173.787.943.000	366.153.260.000
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**7.404.718.171.000**	**7.856.299.190.000**
5.01	**PERENCANAAN**	**48.424.013.000**	**48.421.011.000**
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.323.013.000	35.441.011.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.690.000.000	5.900.000.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.411.000.000	7.080.000.000
5.02	**KEUANGAN**	**7.177.749.390.000**	**7.660.480.267.000**
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	310.115.312.000	302.025.051.000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.819.182.347.000	7.314.939.156.000
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7.123.195.000	5.365.000.000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	41.328.536.000	38.151.060.000
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**55.484.000.000**	**42.970.136.000**
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.286.416.000	32.813.136.000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	16.197.584.000	10.157.000.000
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**75.080.279.000**	**59.710.905.000**
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.805.000.000	43.874.265.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22.275.279.000	15.836.640.000
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**24.818.916.000**	**20.455.100.000**
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.068.916.000	15.780.100.000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10.750.000.000	4.675.000.000
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**23.161.573.000**	**24.261.771.000**
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.872.377.000	20.268.891.000
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	4.289.196.000	3.992.880.000
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**37.200.228.000**	**39.637.631.000**
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**37.200.228.000**	**39.637.631.000**
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.782.900.000	30.233.832.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.700.000.000	6.073.727.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.717.328.000	3.330.072.000
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**72.806.531.000**	**251.957.580.000**
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**72.806.531.000**	**251.957.580.000**
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.332.272.000	18.068.613.000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.637.455.000	3.865.113.000
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	27.464.940.000	50.923.529.000
	POLITIK		
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	7.109.735.000	128.136.927.000

KODE	URAIAN	RPD (Rp)	APBD (Rp)
1	2	3	4
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	3.816.296.000	2.844.451.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	14.445.833.000	48.118.947.000
	Total Anggaran	**22.491.807.660.000**	**23.911.942.794.000**

PJ. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

LAMPIRAN VIII : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PPAS DENGAN RANCANGAN APBD

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.01.2.22.0.00.02	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**8.808.791.843.000**	**8.808.791.843.000**	**8.808.791.843.000**
1.01.2.22.0.00.02.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**8.808.791.843.000**	**8.808.791.843.000**	**8.808.791.843.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**5.286.053.813.000**	**5.286.053.813.000**	**5.286.053.813.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.286.053.813.000**	**5.286.053.813.000**	**5.286.053.813.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**154.941.855.000**	**154.941.855.000**	**154.941.855.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	153.841.855.000	153.841.855.000	153.841.855.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.041.376.458.000**	**5.041.376.458.000**	**5.041.376.458.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.038.626.458.000	5.038.626.458.000	5.038.626.458.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.750.000.000	2.750.000.000	2.750.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**870.000.000**	**870.000.000**	**870.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	620.000.000	620.000.000	620.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**475.000.000**	**475.000.000**	**475.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	250.000.000	250.000.000	250.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**10.800.500.000**	**10.800.500.000**	**10.800.500.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	601.000.000	601.000.000	601.000.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.807.000.000	1.807.000.000	1.807.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	782.000.000	782.000.000	782.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	830.500.000	830.500.000	830.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	373.000.000	373.000.000	373.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	62.000.000	62.000.000	62.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.855.000.000	1.855.000.000	1.855.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.270.000.000	4.270.000.000	4.270.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120.000.000	120.000.000	120.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**16.726.000.000**	**16.726.000.000**	**16.726.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.031.000.000	1.031.000.000	1.031.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.540.000.000	2.540.000.000	2.540.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.830.000.000	1.830.000.000	1.830.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.825.000.000	6.825.000.000	6.825.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.382.200.000**	**49.382.200.000**	**49.382.200.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	112.800.000	112.800.000	112.800.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.237.000.000	6.237.000.000	6.237.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	474.600.000	474.600.000	474.600.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.557.800.000	42.557.800.000	42.557.800.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.481.800.000**	**11.481.800.000**	**11.481.800.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	788.000.000	788.000.000	788.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	293.300.000	293.300.000	293.300.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	800.500.000	800.500.000	800.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	120.000.000	120.000.000	120.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	60.000.000	60.000.000	60.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.595.000.000	6.595.000.000	6.595.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.445.000.000	1.445.000.000	1.445.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1.380.000.000	1.380.000.000	1.380.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**3.486.862.030.000**	**3.486.862.030.000**	**3.486.862.030.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**3.483.596.030.000**	**3.483.596.030.000**	**3.483.596.030.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**1.176.601.098.000**	**1.176.601.098.000**	**1.176.601.098.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	909.610.000	909.610.000	909.610.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-	-
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.708.910.000	10.708.910.000	10.708.910.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	42.137.680.000	42.137.680.000	42.137.680.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	6.128.642.000	6.128.642.000	6.128.642.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	300.000.000	300.000.000	300.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	300.000.000	300.000.000	300.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	-	-	-
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	-	-	-
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	248.667.000	248.667.000	248.667.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.642.788.000	2.642.788.000	2.642.788.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	18.116.000.000	18.116.000.000	18.116.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4.947.000.000	4.947.000.000	4.947.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	30.600.000.000	30.600.000.000	30.600.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	8.520.000.000	8.520.000.000	8.520.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	900.000.000	900.000.000	900.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.755.000.000	4.755.000.000	4.755.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	283.994.308.000	283.994.308.000	283.994.308.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	706.100.384.000	706.100.384.000	706.100.384.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	575.000.000	575.000.000	575.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	400.000.000	400.000.000	400.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	625.000.000	625.000.000	625.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.229.664.000	3.229.664.000	3.229.664.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	3.325.740.000	3.325.740.000	3.325.740.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	14.807.844.000	14.807.844.000	14.807.844.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	9.616.861.000	9.616.861.000	9.616.861.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.512.000.000	1.512.000.000	1.512.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**2.147.994.655.000**	**2.147.994.655.000**	**2.147.994.655.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	14.572.000.000	14.572.000.000	14.572.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	18.895.500.000	18.895.500.000	18.895.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	7.873.300.000	7.873.300.000	7.873.300.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.203.000.000	2.203.000.000	2.203.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.177.200.000	1.177.200.000	1.177.200.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.719.500.000	7.719.500.000	7.719.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	1.163.400.000	1.163.400.000	1.163.400.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	14.563.643.000	14.563.643.000	14.563.643.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	7.537.950.000	7.537.950.000	7.537.950.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	255.650.000.000	255.650.000.000	255.650.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	400.000.000	400.000.000	400.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.145.000.000	4.145.000.000	4.145.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	430.584.962.000	430.584.962.000	430.584.962.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1.318.196.111.000	1.318.196.111.000	1.318.196.111.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	575.000.000	575.000.000	575.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	515.000.000	515.000.000	515.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	5.100.000.000	5.100.000.000	5.100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.812.120.000	5.812.120.000	5.812.120.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	800.000.000	800.000.000	800.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	25.056.750.000	25.056.750.000	25.056.750.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	12.237.503.000	12.237.503.000	12.237.503.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.967.000.000	1.967.000.000	1.967.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	199.716.000	199.716.000	199.716.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	-	-	-
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**159.000.277.000**	**159.000.277.000**	**159.000.277.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.150.346.000	1.150.346.000	1.150.346.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.199.915.000	1.199.915.000	1.199.915.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.134.665.000	9.134.665.000	9.134.665.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	405.000.000	405.000.000	405.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.320.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.640.000.000	2.640.000.000	2.640.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	28.984.931.000	28.984.931.000	28.984.931.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	83.429.585.000	83.429.585.000	83.429.585.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	300.000.000	300.000.000	300.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	776.880.000	776.880.000	776.880.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	170.000.000	170.000.000	170.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.320.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	13.090.000.000	13.090.000.000	13.090.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	645.000.000	645.000.000	645.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	326.000.000	326.000.000	326.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	6.406.955.000	6.406.955.000	6.406.955.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	651.000.000	651.000.000	651.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**896.000.000**	**896.000.000**	**896.000.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**711.000.000**	**711.000.000**	**711.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	711.000.000	711.000.000	711.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	**185.000.000**	**185.000.000**	**185.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	185.000.000	185.000.000	185.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	-	-	-
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**1.120.000.000**	**1.120.000.000**	**1.120.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**925.000.000**	**925.000.000**	**925.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	400.000.000	400.000.000	400.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	525.000.000	525.000.000	525.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02	**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**195.000.000**	**195.000.000**	**195.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	70.000.000	70.000.000	70.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh	125.000.000	125.000.000	125.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**35.876.000.000**	**35.876.000.000**	**35.876.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**7.580.000.000**	**7.580.000.000**	**7.580.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**3.200.000.000**	**3.200.000.000**	**3.200.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**4.380.000.000**	**4.380.000.000**	**4.380.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	4.380.000.000	4.380.000.000	4.380.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**22.266.000.000**	**22.266.000.000**	**22.266.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**22.266.000.000**	**22.266.000.000**	**22.266.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	22.266.000.000	22.266.000.000	22.266.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**955.000.000**	**955.000.000**	**955.000.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**955.000.000**	**955.000.000**	**955.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	605.000.000	605.000.000	605.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	350.000.000	350.000.000	350.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**1.325.000.000**	**1.325.000.000**	**1.325.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**300.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	300.000.000	300.000.000	300.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**1.025.000.000**	**1.025.000.000**	**1.025.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	160.000.000	160.000.000	160.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	165.000.000	165.000.000	165.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	700.000.000	700.000.000	700.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**3.750.000.000**	**3.750.000.000**	**3.750.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**	**3.750.000.000**	**3.750.000.000**	**3.750.000.000**
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	550.000.000	550.000.000	550.000.000
1.02.0.00.0.00.01	**Dinas Kesehatan**	**3.113.258.215.000**	**3.113.258.215.000**	**3.113.258.215.000**
1.02.0.00.0.00.01.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**3.113.258.215.000**	**3.113.258.215.000**	**3.113.258.215.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.704.119.490.000**	**2.704.119.490.000**	**2.704.119.490.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.704.119.490.000**	**2.704.119.490.000**	**2.704.119.490.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**789.442.000**	**789.442.000**	**789.442.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	616.000.000	616.000.000	616.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.442.000	173.442.000	173.442.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**680.229.859.000**	**680.229.859.000**	**680.229.859.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	668.431.859.000	668.431.859.000	668.431.859.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.700.000.000	11.700.000.000	11.700.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.000.000	48.000.000	48.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**417.200.000**	**417.200.000**	**417.200.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	250.000.000	250.000.000	250.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	167.200.000	167.200.000	167.200.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.588.836.000**	**3.588.836.000**	**3.588.836.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140.000.000	140.000.000	140.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	447.050.000	447.050.000	447.050.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	94.850.000	94.850.000	94.850.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	451.000.000	451.000.000	451.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	286.443.000	286.443.000	286.443.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	198.000.000	198.000.000	198.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.711.093.000	1.711.093.000	1.711.093.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	260.400.000	260.400.000	260.400.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.138.400.000**	**3.138.400.000**	**3.138.400.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.400.000	148.400.000	148.400.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	375.000.000	375.000.000	375.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.615.000.000	2.615.000.000	2.615.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.275.392.000**	**20.275.392.000**	**20.275.392.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	136.400.000	136.400.000	136.400.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.786.778.000	6.786.778.000	6.786.778.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.700.000	91.700.000	91.700.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.260.514.000	13.260.514.000	13.260.514.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.330.361.000**	**5.330.361.000**	**5.330.361.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.013.975.000	1.013.975.000	1.013.975.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	761.500.000	761.500.000	761.500.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	275.000.000	275.000.000	275.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.552.886.000	2.552.886.000	2.552.886.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	727.000.000	727.000.000	727.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.990.250.000.000**	**1.990.250.000.000**	**1.990.250.000.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.990.250.000.000	1.990.250.000.000	1.990.250.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**409.138.725.000**	**409.138.725.000**	**409.138.725.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**404.607.180.000**	**404.607.180.000**	**404.607.180.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**42.546.681.000**	**42.546.681.000**	**42.546.681.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	917.800.000	917.800.000	917.800.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	24.043.475.000	24.043.475.000	24.043.475.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	624.150.000	624.150.000	624.150.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	439.400.000	439.400.000	439.400.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	16.471.856.000	16.471.856.000	16.471.856.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat**	**357.457.260.000**	**357.457.260.000**	**357.457.260.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	517.150.000	517.150.000	517.150.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	278.550.000	278.550.000	278.550.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	476.885.000	476.885.000	476.885.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	400.195.000	400.195.000	400.195.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	50.242.000	50.242.000	50.242.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.888.000.000	1.888.000.000	1.888.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional	21.410.000	21.410.000	21.410.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.058.535.000	2.058.535.000	2.058.535.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	347.877.080.000	347.877.080.000	347.877.080.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	666.450.000	666.450.000	666.450.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.629.000.000	1.629.000.000	1.629.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	493.763.000	493.763.000	493.763.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**400.000.000**	**400.000.000**	**400.000.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	400.000.000	400.000.000	400.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah**	**4.203.239.000**	**4.203.239.000**	**4.203.239.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4.003.239.000	4.003.239.000	4.003.239.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.151.000.000**	**1.151.000.000**	**1.151.000.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.151.000.000**	**1.151.000.000**	**1.151.000.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	651.000.000	651.000.000	651.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**300.394.000**	**300.394.000**	**300.394.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**300.394.000**	**300.394.000**	**300.394.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	300.394.000	300.394.000	300.394.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**3.080.151.000**	**3.080.151.000**	**3.080.151.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**2.812.151.000**	**2.812.151.000**	**2.812.151.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2.812.151.000	2.812.151.000	2.812.151.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**268.000.000**	**268.000.000**	**268.000.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	268.000.000	268.000.000	268.000.000
1.03.0.00.0.00.14	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**	**295.502.838.000**	**295.502.838.000**	**295.502.838.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.0.00.0.00.14.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**295.502.838.000**	**295.502.838.000**	**295.502.838.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**105.248.046.000**	**105.248.046.000**	**105.248.046.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**105.248.046.000**	**105.248.046.000**	**105.248.046.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**840.000.000**	**840.000.000**	**840.000.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	520.000.000	520.000.000	520.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	320.000.000	320.000.000	320.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**75.351.549.000**	**75.351.549.000**	**75.351.549.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72.898.309.000	72.898.309.000	72.898.309.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.013.240.000	2.013.240.000	2.013.240.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	440.000.000	440.000.000	440.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**350.000.000**	**350.000.000**	**350.000.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	350.000.000	350.000.000	350.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**193.000.000**	**193.000.000**	**193.000.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	193.000.000	193.000.000	193.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.003.199.000**	**6.003.199.000**	**6.003.199.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	173.704.000	173.704.000	173.704.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	670.064.000	670.064.000	670.064.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	601.114.000	601.114.000	601.114.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	415.509.000	415.509.000	415.509.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	61.500.000	61.500.000	61.500.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.932.308.000	3.932.308.000	3.932.308.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	77.000.000	77.000.000	77.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	72.000.000	72.000.000	72.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.371.613.000**	**1.371.613.000**	**1.371.613.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	378.000.000	378.000.000	378.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	240.000.000	240.000.000	240.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	753.613.000	753.613.000	753.613.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.150.143.000**	**14.150.143.000**	**14.150.143.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.482.000	79.482.000	79.482.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.394.800.000	3.394.800.000	3.394.800.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.675.861.000	10.675.861.000	10.675.861.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.988.542.000**	**6.988.542.000**	**6.988.542.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.808.423.000	2.808.423.000	2.808.423.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.950.000.000	2.950.000.000	2.950.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.230.119.000	1.230.119.000	1.230.119.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**190.254.792.000**	**190.254.792.000**	**190.254.792.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**16.919.053.000**	**16.919.053.000**	**16.919.053.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas**	**16.919.053.000**	**16.919.053.000**	**16.919.053.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.453.657.000	1.453.657.000	1.453.657.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	642.000.000	642.000.000	642.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	14.823.396.000	14.823.396.000	14.823.396.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**674.105.000**	**674.105.000**	**674.105.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	**674.105.000**	**674.105.000**	**674.105.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	674.105.000	674.105.000	674.105.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**38.166.603.000**	**38.166.603.000**	**38.166.603.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01	**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**38.166.603.000**	**38.166.603.000**	**38.166.603.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	180.000.000	180.000.000	180.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	37.836.603.000	37.836.603.000	37.836.603.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**129.159.390.000**	**129.159.390.000**	**129.159.390.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**129.159.390.000**	**129.159.390.000**	**129.159.390.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	347.760.000	347.760.000	347.760.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	15.884.013.000	15.884.013.000	15.884.013.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.782.691.000	1.782.691.000	1.782.691.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0029	Pelebaran Jembatan	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	3.490.000.000	3.490.000.000	3.490.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	80.884.600.000	80.884.600.000	80.884.600.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	23.536.385.000	23.536.385.000	23.536.385.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.049.553.000	2.049.553.000	2.049.553.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.074.553.000	1.074.553.000	1.074.553.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	109.835.000	109.835.000	109.835.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**5.335.641.000**	**5.335.641.000**	**5.335.641.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**4.042.143.000**	**4.042.143.000**	**4.042.143.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	2.065.143.000	2.065.143.000	2.065.143.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	1.777.000.000	1.777.000.000	1.777.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**807.500.000**	**807.500.000**	**807.500.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	682.500.000	682.500.000	682.500.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	125.000.000	125.000.000	125.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.03	**Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**485.998.000**	**485.998.000**	**485.998.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	485.998.000	485.998.000	485.998.000
1.03.0.00.0.00.15	**Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang**	**183.690.040.000**	**183.690.040.000**	**183.690.040.000**
1.03.0.00.0.00.15.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**183.690.040.000**	**183.690.040.000**	**183.690.040.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**93.836.860.000**	**93.836.860.000**	**93.836.860.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**93.836.860.000**	**93.836.860.000**	**93.836.860.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**900.000.000**	**900.000.000**	**900.000.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000.000	450.000.000	450.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000	450.000.000	450.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**79.570.327.000**	**79.570.327.000**	**79.570.327.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78.103.255.000	78.103.255.000	78.103.255.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.467.072.000	1.467.072.000	1.467.072.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**383.500.000**	**383.500.000**	**383.500.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	383.500.000	383.500.000	383.500.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**461.632.000**	**461.632.000**	**461.632.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	269.292.000	269.292.000	269.292.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	92.340.000	92.340.000	92.340.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.095.586.000**	**2.095.586.000**	**2.095.586.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	635.389.000	635.389.000	635.389.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	60.000.000	60.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.944.000	133.944.000	133.944.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	147.025.000	147.025.000	147.025.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.237.000	25.237.000	25.237.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	122.643.000	122.643.000	122.643.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.283.000	363.283.000	363.283.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	608.065.000	608.065.000	608.065.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.415.008.000**	**5.415.008.000**	**5.415.008.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.810.000	74.810.000	74.810.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.659.485.000	1.659.485.000	1.659.485.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.619.595.000	2.619.595.000	2.619.595.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.061.118.000	1.061.118.000	1.061.118.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.010.807.000**	**5.010.807.000**	**5.010.807.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.933.283.000	1.933.283.000	1.933.283.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.202.437.000	2.202.437.000	2.202.437.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	875.087.000	875.087.000	875.087.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**89.853.180.000**	**89.853.180.000**	**89.853.180.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**85.151.387.000**	**85.151.387.000**	**85.151.387.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**41.130.985.000**	**41.130.985.000**	**41.130.985.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	-	-	-
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	638.574.000	638.574.000	638.574.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan	876.751.000	876.751.000	876.751.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	-	-	-
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.0102	Pembangunan Check Dam	-	-	-
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	10.303.659.000	10.303.659.000	10.303.659.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.0104	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	5.407.004.000	5.407.004.000	5.407.004.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	16.546.997.000	16.546.997.000	16.546.997.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	850.000.000	850.000.000	850.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.550.000.000	2.550.000.000	2.550.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	-	-	-
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	-	-	-
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	808.000.000	808.000.000	808.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**44.020.402.000**	**44.020.402.000**	**44.020.402.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.066.639.000	5.066.639.000	5.066.639.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	37.688.763.000	37.688.763.000	37.688.763.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	565.000.000	565.000.000	565.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	700.000.000	700.000.000	700.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**4.701.793.000**	**4.701.793.000**	**4.701.793.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**1.295.711.000**	**1.295.711.000**	**1.295.711.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi	1.133.211.000	1.133.211.000	1.133.211.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	162.500.000	162.500.000	162.500.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**667.853.000**	**667.853.000**	**667.853.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	467.853.000	467.853.000	467.853.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**888.000.000**	**888.000.000**	**888.000.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	709.696.000	709.696.000	709.696.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	178.304.000	178.304.000	178.304.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**1.850.229.000**	**1.850.229.000**	**1.850.229.000**
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.344.355.000	1.344.355.000	1.344.355.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	231.848.000	231.848.000	231.848.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	274.026.000	274.026.000	274.026.000
1.04.0.00.0.00.01	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**52.534.033.000**	**52.534.033.000**	**52.534.033.000**
1.04.0.00.0.00.01.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**52.534.033.000**	**52.534.033.000**	**52.534.033.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**21.324.033.000**	**21.324.033.000**	**21.324.033.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**21.324.033.000**	**21.324.033.000**	**21.324.033.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.150.456.000**	**1.150.456.000**	**1.150.456.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	400.000.000	400.000.000	400.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.456.000	750.456.000	750.456.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.229.577.000**	**15.229.577.000**	**15.229.577.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.724.577.000	14.724.577.000	14.724.577.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	420.000.000	420.000.000	420.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**175.000.000**	**175.000.000**	**175.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	155.000.000	155.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**110.000.000**	**110.000.000**	**110.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.020.000.000**	**2.020.000.000**	**2.020.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	300.000.000	300.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.120.000.000	1.120.000.000	1.120.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	370.000.000	370.000.000	370.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90.000.000**	**90.000.000**	**90.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	90.000.000	90.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.829.000.000**	**1.829.000.000**	**1.829.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	479.000.000	479.000.000	479.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**720.000.000**	**720.000.000**	**720.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.000.000	240.000.000	240.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	70.000.000	70.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	340.000.000	340.000.000	340.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**29.735.000.000**	**29.735.000.000**	**29.735.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**25.290.000.000**	**25.290.000.000**	**25.290.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program**	**220.000.000**	**220.000.000**	**220.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	70.000.000	70.000.000	70.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**140.000.000**	**140.000.000**	**140.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	70.000.000	70.000.000	70.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	70.000.000	70.000.000	70.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**19.430.000.000**	**19.430.000.000**	**19.430.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	16.230.000.000	16.230.000.000	16.230.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program**	**5.500.000.000**	**5.500.000.000**	**5.500.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**3.765.000.000**	**3.765.000.000**	**3.765.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01	**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**1.035.000.000**	**1.035.000.000**	**1.035.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	310.000.000	310.000.000	310.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	650.000.000	650.000.000	650.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**2.730.000.000**	**2.730.000.000**	**2.730.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	690.000.000	690.000.000	690.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	140.000.000	140.000.000	140.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**480.000.000**	**480.000.000**	**480.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	**480.000.000**	**480.000.000**	**480.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	400.000.000	400.000.000	400.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01	**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.475.000.000**	**1.475.000.000**	**1.475.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**380.000.000**	**380.000.000**	**380.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01	**Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi**	**380.000.000**	**380.000.000**	**380.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	380.000.000	380.000.000	380.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**570.000.000**	**570.000.000**	**570.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**570.000.000**	**570.000.000**	**570.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	330.000.000	330.000.000	330.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	240.000.000	240.000.000	240.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**525.000.000**	**525.000.000**	**525.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01	**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**525.000.000**	**525.000.000**	**525.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah	130.000.000	130.000.000	130.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	395.000.000	395.000.000	395.000.000
1.05.0.00.0.00.01	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**20.726.991.000**	**20.726.991.000**	**20.726.991.000**
1.05.0.00.0.00.01.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**20.726.991.000**	**20.726.991.000**	**20.726.991.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**18.538.991.000**	**18.538.991.000**	**18.538.991.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.538.991.000**	**18.538.991.000**	**18.538.991.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**157.000.000**	**157.000.000**	**157.000.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.500.000	98.500.000	98.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.500.000	58.500.000	58.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.450.444.000**	**13.450.444.000**	**13.450.444.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.158.444.000	13.158.444.000	13.158.444.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.000.000	282.000.000	282.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**180.000.000**	**180.000.000**	**180.000.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	35.000.000	35.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000	45.000.000	45.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**795.647.000**	**795.647.000**	**795.647.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	35.000.000	35.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.147.000	125.147.000	125.147.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	40.000.000	40.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000	45.000.000	45.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	-	-	-
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430.500.000	430.500.000	430.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**654.500.000**	**654.500.000**	**654.500.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	639.500.000	639.500.000	639.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	15.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.520.400.000**	**2.520.400.000**	**2.520.400.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	3.400.000	3.400.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.000.000	305.000.000	305.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.212.000.000	2.212.000.000	2.212.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**681.000.000**	**681.000.000**	**681.000.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.000.000	370.000.000	370.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.000.000	196.000.000	196.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**2.188.000.000**	**2.188.000.000**	**2.188.000.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.090.000.000**	**2.090.000.000**	**2.090.000.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.520.100.000**	**1.520.100.000**	**1.520.100.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	260.163.000	260.163.000	260.163.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.000	100.000	100.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	125.000.000	125.000.000	125.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	600.947.000	600.947.000	600.947.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	325.000.000	325.000.000	325.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	208.890.000	208.890.000	208.890.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**481.400.000**	**481.400.000**	**481.400.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	41.000.000	41.000.000	41.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	438.400.000	438.400.000	438.400.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**88.500.000**	**88.500.000**	**88.500.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	88.500.000	88.500.000	88.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**98.000.000**	**98.000.000**	**98.000.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.04.1.01	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**98.000.000**	**98.000.000**	**98.000.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	98.000.000	98.000.000	98.000.000
1.05.0.00.0.00.04	**Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**18.223.940.000**	**18.223.940.000**	**18.223.940.000**
1.05.0.00.0.00.04.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**18.223.940.000**	**18.223.940.000**	**18.223.940.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**14.373.940.000**	**14.373.940.000**	**14.373.940.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**14.373.940.000**	**14.373.940.000**	**14.373.940.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**250.000.000**	**250.000.000**	**250.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.813.463.000**	**7.813.463.000**	**7.813.463.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.513.463.000	7.513.463.000	7.513.463.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300.000.000	300.000.000	300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**926.000.000**	**926.000.000**	**926.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	35.000.000	35.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000	800.000.000	800.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.182.000.000**	**1.182.000.000**	**1.182.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.000.000	82.000.000	82.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.362.477.000**	**3.362.477.000**	**3.362.477.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	450.000.000	450.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.910.977.000	2.910.977.000	2.910.977.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**785.000.000**	**785.000.000**	**785.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	35.000.000	35.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**3.850.000.000**	**3.850.000.000**	**3.850.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**3.850.000.000**	**3.850.000.000**	**3.850.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**1.100.000.000**	**1.100.000.000**	**1.100.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	-	-	-
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**1.475.000.000**	**1.475.000.000**	**1.475.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	300.000.000	300.000.000	300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	275.000.000	275.000.000	275.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.0018	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	-	-	-
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	500.000.000	500.000.000	500.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**975.000.000**	**975.000.000**	**975.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	750.000.000	750.000.000	750.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**300.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.06.0.00.0.00.01	**Dinas Sosial**	**303.203.238.000**	**303.203.238.000**	**303.203.238.000**
1.06.0.00.0.00.01.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**303.203.238.000**	**303.203.238.000**	**303.203.238.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**144.922.151.000**	**144.922.151.000**	**144.922.151.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**144.922.151.000**	**144.922.151.000**	**144.922.151.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**103.412.158.000**	**103.412.158.000**	**103.412.158.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	101.512.158.000	101.512.158.000	101.512.158.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.000.000	300.000.000	300.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	250.000.000	250.000.000	250.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**225.000.000**	**225.000.000**	**225.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**325.000.000**	**325.000.000**	**325.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	125.000.000	125.000.000	125.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7.026.123.000**	**7.026.123.000**	**7.026.123.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	460.786.000	460.786.000	460.786.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.900.000	101.900.000	101.900.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	259.525.000	259.525.000	259.525.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	942.270.000	942.270.000	942.270.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	235.000.000	235.000.000	235.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	95.375.000	95.375.000	95.375.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	501.592.000	501.592.000	501.592.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	426.975.000	426.975.000	426.975.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.962.700.000	3.962.700.000	3.962.700.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.000.000	40.000.000	40.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**666.390.000**	**666.390.000**	**666.390.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	362.515.000	362.515.000	362.515.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	303.875.000	303.875.000	303.875.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.920.460.000**	**20.920.460.000**	**20.920.460.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135.600.000	135.600.000	135.600.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.553.660.000	3.553.660.000	3.553.660.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	444.000.000	444.000.000	444.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.787.200.000	16.787.200.000	16.787.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.347.020.000**	**11.347.020.000**	**11.347.020.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	189.600.000	189.600.000	189.600.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	919.830.000	919.830.000	919.830.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	357.450.000	357.450.000	357.450.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.379.500.000	9.379.500.000	9.379.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.640.000	500.640.000	500.640.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**158.281.087.000**	**158.281.087.000**	**158.281.087.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**10.721.000.000**	**10.721.000.000**	**10.721.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01	**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**250.000.000**	**250.000.000**	**250.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	250.000.000	250.000.000	250.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**10.471.000.000**	**10.471.000.000**	**10.471.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	250.000.000	250.000.000	250.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	7.112.000.000	7.112.000.000	7.112.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.809.000.000	1.809.000.000	1.809.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**72.868.427.000**	**72.868.427.000**	**72.868.427.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**23.255.628.000**	**23.255.628.000**	**23.255.628.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	17.478.480.000	17.478.480.000	17.478.480.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	2.518.120.000	2.518.120.000	2.518.120.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	446.245.000	446.245.000	446.245.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	214.000.000	214.000.000	214.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.042.382.000	1.042.382.000	1.042.382.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	525.801.000	525.801.000	525.801.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.250.000	21.250.000	21.250.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	380.520.000	380.520.000	380.520.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	628.830.000	628.830.000	628.830.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	**23.748.430.000**	**23.748.430.000**	**23.748.430.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	12.011.500.000	12.011.500.000	12.011.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	2.576.885.000	2.576.885.000	2.576.885.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	185.202.000	185.202.000	185.202.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	473.000.000	473.000.000	473.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.217.678.000	4.217.678.000	4.217.678.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	535.295.000	535.295.000	535.295.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	3.748.870.000	3.748.870.000	3.748.870.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**17.710.369.000**	**17.710.369.000**	**17.710.369.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	12.889.537.000	12.889.537.000	12.889.537.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	2.504.350.000	2.504.350.000	2.504.350.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	307.920.000	307.920.000	307.920.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	762.800.000	762.800.000	762.800.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0009	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	429.852.000	429.852.000	429.852.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	322.410.000	322.410.000	322.410.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	487.500.000	487.500.000	487.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**3.284.130.000**	**3.284.130.000**	**3.284.130.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	2.223.550.000	2.223.550.000	2.223.550.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	321.800.000	321.800.000	321.800.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	36.880.000	36.880.000	36.880.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	263.900.000	263.900.000	263.900.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	53.000.000	53.000.000	53.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	60.000.000	60.000.000	60.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	325.000.000	325.000.000	325.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**4.869.870.000**	**4.869.870.000**	**4.869.870.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	3.457.350.000	3.457.350.000	3.457.350.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	723.200.000	723.200.000	723.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	127.470.000	127.470.000	127.470.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	339.350.000	339.350.000	339.350.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	67.000.000	67.000.000	67.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	63.000.000	63.000.000	63.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	92.500.000	92.500.000	92.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**70.447.160.000**	**70.447.160.000**	**70.447.160.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01	**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**350.000.000**	**350.000.000**	**350.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	350.000.000	350.000.000	350.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**70.097.160.000**	**70.097.160.000**	**70.097.160.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	57.297.160.000	57.297.160.000	57.297.160.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**3.584.500.000**	**3.584.500.000**	**3.584.500.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**3.584.500.000**	**3.584.500.000**	**3.584.500.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.567.280.000	1.567.280.000	1.567.280.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	387.500.000	387.500.000	387.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	979.720.000	979.720.000	979.720.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	450.000.000	450.000.000	450.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**460.000.000**	**460.000.000**	**460.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**460.000.000**	**460.000.000**	**460.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	360.000.000	360.000.000	360.000.000
2.07.3.32.0.00.02	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**97.930.545.000**	**97.930.545.000**	**97.930.545.000**
2.07.3.32.0.00.02.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**97.930.545.000**	**97.930.545.000**	**97.930.545.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**86.030.264.000**	**86.030.264.000**	**86.030.264.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**86.030.264.000**	**86.030.264.000**	**86.030.264.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**703.260.000**	**703.260.000**	**703.260.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	459.605.000	459.605.000	459.605.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	243.655.000	243.655.000	243.655.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**69.381.071.000**	**69.381.071.000**	**69.381.071.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	68.068.043.000	68.068.043.000	68.068.043.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.044.920.000	1.044.920.000	1.044.920.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.266.000	194.266.000	194.266.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	71.442.000	71.442.000	71.442.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.400.000	2.400.000	2.400.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**75.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**44.220.000**	**44.220.000**	**44.220.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	44.220.000	44.220.000	44.220.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**102.220.000**	**102.220.000**	**102.220.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	36.300.000	36.300.000	36.300.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22.000.000	22.000.000	22.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	33.920.000	33.920.000	33.920.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.702.409.000**	**3.702.409.000**	**3.702.409.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	118.365.000	118.365.000	118.365.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.870.000	151.870.000	151.870.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	132.219.000	132.219.000	132.219.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	252.340.000	252.340.000	252.340.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	109.075.000	109.075.000	109.075.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.560.000	6.560.000	6.560.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	49.877.000	49.877.000	49.877.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.087.000	68.087.000	68.087.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.214.016.000	2.214.016.000	2.214.016.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	600.000.000	600.000.000	600.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**693.588.000**	**693.588.000**	**693.588.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000	350.000.000	350.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.713.000	206.713.000	206.713.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.875.000	86.875.000	86.875.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.945.231.000**	**8.945.231.000**	**8.945.231.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.127.000	42.127.000	42.127.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.353.506.000	2.353.506.000	2.353.506.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.800.000	177.800.000	177.800.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.371.798.000	6.371.798.000	6.371.798.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.383.265.000**	**2.383.265.000**	**2.383.265.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	716.137.000	716.137.000	716.137.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	42.000.000	42.000.000	42.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243.245.000	243.245.000	243.245.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	139.750.000	139.750.000	139.750.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	95.600.000	95.600.000	95.600.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	768.804.000	768.804.000	768.804.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.435.000	158.435.000	158.435.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	219.294.000	219.294.000	219.294.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**11.639.281.000**	**11.639.281.000**	**11.639.281.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**246.740.000**	**246.740.000**	**246.740.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**246.740.000**	**246.740.000**	**246.740.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	80.850.000	80.850.000	80.850.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	77.370.000	77.370.000	77.370.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	88.520.000	88.520.000	88.520.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**3.664.754.000**	**3.664.754.000**	**3.664.754.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	**3.262.450.000**	**3.262.450.000**	**3.262.450.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.666.648.000	1.666.648.000	1.666.648.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	215.802.000	215.802.000	215.802.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	1.380.000.000	1.380.000.000	1.380.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02	**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	**176.875.000**	**176.875.000**	**176.875.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	176.875.000	176.875.000	176.875.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah**	**219.429.000**	**219.429.000**	**219.429.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	219.429.000	219.429.000	219.429.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**2.319.000.000**	**2.319.000.000**	**2.319.000.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01	**Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**1.490.153.000**	**1.490.153.000**	**1.490.153.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	159.581.000	159.581.000	159.581.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	601.830.000	601.830.000	601.830.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	19.310.000	19.310.000	19.310.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	59.470.000	59.470.000	59.470.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	649.962.000	649.962.000	649.962.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.02	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**516.500.000**	**516.500.000**	**516.500.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	116.500.000	116.500.000	116.500.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03.0003	Job Fair /Bursa Kerja	400.000.000	400.000.000	400.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	**289.307.000**	**289.307.000**	**289.307.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	50.600.000	50.600.000	50.600.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	40.200.000	40.200.000	40.200.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	9.040.000	9.040.000	9.040.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	189.467.000	189.467.000	189.467.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05	**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**13.040.000**	**13.040.000**	**13.040.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13.040.000	13.040.000	13.040.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**1.908.787.000**	**1.908.787.000**	**1.908.787.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**349.824.000**	**349.824.000**	**349.824.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	125.380.000	125.380.000	125.380.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	28.881.000	28.881.000	28.881.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	195.563.000	195.563.000	195.563.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.102.723.000**	**1.102.723.000**	**1.102.723.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	455.362.000	455.362.000	455.362.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	95.422.000	95.422.000	95.422.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	26.963.000	26.963.000	26.963.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	252.793.000	252.793.000	252.793.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	272.183.000	272.183.000	272.183.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03	**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**456.240.000**	**456.240.000**	**456.240.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	278.055.000	278.055.000	278.055.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	54.291.000	54.291.000	54.291.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	123.894.000	123.894.000	123.894.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**3.500.000.000**	**3.500.000.000**	**3.500.000.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**3.500.000.000**	**3.500.000.000**	**3.500.000.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1.541.000.000	1.541.000.000	1.541.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	536.000.000	536.000.000	536.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	1.423.000.000	1.423.000.000	1.423.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**261.000.000**	**261.000.000**	**261.000.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**261.000.000**	**261.000.000**	**261.000.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**261.000.000**	**261.000.000**	**261.000.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	231.000.000	231.000.000	231.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.08.2.14.0.00.02	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	**20.162.302.000**	**20.162.302.000**	**20.162.302.000**
2.08.2.14.0.00.02.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**20.162.302.000**	**20.162.302.000**	**20.162.302.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**16.496.242.000**	**16.496.242.000**	**16.496.242.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.496.242.000**	**16.496.242.000**	**16.496.242.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**225.000.000**	**225.000.000**	**225.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.000.000	110.000.000	110.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000	115.000.000	115.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.926.902.000**	**12.926.902.000**	**12.926.902.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.508.502.000	12.508.502.000	12.508.502.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	368.400.000	368.400.000	368.400.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**67.000.000**	**67.000.000**	**67.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	65.000.000	65.000.000	65.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**290.960.000**	**290.960.000**	**290.960.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	255.960.000	255.960.000	255.960.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	35.000.000	35.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**645.000.000**	**645.000.000**	**645.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.000.000	105.000.000	105.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000	6.500.000	6.500.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	55.500.000	55.500.000	55.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000	320.000.000	320.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**13.500.000**	**13.500.000**	**13.500.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	11.500.000	11.500.000	11.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.022.880.000**	**2.022.880.000**	**2.022.880.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.000.000	550.000.000	550.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.472.880.000	1.472.880.000	1.472.880.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**305.000.000**	**305.000.000**	**305.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.000.000	160.000.000	160.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.000.000	82.000.000	82.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.000.000	52.000.000	52.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**2.701.060.000**	**2.701.060.000**	**2.701.060.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan**	**80.000.000**	**80.000.000**	**80.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**920.000.000**	**920.000.000**	**920.000.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	880.000.000	880.000.000	880.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**977.550.000**	**977.550.000**	**977.550.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**80.000.000**	**80.000.000**	**80.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**50.040.000**	**50.040.000**	**50.040.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	30.040.000	30.040.000	30.040.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**847.510.000**	**847.510.000**	**847.510.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	34.510.000	34.510.000	34.510.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	743.000.000	743.000.000	743.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**135.000.000**	**135.000.000**	**135.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**60.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**75.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**185.000.000**	**185.000.000**	**185.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	90.000.000	90.000.000	90.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**35.000.000**	**35.000.000**	**35.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**253.510.000**	**253.510.000**	**253.510.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**133.510.000**	**133.510.000**	**133.510.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2.500.000	2.500.000	2.500.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	98.510.000	98.510.000	98.510.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**965.000.000**	**965.000.000**	**965.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**195.000.000**	**195.000.000**	**195.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**190.000.000**	**190.000.000**	**190.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	35.000.000	35.000.000	35.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	90.000.000	90.000.000	90.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.0008	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**450.000.000**	**450.000.000**	**450.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**380.000.000**	**380.000.000**	**380.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	180.000.000	180.000.000	180.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB**	**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	70.000.000	70.000.000	70.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**320.000.000**	**320.000.000**	**320.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**220.000.000**	**220.000.000**	**220.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	140.000.000	140.000.000	140.000.000
2.09.0.00.0.00.01	**Dinas Ketahanan Pangan**	**42.108.917.000**	**42.108.917.000**	**42.108.917.000**
2.09.0.00.0.00.01.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**42.108.917.000**	**42.108.917.000**	**42.108.917.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**21.255.029.000**	**21.255.029.000**	**21.255.029.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**21.255.029.000**	**21.255.029.000**	**21.255.029.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**750.000.000**	**750.000.000**	**750.000.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	380.000.000	380.000.000	380.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	370.000.000	370.000.000	370.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.104.222.000**	**16.104.222.000**	**16.104.222.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.316.222.000	15.316.222.000	15.316.222.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.000.000	378.000.000	378.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	410.000.000	410.000.000	410.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**158.000.000**	**158.000.000**	**158.000.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	140.000.000	140.000.000	140.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000	18.000.000	18.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**197.000.000**	**197.000.000**	**197.000.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	197.000.000	197.000.000	197.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.112.000.000**	**1.112.000.000**	**1.112.000.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.000.000	62.000.000	62.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.000.000	86.000.000	86.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.000.000	72.000.000	72.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	-	-	-
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	108.000.000	108.000.000	108.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	674.000.000	674.000.000	674.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	95.000.000	95.000.000	95.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**771.600.000**	**771.600.000**	**771.600.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	771.600.000	771.600.000	771.600.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.692.562.000**	**1.692.562.000**	**1.692.562.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	600.000.000	600.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.092.562.000	1.092.562.000	1.092.562.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**463.645.000**	**463.645.000**	**463.645.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000	180.000.000	180.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	213.645.000	213.645.000	213.645.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	70.000.000	70.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**20.853.888.000**	**20.853.888.000**	**20.853.888.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**14.623.888.000**	**14.623.888.000**	**14.623.888.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**8.290.000.000**	**8.290.000.000**	**8.290.000.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	750.000.000	750.000.000	750.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	5.940.000.000	5.940.000.000	5.940.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**5.333.888.000**	**5.333.888.000**	**5.333.888.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02.0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	5.333.888.000	5.333.888.000	5.333.888.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	510.000.000	510.000.000	510.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	490.000.000	490.000.000	490.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**3.930.000.000**	**3.930.000.000**	**3.930.000.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**3.930.000.000**	**3.930.000.000**	**3.930.000.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	3.930.000.000	3.930.000.000	3.930.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**2.300.000.000**	**2.300.000.000**	**2.300.000.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah**	**2.300.000.000**	**2.300.000.000**	**2.300.000.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	650.000.000	650.000.000	650.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	370.000.000	370.000.000	370.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	650.000.000	650.000.000	650.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	630.000.000	630.000.000	630.000.000
2.11.3.29.0.00.02	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**154.475.369.000**	**154.475.369.000**	**154.475.369.000**
2.11.3.29.0.00.02.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**154.475.369.000**	**154.475.369.000**	**154.475.369.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**140.422.179.000**	**140.422.179.000**	**140.422.179.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**140.422.179.000**	**140.422.179.000**	**140.422.179.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**550.000.000**	**550.000.000**	**550.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	300.000.000	300.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	250.000.000	250.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**127.777.691.000**	**127.777.691.000**	**127.777.691.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	127.627.691.000	127.627.691.000	127.627.691.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.400.000	61.400.000	61.400.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	88.600.000	88.600.000	88.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**431.500.000**	**431.500.000**	**431.500.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	431.500.000	431.500.000	431.500.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**95.000.000**	**95.000.000**	**95.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000	70.000.000	70.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.162.483.000**	**2.162.483.000**	**2.162.483.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.700.000	90.700.000	90.700.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.000.000	162.000.000	162.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	135.190.000	135.190.000	135.190.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	167.660.000	167.660.000	167.660.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	192.500.000	192.500.000	192.500.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	-	-	-
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	220.000.000	220.000.000	220.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.194.433.000	1.194.433.000	1.194.433.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**22.000.000**	**22.000.000**	**22.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	22.000.000	22.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.054.633.000**	**7.054.633.000**	**7.054.633.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.898.550.000	1.898.550.000	1.898.550.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.500.000	111.500.000	111.500.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.019.583.000	5.019.583.000	5.019.583.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.328.872.000**	**2.328.872.000**	**2.328.872.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.794.250.000	1.794.250.000	1.794.250.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	13.000.000	13.000.000	13.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279.000.000	279.000.000	279.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	177.622.000	177.622.000	177.622.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	55.000.000	55.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**6.040.501.000**	**6.040.501.000**	**6.040.501.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**434.000.000**	**434.000.000**	**434.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**234.000.000**	**234.000.000**	**234.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	234.000.000	234.000.000	234.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**2.353.388.000**	**2.353.388.000**	**2.353.388.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**2.353.388.000**	**2.353.388.000**	**2.353.388.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.244.000.000	1.244.000.000	1.244.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	759.388.000	759.388.000	759.388.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	350.000.000	350.000.000	350.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**745.000.000**	**745.000.000**	**745.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**745.000.000**	**745.000.000**	**745.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	535.000.000	535.000.000	535.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**564.000.000**	**564.000.000**	**564.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**564.000.000**	**564.000.000**	**564.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	334.000.000	334.000.000	334.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	230.000.000	230.000.000	230.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**1.305.113.000**	**1.305.113.000**	**1.305.113.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.305.113.000**	**1.305.113.000**	**1.305.113.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	655.113.000	655.113.000	655.113.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	600.000.000	600.000.000	600.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**389.000.000**	**389.000.000**	**389.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**389.000.000**	**389.000.000**	**389.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	-	-	-
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	389.000.000	389.000.000	389.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**8.012.689.000**	**8.012.689.000**	**8.012.689.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**5.854.089.000**	**5.854.089.000**	**5.854.089.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**192.000.000**	**192.000.000**	**192.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	142.000.000	142.000.000	142.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.271.221.000**	**4.271.221.000**	**4.271.221.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	2.341.869.000	2.341.869.000	2.341.869.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.824.352.000	1.824.352.000	1.824.352.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	-	-
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	-	-	-
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**142.000.000**	**142.000.000**	**142.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	142.000.000	142.000.000	142.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**187.440.000**	**187.440.000**	**187.440.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	137.440.000	137.440.000	137.440.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**225.000.000**	**225.000.000**	**225.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**836.428.000**	**836.428.000**	**836.428.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	49.750.000	49.750.000	49.750.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih	749.678.000	749.678.000	749.678.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**824.768.000**	**824.768.000**	**824.768.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	**475.968.000**	**475.968.000**	**475.968.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	158.736.000	158.736.000	158.736.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	72.600.000	72.600.000	72.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	92.232.000	92.232.000	92.232.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	22.400.000	22.400.000	22.400.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	-	-	-
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**188.000.000**	**188.000.000**	**188.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	188.000.000	188.000.000	188.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**160.800.000**	**160.800.000**	**160.800.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	160.800.000	160.800.000	160.800.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.005.832.000**	**1.005.832.000**	**1.005.832.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.005.832.000**	**1.005.832.000**	**1.005.832.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	119.832.000	119.832.000	119.832.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	780.600.000	780.600.000	780.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	105.400.000	105.400.000	105.400.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**328.000.000**	**328.000.000**	**328.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**328.000.000**	**328.000.000**	**328.000.000**
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	-	-	-
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	114.000.000	114.000.000	114.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	184.000.000	184.000.000	184.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.13.2.12.0.00.03	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**25.355.375.000**	**25.355.375.000**	**25.355.375.000**
2.13.2.12.0.00.03.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**25.355.375.000**	**25.355.375.000**	**25.355.375.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**19.863.205.000**	**19.863.205.000**	**19.863.205.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.863.205.000**	**19.863.205.000**	**19.863.205.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**455.000.000**	**455.000.000**	**455.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	325.000.000	325.000.000	325.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000	130.000.000	130.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.625.428.000**	**15.625.428.000**	**15.625.428.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.250.428.000	15.250.428.000	15.250.428.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	375.000.000	375.000.000	375.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**769.722.000**	**769.722.000**	**769.722.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000	65.000.000	65.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.000.000	70.000.000	70.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.000.000	82.000.000	82.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.722.000	12.722.000	12.722.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.000.000	110.000.000	110.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000	320.000.000	320.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.283.055.000**	**2.283.055.000**	**2.283.055.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	565.055.000	565.055.000	565.055.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.688.000.000	1.688.000.000	1.688.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**580.000.000**	**580.000.000**	**580.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	250.000.000	250.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	35.000.000	35.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**624.000.000**	**624.000.000**	**624.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**220.000.000**	**220.000.000**	**220.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01	**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	**220.000.000**	**220.000.000**	**220.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	220.000.000	220.000.000	220.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**210.000.000**	**210.000.000**	**210.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**210.000.000**	**210.000.000**	**210.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	210.000.000	210.000.000	210.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**194.000.000**	**194.000.000**	**194.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**194.000.000**	**194.000.000**	**194.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	194.000.000	194.000.000	194.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**4.868.170.000**	**4.868.170.000**	**4.868.170.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**20.850.000**	**20.850.000**	**20.850.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01	**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**20.850.000**	**20.850.000**	**20.850.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	20.850.000	20.850.000	20.850.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**602.000.000**	**602.000.000**	**602.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**602.000.000**	**602.000.000**	**602.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	190.000.000	190.000.000	190.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	412.000.000	412.000.000	412.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.540.320.000**	**1.540.320.000**	**1.540.320.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**1.540.320.000**	**1.540.320.000**	**1.540.320.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	310.000.000	310.000.000	310.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	313.170.000	313.170.000	313.170.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	478.000.000	478.000.000	478.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.150.000	4.150.000	4.150.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	185.000.000	185.000.000	185.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**2.705.000.000**	**2.705.000.000**	**2.705.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01	**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**2.705.000.000**	**2.705.000.000**	**2.705.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	500.000.000	500.000.000	500.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	125.000.000	125.000.000	125.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000
2.15.0.00.0.00.01	**Dinas Perhubungan**	**200.748.075.000**	**200.748.075.000**	**200.748.075.000**
2.15.0.00.0.00.01.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**200.748.075.000**	**200.748.075.000**	**200.748.075.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**68.772.521.000**	**68.772.521.000**	**68.772.521.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**68.772.521.000**	**68.772.521.000**	**68.772.521.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**346.600.000**	**346.600.000**	**346.600.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	261.600.000	261.600.000	261.600.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.000	85.000.000	85.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**51.042.889.000**	**51.042.889.000**	**51.042.889.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.238.689.000	50.238.689.000	50.238.689.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	734.200.000	734.200.000	734.200.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70.000.000	70.000.000	70.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.155.000.000**	**1.155.000.000**	**1.155.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.155.000.000	1.155.000.000	1.155.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**160.000.000**	**160.000.000**	**160.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	55.000.000	55.000.000	55.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.000.000	105.000.000	105.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.438.352.000**	**2.438.352.000**	**2.438.352.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	257.000.000	257.000.000	257.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.000.000	89.000.000	89.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	89.500.000	89.500.000	89.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.000.000	43.000.000	43.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	229.852.000	229.852.000	229.852.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.605.000.000	1.605.000.000	1.605.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**550.000.000**	**550.000.000**	**550.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	550.000.000	550.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.252.780.000**	**11.252.780.000**	**11.252.780.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.589.225.000	1.589.225.000	1.589.225.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.657.555.000	9.657.555.000	9.657.555.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.826.900.000**	**1.826.900.000**	**1.826.900.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	857.400.000	857.400.000	857.400.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	410.000.000	410.000.000	410.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.500.000	129.500.000	129.500.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**131.975.554.000**	**131.975.554.000**	**131.975.554.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**130.096.680.000**	**130.096.680.000**	**130.096.680.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**380.000.000**	**380.000.000**	**380.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	380.000.000	380.000.000	380.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**2.139.390.000**	**2.139.390.000**	**2.139.390.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.139.390.000	2.139.390.000	2.139.390.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**5.155.000.000**	**5.155.000.000**	**5.155.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	105.000.000	105.000.000	105.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	450.000.000	450.000.000	450.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**2.902.463.000**	**2.902.463.000**	**2.902.463.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	46.320.000	46.320.000	46.320.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	898.080.000	898.080.000	898.080.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	70.000.000	70.000.000	70.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa	1.888.063.000	1.888.063.000	1.888.063.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**75.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06.0006	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**1.611.515.000**	**1.611.515.000**	**1.611.515.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1.200.665.000	1.200.665.000	1.200.665.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	210.850.000	210.850.000	210.850.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**117.312.524.000**	**117.312.524.000**	**117.312.524.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	924.955.000	924.955.000	924.955.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	116.387.569.000	116.387.569.000	116.387.569.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**360.788.000**	**360.788.000**	**360.788.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	290.500.000	290.500.000	290.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	70.288.000	70.288.000	70.288.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**35.000.000**	**35.000.000**	**35.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	-	-	-
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	35.000.000	35.000.000	35.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**35.000.000**	**35.000.000**	**35.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35.000.000	35.000.000	35.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.15	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**779.100.000**	**779.100.000**	**779.100.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.03	**Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan**	**60.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60.000.000	60.000.000	60.000.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	70.000.000	70.000.000	70.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.09	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan**	**79.100.000**	**79.100.000**	**79.100.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	79.100.000	79.100.000	79.100.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**570.000.000**	**570.000.000**	**570.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	130.000.000	130.000.000	130.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400.000.000	400.000.000	400.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**1.099.774.000**	**1.099.774.000**	**1.099.774.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**1.099.774.000**	**1.099.774.000**	**1.099.774.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	-	-	-
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	1.099.774.000	1.099.774.000	1.099.774.000
2.16.0.00.0.00.01	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**78.415.153.000**	**78.415.153.000**	**78.415.153.000**
2.16.0.00.0.00.01.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**78.415.153.000**	**78.415.153.000**	**78.415.153.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**29.637.129.000**	**29.637.129.000**	**29.637.129.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**29.637.129.000**	**29.637.129.000**	**29.637.129.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**610.000.000**	**610.000.000**	**610.000.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	411.510.000	411.510.000	411.510.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.490.000	198.490.000	198.490.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.173.911.000**	**21.173.911.000**	**21.173.911.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.589.686.000	20.589.686.000	20.589.686.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	352.000.000	352.000.000	352.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.150.000	75.150.000	75.150.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	83.225.000	83.225.000	83.225.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	73.850.000	73.850.000	73.850.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**270.000.000**	**270.000.000**	**270.000.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	36.000.000	36.000.000	36.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.000.000	34.000.000	34.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**450.000.000**	**450.000.000**	**450.000.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	320.000.000	320.000.000	320.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.854.875.000**	**1.854.875.000**	**1.854.875.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.000.000	85.000.000	85.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	431.875.000	431.875.000	431.875.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85.000.000	85.000.000	85.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	135.000.000	135.000.000	135.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	185.000.000	185.000.000	185.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.000.000	750.000.000	750.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**160.000.000**	**160.000.000**	**160.000.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.241.343.000**	**4.241.343.000**	**4.241.343.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.343.000	5.343.000	5.343.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000	36.000.000	36.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**877.000.000**	**877.000.000**	**877.000.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000	350.000.000	350.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	22.000.000	22.000.000	22.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	300.000.000	300.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**44.567.195.000**	**44.567.195.000**	**44.567.195.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**24.459.750.000**	**24.459.750.000**	**24.459.750.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**24.459.750.000**	**24.459.750.000**	**24.459.750.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.368.209.000	1.368.209.000	1.368.209.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	559.750.000	559.750.000	559.750.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media	505.841.000	505.841.000	505.841.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.904.750.000	1.904.750.000	1.904.750.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	400.000.000	400.000.000	400.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	5.353.000.000	5.353.000.000	5.353.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	334.027.000	334.027.000	334.027.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	9.437.881.000	9.437.881.000	9.437.881.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	1.096.292.000	1.096.292.000	1.096.292.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**20.107.445.000**	**20.107.445.000**	**20.107.445.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**-**	**-**	**-**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**20.107.445.000**	**20.107.445.000**	**20.107.445.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.0008	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2.817.254.000	2.817.254.000	2.817.254.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	80.082.000	80.082.000	80.082.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.880.800.000	1.880.800.000	1.880.800.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	102.664.000	102.664.000	102.664.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	15.226.645.000	15.226.645.000	15.226.645.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**1.210.829.000**	**1.210.829.000**	**1.210.829.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**1.210.829.000**	**1.210.829.000**	**1.210.829.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**1.210.829.000**	**1.210.829.000**	**1.210.829.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	378.750.000	378.750.000	378.750.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	-	-	-
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	260.000.000	260.000.000	260.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	304.370.000	304.370.000	304.370.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	167.709.000	167.709.000	167.709.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**1.341.640.000**	**1.341.640.000**	**1.341.640.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	240.520.000	240.520.000	240.520.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	145.000.000	145.000.000	145.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	370.600.000	370.600.000	370.600.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	585.520.000	585.520.000	585.520.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**1.658.360.000**	**1.658.360.000**	**1.658.360.000**
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1.658.360.000	1.658.360.000	1.658.360.000
2.17.0.00.0.00.01	**Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**	**35.821.452.000**	**35.821.452.000**	**35.821.452.000**
2.17.0.00.0.00.01.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**35.821.452.000**	**35.821.452.000**	**35.821.452.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**25.907.910.000**	**25.907.910.000**	**25.907.910.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**25.907.910.000**	**25.907.910.000**	**25.907.910.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**486.444.000**	**486.444.000**	**486.444.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	311.444.000	311.444.000	311.444.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.000.000	175.000.000	175.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.483.160.000**	**16.483.160.000**	**16.483.160.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.933.826.000	15.933.826.000	15.933.826.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	421.590.000	421.590.000	421.590.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	127.744.000	127.744.000	127.744.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**90.000.000**	**90.000.000**	**90.000.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.000.000	90.000.000	90.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**26.000.000**	**26.000.000**	**26.000.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.723.680.000**	**1.723.680.000**	**1.723.680.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.000.000	90.000.000	90.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000	90.000.000	90.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.000.000	90.000.000	90.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	171.400.000	171.400.000	171.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	115.000.000	115.000.000	115.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.124.280.000	1.124.280.000	1.124.280.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**207.700.000**	**207.700.000**	**207.700.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000	110.000.000	110.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.700.000	22.700.000	22.700.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.278.926.000**	**6.278.926.000**	**6.278.926.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.500.000	11.500.000	11.500.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.533.100.000	1.533.100.000	1.533.100.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	70.000.000	70.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.664.326.000	4.664.326.000	4.664.326.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**612.000.000**	**612.000.000**	**612.000.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000	16.000.000	16.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	195.000.000	195.000.000	195.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	45.000.000	45.000.000	45.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	145.000.000	145.000.000	145.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.000.000	126.000.000	126.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**9.913.542.000**	**9.913.542.000**	**9.913.542.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**1.499.384.000**	**1.499.384.000**	**1.499.384.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**645.052.000**	**645.052.000**	**645.052.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	645.052.000	645.052.000	645.052.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**854.332.000**	**854.332.000**	**854.332.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	854.332.000	854.332.000	854.332.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**734.908.000**	**734.908.000**	**734.908.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**734.908.000**	**734.908.000**	**734.908.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	734.908.000	734.908.000	734.908.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**1.606.604.000**	**1.606.604.000**	**1.606.604.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.606.604.000**	**1.606.604.000**	**1.606.604.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	705.776.000	705.776.000	705.776.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.0007	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	900.828.000	900.828.000	900.828.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**3.494.064.000**	**3.494.064.000**	**3.494.064.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**3.494.064.000**	**3.494.064.000**	**3.494.064.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	300.000.000	300.000.000	300.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	865.220.000	865.220.000	865.220.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	547.940.000	547.940.000	547.940.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.0010	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	650.000.000	650.000.000	650.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	1.130.904.000	1.130.904.000	1.130.904.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**2.578.582.000**	**2.578.582.000**	**2.578.582.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01	**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**2.578.582.000**	**2.578.582.000**	**2.578.582.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	554.320.000	554.320.000	554.320.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	-	-	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	2.024.262.000	2.024.262.000	2.024.262.000
2.18.0.00.0.00.01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**25.125.018.000**	**25.125.018.000**	**25.125.018.000**
2.18.0.00.0.00.01.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**25.125.018.000**	**25.125.018.000**	**25.125.018.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**20.185.806.000**	**20.185.806.000**	**20.185.806.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**20.185.806.000**	**20.185.806.000**	**20.185.806.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**304.347.000**	**304.347.000**	**304.347.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158.000.000	158.000.000	158.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.347.000	146.347.000	146.347.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.263.466.000**	**16.263.466.000**	**16.263.466.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.933.466.000	15.933.466.000	15.933.466.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	330.000.000	330.000.000	330.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**80.000.000**	**80.000.000**	**80.000.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**54.000.000**	**54.000.000**	**54.000.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.000.000	24.000.000	24.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**680.674.000**	**680.674.000**	**680.674.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.000.000	87.000.000	87.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.854.000	68.854.000	68.854.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.000.000	70.000.000	70.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.000.000	70.000.000	70.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.820.000	279.820.000	279.820.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**370.173.000**	**370.173.000**	**370.173.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	370.173.000	370.173.000	370.173.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.099.646.000**	**2.099.646.000**	**2.099.646.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.500.000	600.500.000	600.500.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000	24.000.000	24.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.467.146.000	1.467.146.000	1.467.146.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**333.500.000**	**333.500.000**	**333.500.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000	95.000.000	95.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000	110.000.000	110.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.000.000	109.000.000	109.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**4.939.212.000**	**4.939.212.000**	**4.939.212.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**560.640.000**	**560.640.000**	**560.640.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**310.640.000**	**310.640.000**	**310.640.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	310.640.000	310.640.000	310.640.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**250.000.000**	**250.000.000**	**250.000.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	250.000.000	250.000.000	250.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**1.612.500.000**	**1.612.500.000**	**1.612.500.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**1.612.500.000**	**1.612.500.000**	**1.612.500.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.582.500.000	1.582.500.000	1.582.500.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**1.654.602.000**	**1.654.602.000**	**1.654.602.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01	**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**850.000.000**	**850.000.000**	**850.000.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	850.000.000	850.000.000	850.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**804.602.000**	**804.602.000**	**804.602.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	720.000.000	720.000.000	720.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	84.602.000	84.602.000	84.602.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**561.470.000**	**561.470.000**	**561.470.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**561.470.000**	**561.470.000**	**561.470.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	161.470.000	161.470.000	161.470.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**550.000.000**	**550.000.000**	**550.000.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**550.000.000**	**550.000.000**	**550.000.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	550.000.000	550.000.000	550.000.000
2.19.3.26.0.00.02	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	**466.072.367.000**	**466.072.367.000**	**466.072.367.000**
2.19.3.26.0.00.02.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**466.072.367.000**	**466.072.367.000**	**466.072.367.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**49.976.367.000**	**49.976.367.000**	**49.976.367.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**49.976.367.000**	**49.976.367.000**	**49.976.367.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**550.030.000**	**550.030.000**	**550.030.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.030.000	300.030.000	300.030.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	250.000.000	250.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.526.337.000**	**27.526.337.000**	**27.526.337.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.066.337.000	27.066.337.000	27.066.337.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	460.000.000	460.000.000	460.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**550.000.000**	**550.000.000**	**550.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	550.000.000	550.000.000	550.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**250.000.000**	**250.000.000**	**250.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	250.000.000	250.000.000	250.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.114.000.000**	**2.114.000.000**	**2.114.000.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	130.000.000	130.000.000	130.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000	160.000.000	160.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	300.000.000	300.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105.000.000	105.000.000	105.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	285.000.000	285.000.000	285.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**600.000.000**	**600.000.000**	**600.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	600.000.000	600.000.000	600.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.635.000.000**	**15.635.000.000**	**15.635.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	35.000.000	35.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.700.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.700.000.000	11.700.000.000	11.700.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.751.000.000**	**2.751.000.000**	**2.751.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.000.000	290.000.000	290.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	361.000.000	361.000.000	361.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**400.311.000.000**	**400.311.000.000**	**400.311.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**11.525.000.000**	**11.525.000.000**	**11.525.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**3.250.000.000**	**3.250.000.000**	**3.250.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	700.000.000	700.000.000	700.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat	650.000.000	650.000.000	650.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	300.000.000	300.000.000	300.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	**8.275.000.000**	**8.275.000.000**	**8.275.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	225.000.000	225.000.000	225.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	8.050.000.000	8.050.000.000	8.050.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**388.786.000.000**	**388.786.000.000**	**388.786.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**9.000.000.000**	**9.000.000.000**	**9.000.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**17.920.000.000**	**17.920.000.000**	**17.920.000.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	4.400.000.000	4.400.000.000	4.400.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	13.370.000.000	13.370.000.000	13.370.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**361.866.000.000**	**361.866.000.000**	**361.866.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	300.000.000	300.000.000	300.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan	70.055.000.000	70.055.000.000	70.055.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	13.736.000.000	13.736.000.000	13.736.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	277.625.000.000	277.625.000.000	277.625.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**-**	**-**	**-**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**15.785.000.000**	**15.785.000.000**	**15.785.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**6.200.000.000**	**6.200.000.000**	**6.200.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**5.200.000.000**	**5.200.000.000**	**5.200.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	5.200.000.000	5.200.000.000	5.200.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**500.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-	-
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	500.000.000	500.000.000	500.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**500.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	118.000.000	118.000.000	118.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	382.000.000	382.000.000	382.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**5.660.000.000**	**5.660.000.000**	**5.660.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**5.660.000.000**	**5.660.000.000**	**5.660.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	350.000.000	350.000.000	350.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	650.000.000	650.000.000	650.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4.660.000.000	4.660.000.000	4.660.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**550.000.000**	**550.000.000**	**550.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**450.000.000**	**450.000.000**	**450.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	450.000.000	450.000.000	450.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.02.0008	Perlindungan Hasil Kreativitas	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**3.375.000.000**	**3.375.000.000**	**3.375.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**2.675.000.000**	**2.675.000.000**	**2.675.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	350.000.000	350.000.000	350.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1.275.000.000	1.275.000.000	1.275.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**700.000.000**	**700.000.000**	**700.000.000**
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	500.000.000	500.000.000	500.000.000
2.23.2.24.0.00.02	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**35.800.957.000**	**35.800.957.000**	**35.800.957.000**
2.23.2.24.0.00.02.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**35.800.957.000**	**35.800.957.000**	**35.800.957.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**33.389.359.000**	**33.389.359.000**	**33.389.359.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**33.389.359.000**	**33.389.359.000**	**33.389.359.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**175.000.000**	**175.000.000**	**175.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	135.000.000	135.000.000	135.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.887.910.000**	**27.887.910.000**	**27.887.910.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.637.910.000	27.637.910.000	27.637.910.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.000.000	250.000.000	250.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**95.000.000**	**95.000.000**	**95.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.000.000	90.000.000	90.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**61.000.000**	**61.000.000**	**61.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.000.000	46.000.000	46.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.074.000.000**	**1.074.000.000**	**1.074.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	175.000.000	175.000.000	175.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	400.000.000	400.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.661.000.000**	**3.661.000.000**	**3.661.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.000.000	86.000.000	86.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.265.000.000	2.265.000.000	2.265.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**235.449.000**	**235.449.000**	**235.449.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	35.000.000	35.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.449.000	100.449.000	100.449.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.23.2.24.0.00.02.2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**1.640.000.000**	**1.640.000.000**	**1.640.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**1.400.000.000**	**1.400.000.000**	**1.400.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**820.000.000**	**820.000.000**	**820.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	550.000.000	550.000.000	550.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**580.000.000**	**580.000.000**	**580.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	435.000.000	435.000.000	435.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	30.400.000	30.400.000	30.400.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	24.600.000	24.600.000	24.600.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**240.000.000**	**240.000.000**	**240.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**80.000.000**	**80.000.000**	**80.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.02	**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	35.000.000	35.000.000	35.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.03	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	40.000.000	40.000.000	40.000.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.04	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**771.598.000**	**771.598.000**	**771.598.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**701.598.000**	**701.598.000**	**701.598.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**145.000.000**	**145.000.000**	**145.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	-	-	-
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	120.000.000	120.000.000	120.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**220.000.000**	**220.000.000**	**220.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	220.000.000	220.000.000	220.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**336.598.000**	**336.598.000**	**336.598.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	261.598.000	261.598.000	261.598.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.01	**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.04	**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.25.0.00.0.00.01	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**86.750.448.000**	**86.750.448.000**	**86.750.448.000**
3.25.0.00.0.00.01.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**86.750.448.000**	**86.750.448.000**	**86.750.448.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**55.662.881.000**	**55.662.881.000**	**55.662.881.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**55.662.881.000**	**55.662.881.000**	**55.662.881.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**741.745.000**	**741.745.000**	**741.745.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	359.445.000	359.445.000	359.445.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	382.300.000	382.300.000	382.300.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**48.061.846.000**	**48.061.846.000**	**48.061.846.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.991.846.000	46.991.846.000	46.991.846.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	920.000.000	920.000.000	920.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**220.000.000**	**220.000.000**	**220.000.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	60.000.000	60.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.547.908.000**	**1.547.908.000**	**1.547.908.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	133.810.000	133.810.000	133.810.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	479.348.000	479.348.000	479.348.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	760.750.000	760.750.000	760.750.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**507.250.000**	**507.250.000**	**507.250.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	507.250.000	507.250.000	507.250.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.340.980.000**	**3.340.980.000**	**3.340.980.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.900.000	46.900.000	46.900.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.294.080.000	2.294.080.000	2.294.080.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.143.152.000**	**1.143.152.000**	**1.143.152.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	80.000.000	80.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.610.000	316.610.000	316.610.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.750.000	196.750.000	196.750.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	469.792.000	469.792.000	469.792.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**31.087.567.000**	**31.087.567.000**	**31.087.567.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**2.106.110.000**	**2.106.110.000**	**2.106.110.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**1.518.438.000**	**1.518.438.000**	**1.518.438.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	382.824.000	382.824.000	382.824.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.135.614.000	1.135.614.000	1.135.614.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.02	**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**67.610.000**	**67.610.000**	**67.610.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	67.610.000	67.610.000	67.610.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03	**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**520.062.000**	**520.062.000**	**520.062.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	520.062.000	520.062.000	520.062.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**10.701.928.000**	**10.701.928.000**	**10.701.928.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**796.726.000**	**796.726.000**	**796.726.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	57.285.000	57.285.000	57.285.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	739.441.000	739.441.000	739.441.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.406.600.000**	**1.406.600.000**	**1.406.600.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	610.000.000	610.000.000	610.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	796.600.000	796.600.000	796.600.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**8.498.602.000**	**8.498.602.000**	**8.498.602.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	2.241.995.000	2.241.995.000	2.241.995.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	6.256.607.000	6.256.607.000	6.256.607.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**14.581.048.000**	**14.581.048.000**	**14.581.048.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**203.500.000**	**203.500.000**	**203.500.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	110.000.000	110.000.000	110.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	93.500.000	93.500.000	93.500.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**3.724.692.000**	**3.724.692.000**	**3.724.692.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	250.000.000	250.000.000	250.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah	452.707.000	452.707.000	452.707.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	771.985.000	771.985.000	771.985.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.06	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**10.652.856.000**	**10.652.856.000**	**10.652.856.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah	10.652.856.000	10.652.856.000	10.652.856.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**1.756.361.000**	**1.756.361.000**	**1.756.361.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**1.282.844.000**	**1.282.844.000**	**1.282.844.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan	174.159.000	174.159.000	174.159.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	894.922.000	894.922.000	894.922.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	163.763.000	163.763.000	163.763.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**473.517.000**	**473.517.000**	**473.517.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	-	-	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	171.104.000	171.104.000	171.104.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	152.409.000	152.409.000	152.409.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	150.004.000	150.004.000	150.004.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**1.942.120.000**	**1.942.120.000**	**1.942.120.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**99.500.000**	**99.500.000**	**99.500.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	95.500.000	95.500.000	95.500.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.0005	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**1.838.620.000**	**1.838.620.000**	**1.838.620.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	130.000.000	130.000.000	130.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.708.620.000	1.708.620.000	1.708.620.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.27.0.00.0.00.08	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	**150.902.041.000**	**150.902.041.000**	**150.902.041.000**
3.27.0.00.0.00.08.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**150.902.041.000**	**150.902.041.000**	**150.902.041.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**55.452.687.000**	**55.452.687.000**	**55.452.687.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**55.452.687.000**	**55.452.687.000**	**55.452.687.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.576.528.000**	**1.576.528.000**	**1.576.528.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	349.768.000	349.768.000	349.768.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.226.760.000	1.226.760.000	1.226.760.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**33.862.915.000**	**33.862.915.000**	**33.862.915.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.546.515.000	33.546.515.000	33.546.515.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	266.400.000	266.400.000	266.400.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**178.740.000**	**178.740.000**	**178.740.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	70.000.000	70.000.000	70.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	8.740.000	8.740.000	8.740.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**108.000.000**	**108.000.000**	**108.000.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108.000.000	108.000.000	108.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.017.198.000**	**2.017.198.000**	**2.017.198.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.856.000	33.856.000	33.856.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.614.000	174.614.000	174.614.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.546.000	36.546.000	36.546.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	605.378.000	605.378.000	605.378.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	131.862.000	131.862.000	131.862.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	-	-	-
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	227.648.000	227.648.000	227.648.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	790.569.000	790.569.000	790.569.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.725.000	16.725.000	16.725.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.248.000.000**	**1.248.000.000**	**1.248.000.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	230.000.000	230.000.000	230.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	110.000.000	110.000.000	110.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000	600.000.000	600.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	293.000.000	293.000.000	293.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.441.486.000**	**11.441.486.000**	**11.441.486.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000	5.700.000	5.700.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.671.400.000	1.671.400.000	1.671.400.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.000.000	122.000.000	122.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.642.386.000	9.642.386.000	9.642.386.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.989.820.000**	**4.989.820.000**	**4.989.820.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	360.500.000	360.500.000	360.500.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.900.000	131.900.000	131.900.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak	-	-	-
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	521.920.000	521.920.000	521.920.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.655.500.000	1.655.500.000	1.655.500.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	55.000.000	55.000.000	55.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.783.500.000	1.783.500.000	1.783.500.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	423.500.000	423.500.000	423.500.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**95.449.354.000**	**95.449.354.000**	**95.449.354.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**37.558.500.000**	**37.558.500.000**	**37.558.500.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**2.400.000.000**	**2.400.000.000**	**2.400.000.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**25.578.500.000**	**25.578.500.000**	**25.578.500.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	21.984.200.000	21.984.200.000	21.984.200.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.594.300.000	3.594.300.000	3.594.300.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06	**Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**	**9.580.000.000**	**9.580.000.000**	**9.580.000.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	9.580.000.000	9.580.000.000	9.580.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**5.700.000.000**	**5.700.000.000**	**5.700.000.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**5.700.000.000**	**5.700.000.000**	**5.700.000.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5.350.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	350.000.000	350.000.000	350.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**39.913.154.000**	**39.913.154.000**	**39.913.154.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**35.865.350.000**	**35.865.350.000**	**35.865.350.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35.865.350.000	35.865.350.000	35.865.350.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah**	**2.909.304.000**	**2.909.304.000**	**2.909.304.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	2.909.304.000	2.909.304.000	2.909.304.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**1.138.500.000**	**1.138.500.000**	**1.138.500.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	1.138.500.000	1.138.500.000	1.138.500.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**12.277.700.000**	**12.277.700.000**	**12.277.700.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**12.277.700.000**	**12.277.700.000**	**12.277.700.000**
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	12.277.700.000	12.277.700.000	12.277.700.000
3.27.0.00.0.00.10	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	**155.675.731.000**	**155.675.731.000**	**155.675.731.000**
3.27.0.00.0.00.10.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**155.675.731.000**	**155.675.731.000**	**155.675.731.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**109.679.896.000**	**109.679.896.000**	**109.679.896.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**109.679.896.000**	**109.679.896.000**	**109.679.896.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**900.000.000**	**900.000.000**	**900.000.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000.000	500.000.000	500.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	400.000.000	400.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90.820.644.000**	**90.820.644.000**	**90.820.644.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85.833.743.000	85.833.743.000	85.833.743.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.986.901.000	4.986.901.000	4.986.901.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**281.500.000**	**281.500.000**	**281.500.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	277.000.000	277.000.000	277.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**80.000.000**	**80.000.000**	**80.000.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.000.000	65.000.000	65.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.601.392.000**	**2.601.392.000**	**2.601.392.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	129.000.000	129.000.000	129.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	474.748.000	474.748.000	474.748.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.070.000	84.070.000	84.070.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	137.500.000	137.500.000	137.500.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	262.713.000	262.713.000	262.713.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.510.361.000	1.510.361.000	1.510.361.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.541.600.000**	**2.541.600.000**	**2.541.600.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	975.000.000	975.000.000	975.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	80.000.000	80.000.000	80.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.313.500.000	1.313.500.000	1.313.500.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	75.000.000	75.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.100.000	98.100.000	98.100.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.453.750.000**	**5.453.750.000**	**5.453.750.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.000.000	32.000.000	32.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.610.400.000	2.610.400.000	2.610.400.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.750.000	134.750.000	134.750.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.676.600.000	2.676.600.000	2.676.600.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.001.010.000**	**7.001.010.000**	**7.001.010.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.059.540.000	1.059.540.000	1.059.540.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	37.500.000	37.500.000	37.500.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	354.470.000	354.470.000	354.470.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.905.500.000	2.905.500.000	2.905.500.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.494.000.000	2.494.000.000	2.494.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**45.995.835.000**	**45.995.835.000**	**45.995.835.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**37.080.553.000**	**37.080.553.000**	**37.080.553.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**25.513.272.000**	**25.513.272.000**	**25.513.272.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	25.513.272.000	25.513.272.000	25.513.272.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**11.567.281.000**	**11.567.281.000**	**11.567.281.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	67.423.000	67.423.000	67.423.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	11.499.858.000	11.499.858.000	11.499.858.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**5.960.000.000**	**5.960.000.000**	**5.960.000.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**5.960.000.000**	**5.960.000.000**	**5.960.000.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	5.960.000.000	5.960.000.000	5.960.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**745.000.000**	**745.000.000**	**745.000.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**745.000.000**	**745.000.000**	**745.000.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	645.000.000	645.000.000	645.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**2.210.282.000**	**2.210.282.000**	**2.210.282.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01	**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**256.970.000**	**256.970.000**	**256.970.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	256.970.000	256.970.000	256.970.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**1.330.000.000**	**1.330.000.000**	**1.330.000.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	400.000.000	400.000.000	400.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	930.000.000	930.000.000	930.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**623.312.000**	**623.312.000**	**623.312.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	623.312.000	623.312.000	623.312.000
3.29.0.00.0.00.01	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	**63.838.104.000**	**63.838.104.000**	**63.838.104.000**
3.29.0.00.0.00.01.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**63.838.104.000**	**63.838.104.000**	**63.838.104.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**53.633.683.000**	**53.633.683.000**	**53.633.683.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**53.633.683.000**	**53.633.683.000**	**53.633.683.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**931.036.000**	**931.036.000**	**931.036.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	632.512.000	632.512.000	632.512.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	298.524.000	298.524.000	298.524.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**40.993.406.000**	**40.993.406.000**	**40.993.406.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.704.620.000	39.704.620.000	39.704.620.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.106.880.000	1.106.880.000	1.106.880.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.566.000	87.566.000	87.566.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	52.500.000	52.500.000	52.500.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41.840.000	41.840.000	41.840.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**157.000.000**	**157.000.000**	**157.000.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	144.500.000	144.500.000	144.500.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.500.000	12.500.000	12.500.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**140.000.000**	**140.000.000**	**140.000.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.129.411.000**	**2.129.411.000**	**2.129.411.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95.000.000	95.000.000	95.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.950.000	175.950.000	175.950.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	107.000.000	107.000.000	107.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.311.000	250.311.000	250.311.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.000.000	78.000.000	78.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	24.600.000	24.600.000	24.600.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.050.000	125.050.000	125.050.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.158.100.000	1.158.100.000	1.158.100.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	115.400.000	115.400.000	115.400.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**195.850.000**	**195.850.000**	**195.850.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	25.400.000	25.400.000	25.400.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	170.450.000	170.450.000	170.450.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.949.780.000**	**7.949.780.000**	**7.949.780.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.100.000	41.100.000	41.100.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.660.900.000	1.660.900.000	1.660.900.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.250.000	13.250.000	13.250.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.234.530.000	6.234.530.000	6.234.530.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.137.200.000**	**1.137.200.000**	**1.137.200.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	388.560.000	388.560.000	388.560.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.640.000	81.640.000	81.640.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	315.000.000	315.000.000	315.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327.000.000	327.000.000	327.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**10.204.421.000**	**10.204.421.000**	**10.204.421.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**2.178.750.000**	**2.178.750.000**	**2.178.750.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**605.000.000**	**605.000.000**	**605.000.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	605.000.000	605.000.000	605.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**1.573.750.000**	**1.573.750.000**	**1.573.750.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	563.700.000	563.700.000	563.700.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	1.010.050.000	1.010.050.000	1.010.050.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**2.503.054.000**	**2.503.054.000**	**2.503.054.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.01	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**186.250.000**	**186.250.000**	**186.250.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.01.0006	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut	186.250.000	186.250.000	186.250.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**2.166.804.000**	**2.166.804.000**	**2.166.804.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	278.500.000	278.500.000	278.500.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1.888.304.000	1.888.304.000	1.888.304.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**2.381.039.000**	**2.381.039.000**	**2.381.039.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.07	**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	**1.499.084.000**	**1.499.084.000**	**1.499.084.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1.499.084.000	1.499.084.000	1.499.084.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.10	**Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi**	**881.955.000**	**881.955.000**	**881.955.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	881.955.000	881.955.000	881.955.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**3.141.578.000**	**3.141.578.000**	**3.141.578.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**336.600.000**	**336.600.000**	**336.600.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	336.600.000	336.600.000	336.600.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**1.185.518.000**	**1.185.518.000**	**1.185.518.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1.185.518.000	1.185.518.000	1.185.518.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**1.619.460.000**	**1.619.460.000**	**1.619.460.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	34.320.000	34.320.000	34.320.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.585.140.000	1.585.140.000	1.585.140.000
3.31.3.30.0.00.02	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**100.339.322.000**	**100.339.322.000**	**100.339.322.000**
3.31.3.30.0.00.02.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**100.339.322.000**	**100.339.322.000**	**100.339.322.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**49.524.618.000**	**49.524.618.000**	**49.524.618.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**49.524.618.000**	**49.524.618.000**	**49.524.618.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**548.742.000**	**548.742.000**	**548.742.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	248.742.000	248.742.000	248.742.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**34.382.824.000**	**34.382.824.000**	**34.382.824.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.808.304.000	32.808.304.000	32.808.304.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.509.520.000	1.509.520.000	1.509.520.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.000.000	65.000.000	65.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**290.585.000**	**290.585.000**	**290.585.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	240.585.000	240.585.000	240.585.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**117.677.000**	**117.677.000**	**117.677.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	42.677.000	42.677.000	42.677.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	75.000.000	75.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.927.073.000**	**2.927.073.000**	**2.927.073.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	160.000.000	160.000.000	160.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258.233.000	258.233.000	258.233.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	220.000.000	220.000.000	220.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	646.540.000	646.540.000	646.540.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.600.000	107.600.000	107.600.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	22.000.000	22.000.000	22.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	249.900.000	249.900.000	249.900.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.227.800.000	1.227.800.000	1.227.800.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.803.391.000**	**8.803.391.000**	**8.803.391.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.700.000	3.700.000	3.700.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.109.700.000	3.109.700.000	3.109.700.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.689.991.000	5.689.991.000	5.689.991.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.454.326.000**	**2.454.326.000**	**2.454.326.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.400.000	342.400.000	342.400.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.500.000	12.500.000	12.500.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	705.426.000	705.426.000	705.426.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	776.500.000	776.500.000	776.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.500.000	91.500.000	91.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	401.000.000	401.000.000	401.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**40.338.845.000**	**40.338.845.000**	**40.338.845.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**633.633.000**	**633.633.000**	**633.633.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor**	**168.621.000**	**168.621.000**	**168.621.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	168.621.000	168.621.000	168.621.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.02	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi**	**-**	**-**	**-**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.02.0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.03	**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	26.300.000	26.300.000	26.300.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	**438.712.000**	**438.712.000**	**438.712.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	438.712.000	438.712.000	438.712.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**238.250.000**	**238.250.000**	**238.250.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	**238.250.000**	**238.250.000**	**238.250.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	238.250.000	238.250.000	238.250.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**32.895.000.000**	**32.895.000.000**	**32.895.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah**	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02	**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	**32.800.000.000**	**32.800.000.000**	**32.800.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32.780.000.000	32.780.000.000	32.780.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	**55.000.000**	**55.000.000**	**55.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03.0005	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	35.000.000	35.000.000	35.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**1.334.967.000**	**1.334.967.000**	**1.334.967.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**1.334.967.000**	**1.334.967.000**	**1.334.967.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	1.071.367.000	1.071.367.000	1.071.367.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal	72.650.000	72.650.000	72.650.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	140.950.000	140.950.000	140.950.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**2.786.815.000**	**2.786.815.000**	**2.786.815.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**518.012.000**	**518.012.000**	**518.012.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	329.500.000	329.500.000	329.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	188.512.000	188.512.000	188.512.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**2.091.482.000**	**2.091.482.000**	**2.091.482.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	310.000.000	310.000.000	310.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	691.226.000	691.226.000	691.226.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	1.090.256.000	1.090.256.000	1.090.256.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**177.321.000**	**177.321.000**	**177.321.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	177.321.000	177.321.000	177.321.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**2.450.180.000**	**2.450.180.000**	**2.450.180.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01	**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	**325.180.000**	**325.180.000**	**325.180.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	325.180.000	325.180.000	325.180.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.02	**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**2.110.000.000**	**2.110.000.000**	**2.110.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	2.110.000.000	2.110.000.000	2.110.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.03	**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**10.475.859.000**	**10.475.859.000**	**10.475.859.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**9.979.492.000**	**9.979.492.000**	**9.979.492.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**9.979.492.000**	**9.979.492.000**	**9.979.492.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5.815.029.000	5.815.029.000	5.815.029.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4.164.463.000	4.164.463.000	4.164.463.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**245.681.000**	**245.681.000**	**245.681.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	**245.681.000**	**245.681.000**	**245.681.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	245.681.000	245.681.000	245.681.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**250.686.000**	**250.686.000**	**250.686.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**250.686.000**	**250.686.000**	**250.686.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	30.175.000	30.175.000	30.175.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	220.511.000	220.511.000	220.511.000
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO ORGANISASI**	**2.601.069.000**	**2.601.069.000**	**2.601.069.000**
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO HUKUM**	**3.072.092.000**	**3.072.092.000**	**3.072.092.000**
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM**	**2.312.812.000**	**2.312.812.000**	**2.312.812.000**
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**400.401.884.000**	**400.401.884.000**	**400.401.884.000**
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**2.675.524.000**	**2.675.524.000**	**2.675.524.000**
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA**	**4.387.526.000**	**4.387.526.000**	**4.387.526.000**
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**2.594.229.000**	**2.594.229.000**	**2.594.229.000**
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO PEREKONOMIAN**	**3.470.400.000**	**3.470.400.000**	**3.470.400.000**
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO UMUM**	**222.055.535.000**	**222.055.535.000**	**222.055.535.000**
4.01.0.00.0.00.01.4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**643.571.071.000**	**643.571.071.000**	**643.571.071.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**226.172.646.000**	**226.172.646.000**	**226.172.646.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**226.172.646.000**	**226.172.646.000**	**226.172.646.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**190.000.000**	**190.000.000**	**190.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.000.000	110.000.000	110.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	80.000.000	80.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**115.305.142.000**	**115.305.142.000**	**115.305.142.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	113.340.142.000	113.340.142.000	113.340.142.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.540.000.000	1.540.000.000	1.540.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.000.000	300.000.000	300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	125.000.000	125.000.000	125.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**792.000.000**	**792.000.000**	**792.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	442.000.000	442.000.000	442.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	350.000.000	350.000.000	350.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	30.000.000	30.000.000	30.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**145.312.000**	**145.312.000**	**145.312.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	104.574.000	104.574.000	104.574.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.738.000	40.738.000	40.738.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**14.631.753.000**	**14.631.753.000**	**14.631.753.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	400.000.000	400.000.000	400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.718.000	500.718.000	500.718.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	425.000.000	425.000.000	425.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	150.000.000	150.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	45.000.000	45.000.000	45.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.895.651.000	6.895.651.000	6.895.651.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	365.384.000	365.384.000	365.384.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000	150.000.000	150.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.700.000.000**	**10.700.000.000**	**10.700.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.200.000.000	9.200.000.000	9.200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.511.213.000**	**25.511.213.000**	**25.511.213.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	30.000.000	30.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	631.213.000	631.213.000	631.213.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.350.000.000	17.350.000.000	17.350.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.300.000.000**	**8.300.000.000**	**8.300.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	250.000.000	250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	87.500.000	87.500.000	87.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.500.000	312.500.000	312.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**26.232.776.000**	**26.232.776.000**	**26.232.776.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.743.094.000	2.743.094.000	2.743.094.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	160.000.000	160.000.000	160.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	23.279.682.000	23.279.682.000	23.279.682.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**6.120.000.000**	**6.120.000.000**	**6.120.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.950.000.000	2.950.000.000	2.950.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.770.000.000	1.770.000.000	1.770.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**15.334.203.000**	**15.334.203.000**	**15.334.203.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	350.000.000	350.000.000	350.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	11.484.203.000	11.484.203.000	11.484.203.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**	**2.880.247.000**	**2.880.247.000**	**2.880.247.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2.580.247.000	2.580.247.000	2.580.247.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.000.000	250.000.000	250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**417.398.425.000**	**417.398.425.000**	**417.398.425.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**1.780.528.000**	**1.780.528.000**	**1.780.528.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**687.552.000**	**687.552.000**	**687.552.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	262.352.000	262.352.000	262.352.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	212.400.000	212.400.000	212.400.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	212.800.000	212.800.000	212.800.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02	**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**1.092.976.000**	**1.092.976.000**	**1.092.976.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	301.360.000	301.360.000	301.360.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	240.160.000	240.160.000	240.160.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	276.640.000	276.640.000	276.640.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	274.816.000	274.816.000	274.816.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**3.478.000.000**	**3.478.000.000**	**3.478.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**1.005.000.000**	**1.005.000.000**	**1.005.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	550.000.000	550.000.000	550.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	230.000.000	230.000.000	230.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	225.000.000	225.000.000	225.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**1.330.000.000**	**1.330.000.000**	**1.330.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	800.000.000	800.000.000	800.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	225.000.000	225.000.000	225.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	305.000.000	305.000.000	305.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**1.143.000.000**	**1.143.000.000**	**1.143.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	593.000.000	593.000.000	593.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	200.000.000	200.000.000	200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	350.000.000	350.000.000	350.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**400.058.148.000**	**400.058.148.000**	**400.058.148.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**398.686.424.000**	**398.686.424.000**	**398.686.424.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	394.145.724.000	394.145.724.000	394.145.724.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	4.540.700.000	4.540.700.000	4.540.700.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**643.908.000**	**643.908.000**	**643.908.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	243.908.000	243.908.000	243.908.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**727.816.000**	**727.816.000**	**727.816.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	200.000.000	200.000.000	200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	527.816.000	527.816.000	527.816.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**2.918.000.000**	**2.918.000.000**	**2.918.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01	**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**1.682.000.000**	**1.682.000.000**	**1.682.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	500.000.000	500.000.000	500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	65.000.000	65.000.000	65.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	465.000.000	465.000.000	465.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	652.000.000	652.000.000	652.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**1.236.000.000**	**1.236.000.000**	**1.236.000.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	236.000.000	236.000.000	236.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN**	**4.775.260.000**	**4.775.260.000**	**4.775.260.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**1.762.448.000**	**1.762.448.000**	**1.762.448.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	462.448.000	462.448.000	462.448.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**1.612.812.000**	**1.612.812.000**	**1.612.812.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	577.043.000	577.043.000	577.043.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	521.683.000	521.683.000	521.683.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	514.086.000	514.086.000	514.086.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**1.400.000.000**	**1.400.000.000**	**1.400.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	810.000.000	810.000.000	810.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	390.000.000	390.000.000	390.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan	150.000.000	150.000.000	150.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**2.348.489.000**	**2.348.489.000**	**2.348.489.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.270.335.000**	**1.270.335.000**	**1.270.335.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	262.535.000	262.535.000	262.535.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	799.800.000	799.800.000	799.800.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	208.000.000	208.000.000	208.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**603.720.000**	**603.720.000**	**603.720.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	190.230.000	190.230.000	190.230.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	295.350.000	295.350.000	295.350.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	118.140.000	118.140.000	118.140.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**474.434.000**	**474.434.000**	**474.434.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	147.204.000	147.204.000	147.204.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	162.210.000	162.210.000	162.210.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	165.020.000	165.020.000	165.020.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**2.040.000.000**	**2.040.000.000**	**2.040.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**1.470.000.000**	**1.470.000.000**	**1.470.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	465.000.000	465.000.000	465.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	285.000.000	285.000.000	285.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	720.000.000	720.000.000	720.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**570.000.000**	**570.000.000**	**570.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	120.000.000	120.000.000	120.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	347.000.000	347.000.000	347.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	103.000.000	103.000.000	103.000.000
4.02.0.00.0.00.01	**Sekretariat DPRD**	**585.025.008.000**	**585.025.008.000**	**585.025.008.000**
4.02.0.00.0.00.01.4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**585.025.008.000**	**585.025.008.000**	**585.025.008.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**218.871.748.000**	**218.871.748.000**	**218.871.748.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**218.871.748.000**	**218.871.748.000**	**218.871.748.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.112.567.000**	**1.112.567.000**	**1.112.567.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	812.567.000	812.567.000	812.567.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	300.000.000	300.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**20.665.764.000**	**20.665.764.000**	**20.665.764.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.560.764.000	19.560.764.000	19.560.764.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.105.000.000	1.105.000.000	1.105.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.055.674.000**	**1.055.674.000**	**1.055.674.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.055.674.000	1.055.674.000	1.055.674.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**600.101.000**	**600.101.000**	**600.101.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	206.808.000	206.808.000	206.808.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	393.293.000	393.293.000	393.293.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.256.952.000**	**3.256.952.000**	**3.256.952.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	435.701.000	435.701.000	435.701.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182.189.000	182.189.000	182.189.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	480.500.000	480.500.000	480.500.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	980.400.000	980.400.000	980.400.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	178.162.000	178.162.000	178.162.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.762.981.000**	**5.762.981.000**	**5.762.981.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	639.680.000	639.680.000	639.680.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.163.948.000	2.163.948.000	2.163.948.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	276.640.000	276.640.000	276.640.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	381.288.000	381.288.000	381.288.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.301.425.000	2.301.425.000	2.301.425.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.393.158.000**	**19.393.158.000**	**19.393.158.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	196.957.000	196.957.000	196.957.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.439.000.000	3.439.000.000	3.439.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.031.086.000	1.031.086.000	1.031.086.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.726.115.000	14.726.115.000	14.726.115.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.718.675.000**	**7.718.675.000**	**7.718.675.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	502.800.000	502.800.000	502.800.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.027.582.000	3.027.582.000	3.027.582.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	57.475.000	57.475.000	57.475.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.699.503.000	1.699.503.000	1.699.503.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.431.315.000	2.431.315.000	2.431.315.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**159.305.876.000**	**159.305.876.000**	**159.305.876.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	157.346.875.000	157.346.875.000	157.346.875.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.392.880.000	1.392.880.000	1.392.880.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	566.121.000	566.121.000	566.121.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**366.153.260.000**	**366.153.260.000**	**366.153.260.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**366.153.260.000**	**366.153.260.000**	**366.153.260.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**8.483.926.000**	**8.483.926.000**	**8.483.926.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8.483.926.000	8.483.926.000	8.483.926.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**2.102.662.000**	**2.102.662.000**	**2.102.662.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	2.102.662.000	2.102.662.000	2.102.662.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**13.819.030.000**	**13.819.030.000**	**13.819.030.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2.214.668.000	2.214.668.000	2.214.668.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2.214.668.000	2.214.668.000	2.214.668.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.214.668.000	2.214.668.000	2.214.668.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2.214.668.000	2.214.668.000	2.214.668.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2.214.668.000	2.214.668.000	2.214.668.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	1.149.830.000	1.149.830.000	1.149.830.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.595.860.000	1.595.860.000	1.595.860.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**83.361.307.000**	**83.361.307.000**	**83.361.307.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.380.000.000	4.380.000.000	4.380.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.173.208.000	2.173.208.000	2.173.208.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	454.190.000	454.190.000	454.190.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	10.849.896.000	10.849.896.000	10.849.896.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	65.504.013.000	65.504.013.000	65.504.013.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**64.153.805.000**	**64.153.805.000**	**64.153.805.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	20.563.680.000	20.563.680.000	20.563.680.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	175.000.000	175.000.000	175.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	43.415.125.000	43.415.125.000	43.415.125.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**552.860.000**	**552.860.000**	**552.860.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	552.860.000	552.860.000	552.860.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**116.323.862.000**	**116.323.862.000**	**116.323.862.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	116.323.862.000	116.323.862.000	116.323.862.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**77.355.808.000**	**77.355.808.000**	**77.355.808.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	77.355.808.000	77.355.808.000	77.355.808.000
5.01.0.00.0.00.02	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**48.421.011.000**	**48.421.011.000**	**48.421.011.000**
5.01.0.00.0.00.02.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**48.421.011.000**	**48.421.011.000**	**48.421.011.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01	**PERENCANAAN**	**35.441.011.000**	**35.441.011.000**	**35.441.011.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**35.441.011.000**	**35.441.011.000**	**35.441.011.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**660.000.000**	**660.000.000**	**660.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	360.000.000	360.000.000	360.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22.081.232.000**	**22.081.232.000**	**22.081.232.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.406.192.000	21.406.192.000	21.406.192.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	350.040.000	350.040.000	350.040.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000	75.000.000	75.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**260.000.000**	**260.000.000**	**260.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.000.000	60.000.000	60.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**390.000.000**	**390.000.000**	**390.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	190.000.000	190.000.000	190.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.871.200.000**	**2.871.200.000**	**2.871.200.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000	70.000.000	70.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000	120.000.000	120.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.000.000	52.000.000	52.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	220.000.000	220.000.000	220.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	39.000.000	39.000.000	39.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	180.200.000	180.200.000	180.200.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	90.000.000	90.000.000	90.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	950.000.000	950.000.000	950.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.275.418.000**	**4.275.418.000**	**4.275.418.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.045.418.000	3.045.418.000	3.045.418.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.653.161.000**	**3.653.161.000**	**3.653.161.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	650.000.000	650.000.000	650.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	340.000.000	340.000.000	340.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	24.000.000	24.000.000	24.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.809.161.000	1.809.161.000	1.809.161.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01	**PERENCANAAN**	**12.980.000.000**	**12.980.000.000**	**12.980.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**5.900.000.000**	**5.900.000.000**	**5.900.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**4.216.000.000**	**4.216.000.000**	**4.216.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	4.216.000.000	4.216.000.000	4.216.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan**	**741.000.000**	**741.000.000**	**741.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	601.000.000	601.000.000	601.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	140.000.000	140.000.000	140.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**943.000.000**	**943.000.000**	**943.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	678.000.000	678.000.000	678.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	265.000.000	265.000.000	265.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**7.080.000.000**	**7.080.000.000**	**7.080.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**2.700.000.000**	**2.700.000.000**	**2.700.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	140.000.000	140.000.000	140.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	984.000.000	984.000.000	984.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	350.000.000	350.000.000	350.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.226.000.000	1.226.000.000	1.226.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**2.230.000.000**	**2.230.000.000**	**2.230.000.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	680.000.000	680.000.000	680.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	860.000.000	860.000.000	860.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	340.000.000	340.000.000	340.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	350.000.000	350.000.000	350.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**2.150.000.000**	**2.150.000.000**	**2.150.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	500.000.000	500.000.000	500.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	400.000.000	400.000.000	400.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
5.02.0.00.0.00.02	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	**292.550.704.000**	**292.550.704.000**	**292.550.704.000**
5.02.0.00.0.00.02.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**292.550.704.000**	**292.550.704.000**	**292.550.704.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02	**KEUANGAN**	**254.399.644.000**	**254.399.644.000**	**254.399.644.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**254.399.644.000**	**254.399.644.000**	**254.399.644.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**605.000.000**	**605.000.000**	**605.000.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	345.000.000	345.000.000	345.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.000.000	260.000.000	260.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**156.923.731.000**	**156.923.731.000**	**156.923.731.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	154.448.801.000	154.448.801.000	154.448.801.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.247.370.000	2.247.370.000	2.247.370.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	227.560.000	227.560.000	227.560.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**613.700.000**	**613.700.000**	**613.700.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	258.700.000	258.700.000	258.700.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	355.000.000	355.000.000	355.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**207.550.000**	**207.550.000**	**207.550.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	157.550.000	157.550.000	157.550.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**18.356.538.000**	**18.356.538.000**	**18.356.538.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	425.744.000	425.744.000	425.744.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.040.000.000	3.040.000.000	3.040.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.374.224.000	1.374.224.000	1.374.224.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.393.104.000	4.393.104.000	4.393.104.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	239.729.000	239.729.000	239.729.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.957.357.000	3.957.357.000	3.957.357.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.202.344.000	1.202.344.000	1.202.344.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.664.171.000	3.664.171.000	3.664.171.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	47.865.000	47.865.000	47.865.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.000.000	12.000.000	12.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7.392.128.000**	**7.392.128.000**	**7.392.128.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.200.000.000	5.200.000.000	5.200.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.192.128.000	2.192.128.000	2.192.128.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**54.381.188.000**	**54.381.188.000**	**54.381.188.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.555.000	104.555.000	104.555.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.695.570.000	12.695.570.000	12.695.570.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.184.428.000	10.184.428.000	10.184.428.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.396.635.000	31.396.635.000	31.396.635.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.919.809.000**	**15.919.809.000**	**15.919.809.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	871.890.000	871.890.000	871.890.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.359.980.000	5.359.980.000	5.359.980.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.926.690.000	2.926.690.000	2.926.690.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	288.525.000	288.525.000	288.525.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.928.858.000	2.928.858.000	2.928.858.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.150.510.000	1.150.510.000	1.150.510.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	2.393.356.000	2.393.356.000	2.393.356.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02	**KEUANGAN**	**38.151.060.000**	**38.151.060.000**	**38.151.060.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**38.151.060.000**	**38.151.060.000**	**38.151.060.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**38.151.060.000**	**38.151.060.000**	**38.151.060.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	2.710.000.000	2.710.000.000	2.710.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.897.000.000	1.897.000.000	1.897.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	352.000.000	352.000.000	352.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.506.435.000	7.506.435.000	7.506.435.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	225.209.000	225.209.000	225.209.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	15.303.951.000	15.303.951.000	15.303.951.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	290.000.000	290.000.000	290.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	659.000.000	659.000.000	659.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	9.057.465.000	9.057.465.000	9.057.465.000
5.02.0.00.0.00.03	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**7.367.929.563.000**	**7.367.929.563.000**	**7.367.929.563.000**
5.02.0.00.0.00.03.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**7.367.929.563.000**	**7.367.929.563.000**	**7.367.929.563.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02	**KEUANGAN**	**47.625.407.000**	**47.625.407.000**	**47.625.407.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**47.625.407.000**	**47.625.407.000**	**47.625.407.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**507.095.000**	**507.095.000**	**507.095.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	256.300.000	256.300.000	256.300.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.795.000	250.795.000	250.795.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**31.434.373.000**	**31.434.373.000**	**31.434.373.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.576.252.000	29.576.252.000	29.576.252.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.661.421.000	1.661.421.000	1.661.421.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	56.000.000	56.000.000	56.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	140.700.000	140.700.000	140.700.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.601.207.000**	**2.601.207.000**	**2.601.207.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	565.000.000	565.000.000	565.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	354.500.000	354.500.000	354.500.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	360.000.000	360.000.000	360.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	771.707.000	771.707.000	771.707.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95.000.000**	**95.000.000**	**95.000.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	35.000.000	35.000.000	35.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	60.000.000	60.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.216.354.000**	**8.216.354.000**	**8.216.354.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.200.000	11.200.000	11.200.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.820.000.000	1.820.000.000	1.820.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.185.154.000	6.185.154.000	6.185.154.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.671.378.000**	**4.671.378.000**	**4.671.378.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.600.000	132.600.000	132.600.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	70.000.000	70.000.000	70.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.468.778.000	1.468.778.000	1.468.778.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02	**KEUANGAN**	**7.320.304.156.000**	**7.320.304.156.000**	**7.320.304.156.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**7.314.939.156.000**	**7.314.939.156.000**	**7.314.939.156.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**8.600.000.000**	**8.600.000.000**	**8.600.000.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	160.000.000	160.000.000	160.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	160.000.000	160.000.000	160.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4.597.137.000	4.597.137.000	4.597.137.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.724.546.000	2.724.546.000	2.724.546.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	958.317.000	958.317.000	958.317.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	218.900.000	218.900.000	218.900.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	218.900.000	218.900.000	218.900.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	218.900.000	218.900.000	218.900.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	498.400.000	498.400.000	498.400.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	44.900.000	44.900.000	44.900.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**2.200.000.000**	**2.200.000.000**	**2.200.000.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	400.000.000	400.000.000	400.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	600.000.000	600.000.000	600.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	600.000.000	600.000.000	600.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	600.000.000	600.000.000	600.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**4.150.000.000**	**4.150.000.000**	**4.150.000.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	408.927.000	408.927.000	408.927.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	220.530.000	220.530.000	220.530.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.664.237.000	1.664.237.000	1.664.237.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	746.868.000	746.868.000	746.868.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	319.228.000	319.228.000	319.228.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	790.210.000	790.210.000	790.210.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**7.297.839.156.000**	**7.297.839.156.000**	**7.297.839.156.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3.076.277.924.000	3.076.277.924.000	3.076.277.924.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	4.196.561.232.000	4.196.561.232.000	4.196.561.232.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup**	**950.000.000**	**950.000.000**	**950.000.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	950.000.000	950.000.000	950.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**5.365.000.000**	**5.365.000.000**	**5.365.000.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**5.365.000.000**	**5.365.000.000**	**5.365.000.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	698.000.000	698.000.000	698.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	189.000.000	189.000.000	189.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	352.000.000	352.000.000	352.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	400.000.000	400.000.000	400.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.705.000.000	1.705.000.000	1.705.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	193.000.000	193.000.000	193.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	132.000.000	132.000.000	132.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.268.000.000	1.268.000.000	1.268.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	428.000.000	428.000.000	428.000.000
5.03.0.00.0.00.01	**Badan Kepegawaian Daerah**	**42.970.136.000**	**42.970.136.000**	**42.970.136.000**
5.03.0.00.0.00.01.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**42.970.136.000**	**42.970.136.000**	**42.970.136.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.03.0.00.0.00.01.5.03	**KEPEGAWAIAN**	**32.813.136.000**	**32.813.136.000**	**32.813.136.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**32.813.136.000**	**32.813.136.000**	**32.813.136.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**500.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.720.170.000**	**27.720.170.000**	**27.720.170.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.602.950.000	26.602.950.000	26.602.950.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.022.220.000	1.022.220.000	1.022.220.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**170.000.000**	**170.000.000**	**170.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140.000.000	140.000.000	140.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.255.966.000**	**1.255.966.000**	**1.255.966.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.000.000	140.000.000	140.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.966.000	25.966.000	25.966.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.000.000	560.000.000	560.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	110.000.000	110.000.000	110.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**175.000.000**	**175.000.000**	**175.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	75.000.000	75.000.000	75.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.112.000.000**	**2.112.000.000**	**2.112.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.000.000	12.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000.000	700.000.000	700.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**710.000.000**	**710.000.000**	**710.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000	190.000.000	190.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03	**KEPEGAWAIAN**	**10.157.000.000**	**10.157.000.000**	**10.157.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**10.157.000.000**	**10.157.000.000**	**10.157.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**4.335.000.000**	**4.335.000.000**	**4.335.000.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	110.000.000	110.000.000	110.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.960.000.000	2.960.000.000	2.960.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	280.000.000	280.000.000	280.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	275.000.000	275.000.000	275.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	385.000.000	385.000.000	385.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	325.000.000	325.000.000	325.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**1.055.000.000**	**1.055.000.000**	**1.055.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	140.000.000	140.000.000	140.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	315.000.000	315.000.000	315.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	600.000.000	600.000.000	600.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**3.647.000.000**	**3.647.000.000**	**3.647.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	1.021.000.000	1.021.000.000	1.021.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.256.000.000	2.256.000.000	2.256.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	320.000.000	320.000.000	320.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**1.120.000.000**	**1.120.000.000**	**1.120.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	275.000.000	275.000.000	275.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	292.800.000	292.800.000	292.800.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	92.200.000	92.200.000	92.200.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	180.000.000	180.000.000	180.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	280.000.000	280.000.000	280.000.000
5.04.0.00.0.00.01	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**59.710.905.000**	**59.710.905.000**	**59.710.905.000**
5.04.0.00.0.00.01.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**59.710.905.000**	**59.710.905.000**	**59.710.905.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**43.874.265.000**	**43.874.265.000**	**43.874.265.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**43.874.265.000**	**43.874.265.000**	**43.874.265.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**350.000.000**	**350.000.000**	**350.000.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**29.413.493.000**	**29.413.493.000**	**29.413.493.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.693.553.000	27.693.553.000	27.693.553.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.499.930.000	1.499.930.000	1.499.930.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	82.174.000	82.174.000	82.174.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78.868.000	78.868.000	78.868.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58.968.000	58.968.000	58.968.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**234.000.000**	**234.000.000**	**234.000.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	234.000.000	234.000.000	234.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**79.990.000**	**79.990.000**	**79.990.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	79.990.000	79.990.000	79.990.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**198.400.000**	**198.400.000**	**198.400.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48.400.000	48.400.000	48.400.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.088.982.000**	**2.088.982.000**	**2.088.982.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	178.093.000	178.093.000	178.093.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.916.000	188.916.000	188.916.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	343.025.000	343.025.000	343.025.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305.260.000	305.260.000	305.260.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.200.000	76.200.000	76.200.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	36.000.000	36.000.000	36.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	105.400.000	105.400.000	105.400.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.693.000	280.693.000	280.693.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.505.000	8.505.000	8.505.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	566.890.000	566.890.000	566.890.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**297.000.000**	**297.000.000**	**297.000.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	218.000.000	218.000.000	218.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.000.000	69.000.000	69.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.725.600.000**	**9.725.600.000**	**9.725.600.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.252.000.000	2.252.000.000	2.252.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.469.600.000	7.469.600.000	7.469.600.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.486.800.000**	**1.486.800.000**	**1.486.800.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.300.000	117.300.000	117.300.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	21.000.000	21.000.000	21.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	760.000.000	760.000.000	760.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	588.500.000	588.500.000	588.500.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**15.836.640.000**	**15.836.640.000**	**15.836.640.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**15.836.640.000**	**15.836.640.000**	**15.836.640.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**1.347.950.000**	**1.347.950.000**	**1.347.950.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	21.250.000	21.250.000	21.250.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	102.924.000	102.924.000	102.924.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	23.776.000	23.776.000	23.776.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**14.488.690.000**	**14.488.690.000**	**14.488.690.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	58.750.000	58.750.000	58.750.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	25.437.000	25.437.000	25.437.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	374.563.000	374.563.000	374.563.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	73.115.000	73.115.000	73.115.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	13.636.640.000	13.636.640.000	13.636.640.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	320.185.000	320.185.000	320.185.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.05.0.00.0.00.01	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**	**20.455.100.000**	**20.455.100.000**	**20.455.100.000**
5.05.0.00.0.00.01.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**20.455.100.000**	**20.455.100.000**	**20.455.100.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**15.780.100.000**	**15.780.100.000**	**15.780.100.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.780.100.000**	**15.780.100.000**	**15.780.100.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**340.000.000**	**340.000.000**	**340.000.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	240.000.000	240.000.000	240.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.928.099.000**	**10.928.099.000**	**10.928.099.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.484.539.000	10.484.539.000	10.484.539.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	223.560.000	223.560.000	223.560.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.000.000	110.000.000	110.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	110.000.000	110.000.000	110.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**125.000.000**	**125.000.000**	**125.000.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	110.000.000	110.000.000	110.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**340.000.000**	**340.000.000**	**340.000.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	280.000.000	280.000.000	280.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000	45.000.000	45.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.014.435.000**	**1.014.435.000**	**1.014.435.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	40.000.000	40.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.374.000	112.374.000	112.374.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.000.000	65.000.000	65.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	40.000.000	40.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	600.000.000	600.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	94.561.000	94.561.000	94.561.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.676.766.000**	**1.676.766.000**	**1.676.766.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	570.000.000	570.000.000	570.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305.000.000	305.000.000	305.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	796.766.000	796.766.000	796.766.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.205.800.000**	**1.205.800.000**	**1.205.800.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	375.000.000	375.000.000	375.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.000.000	12.000.000	12.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	58.800.000	58.800.000	58.800.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	90.000.000	90.000.000	90.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.000.000	305.000.000	305.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	235.000.000	235.000.000	235.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	130.000.000	130.000.000	130.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**4.675.000.000**	**4.675.000.000**	**4.675.000.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**4.675.000.000**	**4.675.000.000**	**4.675.000.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian**	**1.917.872.000**	**1.917.872.000**	**1.917.872.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	250.000.000	250.000.000	250.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	552.000.000	552.000.000	552.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	348.000.000	348.000.000	348.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	425.000.000	425.000.000	425.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	317.872.000	317.872.000	317.872.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**218.000.000**	**218.000.000**	**218.000.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	218.000.000	218.000.000	218.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**218.000.000**	**218.000.000**	**218.000.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	218.000.000	218.000.000	218.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**2.321.128.000**	**2.321.128.000**	**2.321.128.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	525.000.000	525.000.000	525.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	914.000.000	914.000.000	914.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	690.846.000	690.846.000	690.846.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	191.282.000	191.282.000	191.282.000
5.07.0.00.0.00.01	**Badan Penghubung**	**24.261.771.000**	**24.261.771.000**	**24.261.771.000**
5.07.0.00.0.00.01.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**24.261.771.000**	**24.261.771.000**	**24.261.771.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**20.268.891.000**	**20.268.891.000**	**20.268.891.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**20.268.891.000**	**20.268.891.000**	**20.268.891.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**128.067.000**	**128.067.000**	**128.067.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.067.000	68.067.000	68.067.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	60.000.000	60.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.898.194.000**	**9.898.194.000**	**9.898.194.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.840.414.000	9.840.414.000	9.840.414.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.780.000	37.780.000	37.780.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**251.580.000**	**251.580.000**	**251.580.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	251.580.000	251.580.000	251.580.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**90.000.000**	**90.000.000**	**90.000.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000	90.000.000	90.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.757.213.000**	**1.757.213.000**	**1.757.213.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.941.000	50.941.000	50.941.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	75.000.000	75.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	204.372.000	204.372.000	204.372.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.000.000	21.000.000	21.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	630.900.000	630.900.000	630.900.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.000.000	750.000.000	750.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000.000	500.000.000	500.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.239.837.000**	**5.239.837.000**	**5.239.837.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.000.000	21.000.000	21.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	950.000.000	950.000.000	950.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	80.000.000	80.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.188.837.000	4.188.837.000	4.188.837.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.404.000.000**	**1.404.000.000**	**1.404.000.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	762.900.000	762.900.000	762.900.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	86.100.000	86.100.000	86.100.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	380.000.000	380.000.000	380.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**3.992.880.000**	**3.992.880.000**	**3.992.880.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**3.992.880.000**	**3.992.880.000**	**3.992.880.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.02.1.01	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**3.992.880.000**	**3.992.880.000**	**3.992.880.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	2.792.880.000	2.792.880.000	2.792.880.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
6.01.0.00.0.00.01	**INSPEKTORAT**	**39.637.631.000**	**39.637.631.000**	**39.637.631.000**
6.01.0.00.0.00.01.6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**39.637.631.000**	**39.637.631.000**	**39.637.631.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**30.233.832.000**	**30.233.832.000**	**30.233.832.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**30.233.832.000**	**30.233.832.000**	**30.233.832.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**105.000.000**	**105.000.000**	**105.000.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000	60.000.000	60.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	45.000.000	45.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**24.327.954.000**	**24.327.954.000**	**24.327.954.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.312.954.000	24.312.954.000	24.312.954.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000	15.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**200.500.000**	**200.500.000**	**200.500.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.500.000	200.500.000	200.500.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**587.889.000**	**587.889.000**	**587.889.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000	20.000.000	20.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	567.889.000	567.889.000	567.889.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**820.434.000**	**820.434.000**	**820.434.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.214.000	10.214.000	10.214.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	300.220.000	300.220.000	300.220.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480.000.000	480.000.000	480.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**70.012.000**	**70.012.000**	**70.012.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	17.400.000	17.400.000	17.400.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.612.000	52.612.000	52.612.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.782.015.000**	**2.782.015.000**	**2.782.015.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	229.940.000	229.940.000	229.940.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	707.074.000	707.074.000	707.074.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.581.000	40.581.000	40.581.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.804.420.000	1.804.420.000	1.804.420.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.340.028.000**	**1.340.028.000**	**1.340.028.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.953.000	37.953.000	37.953.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	553.000.000	553.000.000	553.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	20.000.000	20.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.000.000	160.000.000	160.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	419.075.000	419.075.000	419.075.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	150.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**9.403.799.000**	**9.403.799.000**	**9.403.799.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**6.073.727.000**	**6.073.727.000**	**6.073.727.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**4.794.427.000**	**4.794.427.000**	**4.794.427.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.420.914.000	1.420.914.000	1.420.914.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.126.400.000	1.126.400.000	1.126.400.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	484.250.000	484.250.000	484.250.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	348.000.000	348.000.000	348.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	835.620.000	835.620.000	835.620.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil	579.243.000	579.243.000	579.243.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**1.279.300.000**	**1.279.300.000**	**1.279.300.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	200.000.000	200.000.000	200.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.079.300.000	1.079.300.000	1.079.300.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**3.330.072.000**	**3.330.072.000**	**3.330.072.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**198.940.000**	**198.940.000**	**198.940.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	198.940.000	198.940.000	198.940.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**3.131.132.000**	**3.131.132.000**	**3.131.132.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	772.407.000	772.407.000	772.407.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.358.725.000	2.358.725.000	2.358.725.000
8.01.0.00.0.00.01	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**251.957.580.000**	**251.957.580.000**	**251.957.580.000**
8.01.0.00.0.00.01.8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**251.957.580.000**	**251.957.580.000**	**251.957.580.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**18.068.613.000**	**18.068.613.000**	**18.068.613.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.068.613.000**	**18.068.613.000**	**18.068.613.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.302.117.000**	**2.302.117.000**	**2.302.117.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.350.280.000	1.350.280.000	1.350.280.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	951.837.000	951.837.000	951.837.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.195.687.000**	**10.195.687.000**	**10.195.687.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.822.687.000	9.822.687.000	9.822.687.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	350.000.000	350.000.000	350.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**80.000.000**	**80.000.000**	**80.000.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000	80.000.000	80.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**370.000.000**	**370.000.000**	**370.000.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000	15.000.000	15.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000	15.000.000	15.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000	80.000.000	80.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	260.000.000	260.000.000	260.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.516.629.000**	**1.516.629.000**	**1.516.629.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	25.000.000	25.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	200.000.000	200.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000	100.000.000	100.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.000.000	180.000.000	180.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.000	85.000.000	85.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.000.000	90.000.000	90.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	731.629.000	731.629.000	731.629.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.000.000	60.000.000	60.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**400.000.000**	**400.000.000**	**400.000.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	50.000.000	50.000.000	50.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.000.000	350.000.000	350.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.591.180.000**	**2.591.180.000**	**2.591.180.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000	7.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	450.000.000	450.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.134.180.000	2.134.180.000	2.134.180.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**613.000.000**	**613.000.000**	**613.000.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.000.000	225.000.000	225.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000	110.000.000	110.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.000.000	205.000.000	205.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	70.000.000	70.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**233.888.967.000**	**233.888.967.000**	**233.888.967.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**3.865.113.000**	**3.865.113.000**	**3.865.113.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**3.865.113.000**	**3.865.113.000**	**3.865.113.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	2.715.113.000	2.715.113.000	2.715.113.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	35.210.000	35.210.000	35.210.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	54.000.000	54.000.000	54.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	9.590.000	9.590.000	9.590.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	44.611.000	44.611.000	44.611.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	11.042.000	11.042.000	11.042.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	995.547.000	995.547.000	995.547.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**50.923.529.000**	**50.923.529.000**	**50.923.529.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**50.923.529.000**	**50.923.529.000**	**50.923.529.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	29.660.000	29.660.000	29.660.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.462.040.000	2.462.040.000	2.462.040.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	339.885.000	339.885.000	339.885.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	48.091.944.000	48.091.944.000	48.091.944.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**128.136.927.000**	**128.136.927.000**	**128.136.927.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**128.136.927.000**	**128.136.927.000**	**128.136.927.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.550.543.000	2.550.543.000	2.550.543.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	180.000.000	180.000.000	180.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	125.406.384.000	125.406.384.000	125.406.384.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**2.844.451.000**	**2.844.451.000**	**2.844.451.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**2.844.451.000**	**2.844.451.000**	**2.844.451.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.044.959.000	2.044.959.000	2.044.959.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	593.400.000	593.400.000	593.400.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	206.092.000	206.092.000	206.092.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**48.118.947.000**	**48.118.947.000**	**48.118.947.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**48.118.947.000**	**48.118.947.000**	**48.118.947.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.701.086.000	2.701.086.000	2.701.086.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200.000.000	200.000.000	200.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	43.717.861.000	43.717.861.000	43.717.861.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	Total Anggaran	**23.911.942.794.000**	**23.911.942.794.000**	**23.911.942.794.000**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

PRINTED BY GRMS JATENG

LAMPIRAN IX : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi**			**264.388.836.000**	**65.946.894.000**	**-**	**-**	**330.335.730.000**	**0.09**
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		8.166.603.000	30.000.000.000	-	-	38.166.603.000	11.55
			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	8.166.603.000	30.000.000.000	-	-	38.166.603.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		101.085.669.000	28.073.721.000	-	-	129.159.390.000	39.1
			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	101.085.669.000	28.073.721.000	-	-	129.159.390.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		5.310.641.000	25.000.000	-	-	5.335.641.000	1.62
			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	5.310.641.000	25.000.000	-	-	5.335.641.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		122.979.680.000	7.117.000.000	-	-	130.096.680.000	39.38
			Dinas Perhubungan	122.979.680.000	7.117.000.000	-	-	130.096.680.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		217.500.000	561.600.000	-	-	779.100.000	0.24
			Dinas Perhubungan	217.500.000	561.600.000	-	-	779.100.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		930.201.000	169.573.000	-	-	1.099.774.000	0.33
			Dinas Perhubungan	930.201.000	169.573.000	-	-	1.099.774.000	100
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		1.499.384.000	-	-	-	1.499.384.000	0.45
			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.499.384.000	-	-	-	1.499.384.000	100
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		734.908.000	-	-	-	734.908.000	0.22
			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	734.908.000	-	-	-	734.908.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		1.606.604.000	-	-	-	1.606.604.000	0.49
			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.606.604.000	-	-	-	1.606.604.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		3.494.064.000	-	-	-	3.494.064.000	1.06
			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.494.064.000	-	-	-	3.494.064.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		2.578.582.000	-	-	-	2.578.582.000	0.78
			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.578.582.000	-	-	-	2.578.582.000	100

PRINTED BY GRMS JATENG

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		6.200.000.000	-	-	-	6.200.000.000	1.88
			Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.200.000.000	-	-	-	6.200.000.000	100
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		5.660.000.000	-	-	-	5.660.000.000	1.71
			Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.660.000.000	-	-	-	5.660.000.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		550.000.000	-	-	-	550.000.000	0.17
			Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	550.000.000	-	-	-	550.000.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		3.375.000.000	-	-	-	3.375.000.000	1.02
			Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.375.000.000	-	-	-	3.375.000.000	100
2	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas**			**5.221.453.197.000**	**1.086.379.075.000**	**-**	**-**	**6.307.832.272.000**	**0.94**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.718.250.000.000	272.000.000.000	-	-	1.990.250.000.000	31.55
			Dinas Kesehatan	1.718.250.000.000	272.000.000.000	-	-	1.990.250.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		2.704.475.680.000	779.120.350.000	-	-	3.483.596.030.000	55.23
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.704.475.680.000	779.120.350.000	-	-	3.483.596.030.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		896.000.000	-	-	-	896.000.000	0.01
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	896.000.000	-	-	-	896.000.000	100
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		1.250.000.000	-	-	-	1.250.000.000	0.02
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.250.000.000	-	-	-	1.250.000.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		1.120.000.000	-	-	-	1.120.000.000	0.02
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.120.000.000	-	-	-	1.120.000.000	100
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		380.493.705.000	24.113.475.000	-	-	404.607.180.000	6.41
			Dinas Kesehatan	380.493.705.000	24.113.475.000	-	-	404.607.180.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		1.151.000.000	-	-	-	1.151.000.000	0.02
			Dinas Kesehatan	1.151.000.000	-	-	-	1.151.000.000	100
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		300.394.000	-	-	-	300.394.000	0
			Dinas Kesehatan	300.394.000	-	-	-	300.394.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		3.080.151.000	-	-	-	3.080.151.000	0.05

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Dinas Kesehatan	3.080.151.000	-	-	-	3.080.151.000	100
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		246.740.000	-	-	-	246.740.000	0
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	246.740.000	-	-	-	246.740.000	100
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		2.314.754.000	1.350.000.000	-	-	3.664.754.000	0.06
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.314.754.000	1.350.000.000	-	-	3.664.754.000	100
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		2.319.000.000	-	-	-	2.319.000.000	0.04
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.319.000.000	-	-	-	2.319.000.000	100
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		1.558.963.000	-	-	-	1.558.963.000	0.02
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.558.963.000	-	-	-	1.558.963.000	100
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		3.500.000.000	-	-	-	3.500.000.000	0.06
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.500.000.000	-	-	-	3.500.000.000	100
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	0.02
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		977.550.000	-	-	-	977.550.000	0.02
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	977.550.000	-	-	-	977.550.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		135.000.000	-	-	-	135.000.000	0
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	135.000.000	-	-	-	135.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		150.000.000	-	-	-	150.000.000	0
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	150.000.000	-	-	-	150.000.000	100
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		185.000.000	-	-	-	185.000.000	0
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	185.000.000	-	-	-	185.000.000	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		253.510.000	-	-	-	253.510.000	0
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	253.510.000	-	-	-	253.510.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		195.000.000	-	-	-	195.000.000	0
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	195.000.000	-	-	-	195.000.000	100
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		450.000.000	-	-	-	450.000.000	0.01
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	450.000.000	-	-	-	450.000.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		320.000.000	-	-	-	320.000.000	0.01
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	320.000.000	-	-	-	320.000.000	100

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		11.525.000.000	-	-	-	11.525.000.000	0.18
			Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11.525.000.000	-	-	-	11.525.000.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		379.986.000.000	8.800.000.000	-	-	388.786.000.000	6.16
			Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	379.986.000.000	8.800.000.000	-	-	388.786.000.000	100
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		427.750.000	972.250.000	-	-	1.400.000.000	0.02
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	427.750.000	972.250.000	-	-	1.400.000.000	100
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		217.000.000	23.000.000	-	-	240.000.000	0
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	217.000.000	23.000.000	-	-	240.000.000	100
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		4.675.000.000	-	-	-	4.675.000.000	0.07
			Badan Riset dan Inovasi Daerah	4.675.000.000	-	-	-	4.675.000.000	100
3	**Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**			**56.024.642.000**	**-**	**-**	**-**	**56.024.642.000**	**0.08**
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		1.236.000.000	-	-	-	1.236.000.000	2.21
			BIRO HUKUM	1.236.000.000	-	-	-	1.236.000.000	100
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		3.865.113.000	-	-	-	3.865.113.000	6.9
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.865.113.000	-	-	-	3.865.113.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		50.923.529.000	-	-	-	50.923.529.000	90.89
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.923.529.000	-	-	-	50.923.529.000	100
4	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri**			**20.658.459.000**	**-**	**-**	**-**	**20.658.459.000**	**0.01**
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		560.640.000	-	-	-	560.640.000	2.71
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	560.640.000	-	-	-	560.640.000	100
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		1.612.500.000	-	-	-	1.612.500.000	7.81
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.612.500.000	-	-	-	1.612.500.000	100
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		1.654.602.000	-	-	-	1.654.602.000	8.01
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.654.602.000	-	-	-	1.654.602.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		561.470.000	-	-	-	561.470.000	2.72
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	561.470.000	-	-	-	561.470.000	100

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		550.000.000	-	-	-	550.000.000	2.66
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	550.000.000	-	-	-	550.000.000	100
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		607.333.000	-	-	-	607.333.000	2.94
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	607.333.000	-	-	-	607.333.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		238.250.000	-	-	-	238.250.000	1.15
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	238.250.000	-	-	-	238.250.000	100
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		55.000.000	-	-	-	55.000.000	0.27
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	55.000.000	-	-	-	55.000.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		1.334.967.000	-	-	-	1.334.967.000	6.46
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.334.967.000	-	-	-	1.334.967.000	100
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		2.786.815.000	-	-	-	2.786.815.000	13.49
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.786.815.000	-	-	-	2.786.815.000	100
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		2.450.180.000	-	-	-	2.450.180.000	11.86
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.450.180.000	-	-	-	2.450.180.000	100
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		7.750.335.000	-	-	-	7.750.335.000	37.52
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.750.335.000	-	-	-	7.750.335.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		245.681.000	-	-	-	245.681.000	1.19
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	245.681.000	-	-	-	245.681.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		250.686.000	-	-	-	250.686.000	1.21
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	250.686.000	-	-	-	250.686.000	100
5	**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**			**469.080.537.000**	**26.530.042.000**	**-**	**-**	**495.610.579.000**	**0.05**
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		74.153.743.000	10.997.644.000	-	-	85.151.387.000	17.18
			Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	74.153.743.000	10.997.644.000	-	-	85.151.387.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		8.919.053.000	8.000.000.000	-	-	16.919.053.000	3.41
			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	8.919.053.000	8.000.000.000	-	-	16.919.053.000	100

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		674.105.000	-	-	-	674.105.000	0.14
			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	674.105.000	-	-	-	674.105.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		4.701.793.000	-	-	-	4.701.793.000	0.95
			Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	4.701.793.000	-	-	-	4.701.793.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.520.000.000	-	-	-	1.520.000.000	0.31
			Satuan Polisi Pamong Praja	1.520.000.000	-	-	-	1.520.000.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1.750.000.000	-	-	-	1.750.000.000	0.35
			Dinas Ketahanan Pangan	1.750.000.000	-	-	-	1.750.000.000	100
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		3.930.000.000	-	-	-	3.930.000.000	0.79
			Dinas Ketahanan Pangan	3.930.000.000	-	-	-	3.930.000.000	100
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		2.300.000.000	-	-	-	2.300.000.000	0.46
			Dinas Ketahanan Pangan	2.300.000.000	-	-	-	2.300.000.000	100
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		360.000.000	20.000.000	-	-	380.000.000	0.08
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	360.000.000	20.000.000	-	-	380.000.000	100
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		570.000.000	-	-	-	570.000.000	0.12
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	570.000.000	-	-	-	570.000.000	100
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		525.000.000	-	-	-	525.000.000	0.11
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	525.000.000	-	-	-	525.000.000	100
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		434.000.000	-	-	-	434.000.000	0.09
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	434.000.000	-	-	-	434.000.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		2.353.388.000	-	-	-	2.353.388.000	0.47
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.353.388.000	-	-	-	2.353.388.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		745.000.000	-	-	-	745.000.000	0.15
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	745.000.000	-	-	-	745.000.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		50.000.000	-	-	-	50.000.000	0.01
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000	-	-	-	50.000.000	100
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		564.000.000	-	-	-	564.000.000	0.11

PRINTED BY GRMS JATENG

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	564.000.000	-	-	-	564.000.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		1.305.113.000	-	-	-	1.305.113.000	0.26
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.305.113.000	-	-	-	1.305.113.000	100
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		200.000.000	-	-	-	200.000.000	0.04
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200.000.000	-	-	-	200.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		189.000.000	200.000.000	-	-	389.000.000	0.08
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	189.000.000	200.000.000	-	-	389.000.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		2.485.695.000	514.305.000	-	-	3.000.000.000	0.61
			Dinas Komunikasi dan Informatika	2.485.695.000	514.305.000	-	-	3.000.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		2.105.610.000	500.000	-	-	2.106.110.000	0.42
			Dinas Kelautan dan Perikanan	2.105.610.000	500.000	-	-	2.106.110.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		9.550.835.000	1.151.093.000	-	-	10.701.928.000	2.16
			Dinas Kelautan dan Perikanan	9.550.835.000	1.151.093.000	-	-	10.701.928.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		9.319.548.000	5.261.500.000	-	-	14.581.048.000	2.94
			Dinas Kelautan dan Perikanan	9.319.548.000	5.261.500.000	-	-	14.581.048.000	100
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		1.756.361.000	-	-	-	1.756.361.000	0.35
			Dinas Kelautan dan Perikanan	1.756.361.000	-	-	-	1.756.361.000	100
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		1.902.120.000	40.000.000	-	-	1.942.120.000	0.39
			Dinas Kelautan dan Perikanan	1.902.120.000	40.000.000	-	-	1.942.120.000	100
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		74.294.053.000	345.000.000	-	-	74.639.053.000	7.53
			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	37.558.500.000	-	-	-	37.558.500.000	50.32
			Dinas Pertanian dan Perkebunan	36.735.553.000	345.000.000	-	-	37.080.553.000	49.68
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		11.660.000.000	-	-	-	11.660.000.000	1.18
			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.700.000.000	-	-	-	5.700.000.000	48.89
			Dinas Pertanian dan Perkebunan	5.960.000.000	-	-	-	5.960.000.000	51.11
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		39.913.154.000	-	-	-	39.913.154.000	8.05
			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	39.913.154.000	-	-	-	39.913.154.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		745.000.000	-	-	-	745.000.000	0.15
			Dinas Pertanian dan Perkebunan	745.000.000	-	-	-	745.000.000	100
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		14.487.982.000	-	-	-	14.487.982.000	1.46
			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.277.700.000	-	-	-	12.277.700.000	84.74

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.210.282.000	-	-	-	2.210.282.000	15.26
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		5.854.089.000	-	-	-	5.854.089.000	1.18
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.854.089.000	-	-	-	5.854.089.000	100
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		824.768.000	-	-	-	824.768.000	0.17
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	824.768.000	-	-	-	824.768.000	100
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		1.005.832.000	-	-	-	1.005.832.000	0.2
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.005.832.000	-	-	-	1.005.832.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		328.000.000	-	-	-	328.000.000	0.07
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	328.000.000	-	-	-	328.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		2.178.750.000	-	-	-	2.178.750.000	0.44
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.178.750.000	-	-	-	2.178.750.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		2.503.054.000	-	-	-	2.503.054.000	0.51
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.503.054.000	-	-	-	2.503.054.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		2.381.039.000	-	-	-	2.381.039.000	0.48
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.381.039.000	-	-	-	2.381.039.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		3.141.578.000	-	-	-	3.141.578.000	0.63
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.141.578.000	-	-	-	3.141.578.000	100
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		1.143.000.000	-	-	-	1.143.000.000	0.23
			BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	1.143.000.000	-	-	-	1.143.000.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		128.136.927.000	-	-	-	128.136.927.000	25.85
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	128.136.927.000	-	-	-	128.136.927.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		48.118.947.000	-	-	-	48.118.947.000	9.71
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48.118.947.000	-	-	-	48.118.947.000	100
6	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan**			**189.830.581.000**	**80.000.000**	**-**	**-**	**189.910.581.000**	**0.05**
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		25.215.000.000	75.000.000	-	-	25.290.000.000	13.32
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25.215.000.000	75.000.000	-	-	25.290.000.000	100
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		3.765.000.000	-	-	-	3.765.000.000	1.98
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.765.000.000	-	-	-	3.765.000.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		480.000.000	-	-	-	480.000.000	0.25

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	480.000.000	-	-	-	480.000.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		200.000.000	-	-	-	200.000.000	0.11
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	200.000.000	-	-	-	200.000.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		10.721.000.000	-	-	-	10.721.000.000	5.65
			Dinas Sosial	10.721.000.000	-	-	-	10.721.000.000	100
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		200.000.000	-	-	-	200.000.000	0.11
			Dinas Sosial	200.000.000	-	-	-	200.000.000	100
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		72.863.427.000	5.000.000	-	-	72.868.427.000	38.37
			Dinas Sosial	72.863.427.000	5.000.000	-	-	72.868.427.000	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		70.447.160.000	-	-	-	70.447.160.000	37.09
			Dinas Sosial	70.447.160.000	-	-	-	70.447.160.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		460.000.000	-	-	-	460.000.000	0.24
			Dinas Sosial	460.000.000	-	-	-	460.000.000	100
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		349.824.000	-	-	-	349.824.000	0.18
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	349.824.000	-	-	-	349.824.000	100
		PROGRAM PENATAAN DESA		20.850.000	-	-	-	20.850.000	0.01
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.850.000	-	-	-	20.850.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		602.000.000	-	-	-	602.000.000	0.32
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	602.000.000	-	-	-	602.000.000	100
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		1.540.320.000	-	-	-	1.540.320.000	0.81
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.540.320.000	-	-	-	1.540.320.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		2.705.000.000	-	-	-	2.705.000.000	1.42
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.705.000.000	-	-	-	2.705.000.000	100
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		261.000.000	-	-	-	261.000.000	0.14
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	261.000.000	-	-	-	261.000.000	100
7	**Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan**			**8.693.070.684.000**	**75.721.316.000**	**25.000.000.000**	**7.272.839.156.000**	**16.066.631.156.000**	**0.9**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		8.116.095.447.000	61.510.946.000	-	-	8.177.606.393.000	1.18

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.272.129.143.000	13.924.670.000	-	-	5.286.053.813.000	64.64
			Dinas Kesehatan	710.649.990.000	3.219.500.000	-	-	713.869.490.000	8.73
			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	102.976.433.000	2.271.613.000	-	-	105.248.046.000	1.29
			Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	93.222.690.000	614.170.000	-	-	93.836.860.000	1.15
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	21.234.033.000	90.000.000	-	-	21.324.033.000	0.26
			Satuan Polisi Pamong Praja	17.688.491.000	850.500.000	-	-	18.538.991.000	0.23
			Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.191.940.000	1.182.000.000	-	-	14.373.940.000	0.18
			Dinas Sosial	144.277.111.000	645.040.000	-	-	144.922.151.000	1.77
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	85.336.676.000	693.588.000	-	-	86.030.264.000	1.05
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	16.384.064.000	112.178.000	-	-	16.496.242.000	0.2
			Dinas Ketahanan Pangan	20.433.329.000	821.700.000	-	-	21.255.029.000	0.26
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	140.400.179.000	22.000.000	-	-	140.422.179.000	1.72
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.749.565.000	113.640.000	-	-	19.863.205.000	0.24
			Dinas Perhubungan	68.222.521.000	550.000.000	-	-	68.772.521.000	0.84
			Dinas Komunikasi dan Informatika	29.477.129.000	160.000.000	-	-	29.637.129.000	0.36
			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	25.715.210.000	192.700.000	-	-	25.907.910.000	0.32
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.815.633.000	370.173.000	-	-	20.185.806.000	0.25
			Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	49.976.367.000	-	-	-	49.976.367.000	0.61
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	33.189.359.000	200.000.000	-	-	33.389.359.000	0.41
			Dinas Kelautan dan Perikanan	54.726.113.000	936.768.000	-	-	55.662.881.000	0.68
			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	54.047.687.000	1.405.000.000	-	-	55.452.687.000	0.68
			Dinas Pertanian dan Perkebunan	104.021.896.000	5.658.000.000	-	-	109.679.896.000	1.34
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	53.450.653.000	183.030.000	-	-	53.633.683.000	0.66
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49.128.618.000	396.000.000	-	-	49.524.618.000	0.61
			BIRO PEREKONOMIAN	307.952.000	-	-	-	307.952.000	0
			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	343.736.000	-	-	-	343.736.000	0
			BIRO ORGANISASI	820.541.000	-	-	-	820.541.000	0.01
			BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	700.000.000	-	-	-	700.000.000	0.01
			BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	635.524.000	-	-	-	635.524.000	0.01
			BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	245.740.000	-	-	-	245.740.000	0
			BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	909.526.000	-	-	-	909.526.000	0.01
			BIRO HUKUM	154.092.000	-	-	-	154.092.000	0
			BIRO UMUM	211.355.535.000	10.700.000.000	-	-	222.055.535.000	2.72
			Sekretariat DPRD	215.131.812.000	3.739.936.000	-	-	218.871.748.000	2.68
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	33.772.011.000	1.669.000.000	-	-	35.441.011.000	0.43
			Badan Pengelola Pendapatan Daerah	247.007.516.000	7.392.128.000	-	-	254.399.644.000	3.11
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	46.819.807.000	805.600.000	-	-	47.625.407.000	0.58
			Badan Kepegawaian Daerah	32.638.136.000	175.000.000	-	-	32.813.136.000	0.4

PRINTED BY GRMS JATENG

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	43.577.265.000	297.000.000	-	-	43.874.265.000	0.54
			Badan Riset dan Inovasi Daerah	15.630.100.000	150.000.000	-	-	15.780.100.000	0.19
			Badan Penghubung	18.768.891.000	1.500.000.000	-	-	20.268.891.000	0.25
			INSPEKTORAT	30.163.820.000	70.012.000	-	-	30.233.832.000	0.37
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.668.613.000	400.000.000	-	-	18.068.613.000	0.22
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		570.000.000	-	-	-	570.000.000	0
			Satuan Polisi Pamong Praja	570.000.000	-	-	-	570.000.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		12.873.888.000	-	-	-	12.873.888.000	0.08
			Dinas Ketahanan Pangan	12.873.888.000	-	-	-	12.873.888.000	100
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		220.000.000	-	-	-	220.000.000	0
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	220.000.000	-	-	-	220.000.000	100
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		210.000.000	-	-	-	210.000.000	0
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	210.000.000	-	-	-	210.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		194.000.000	-	-	-	194.000.000	0
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	194.000.000	-	-	-	194.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		24.459.750.000	-	-	-	24.459.750.000	0.15
			Dinas Komunikasi dan Informatika	24.459.750.000	-	-	-	24.459.750.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		6.607.445.000	13.500.000.000	-	-	20.107.445.000	0.13
			Dinas Komunikasi dan Informatika	6.607.445.000	13.500.000.000	-	-	20.107.445.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		1.210.829.000	-	-	-	1.210.829.000	0.01
			Dinas Komunikasi dan Informatika	1.210.829.000	-	-	-	1.210.829.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		701.598.000	-	-	-	701.598.000	0
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	701.598.000	-	-	-	701.598.000	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		59.605.000	10.395.000	-	-	70.000.000	0
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	59.605.000	10.395.000	-	-	70.000.000	100
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		26.300.000	-	-	-	26.300.000	0
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.300.000	-	-	-	26.300.000	100
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		32.840.000.000	-	-	-	32.840.000.000	0.2
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.840.000.000	-	-	-	32.840.000.000	100
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		2.229.157.000	-	-	-	2.229.157.000	0.01

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.229.157.000	-	-	-	2.229.157.000	100
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		1.780.528.000	-	-	-	1.780.528.000	0.01
			BIRO ORGANISASI	1.780.528.000	-	-	-	1.780.528.000	100
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		2.335.000.000	-	-	-	2.335.000.000	0.01
			BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	2.335.000.000	-	-	-	2.335.000.000	100
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		1.371.724.000	-	-	-	1.371.724.000	0.01
			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.371.724.000	-	-	-	1.371.724.000	100
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		1.677.000.000	5.000.000	-	-	1.682.000.000	0.01
			BIRO HUKUM	1.677.000.000	5.000.000	-	-	1.682.000.000	100
		PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN		4.775.260.000	-	-	-	4.775.260.000	0.01
			BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	1.612.812.000	-	-	-	1.612.812.000	33.77
			BIRO PEREKONOMIAN	3.162.448.000	-	-	-	3.162.448.000	66.23
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		2.348.489.000	-	-	-	2.348.489.000	0.01
			BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.348.489.000	-	-	-	2.348.489.000	100
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		2.040.000.000	-	-	-	2.040.000.000	0.01
			BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.040.000.000	-	-	-	2.040.000.000	100
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		366.153.260.000	-	-	-	366.153.260.000	2.28
			Sekretariat DPRD	366.153.260.000	-	-	-	366.153.260.000	100
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		5.900.000.000	-	-	-	5.900.000.000	0.04
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.900.000.000	-	-	-	5.900.000.000	100
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		7.080.000.000	-	-	-	7.080.000.000	0.04
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.080.000.000	-	-	-	7.080.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		17.100.000.000	-	25.000.000.000	7.272.839.156.000	7.314.939.156.000	45.53
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	17.100.000.000	-	25.000.000.000	7.272.839.156.000	7.314.939.156.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		4.760.025.000	604.975.000	-	-	5.365.000.000	0.03
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.760.025.000	604.975.000	-	-	5.365.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		38.061.060.000	90.000.000	-	-	38.151.060.000	0.24
			Badan Pengelola Pendapatan Daerah	38.061.060.000	90.000.000	-	-	38.151.060.000	100
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		10.157.000.000	-	-	-	10.157.000.000	0.06
			Badan Kepegawaian Daerah	10.157.000.000	-	-	-	10.157.000.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		15.836.640.000	-	-	-	15.836.640.000	0.1
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.836.640.000	-	-	-	15.836.640.000	100
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		3.992.880.000	-	-	-	3.992.880.000	0.02

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Badan Penghubung	3.992.880.000	-	-	-	3.992.880.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		6.073.727.000	-	-	-	6.073.727.000	0.04
			INSPEKTORAT	6.073.727.000	-	-	-	6.073.727.000	100
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		3.330.072.000	-	-	-	3.330.072.000	0.02
			INSPEKTORAT	3.330.072.000	-	-	-	3.330.072.000	100
8	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur**			**444.939.375.000**	**-**	**-**	**-**	**444.939.375.000**	**0.19**
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		3.850.000.000	-	-	-	3.850.000.000	0.87
			Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.850.000.000	-	-	-	3.850.000.000	100
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		98.000.000	-	-	-	98.000.000	0.02
			Satuan Polisi Pamong Praja	98.000.000	-	-	-	98.000.000	100
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		3.584.500.000	-	-	-	3.584.500.000	0.81
			Dinas Sosial	3.584.500.000	-	-	-	3.584.500.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		7.580.000.000	-	-	-	7.580.000.000	1.7
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.580.000.000	-	-	-	7.580.000.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		22.266.000.000	-	-	-	22.266.000.000	5
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.266.000.000	-	-	-	22.266.000.000	100
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		955.000.000	-	-	-	955.000.000	0.21
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	955.000.000	-	-	-	955.000.000	100
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		1.325.000.000	-	-	-	1.325.000.000	0.3
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.325.000.000	-	-	-	1.325.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		3.750.000.000	-	-	-	3.750.000.000	0.84
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.750.000.000	-	-	-	3.750.000.000	100
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		398.686.424.000	-	-	-	398.686.424.000	89.6
			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	398.686.424.000	-	-	-	398.686.424.000	100
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		2.844.451.000	-	-	-	2.844.451.000	0.64
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.844.451.000	-	-	-	2.844.451.000	100
TOTAL ANGGARAN				**15.359.446.311.000**	**1.254.657.327.000**	**25.000.000.000**	**7.272.839.156.000**	**23.911.942.794.000**	

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

PRINTED BY GRMS JATENG

LAMPIRAN X : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN	ESELON					NON ESELON				TOTAL
						FUNGSIONAL				
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA	STAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	23	-	8	-	31
Golongan IV/d	1	20	-	-	-	23	5	9	-	58
Golongan IV/c	-	23	1	-	-	169	661	60	1	915
Golongan IV/b	-	8	154	2	-	330	3.150	144	6	3.794
Golongan IV/a	-	1	159	201	-	302	2.599	304	204	3.770
Jumlah Golongan IV	1	52	314	203	-	847	6.415	525	211	8.568
Golongan III/d	-	-	35	367	-	959	7.221	644	1.030	10.256
Golongan III/c	-	-	-	49	-	481	2.285	185	552	3.552
Golongan III/b	-	-	-	1	-	779	2.434	260	1.206	4.680
Golongan III/a	-	-	-	-	-	183	15.656	702	1.276	17.817
Jumlah Golongan III	-	-	35	417	-	2.402	27.596	1.791	4.064	36.305
Golongan II/d	-	-	-	-	-	569	4	62	1.026	1.661
Golongan II/c	-	-	-	-	-	506	2	182	837	1.527
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-	2	182	184
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-	1	249	250
Jumlah Golongan II	-	-	-	-	-	1.075	6	247	2.294	3.622
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
TOTAL	**1**	**52**	**349**	**620**	**-**	**4.324**	**34.017**	**2.563**	**6.669**	**48.595**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

LAMPIRAN XI : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2023	Perkiraan Penambahan Tahun 2024	Perkiraan Pengurangan Tahun 2024	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	**Piutang Pajak Daerah**					
	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	2019 s/d 2023	2.625.551.335.300,00	436.496.606.000,00	297.887.309.500,00	2.764.160.631.800,00
	Piutang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah	2023	334.676.708,00		334.676.708,00	-
	Jumlah Piutang Pajak Daerah		**2.625.886.012.008,00**			**2.764.160.631.800,00**
2	**Piutang Retribusi Daerah**					
	Retribusi Jasa Umum	2023	51.987.608,00		51.987.608,00	-
	Retribusi Jasa Usaha	2014 s/d 2023	34.048.350,00		2.006.750,00	32.041.600,00
	Jumlah Piutang Retribusi Daerah		**86.035.958,00**			**32.041.600,00**
3	**Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah**					
	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2017 s/d 2023	370.051.669,00			370.051.669,00
	Piutang Pendapatan BLUD	2000 s/d 2023	30.811.420.179,70			30.811.420.179,70
	Jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah		**31.181.471.848,70**			**31.181.471.848,70**
4	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**					
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2023	4.254,00			4.254,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		**4.254,00**			**4.254,00**
5	**Piutang Transfer Antar Daerah**					
	Piutang Bantuan Keuangan	2023	-			-
	Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah		**-**			**-**

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2023	Perkiraan Penambahan Tahun 2024	Perkiraan Pengurangan Tahun 2024	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
6	**Piutang Lainnya**					
	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	1998 s/d 2006	10.936.593.864,00			10.936.593.864,00
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	2008 s/d 2012	4.470.029.992,00		50.777.700,00	4.419.252.292,00
	Jumlah Piutang Lainnya		**15.406.623.856,00**			**15.355.846.156,00**
	JUMLAH PIUTANG SELURUHNYA		**2.672.560.147.924,70**			**2.810.729.995.658,70**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

LAMPIRAN XII : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah modal Yang telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah modal yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) yang akan Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan sampai dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
I	**INVESTASI PERMANEN**											
1	1982	PT. Jateng Agro Berdikari	Perda Nomor 10 Tahun 2019	Recipis Saham	200.000.000.000	165.309.044.132		165.309.044.132	34.690.955.868	4.260.000.000		165.309.044.132
2	1989	PT. Askrida	Perda Nomor 10 Tahun 2019	Recipis Saham	400.000.000.000	26.610.000.000		26.610.000.000	373.390.000.000	4.000.000.000		26.610.000.000
3	1992	PT. Tirta Utama Jawa Tengah (Persoda)	Perda Nomor 10 Tahun 2019	Recipis Saham	400.000.000.000	109.197.500.000		109.197.500.000	290.802.500.000	12.180.000.000		109.197.500.000
4	1992	PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	Perda Nomor 10 Tahun 2019	Recipis Saham	100.000.000.000	10.446.000.000		10.446.000.000	89.554.000.000	1.256.000.000		10.446.000.000
5	1993	PT. PRPP	Perda Nomor 10 Tahun 2019	Recipis Saham	200.000.000.000	64.252.200.000		64.252.200.000	135.747.800.000			64.252.200.000
6	1999	PT. Bank Jateng	Perda Nomor 10 Tahun 2019	Recipis Saham	5.100.000.000.000	2.205.289.000.000		2.205.289.000.000	2.894.711.000.000	560.000.000.000		2.205.289.000.000
7	2002	PT. BPR BKK Se-Jateng	Perda Nomor 10 Tahun 2019	Recipis Saham	1.460.640.000.000	571.780.000.000	70.000.000.000	641.780.000.000	818.860.000.000	78.500.000.000		641.780.000.000
8	2019	PT. BPR BKK JATENG	Perda Nomor 10 Tahun 2019	Recipis Saham	471.668.400.000	186.290.000.000		186.290.000.000	285.378.400.000	12.000.000.000		186.290.000.000
9	2006	PT. SPJT	Perda Nomor 10 Tahun 2019	Recipis Saham	1.500.000.000.000	375.392.000.000		375.392.000.000	1.124.608.000.000	2.300.000.000		375.392.000.000
10	2014	PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah	Perda Nomor 10 Tahun 2019	Recipis Saham	600.000.000.000	140.000.000.000		140.000.000.000	460.000.000.000	7.853.144.000		140.000.000.000
11	2020	PT. Jateng Petro Energi (SPHC Menjadi Anak Perusahaan)	Perda Nomor 10 Tahun 2019	Recipis Saham	140.000.000.000	54.887.500.000		54.887.500.000	85.112.500.000	25.000.000.000		54.887.500.000

GUBERNUR JAWA TENGAH

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

LAMPIRAN XIII a : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Prakiraan Pengurangan tahun n-1	Prakiraan Saldo akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6=(3+4)-5
1	Tanah	12.799.105.582.850	11.312.838.900	309.165.272.242	12.501.253.149.508
2	Peralatan dan Mesin	9.367.919.269.063	857.012.072.400	587.893.144.369	9.637.038.197.094
3	Bangunan dan Gedung	9.376.720.815.881	464.184.956.400	590.841.447.595	9.250.064.324.686
4	Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan	11.942.288.364.977	416.112.313.100	24.530.118.325	12.333.870.559.752
5	Aset Tetap Lainnya	1.088.242.180.880	123.264.970.400	85.127.405.062	1.126.379.746.218
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	244.643.283.088	-	725.417.392,70	243.917.865.695
		44.818.919.496.739	1.871.887.151.200	1.598.282.804.986	45.092.523.842.953

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

LAMPIRAN XIII b : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada Akhir Tahun n - 2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Prakiraan Pengurangan tahun n-1	Prakiraan Saldo akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6=(3+4)-5
1	Kemitraan dengan Pihak Ke III	134.797.504.960	37.804.328.100	-	172.601.833.060
2	Aset Tak Berwujud	41.318.033.570	1.659.963.800	-	42.977.997.370
3	Aset Lain-lain	3.587.490.228.567	792.669.996.604	97.682.774.882	4.282.477.450.289
		3.763.605.767.097	832.134.288.504	97.682.774.882	4.498.057.280.719

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

LAMPIRAN XIV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (*Multi Years*)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi sub Kegiatan	Jumlah Anggaran TA. 2025		Jumlah Realisasi sampai dengan Akhir TA. 2025	Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan TA.2026		Keterangan
				APBD TA.2025	Perubahan APBD TA.2025		APBD TA.2026	Perubahan APBD TA.2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Banyumas	100.000.000.000	-	-	80.000.000.000	-	Pembangunan gedung pelayanan 7 lantai untuk pemenuhan standar Kelas Rawat Inap Standar

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

LAMPIRAN XV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Transfer dari Kas daerah (Rp.)	Transfer ke Kas Daerah (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)	Sisa Dana Cadangan yang Belum dicadangkan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6	9
NIHIL								

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

LAMPIRAN XVI : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGAGRAN 2025

NO	Sumber Pinjaman/ obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal obligasi	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Presentase bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun Ini		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp.)	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6	9	10	11	12
N I H I L											

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA